

INDONESIA - ENGLISH

TOP 100

INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2017

PUBLIC SERVICE INNOVATION 2017



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
MINISTRY OF ADMINISTRATIVE AND BUREAUCRACY REFORM REPUBLIC OF INDONESIA

TOP 100

INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2017

PUBLIC SERVICE INNOVATION 2017



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
MINISTRY OF ADMINISTRATIVE AND BUREAUCRACY REFORM REPUBLIC OF INDONESIA

TOP 40

INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2017

PUBLIC SERVICE INNOVATION 2017



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
MINISTRY OF ADMINISTRATIVE AND BUREAUCRACY REFORM REPUBLIC OF INDONESIA



Deputi Bidang Pelayanan Publik

Dengan mengucapkan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kami dapat menerbitkan Buku Top 40 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2017. Penerbitan buku ini merupakan bagian dari penghargaan terhadap Inovasi Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN yang terpilih menjadi Top 40 Inovasi Pelayanan Publik dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017.

Penerbitan buku ini merupakan bagian dari perjalanan yang cukup panjang dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017. Mereka yang terpilih menjadi Top 40 Inovasi Pelayanan Publik merupakan inovasi yang terpilih dari TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik.

Pada kesempatan yang baik ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas arahan dan kebijakan beliau, Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik berlangsung dan dipertahankan dari tahun 2014, 2015, 2016, dan 2017. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Tim Evaluasi dan Tim Panel Independen yang telah bekerja keras memilih Top 40 Inovasi Pelayanan Publik. Terima kasih ingin kami sampaikan kepada teman-teman jajarannya Deputi Bidang Pelayanan Publik yang tidak kenal lelah menyiapkan dan menerbitkan buku ini.

Semoga buku ini bermanfaat sebagaimana arahan Bapak Menteri sebagai bahan *transfer of knowledge* dan menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak yang memerlukan pengetahuan baru mengenai perkembangan inovasi pelayanan publik di Indonesia.

Deputi Bidang Pelayanan Publik,

Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA

Deputy of Public Services

By saying Thanks to Almighty God, we can publish the Top 40 Public Service Innovation Book. The publication of this book is part of the appreciation of the Public Service Innovation of Ministries / Agencies, Local Governments and SOEs selected to be the Top 99 Public Service Innovations in the Public Service Innovation Competition of 2017.

The publication of this book is part of a long journey in the event of the Public Service Innovation Competition 2017. Those elected to the Top 40 Public Service Innovations are the selected innovations of 99 Public Service Innovations.

On this good occasion, we would like to thank the Minister of Administrative Reform and Bureaucracy Reform for his direction and policy, the Public Service Innovation Competition in progress and maintained from 2014, 2015, 2016 and 2017. We also thank The Evaluation Team and the Independent Panel Team had worked hard to select the Top 40 Public Service Innovations. We would like to express our gratitude to our friends of the Deputy Ministry of Public Service who tirelessly prepare and publish this book.

Hopefully this book is useful as the direction of Mr. Minister as the material of transfer of knowledge and become reference material for the parties who need new knowledge about the development of innovation of public service in Indonesia.

Deputy of Public Service

Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA



Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Inovasi pelayanan publik berperan sebagai sarana percepatan peningkatan kualitas publik. Oleh karena itu kebaruan inovasi, manfaat, dan keberlanjutan yang teruji dari suatu instansi atau unit kerja diharapkan dapat menjadi praktik terbaik untuk direplikasi oleh instansi atau unit kerja yang lain. Dengan cara demikian kita mengharapkan pelayanan publik di Indonesia menjadi semakin maju.

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik merupakan bagian dari strategi mendapatkan inovasi Pelayanan Publik yang terbaik, karena inovasi yang terpilih merupakan hasil penilaian yang objektif terhadap keandalan inovasi tersebut. Disamping itu dengan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik akan mendorong persaingan yang produktif antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN dalam melahirkan inovasi pelayanan publik.

Saya menyambut baik penerbitan Buku Top 40 Inovasi Pelayanan Publik Indonesia Tahun 2017. Harapan saya buku ini menjadi sumber inspirasi bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN yang akan melakukan *transfer of knowledge*. Di samping itu, buku ini diharapkan sekaligus menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak yang memerlukan pengetahuan baru mengenai perkembangan inovasi pelayanan publik di Indonesia.

Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Tim Evaluasi dan Tim Panel Independen yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga dapat memilih Top 40 Inovasi Pelayanan Publik. Terima kasih saya sampaikan kepada Deputy Bidang Pelayanan Publik dan seluruh Jajaran yang telah bekerja keras menyiapkan dan menerbitkan buku ini. Semoga bermanfaat.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,

Dr. Asman Abnur, SE M.Si.

The Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform

Public service innovation serves as a means of accelerating public quality improvement. Therefore, the innovative innovation, benefits, and sustainability tested from an agency or work unit is expected to be the best practice to be replicated by other agencies or work units. In this way we expect public services in Indonesia to become more advanced.

The Public Service Innovation Competition is part of the best Public Service innovation strategy, because the chosen innovation is the result of an objective assessment of the reliability of the innovation. In addition, the Public Service Innovation Competition will encourage productive competition among Ministries / Institutions, Local Governments and SOEs in generating public service innovation.

I welcome the publication of the Top 40 Public Service Innovations Indonesia Year 2017. My hope this book is a source of inspiration for the Ministry / Institution, Local Government, and BUMN (State Owned Enterprises) will transfer the knowledge. In addition, this book is expected to be a reference for those who need new knowledge about the development of innovation of public services in Indonesia.

On this occasion I would like to thank the Evaluation Team and the Independent Panel Team who have done their job well so that they can choose Top 40 Public Service Innovation. I would like to thank the Deputy of the Ministry of Public Services and the whole range who have worked hard to prepare and publish this book. Hopefully, It may be useful.

Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform,

Dr. Asman Abnur, SE M.Si.

Kata Pengantar Deputi Bidang Pelayanan Publik	iv
Sambutan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	vi
Daftar Isi	viii
A. KEMENTERIAN	
1. 119 – Kolaborasi Nasional Layanan Emergensi Medik di Indonesia	2
Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan	
2. Aplikasi Lapori Diri WNI Terintegrasi Secara <i>Online</i> pada Perwakilan RI se-Jerman	8
Kedutaan Besar RI Berlin, Kementerian Luar Negeri	
3. KIARKOD: <i>Tracking Order</i> Sistem Informasi Pelayanan Jasa B4T	14
Balai Besar Bahan dan Barang Teknik, Kementerian Perindustrian	
4. MAGMA (<i>Multiplatform Application for Geohazard Mitigation and Assessment</i>) Indonesia	20
Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	
5. PRIQQ KLIK	26
Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok, Kementerian Pertanian	
6. SIPUHH: Mewujudkan Tata Kelola Kehutanan	32
Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
7. Teknologi <i>E-Filing Renewal Trademark</i> di Indonesia	38
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	
B. LEMBAGA	
8. BPKB <i>Delivery</i>	44
Kepolisian Resor Brebes, Kepolisian Negara Republik Indonesia	
C. PROVINSI	
9. BANG ELIS HADIR, Kampung Kami Jadi Terang (Pembangkit Energi Listrik Tenaga Matahari di Daerah Pedalaman Kalbar)	50
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	

<i>Preface of Deputy for Public Service</i>	v
<i>Message from the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform</i>	vii
<i>Table List of Content</i>	ix
A. MINISTRY	
1. 119 - National Collaboration of Medical Emergency Services in Indonesia	3
<i>Directorate of Referral Health Services, Directorate General of Health Efforts, Ministry of Health</i>	
2. Online self-report application for Indonesian Citizens At the RI Representative of Germany	9
<i>Embassy of the Republic of Indonesia in Berlin, Ministry of Foreign</i>	
3. KIARKOD: Tracking Order of Service Information System of B4T	15
<i>Central for Material and Technical Products, Ministry of Industry</i>	
4. MAGMA (Multiplatform Application for Geohazard Mitigation and Assessment) Indonesia	21
<i>Geological Agency, Ministry of Energy and Mineral Resources</i>	
5. PRIQQ CLICK	27
<i>Tanjung Priok Agriculture Quarantine Center, Ministry of Agriculture</i>	
6. SIPUHH: Realizing Forestry Governance	33
<i>Directorate of Contribution and Distribution of Forest Products, Directorate General of Sustainable Production Forest Management, Ministry of Environment and Forestry</i>	
7. Technology of E-Filing Renewal Trademark in Indonesia	39
<i>Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights</i>	
B. INSTITUTIONS	
8. BPKB Delivery	45
<i>Brebes Resort Police, The Indonesian National Police</i>	
C. PROVINCE	
9. BANG ELIS HADIR, Our Village Becomes Bright (Solar Power Station in the countryside of West Kalimantan)	51
<i>The Energy and Mineral Resources Agency, West Kalimantan Province</i>	

10. Kader Peduli Luka dan Perawatan Luka Diabet Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo Dinas Kesehatan, Pemerintah DKI Jakarta	56
11. Layanan WARAS (Wisata Arsip Untuk Anak Sekolah) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur	62
12. Mencerdaskan Si Miskin Menjadi Generasi Emas SMA Negeri Bali Mandara, Pemerintah Provinsi Bali	68
13. MR SAHDU (Manajemen Risiko Sanggahan dan Pengaduan) Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur	74
14. PELUK MY DARLING (Perawatan Luka Kusta Menyeluruh Dengan <i>Garden Healing</i>) RSUD Kelet Pemerintah Kabupaten Jepara, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	80
15. PENA BERKARIB (petabencana.id) Bersama Kurangi Risiko Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	86
16. Penyederhanaan Prosedur Pendaftaran Melalui "SI BINA CANTIK" (Sistem <i>Bridging</i> SIM RSMS, BPJS, dan INA-CBG's Menuju Akuntabilitas, Transparansi, dan Efisiensi Pelayanan Kesehatan JKN Secara Paripurna) RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	92
17. PLANET KAKAO: Pengelolaan dan Edukasi Terpadu Kakao Melalui Kebun Rakyat Demi Indonesia Daulat Coklat Dinas Perkebunan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur	98
18. SIMAS-LH <i>Online</i> (Sistem Informasi Lingkungan Hidup Berbasis <i>Online</i>) Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	104
D. KABUPATEN	
19. 2H2 <i>Center</i> Kerabat Ibu Dan Bayi Dinas Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Flores Timur	110
20. Alarm Persalinan UPTD Puskesmas Kecamatan Kerinci Kanan Dinas Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Siak	116

10. <i>Cadre of Care About Injuries and Treatment of Diabet Pasar Rebo Districts Public Health Center Agency of Health, Special Region of Jakarta Province</i>	57
11. <i>WARAS Service (Archive Tour For School Children) Library and Archive Agency, East Java Province</i>	63
12. <i>Introducing the Poor into the Golden Generation Public High School Bali Mandara, Bali Province</i>	69
13. <i>MR SAHDU (Risk Management Oppose and Complaint) Procurement Services of Government Goods/Services Office of Investment and Integrated Services One Door, East Java Province</i>	75
14. <i>PELUK MY DARLING (Whole Leprosy Treatment With Garden Healing) Regionsl General Hospital Kelet, Central Java Province</i>	81
15. <i>PENA BERKARIB (petabencana.id) Together Reduce Disaster Risk Regional Disaster Management Agency, Special Region of Jakarta Province</i>	87
16. <i>"SI BINA CANTIK" (Bridging SIM RSMS, BPJS, and INA-CBG's Systems Into the JKN Accountability, Transparency and Efficiency of JKN Health Services In Plenary) Regionsl General Hospital Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, Central Java Province</i>	93
17. <i>PLANET KAKAO: Integrated Management and Education of Cocoa Through People's Garden For Indonesia Chocolate Daulat Plantation Agency, East Java Province</i>	99
18. <i>SIMAS-LH Online (Online Based Environmental Information System) Environmental Management Agency, South Sulawesi Province</i>	105
D. DISTRICT	
19. <i>2H2 Center of Mother's and Infant Relatives Health Agency, East Flores Regency</i>	111
20. <i>Birth Alarms Community Health Center of Kerinci Kanan District, Health Agency, Siak Regency</i>	117

21. Implementasi E-VB di Banyuwangi	122
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	
22. LASITER AMB (Layanan Transportasi Terpadu Angkutan Masyarakat Bintuni)	128
UPT Angkutan Masyarakat Bintuni, Dinas Perhubungan, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni	
23. Model Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Melalui Sistem Elektronik Voting Yang Menggunakan KTP Elektronik, KK, dan Akta Berbasis NIK	134
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Batanghari	
24. MP – TGR (Majelis Pertimbangan - Tuntutan Ganti Rugi)	140
Badan Keuangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Gorontalo	
25. PANTASI MART (Pusat Pengadaan Fasilitas Sanitasi Masyarakat)	146
Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sumedang	
26. PATUH SELAM (Pelayanan Administrasi Terpadu Kelurahan Selat Dalam)	152
Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Pemerintah Kabupaten Kapuas	
27. Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) BAHARI	158
Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Sinjai	
28. SELEMPANG MERA (Selamatkan Pasien Pasung Melalui Tim Samurai ODGJ)	164
UPTD Puskesmas Omben Dinas Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Sampang	
29. Si Jempol (Sistem Informasi Jaringan Elektronik Medik Pasien <i>Online</i>)	170
RSUD Balaraja, Pemerintah Kabupaten Tangerang	
30. SIGAP SRATUS 369 PLUS (Aksi Tanggap Pada Sapi Madura Bunting dan Partus)	176
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Pemerintah Kabupaten Pamekasan	
31. TELAT BERKEMAS (Tetap Lestari Berdayakan Kelompok Masyarakat)	182
Dinas Perikanan dan Peternakan, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	

21. Implementation of E-VB in Banyuwangi	123
<i>Community and Village Empowerment Agency, Banyuwangi Regency</i>	
22. LASITER AMB (Integrated Transportation Service of Bintuni Public Transportation)	129
<i>Integrated Service Unit (UPT) of Transportation, Teluk Bintuni Regency</i>	
23. Model of Village Head Selection (PILKADES) Through Voting Electronic System	135
<i>Population and Civil Registration Agency, Batang Hari Regency</i>	
24. MP - TGR (Assembly Considerations of Indemnification)	141
<i>Finance Agency, Gorontalo Regency</i>	
25. PANTASI MART (Community Sanitation Facilities Procurement Center)	147
<i>Water and Sanitation Working Group, Regional Planning and Development Agency, Sumedang Regency</i>	
26. PATUH SELAM (Integrated Administration Service Selat Dalam Village)	153
<i>Selat Dalam sub-districts, Kapuas Regency</i>	
27. BAHARI Birth Waiting Home (RTK)	159
<i>Health Agency, Sinjai Regency</i>	
28. SELEMPANG MERA (Save Patient Through ODGJ Samurai Team)	165
<i>Community of Center Omben, Health Agency, Sampang Regency</i>	
29. The Thumb (Electronic Patient Medical Network Information System)	171
<i>Regional General Hospital Balaraja, Tangerang Regency</i>	
30. SIGAP SRATUS 369 PLUS (Action Response to Madura Pregnant and Partus Cattle)	177
<i>Food and Livestock Agency, Pamekasan Regency</i>	
31. TELAT BERKEMAS (Staying Sustainable Empowers Community Groups)	183
<i>Fisheries and Animal Husbandry Agency, Hulu Sungai Selatan Regency</i>	

E. KOTA	
32. 112	188
Dinas Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Kota Surabaya	
33. BCL (Bisnis Cakep Lalu Lintas Lancar) Pengaturan dan Pengendalian Lalu lintas Melalui <i>Smartphone</i>	194
Dinas Perhubungan, Pemerintah Kota Pontianak	
34. CETEK (Cukup E-KTP Sertakan Kartu Keluarga)	200
RSUD Al Mulk, Pemerintah Kota Sukabumi	
35. iJUS MELON (Ijin Usaha Mikro melalui <i>Online</i>)	206
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Pemerintah Kota Semarang	
36. Longset (Lorong Sehat)	212
Dinas Kesehatan, Pemerintah Kota Makassar	
37. Sampah Menjadi Gas, Berkah Bagi Warga	218
Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota, Pemerintah Kota Banda Aceh	
38. "SODA MOLEK" K 5-1	222
Kelurahan Naikoten II, Pemerintah Kota Kupang	
39. Taman Anak Cerdas: Papan Sarana Wasis Bocahe, Waras Ragane Lan Mapan Budi Pekertine	228
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Kota Surakarta	
F. BADAN USAHA MILIK NEGARA	
40. SAHABAT LATANRO - Sejahtera Berkat Layanan Taspen Persero	234
Divisi Layanan dan Manfaat, PT Taspen (Persero)	

E. CITY	
32. 112	189
<i>Communications and Informatics Agency, Surabaya City</i>	
33. BCL (Business Good Current Traffic) Arrangement and Control of Traffic Through Smartphone	195
<i>Transportation Agency, Pontianak City</i>	
34. CETEK (Simply E-ID Card Submit a Family Card)	201
<i>Al Mulk Regional General Hospital, Sukabumi City</i>	
35. iJUS MELON (Micro Business License through Online)	207
<i>Cooperatives and Micro Enterprises Agency, Semarang City</i>	
36. Longset (Healthy Alley)	213
<i>Public Health Agency, Makassar City</i>	
37. Rubbish into Gas, Blessing for the People	219
<i>Environment, Hygiene and the Beauty of the City Agency, Banda Aceh City</i>	
38. "SODA MOLEK" K 5-1	223
<i>Naikoten II Sub-Districts, Kupang City</i>	
39. Smart Kids Park: Bocahe Wasis Facility Board, Waras Ragane Lan Mapan Budi Pekertine	229
<i>Women Empowerment, Child Protection, and Community Empowerment Agency, Surakarta City</i>	
F. STATE OWNED ENTERPRISES	
40. SAHABAT LATANRO - Prosperous Thanks to Taspen Persero Services	235
<i>Services and Benefits Division, PT Taspen (Persero)</i>	



TOP 40

INOVASI PELAYANAN PUBLIK
TAHUN 2017

PUBLIC SERVICE INNOVATION 2017

119-KOLABORASI NASIONAL LAYANAN EMERGENSI MEDIK DI INDONESIA

Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan,
Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan,
Kementerian Kesehatan

- 1 Cepat tanggap dalam melayani setiap keadaan gawat darurat baik yang diakibatkan oleh kecelakaan transportasi maupun akibat gangguan kesehatan merupakan wujud pelayanan kesehatan optimal. Berdasarkan data dari Profil Kesehatan Indonesia tahun 2015, kecelakaan lalu lintas menjadi penyumbang terbesar tingginya angka korban meninggal dunia, sebanyak 475 jiwa dari total 893 kematian (53%). Selain itu, data Health Sector Review tahun 2014 menyebutkan bahwa penyakit *cerebrovascular* dan penyakit jantung iskemik merupakan penyakit tertinggi yang menjadi beban penyakit di Indonesia pada tahun 2015.

Tingginya angka kematian berdasarkan data-data tersebut menunjukkan layanan gawat darurat masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya layanan emergensi masih bersifat pasif. Fasyankes (RS/puskesmas/klinik) umumnya menunggu pasien datang dan pelayanan ambulans ke lokasi kejadian masih terbatas. Belum adanya integrasi antara petugas kesehatan dengan lintas sektor yang terkait seperti kepolisian, pemadam kebakaran, BNPB, PT Jasa Raharja, dan lain sebagainya. Belum adanya keterpaduan secara nasional antara pusat dan daerah menjadi penyebab kurang optimalnya pelayanan kesehatan. Tak hanya itu, sulitnya mendapatkan akses layanan ambulans bagi para pasien menjadi penyebab tingginya angka kematian karena terlambatnya tindakan medis bagi para pasien.

Oleh karena itu, peningkatan kualitas layanan pertolongan yang cepat dan tepat melalui layanan gawat darurat 119 sangat dibutuhkan. Layanan Emergensi Medik 119 sangat berpengaruh bagi masyarakat khususnya bagi yang kurang mampu. Setiap masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan Emergensi Medik 119 dan panggilan ini tidak dikenakan biaya.

Layanan Emergensi 119 dilakukan melalui kolaborasi pusat (*National Command Center/NCC 119*) dan daerah (*Public Safety Center/PSC 119*), menggunakan nomor 119 yang gratis, mudah diakses, dan berlaku nasional. Layanan ini

119-NATIONAL COLLABORATION OF MEDICAL EMERGENCY SERVICES IN INDONESIA

01

Directorate of Referral Health Services
Directorate General of Health Services
Ministry of Health

- Quick response in serving every state of emergency caused by either transportation accidents or due to health problems is a form of optimal health services. Based on data from the Indonesian Health Profile of 2015, traffic accidents became the largest contributor to the high death toll, 475 from 893 deaths (53%). In addition, the Health Sector Review data of 2014 mentions that cerebrovascular disease and ischemic heart disease is the highest disease that becomes burden disease in Indonesia in 2015.

The high mortality rate based on these data indicates that emergency services are still not optimal. This is caused by several factors, including emergency services are still passive. Health Care Facilities (Hospitals / Puskesmas / Clinic) are generally waiting for patients to arrive and ambulance services to the scene are limited. The absence of integration between health workers with related cross-sector such as police, fire brigade, BNPB, PT Jasa Raharja, and so forth. The absence of national integration between central and regional causes the less optimal of health services. Not only that, the difficulty of accessing ambulance services for patients is the cause of the high mortality rate due to delayed medical treatment for patients.

Therefore, prompt and timely improvement of the quality of prompt relief services through emergency services is urgently needed. 119 Medical Emergency Service is very influential for the community, especially for the less fortunate. Each community can easily access 119 Medical Emergency services and these calls are free.

The 119 Emergency Service is conducted through the Central Command Center (NCC 119) and the Public Safety Center (PSC 119), using 119 numbers that are free, accessible, and nationally applicable. This service is guided by operators who have experience in the health field to provide first-aid emergencies for 24 hours. When the patient needs handling at the scene and transportation to Health Care Facilities, the operator will contact the 119 district or city PSC to send an ambulance along with the medical team to the scene. During communication connected with the patient, the operator will provide directions for first aid.

dipandu oleh operator yang memiliki pengalaman di bidang kesehatan untuk memberikan pertolongan pertama emergensi selama 24 jam. Saat pasien membutuhkan penanganan di tempat kejadian dan alat transportasi ke Fasyankes, maka operator akan menghubungi PSC 119 kabupaten atau kota untuk mengirimkan ambulans beserta tim medis ke lokasi kejadian. Selama komunikasi terhubung dengan pasien, operator akan memberikan arahan untuk pertolongan pertama.

Penggunaan aplikasi yang seragam di pusat maupun daerah memudahkan dalam koordinasi dan monitoring. Kelebihan lainnya adalah proses rujukan antar-kabupaten maupun provinsi menjadi lebih mudah karena terhubung dalam satu sistem. Layanan ini juga terintegrasi dengan lintas sektor terkait seperti kepolisian, pemadam kebakaran, BPBD, dan lain sebagainya.

Beberapa pihak yang turut aktif dalam perkembangan Layanan Emergensi Medik 119 antara lain Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Pemda, DPRD, Bapeda, rumah sakit, puskesmas, PT Jasa Raharja, Kepolisian, BPBD, dan Pemadam Kebakaran. Organisasi masyarakat dan sektor swasta yang terlibat antara lain organisasi profesi (IDI), Tagana, PMI, Orari, RAPI, Palang Merah Remaja, PT Telkom, dan relawan.

Untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan Emergensi Medik 119, monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan secara terintegrasi. Monitoring NCC 119 dilakukan secara berkelanjutan oleh *quality assurance* NCC 119 dan Sub Direktorat Pelayanan Gawat Darurat Terpadu. Monitoring kegiatan yang dilakukan oleh NCC 119 dan PSC 119 dipantau secara langsung melalui *dashboard monitoring*. *Dashboard monitoring* antara lain menampilkan data *daily call performance* NCC 119 dan monitoring *real time* PSC 119 yang terintegrasi. Hasil monitoring kemudian dilakukan evaluasi secara periodik untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan layanan. Hasil evaluasi yang menghasilkan inovasi baru disampaikan kepada pejabat di level yang lebih tinggi dalam hal ini Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan. Monitoring di tingkat kabupaten/kota dan provinsi dilakukan oleh internal tiap instansi.

Setelah diterapkannya sistem layanan Emergensi Medik 119, masyarakat menjadi lebih mudah dalam mengakses fasilitas kesehatan seperti ambulans; setiap pasien kritis dapat diberikan tindakan medis yang cepat dan tepat sehingga mengurangi angka kematian pasien; terbitnya beberapa peraturan daerah terkait dengan layanan Emergensi Medik 119 seperti Instruksi Gubernur Aceh tentang Pembentukan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu



The use of uniform applications at both central and regional levels facilitates coordination and monitoring. Another plus is the inter-regency and provincial referral process becomes easier because it is connected in one system. This service is also integrated with cross-related sectors such as police, fire brigade, BPBD, and so forth.

Some of those who have been active in the development of 119 Medical Emergency Services are Provincial Health Office, District / Municipal Health Service, Local Government, DPRD, Bapeda, hospitals, Puskesmas, PT Jasa Raharja, Police, BPBD, and Fire Department. Community organizations and the private sector involved include professional organizations (IDI), Tagana, PMI, Orari, RAPI, Youth Red Cross, PT Telkom, and volunteers.

To further improve the service quality of Medical Emergency 119, monitoring and evaluation activities are conducted in an integrated manner. Monitoring of NCC 119 is conducted continuously by the quality assurance of NCC 119 and the Sub Directorate of Integrated Emergency Services. Monitoring of activities conducted by NCC 119 and PSC 119 is monitored directly through dashboard monitoring. Dashboard monitoring includes showing daily call performance of NCC 119 and real time monitoring of integrated PSC 119. Monitoring results are then periodically evaluated to produce improved recommendations for service improvement. Evaluation results resulting in new innovations are submitted to higher level officials, in this case the Director of Referral Health Services and the Director General of Health Services. Monitoring at the district / city and provincial level is done by the internal of each agency.

(SPGDT) di setiap Kabupaten/Kota, Instruksi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Pembentukan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) di Setiap Kabupaten/Kota, Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan tentang *Public Safety Center* (PSC), dan lain sebagainya.

Inovasi layanan Emergensi Medik 119 ini masih perlu terus dilakukan pengembangan. Pengembangan inovasi ini didukung dari sumber dana APBN Kementerian Kesehatan. Pada tahun 2016 anggaran yang disediakan terdiri atas pengadaan NCC 119 sebesar Rp11.672.880.000 dan implementasi Layanan Emergensi Medik 119 sebesar Rp280.250.000. Sedangkan di tahun 2017 anggaran yang disiapkan antara lain untuk pengadaan NCC 119 dan implementasi Layanan Emergensi Medik sebesar Rp. 12.510.740.000.

Pengembangan inovasi Layanan Emergensi Medik 119 mendapatkan perhatian yang baik dari lembaga/lintas sektor antara lain Kepolisian, Jasa Raharja, USAID, Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), Dinas Kesehatan, RS, DPRD, dan lembaga masyarakat dari berbagai daerah yang telah melakukan kunjungan ke NCC 119 Kementerian Kesehatan untuk melakukan studi banding serta kajian.

Layanan Emergensi Medik 119 dapat direplikasi di daerah dengan pembentukan PSC 119. Konsep PSC 119 secara umum terdapat di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 tahun 2016 tentang SPGDT dan dapat dikembangkan sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing. Hingga akhir bulan Desember 2016, sudah terdapat sekitar 104 PSC 119 yang terbentuk dan tersebar di seluruh Indonesia.

After the implementation of the 119 Medical Emergency service system, communities have become more accessible to health facilities such as ambulances; Any critical patient may be given prompt and precise medical measures thereby reducing the patient's death rate; The issuance of several local regulations related to medical emergency 119 service such as the Governor of Aceh Instruction on Establishment of Integrated Emergency Management System (SPGDT) in every Regency / City, Instruction of the Governor of Bangka Belitung Islands on the Establishment of Integrated Emergency Management System (SPGDT) in Each District / Town, Circular Letter of the Governor of South Sulawesi on the Public Safety Center (PSC), and so forth.

The 119th Medical Emergency service innovation still needs further development. Development of this innovation is supported from the source of State Budget funds of the Ministry of Health. In 2016 the budget provided consisted of the provision of NCC 119 of Rp11,672,880,000 and the implementation of 119 Medical Emergency Services amount of Rp280,250,000. While in the year 2017 budget prepared for example for the provision of NCC 119 and the implementation of Medical Emergency Services of Rp. 12,510,740,000.

The development of 119 Medical Emergency Service innovations has received good attention from agencies / inter-sectoral agencies such as Police, Jasa Raharja, USAID, Local Government (Provincial / District / City), Health Office, RS, DPRD, and community agencies from various regions who have undertaken A visit to the NCC 119 Ministry of Health to conduct comparative studies and studies.

119 Medical Emergency Services can be replicated in areas with the establishment of PSC 119. The concept of PSC 119 is generally contained in the Minister of Health Regulation No. 19 of 2016 on SPGDT and can be developed in accordance with the capabilities of each region. Until end of December 2016, there are already about 104 PSC 119 formed and spread throughout Indonesia.



APLIKASI LAPOR DIRI WNI TERINTEGRASI SECARA ONLINE PADA PERWAKILAN RI SE-JERMAN

Kedutaan Besar Republik Indonesia Berlin
Kementerian Luar Negeri

- 1 Kewajiban lapor diri bagi WNI yang berdomisili di luar negeri, merupakan salah satu instrumen untuk memperoleh layanan dan perlindungan dari Perwakilan RI. Pelayanan Lapor Diri di Perwakilan RI Jerman dilayani oleh KBRI Berlin, KJRI Frankfurt dan KJRI Hamburg. Namun, pelayanan di ketiga Perwakilan itu masih bersifat manual dan belum terintegrasi. Pemohon datang ke Perwakilan RI terdekat untuk menyerahkan dokumen data atau mengirim dokumen tersebut melalui pos.

Mekanisme seperti ini, menimbulkan masalah. Di antaranya, data di setiap Perwakilan RI belum terintegrasi. Maka, apabila WNI berpindah domisili, terjadi data ganda karena WNI hanya Lapor Diri pada Perwakilan RI sesuai domisili barunya. Pun saat pulang ke Indonesia, sebagian besar juga tidak Lapor Diri sehingga WNI tersebut masih tercatat berdomisili di Jerman. Belum tersedianya sarana untuk mengkonfirmasi keberadaan dan domisili. Masalah lainnya, butuh waktu lama mengakses database Lapor Diri, hal itu ditambah dengan sikap WNI yang cenderung mengabaikan kewajiban untuk Lapor Diri.

Berdasarkan kondisi ini, Duta Besar RI untuk Republik Federal Jerman meminta Atase Imigrasi KBRI Berlin membangun sistem teknologi informasi berbasis jaringan. Terobosan ini dinamai Aplikasi Lapor Diri (LaDi). Aplikasi ini dapat diakses melalui laman www.lapordirijerman.de.

Aplikasi LaDi dipandang unik, kreatif, dan inovatif karena mampu mengintegrasikan data Lapor Diri di tiga Perwakilan RI Jerman ke dalam satu *database*. Karena bersifat online, data tersebut dapat diakses setiap saat. Input data juga difungsikan sebagai notifikasi masa berlaku paspor RI, izin tinggal, aktualisasi data dan reminder lainnya. Melalui aplikasi ini, dokumen fisik dialihmediakan menjadi data digital sehingga tidak ada arsip fisik. Karena database Lapor Diri terintegrasi maka tidak terjadi lagi duplikasi data WNI. Aplikasi ini juga menjanjikan kemudahan karena dapat diakses menggunakan laptop, komputer, smartphone dan Ipad/tablet. Dengan aplikasi LaDi, prosedur layanan lapor diri menjadi lebih sederhana. Semula ada lima tahapan menjadi

ONLINE SELF-REPORT APPLICATION FOR INDONESIAN CITIZENS AT THE RI REPRESENTATIVE OF GERMANY

02

Embassy of the Republic of Indonesia in Berlin
Ministry of Foreign

❶ *Obligation of self report for Indonesian citizen (WNI) domiciled abroad, is one of the instruments to get service and protection from RI Representative. Self-Service at Representative of the Republic of Indonesia (RI) Germany is served by the Indonesian Embassy in Berlin, Consulate General of the Republic of Indonesia and the Consulate General of Hamburg. However, the services in the three Representatives are still manual and not yet integrated. Applicant comes to the nearest RI Representative to submit the data document or send the document by post.*

Mechanisms like this, cause problems. Among other things, the data in every RI Representative has not been integrated. So, if the citizen moved domicile, there is double data because the citizen only Report on the RI Representative according to his new domicile. Even when returning to Indonesia, most also do not report themselves so those citizens are still recorded living in Germany. This is due to unavailability of means to confirm existence and domicile. Another problem was that it takes a long time to access the Self Report database, which is coupled with the attitude of Indonesians who tend to ignore the obligation to report themselves.

Based on this condition, the Indonesian Ambassador to the Federal Republic of Germany requested the Indonesian Embassy's Immigration Attaché to build a network-based information technology system. This breakthrough is called Self-Check Application (LaDi). This app can be accessed through the www.lapordirijerman.de page.

LaDi application is considered unique, creative, and innovative because it is able to integrate Self-Report data in three RI Representatives into one database. Because it is online, the data can be accessed at any time. Input data also functioned as notification of validity period of passport RI, residence permit, data actualization and other reminder. Through this application, physical documents are converted into digital data so that there is no physical archive. Because of the integrated Personal Report database, there is no duplication of WNI data. This application

tiga tahapan.

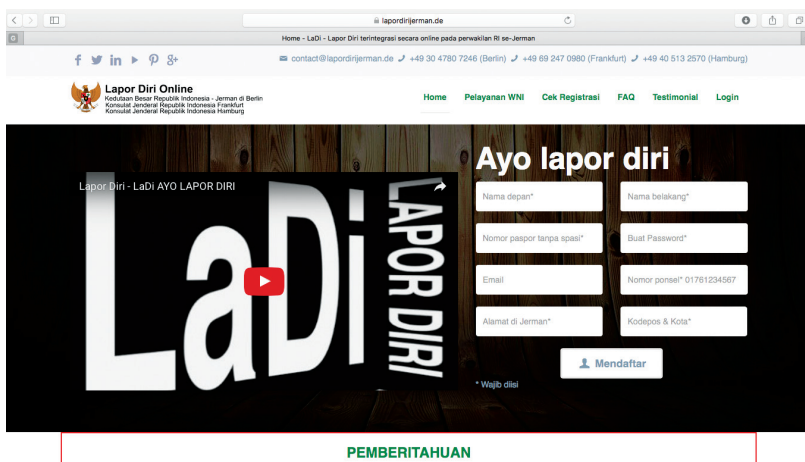
Aplikasi LaDi dibangun dari berbagai komponen yang meliputi tampilan depan, registrasi akun termasuk pengaturan wilayah akreditasi, login, notifikasi via e-mail atau SMS berupa reminder aktualisasi data, perpanjangan paspor, perpanjangan izin tinggal dan *reminder* lainnya serta cetak stiker.

Inovasi ini dapat berjalan berkat kerja sama pemangku kepentingan, seperti Dubes RI selaku penggagas ide, Atase Imigrasi KBRI Berlin, aplikator, masyarakat Indonesia yang berdomisili di Jerman. Adapun sumber daya yang digunakan terdiri atas sumber daya manusia dan sumber daya keuangan yang mencapai 10.500 Euro yang berasal dari DIPA perwakilan Imigrasi Berlin TA 2015. Selain itu, juga didukung oleh sumber daya teknis yakni penggunaan kerangka kerja *Symfony 2* yang menggunakan bahasa pemrograman PHP. *Symfony 2* adalah *Full Stack Framework* yang menggabungkan open-source-libraries ke dalam sebuah sistem kerangka kerja. *Symfony* didukung oleh SensioLabs dengan reputasi sangat baik.

Penerapan inovasi ini menghasilkan beberapa *output*, yaitu Laporan Bulanan dan Tahunan, data WNI aktif dan tidak aktif, profil WNI dalam file Pdf dan Penyimpanan Dokumen WNI yang memudahkan pengecekan input data Lapor Diri, sebaran dan data WNI berdasarkan peta wilayah negara bagian Jerman, database WNI yang melakukan perkawinan campuran dan anak berkewarganegaraan ganda.

Setelah diaplikasikan, terdapat masukan dan saran positif untuk meningkatkan efektivitas penggunaan aplikasi LaDi yang disampaikan pengguna baik secara langsung maupun melalui e-mail contact@lapordirijerman.de. Beberapa langkah evaluasi yang telah dilakukan di antaranya, statistik pengunjung aplikasi LaDi, jam kunjungan, jumlah pengunjung, jumlah cek-registrasi, masukan prosedur lupa *password*.

Dalam penerapan terobosan terdapat beberapa kendala namun berhasil diatasi. Antara lain sulitnya mengintegrasikan data pada awal inovasi dibangun. Kendala berikutnya, layanan Lapor Diri berbasis online menimbulkan kesulitan bagi orangtua yang awam teknologi. Solusinya, petugas membantu menginput data. Dan kendala yang cukup merepotkan adalah rendahnya kesadaran Lapor Diri. Untuk menanggulangnya melakukan sosialisasi yang intens dan membuat tayangan video singkat yang dapat memberikan pemahaman terkait pentingnya Lapor Diri.



also promises convenience because it can be accessed by using a laptop, computer, smart phone and iPad / tablet. With the LaDi app, the self-reporting service procedure is simpler. Initially there are five stages into three stages.

LaDi applications are built from various components that include front view, account registration including accreditation area settings, login, e-mail notification or SMS in the form of data actualization reminder, extension of passport, extension of residence permit and other reminder and sticker printing.

This innovation can be run thanks to the cooperation of stakeholders, such as the Ambassador of Indonesia as the initiator of ideas, the Indonesian Embassy Immigration Attaché, applicators, Indonesian citizens domiciled in Germany. The resources used consist of human resources and financial resources reaching 10,500 Euro from DIPA representative of Berlin Immigration TA 2015. In addition, these are also supported by technical resources namely the use of framework Symfony 2 using PHP programming language. Symfony 2 is a Full Stack Framework that incorporates open-source-libraries into a framework system. Symfony is supported by SensioLabs with a very good reputation.

The application of this innovation produces several outputs, such as Monthly and Annual Reports, active and inactive Indonesian data, WNI profiles in pdf files and WNI Document Storage which facilitates the checking of Data Entry Reports, distribution and data of Indonesian citizens based on the German state map, A mixed marriage and a dual citizen.

Once applied, there are positive feedback and suggestions to improve the effectiveness of the use of LaDi applications delivered by users either directly or

Tak dapat dipungkiri, penerapan inovasi ini menghasilkan banyak manfaat. Di antaranya, retrieve data WNI, fitur *broadcast newsletter*, pengintegrasian aplikasi LaDi ke dalam pencatatan di bidang administrasi kependudukan, *historical-data*, back-up dokumen, memaksimalkan upaya perlindungan WNI, membantu penyelenggaraan Pemilu, notifikasi masa opsi anak berkewarganegaraan ganda, data WNI yang berpindah kewarganegaraan, terhindarnya duplikasi data, *paperless*.

Aplikasi LaDi menghasilkan pemahaman bahwa membangun suatu produk layanan harus memiliki kepekaan yang tinggi dan kemampuan menampung aspirasi masyarakat, produk teknologi yang canggih tanpa dibarengi marketing yang baik tidak akan memenangkan pasar, suatu inovasi pasti akan mendapatkan resistensi dari *stakeholders*, untuk itu dibutuhkan stamina yang tinggi dan selalu berfokus pada tujuan akhir, agar dapat diterima dan memenangkan hati pengguna maka suatu inovasi harus senantiasa menjadi pusat perhatian, pengintegrasian database tidak hanya membutuhkan kemampuan teknis namun harus mampu melakukan koordinasi dengan stakeholder pemilik data. Untuk masa depan aplikasi LaDi dapat menjadi role model dan dapat digelar di berbagai Perwakilan RI khususnya di Negara akreditasi yang banyak jumlah WNI nya.

via e-mail contact@lapordirjerman.de. Some evaluation steps that have been done include, the statistics of visitors of LaDi app, visit time, visitor number, check-registration number, password forgot procedure input.

In the implementation of the breakthrough there are several obstacles but successfully overcome. Among other things difficult integration of data at the beginning of innovation built. The next obstacle, an online-based Reporting service poses difficulties for the layman's parents. The solution, officers help input data. And the troubling obstacle is the low awareness of the Report of Self. To cope with intense socialization and create short video shows that can provide an understanding of the importance of Reporting Self.

Undeniably, the application of this innovation generates many benefits. Among other things, the retrieve of WNI data, broadcast newsletter feature, integration of LaDi application into recording in the field of population administration, historical-data, document back-up, maximizing the protection of Indonesian citizen, assisting in the election, notification of the child's dual citizenship period, Move citizenship, avoid data duplication, paperless.

The LaDi application produces an understanding that building a service product must have high sensitivity and ability to accommodate people's aspirations, sophisticated technology products without good marketing will not win the market, an innovation will definitely get resistance from stakeholders, therefore high stamina and Always focused on the ultimate goal, in order to be accepted and win the heart of the user then an innovation should always be the center of attention, the integration of the database requires not only technical skills but must be able to coordinate with stakeholders data owners. For the future of LaDi application can be a role model and can be held in various RI Representatives especially in accreditation countries with many number of its citizen.

KIARKOD : *TRACKING ORDER* SISTEM INFORMASI PELAYANAN JASA B4T

Balai Besar Bahan dan Barang Teknik
Kementerian Perindustrian

- 1 Ketepatan waktu, kecepatan, dan kemudahan pelayanan dalam mengakses informasi pelayanan merupakan *point of view* pemanfaatan serta pengelolaan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik di Balai Besar Bahan dan Barang Teknik

(B4T). Transformasi sistem pelayanan publik di B4T terus dilakukan. Dimulai dari perubahan sistem administrasi manual menjadi digital agar terbentuk basis data yang memudahkan serta transparansi dalam pelayanan publik B4T terkait pengujian dan kalibrasi. Namun dalam prosesnya, informasi dan transparansi pelayanan nyatanya tidak tersampaikan kepada pelanggan secara langsung dan rekam data belum terintegrasi secara *realtime online*. Permasalahan lain yang timbul di antaranya waktu penelusuran informasi order oleh pelanggan rata-rata 30 menit bahkan lebih; terdapat biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan untuk melakukan panggilan; informasi yang diberikan pun masih bersifat pasif serta keterbatasan dalam pemberian informasi kepada pelanggan.

Sebagai langkah solusif, maka dilakukan pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Jasa B4T (SIPEJAB4T) berdasarkan SNI ISO 9001:2008. Sejak tahun 2004 B4T telah memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan. Perubahan terus dilakukan demi meningkatkan kepuasan pelanggan dan mewujudkan *good corporate governance* yang akuntabel, transparan, dan profesional dalam mewujudkan reformasi birokrasi. Maka B4T mengembangkan SIL untuk mencatat data order pengujian dan kalibrasi di area penerimaan contoh, bendahara penerima, laboratorium kalibrasi, semen, dan kimia.

Kemudian pada 2005, B4T memperbaiki SIL versi 1 dan mulai menggunakan SIL versi 2. Selanjutnya dilakukan perluasan infrastruktur jaringan di B4T dengan menambah koneksi *fiberoptic* dan juga telah mencanangkan moto pelayanan 3T (Tanggap, Terjamin, Terpercaya). Tahun 2014, B4T mengembangkan SIPEJAB4T sebagai penyempurna SIL yang mencatat data order di area penerimaan

KIARKOD : TRACKING ORDER OF SERVICE INFORMATION SYSTEM OF B4T

03

Central for Material and Technical Products
Ministry of Industry

E Time accuracy, speed and easiness in accessing service information are points of view in the use and management of information technology to support the delivery of public services at the Industry Ministry's Material and Technical Goods Center (B4T). The transformation of the public service system at B4T has been continuously conducted. The ministry started the transformation by changing its manual administration system into a digital system in its efforts to create a data base, which can ease the service delivery process, and transparency in B4T public services related to examination and calibration.

In its process, information and service transparency could not yet be delivered to customers directly and data recapitulation could not yet been integrated online and in real time. Other problems also emerged, such as customers' order information tracing time, which took around 30 minutes and even more; additional costs customers must pay to make a call; information provided is still passive in nature; and limitedness in the supplying of information to customers.

As a solution, the Industry Ministry developed the B4T Service Delivery Information System (SIPEJAB4T) based on SNI ISO 9001:2008. Since 2004, B4T has used information technology in delivering its services. Improvements have continued to be conducted to increase customer satisfaction and to create good corporate governance that is accountable, transparent and professional in realizing bureaucratic reforms. Therefore, B4T developed SIL to record data on examination and calibration orders in sample acceptance units, treasurers, and calibration, cement and chemical laboratories.

In 2005, B4T improved SIL Version 1 and began to use SIL Version 2. It later expanded infrastructure networks by adding fiberoptic connections and adopting a slogan called 3T or *Tanggap, Terjamin Terpercaya* (Responsive, Guaranteed and Trusted).

In 2014, B4T developed SIPEJAB4T to complete SIL, which is used to record order



contoh, bendahara penerima, laboratorium kalibrasi, semen, logam, otomotif, listrik, elektronika, kimia, inspeksi NDT, beton dan bahan bangunan, barang teknik, dan metalografi.

Kemudian pada 2015, penyempurnaan SIPEJAB4T dan penyemat teknologi QRCode dalam bukti pembayaran dan laporan hasil uji untuk memudahkan pelanggan mengakses informasi *order* dengan *smartphone*. QRCode ini menjadi salah satu karya paling inovatif dan kreatif dari SIPEJAB4T dibanding sistem informasi pelayanan lain. Dengan adanya QRCode dapat meningkatkan kecepatan penelusuran informasi layanan jasa pengujian dan kalibrasi oleh pelanggan. Sistem akan menghasilkan QRCode secara otomatis agar mudah diidentifikasi. QRCode yang tertera pada laporan hasil uji dihasilkan dengan metode digital. Hal ini dapat meningkatkan rasa aman dan kepercayaan pelanggan terhadap layanan jasa teknik. Fungsi telusur juga merupakan fungsi lain dari adanya penyemat QRCode pada bukti pelayanan jasa teknis.

Selama proses penerapan SIPEJAB4T beberapa dampak positif telah didapatkan oleh B4T. Seperti Indeks Kepuasan Masyarakat bernilai A, tersusunnya Laporan Hasil Uji melalui sistem, penerimaan contoh serta PNPB dari pengujian

data in the sample acceptance units, treasurers, and in calibration, cement, metal, automotive, electricity, electronics and chemical laboratories. SIL is also used in NDT, concrete and construction materials, technical goods, and metalography inspections.

In 2015, B4T completed SIPEJAB4T and attached QRCode technology on payment receipts and examination result reports, which made it easier for customers to access information on their orders via smart phones. QRCode has become one of most outstanding works from SIPEJAB4T that are much more innovative and creative compared to other information service systems.

QRCode can speed up the tracing process of examination and calibration service results by customers. The system will issue QR Code automatically so that all services can be easily identified. QR Code attached to the examination result reports is produced with a digital method. This can increase customers' safety feelings and trust toward engineering services provided. Tracing is another function of the attachment of QR Code on engineering service delivery bills.

During the implementation of SIPEJAB4T, B4T has received several positive impacts. These include the center's success to get Grade A for the Public Satisfaction Index; to compose Examination Result Reports (LHU) via a system; to create a system for the acceptance of samples and non-tax revenues (PNBP) from examination and calibration that is controlled and monitored quickly, precisely and accountable; to get an efficient use of office stationeries; to build a centralized customer database; to successfully implement a prime service process at B4T; to get an efficient and more affordable information access to examination and calibration details; and to ensure that information accepted customers can be more transparent, detailed, and accountable.

Other impacts obtained are the establishment of a modern working culture in using information technology, a more efficient use of financial, time and human resources.

Satisfying achievements in the development of SIPEJAB4T cannot be separated from roles and involvements of several parties, including the B4T head, all standardization laboratories, IT experts at B4T, treasurers and general affairs and program divisions, information and marketing departments, B4T cooperation division in the field of PJT, LSpro, and last but not least, all customers.

Financial supports for the development of SIPEJAB4T come from B4T's budget allocation list (DIPA), in which the independent management of the budget is handled by B4T experts.

dan kalibrasi terkendali dan termonitor secara cepat, tepat, dan akuntabel, adanya efisiensi penggunaan bahan ATK, database pelanggan yang terpusat, terlaksananya proses pelayanan prima di B4T, efisiensi dan penekanan biaya akses informasi detail pengujian dan kalibrasi, serta informasi yang diterima pelanggan lebih transparan, detail, dan akuntabel. Dampak lain yang dirasakan yakni terbentuknya budaya kerja yang modern dalam penggunaan teknologi informasi, efisiensi dalam penggunaan sumber daya keuangan, waktu, dan SDM.

Pencapaian yang cukup memuaskan dalam pengembangan SIPEJAB4T ini tidak terlepas dari peran serta beberapa pihak, di antaranya Kepala Balai Besar Bahan dan Barang Teknik, seluruh laboratorium yang tergabung dalam bidang standarisasi, para tenaga ahli IT B4T, Bendahara Penerimaan & Keuangan dan Program dan Pelaporan Bidang Tata Usaha, Bagian Informasi dan Pemasaran dan Kerjasama Bidang PJT, LSpro, dan tentunya para pelanggan. Sedangkan dukungan dana yang digunakan untuk pengembangan SIPEJAB4T diperoleh dari DIPA B4T dengan pengelolaan Swakelola yang dikerjakan oleh tenaga ahli B4T.

Demi menjaga mutu pelayanan di B4T, maka dilakukanlah monitoring dan evaluasi sistem pelayanan. Aktivitas yang dilakukan seperti monitoring contoh masuk, Laporan Hasil Uji (LHU), sistem pengingat yang dikirim ke pelanggan melalui SMS, penerimaan PNPB, dan lain sebagainya.

Capaian positif yang telah ditorehkan oleh SIPEJAB4T ini telah menarik minat beberapa balai sejenis seperti Baristand Industri dan Balai Besar telah melakukan *benchmarking* terhadap penerapan SIPEJAB4T di lingkungan B4T. Balai tersebut di antaranya Balai Besar Batik, Balai Besar Kulit, Balai Kimia Kemasan, Balai Besar Pencegahan Pencemaran Industri, dan laboratorium-laboratorium pengujian lainnya. Melalui komitmen B4T dalam memanfaatkan dan mengembangkan teknologi informasi terkait perkantoran modern berbasis IT, Sistem Informasi Pelayanan Jasa B4T (SIPEJAB4T) dapat dijadikan model Undang-undang KIP UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Penerapan Sistem Informasi Laboratorium sudah diterapkan sejak tahun 2004, namun seiring kebutuhan informasi yang cepat, tepat maka dikembangkan SIPEJAB4T. Keberhasilan B4T dalam menerapkan SIPEJAB4T ini diharapkan dapat menjadi model bagi instansi Lain yang ingin menerapkan pelayanan prima.

To maintain the quality of B4T services, monitoring and evaluation activities of the service system have continued to be held. Among activities conducted include the evaluation of samples and examination result reports (LHU), the establishment of a reminder system, which sends information to customers via SMS, the monitoring of non-tax revenues (PNBP) and many more.

Positive achievements resulted through SIPEJAB4T have attracted several similar agencies, such as the Trade and Industry Standardization and Research Agency (Baristand), which has conducted benchmarking activities on the implementation of SIPEJAB4T in all B4T units. Other agencies conducting similar benchmarking include the Handicrafts and Batik Center (BBKB), the Leather, Rubber and Plastic Center (BBKPP), the Chemical and Packaging Center (BBKK), the Industrial Pollution Prevention Technology Center (BBTPPI) and other examination laboratories.

Through B4T commitments to use and develop information technology (IT) related to IT-based modern offices, SIPEJAB4T has become a model for the implementation of Law No.14/2008 on Public Information Openness (KIP). The Laboratory Information System had been implemented since 2004 but as public needs on quick and precise information continued to grow, the Industry Ministry decided to develop SIPEJAB4T. It is hoped B4T's success in implementing SIPEJAB4T can become a model for other institutions that are eager to implement prime services.



MAGMA (MULTIPLATFORM APPLICATION FOR GEOHAZARD MITIGATION AND ASSESSMENT) INDONESIA

Badan Geologi
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

- 1 Indonesia memiliki 127 gunung api aktif (terbanyak di dunia). Soal jumlah korban jiwa akibat letusan gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami, Indonesia juga terbanyak di dunia. Untuk mengurangi dampak bencana alam, PVMBG melakukan Mitigasi Bencana dengan mengumpulkan data geologi, seismik, geofisika, deformasi maupun geokimia. Data dianalisa untuk menghasilkan informasi dan rekomendasi bagi masyarakat dan institusi terkait. Selain bentuk laporan, informasi disampaikan dalam bentuk Peta Kawasan Rawan Bencana.

Permasalahannya, sistem informasi kebencanaan geologi di Indonesia masih tertinggal dari negara yang tingkat kerawanan bencananya jauh lebih kecil dari Indonesia. Tidak hanya itu, sistem peringatan dini yang cepat dan tepat sasaran juga belum tersedia. Upaya mitigasi bencana belum optimal karena belum tersedia inovasi yang dapat menyampaikan informasi secara cepat, akurat, mudah dan terkini secara realtime. Untuk mengatasi kondisi ini sejak 2015 PVMBG membangun MAGMA Indonesia (*Multiplatform Application for Geohazard Mitigation and Assessment*).

MAGMA Indonesia adalah sistem informasi kebencanaan geologi yang menghadirkan kreativitas karena berupa satu jendela informasi yang bisa diakses melalui android atau web <http://magma.vsi.esdm.go.id/>. Penerapan inovasi ini mampu mempersingkat jalur laporan, tanggapan dan rekomendasi kebencanaan geologi, sehingga informasi bisa lebih cepat tersampaikan pada publik. Selain itu, data yang diterima dari laporan harian diproses otomatis sehingga bisa ditampilkan dalam bentuk deskriptif dan mudah dibaca. Selain hal baru, aplikasi kebencanaan yang menggunakan Android ini membuat pelaporan lebih efisien dan terkontrol. Digitasi dan pemusatan data pada satu tempat memudahkan pencarian data secara terpusat. Bahkan, salah satu fitur memungkinkan diseminasi informasi abu vulkanik yang dapat membantu keselamatan penerbangan. Informasi ini secara otomatis dan langsung terkirim dalam waktu kurang dari 10 menit kepada semua stakeholders.

MAGMA (MULTIPLATFORM APPLICATION FOR GEO-HAZARD MITIGATION AND ASSESSMENT) INDONESIA

Geological Agency
Ministry of Energy and Mineral Resources

04

Indonesia has 127 active volcanoes (most in the world). About the number of casualties due to volcanic eruptions, earthquakes, and tsunamis, Indonesia is also the largest in the world. To reduce the impact of natural disasters, PVMBG conducts Disaster Mitigation by collecting geological, seismic, geophysical, deformation and geochemical data. Data are analyzed to produce information and recommendations for the community and related institutions. In addition to the report form, information is submitted in the form of Disaster Prone Area Map.

The problem is, geological disaster information systems in Indonesia are still lagging behind countries whose vulnerability level is much smaller than Indonesia. Not only that, fast and targeted early warning systems are also not available. Disaster mitigation efforts are not yet optimal because there is no innovation available that can deliver information quickly, accurately, easily and in real time. To overcome this condition since 2015 PVMBG built MAGMA Indonesia (Multiplatform Application for Geo-hazard Mitigation and Assessment).

MAGMA Indonesia is a geological disaster information system that brings creativity because it is a single window of information that can be accessed via android or web <http://magma.vsi.esdm.go.id/>. The application of this innovation is able to shorten the report path, response and geological disaster recommendations, so that information can be more quickly delivered to the public. In addition, data received from daily reports is automated so that they can be displayed in descriptive and readable form. In addition to the novelty, disaster applications using Android make reporting more efficient and controllable. Digitizing and centralizing data in one place facilitates centralized search of data. In fact, one feature allows the dissemination of volcanic ash information that can help flight safety. This information is automatically and instantly sent in less than 10 minutes to all stakeholders.

Initiative to form an integrated and structured database system pioneered by Dr. Ir. Devy Kamil Syahbana, Head of Eastern Region Volcano Mitigation. This effort



Inisiatif membentuk sistem database yang terintegrasi dan terstruktur dirintis oleh Dr. Devy Kamil Syahbana, Kasubid Mitigasi Gunungapi Wilayah Timur dengan. Upaya ini diawali dengan survei pelayanan publik di bidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi. Hasil dari survei menunjukkan 81,29% masyarakat Indonesia mengharapkan PVMBG memiliki sistem peringatan dini. Selanjutnya, mulai merancang sistem dengan membuat framework system, platform yang akan digunakan. Januari 2016, pengembangan backend untuk pengolahan data otomatis MAGMA dengan menggunakan bahasa Python. Aplikasi yang telah dibuat antara lain Aplikasi GUI MAGMA-CAT dan MAGMA-WEB GIS. Kedua aplikasi ini sepenuhnya dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Python oleh Dr. Devy Kamil Syahbana. Februari 2016, pengembangan Aplikasi Android Pelaporan Gunungapi secara detail dilakukan. Aplikasi ini bernama MAGMA-VAR (Volcanic Activity Report). Januari 2017, pengembangan MAGMA-PRESS sebagai blog kebencanaan geologi yang memuat informasi kebencanaan geologi.

Terobosan ini dapat berjalan berkat dukungan banyak pihak, mulai dari masyarakat, BMKG, BNPB, Kementerian Perhubungan, Ditjen Penerbangan Udara, Pemerintah Daerah, Volcanic Ash Advisory Center Darwin. MAGMA Indonesia 100 persen buah karya PNS di PVMBG dengan menggunakan fasilitas yang ada tanpa menggunakan dana APBN khusus. Karena itu, terobosan ini menggunakan perangkat lunak open-source. Meski demikian, MAGMA mampu menghasilkan informasi secara cepat dan akurat.

Untuk menjaga kinerja aplikasi, dilakukan evaluasi dengan mengumpulkan

begins with a survey of public services in the field of volcanology and geological disaster mitigation. Results from the survey showed 81.29% of Indonesians expected PVMBG to have an early warning system. Next, start designing the system by creating a framework system, which platform will be used. January 2016, backend development for automatic MAGMA data processing using Python language. Applications that have been made include MAGMA-CAT GUI and MAGMA-WEB GIS applications. Both of these applications are fully developed using the Python programming language. Devy Kamil Syahbana. February 2016, Android Application Development Reporting Volcano in detail is done. This application is called MAGMA-VAR (Volcanic Activity Report). January 2017, development of MAGMA-PRESS as a geological disaster blog containing geological disaster information.

This breakthrough can run thanks to the support of many parties, ranging from the community, BMKG, BNPB, Ministry of Transportation, DG Aviation, Derah Government, Volcanic Ash Advisory Center Darwin. MAGMA Indonesia 100 percent of the work of civil servants in PVMBG by using existing facilities without using special state budget funds. Therefore, this breakthrough using open-source software. However, MAGMA is able to produce information quickly and accurately.

To maintain the performance of the application, the evaluation by collecting input suggestions and criticism from the public and internal by conducting an online survey or face to face. Data collection is also done through log data from MAGMA server to find out how big the use of MAGMA in its function of giving disaster information to public. Because it is based on information technology, it is necessary to test repeatedly every time a system update is performed.

In its development, MAGMA faced several obstacles. Among the number of core officers working on MAGMA only three programmers and two network experts. This makes the development of MAGMA slower. The solution of MAGMA development is done by giving the highest priority in view of whether or not a feature will be integrated. Another obstacle, there is no user interface designers. This forces every officer to learn how to design the interface. It takes time so that every officer has to study the front end and backend simultaneously. Limitations of the Internet network is also a constraint. The solution, data sent via SMS to PVMBG. The next obstacle, small network bandwidth for international access. Therefore, the use of third party interconnection such as MaxCDN can be used to reduce international bandwidth. Data security is still not perfect. The solution is to continue to update the system to fix security holes.

MAGMA is an integrated and organized database system. MAGMA can develop

masukkan saran dan kritik dari publik dan internal dengan melakukan survai online ataupun tatap muka. Pengumpulan data juga dilakukan melalui data log dari server MAGMA untuk mengetahui seberapa besar penggunaan MAGMA dalam fungsinya memberikan informasi kebencanaan kepada publik. Karena berbasis teknologi informasi, perlu melakukan uji coba berulang kali setiap kali pembaruan sistem dilakukan.

Dalam pengembangannya, MAGMA menghadapi beberapa kendala. Di antaranya jumlah petugas inti yang mengerjakan MAGMA hanya tiga orang programmer dan dua ahli jaringan. Hal ini membuat pengembangan MAGMA lambat. Solusinya pengembangan MAGMA dikerjakan dengan memberikan prioritas tertinggi dilihat dari mendesak tidaknya suatu fitur akan diintegrasikan. Kendala lainnya, belum ada desainer antar muka pengguna. Hal ini memaksa setiap petugas belajar bagaimana desain antar muka. Ini menyita waktu sehingga setiap petugas harus mempelajari front-end dan backend secara bersamaan. Keterbatasan jaringan internet juga menjadi kendala. Solusinya, data dikirim lewat SMS ke PVMBG. Kendala berikutnya, *bandwidth* jaringan kecil untuk akses internasional. Oleh karenanya penggunaan interkoneksi pihak ketiga seperti MaxCDN bisa digunakan untuk memperingan bandwidth internasional. Keamanan data masih belum sempurna. Solusinya adalah dengan terus melakukan pembaruan sistem untuk memperbaiki celah – celah keamanan.

MAGMA merupakan suatu sistem database yang terintegrasi dan terorganisir. MAGMA bisa berkembang bukan hanya sebagai suatu sistem yang menangani masalah bencana geologi saja, melainkan bisa dikembangkan untuk menjadi satu sistem yang utuh yang mampu untuk mengorganisasi pekerjaan instansi. Dalam aplikasi Android MAGMA-VAR, tersedia suatu fitur yang mengakomodir informasi pegawai, saran dan pertanyaan seputar MAGMA, pengajuan atau pengaduan alat serta statistika laporan dan pegawai. Pembangunan sistem dengan tenaga PNS lebih menjamin keberlangsungan sistem karena tidak bergantung pihak luar, dan dapat diubah-ubah tergantung kebutuhan institusi.



not only as a system that deals with geological disasters, but can be developed to become a whole system capable of organizing agency work. In the MAGMA-VAR Android app, there is a feature that accommodates employee information, suggestions and questions about MAGMA, submissions or complaints of tools and statistics of reports and employees. The development of a system with civil servants will ensure the sustainability of the system because it does not depend on external parties, and can be changed depending on the needs of the institution.



PRIOQ KLIK

Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok
Kementerian Pertanian

- 1 Pelayanan kantor karantina, terutama di pelabuhan besar, turut mempengaruhi *dwelling time* atau masa inap barang. Makin lama dan rumit birokrasinya, maka *dwelling time* menjadi panjang dan biaya yang ditimbulkan semakin besar.

Sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam *proses pre cutom clearance*, Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok setiap tahun menerima lebih dari 60.000 pengajuan dokumen, atau kurang lebih 250 dokumen/hari. Angka itu belum termasuk 50% dokumen yang dikembalikan karena tidak lolos verifikasi.

Hingga awal 2013, antrian pelayanan di Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok belum tertata baik. Saling serobot hingga pemberian tip kepada oknum petugas untuk mempercepat proses menjadi lumrah. Biaya PNBP pun belum transparan, bahkan manajemen sulit melakukan evaluasi terhadap *SLA (Service Level Agreement)*.

Berangkat dari permasalahan itu, pada pertengahan 2013, Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok meluncurkan Sistem Manajemen Antrian (SMA) untuk bidang karantina tumbuhan dan Tracking Dokumen (TD) untuk bidang karantina hewan. Namun, dua sistem tersebut hanya mengatasi 20% masalah.

Kemudian, pada 2015, manajemen membuat tim kecil untuk melakukan evaluasi internal dan eksternal. Pertengahan 2016, lahirlah PRIOQ KLIK yang merupakan gabungan dari SMA dan Tracking Dokumen. Dengan PRIOQ KLIK, pengguna layanan bisa melakukan semuanya via *smartphone*, mulai cek hasil verifikasi, jumlah PNBP, status upload serta analisis reject dokumen ke INSW tanpa harus menunggu dan membuang waktu. Sistem juga dirancang untuk mencegah manipulasi PNBP oleh oknum. Dengan klik nomor permohonan, langsung bisa *update* semua informasi tersebut, bahkan di notifikasi via email tanpa perlu mengecek.

Tanjung Priok Agriculture Quarantine Center
Ministry of Agriculture

- ❶ Quarantine office services, especially in large ports, also influence the dwelling time or stay of goods. The longer and complicated the bureaucracy, the dwelling time becomes longer and the costs incurred are greater.

As one of the parties involved in the pre custom clearance process, the Tanjung Priok Agriculture Quarantine Center receives more than 60,000 documents per day, or approximately 250 documents per day. That figure does not include 50% of the documents returned because they did not pass the verification.

Until early 2013, the queue of services at the Central Quarantine of Tanjung Priok Agriculture has not been well organized. Mutual each other until giving tip to unscrupulous officers to speed up the process become commonplace. PNBPN costs are not yet transparent, even management is difficult to evaluate the SLA (Service Level Agreement).

Departing from the problem, in the middle of 2013, the Tanjung Priok Agriculture Quarantine Center launched the queue management system for quarantine and document tracking for animal quarantine. However, the two systems only address 20% of problems.

Then, by 2015, management creates small teams to conduct internal and external evaluations. Mid-2016, was born PRIQQ CLICK which is a combination of SMA and Tracking Dukumen. With PRIQQ CLICK, service users can do everything via smartphones, starting verification checks, PNBPN amounts, upload status and reject document analysis to INSW without having to wait and waste time. Systems are also designed to prevent PNBPN manipulation by unscrupulous individuals. By clicking on the application number, you can directly update all the information, even in the notification via email without checking.

This system is somewhat creative and innovative because it uses a new way of doing service, by combining two different systems. Quarantine services that have



Sistem ini terbilang kreatif dan inovatif karena memakai cara baru dalam melakukan pelayanan, yakni dengan menggabungkan dua sistem yang berbeda. Pelayanan karantina yang selama ini selalu dibedakan menjadi karantina hewan dan tumbuhan, kini menyatu dalam PRIOQ KLIK. Selain itu, sistem yang baru ada di Karantina Tanjung Priok ini memiliki layanan terintegrasi dengan *inhouse system*, sehingga mudah direplikasi UPT atau Instansi lain.

Terwujudnya PRIOQ KLIK merupakan hasil kerja sama seluruh pemangku kepentingan. Mulai dari Kepala KarantinaTanjung Priok, Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Karantina Tanjung Priok, Kepala Bidang Karantina Hewan dan Tumbuhan, Kepala Seksi Informasi dan Sarana Teknis Karantina Hewan dan Tumbuhan, Operator sistem dan IT, Operator pelayanan yang dikoordinir oleh Kepala Seksi Pelayanan Operasional Karantina Hewan dan Tumbuhan, serta pengguna layanan internal maupun eksternal sebagai pengguna yang memberikan umpan balik perbaikan sistem PRIOQ KLIK.

Dalam membangun PRIOQ KLIK, Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok menggunakan berbagai sumber daya. *Pertama*, sumber daya anggaran. Biaya diambil melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok. Biaya pengembangan digunakan untuk mengonsep, pembuatan aplikasi serta administrasi.

Kedua, sumber daya manusia (SDM). Sumber daya ini menggunakan tenaga operator IT, operator pelayanan, dan manajemen. Operator IT terdiri dari empat orang. Masing-masing dua orang dari bidang karantina hewan dan tumbuhan. *Ketiga*, sarana dan prasarana. Pada bagian ini, sumber daya yang digunakan antara lain server, internet (PC) gratis untuk pengguna jasa, wifi gratis di ruang

always been differentiated into animal and plant quarantine, are now integrated into PRIOQ CLICK. In addition, the new system is in Quarantine Tanjung Priok has integrated services with inhouse system, so easily replicated UPT or other agencies.

The realization of PRIOQ CLICK is the result of cooperation of all stakeholders. Starting from the Head of Quarantine of Tanjung Priok, Head of Quarantine and Quarantine of Tanjung Priok, Head of Animal and Plant Quarantine Division, Head of Information and Technical Section of Quarantine of Animal and Plant Quarantine, System and IT Operator, Service Operator coordinated by Section Head of Optional Service of Animal Quarantine and Plants, as well as users of internal and external services as users who provide feedback on PRIOQ CLICK system improvements.

In establishing PRIOQ KLIK, the Tanjung Priok Agriculture Quarantine Center uses various resources. First are budget resources. The cost is taken through the List of Budget Implementation (DIPA) of Tanjung Priok Agriculture Quarantine Office. Development costs are used to conceptualize, manufacture and administer applications.

Secondly, human resources (HR) This resource uses IT operators, service operators, and management operators IT operators consist of empty people, each of them two people from the field of animal and plant quarantine. Third are facilities and infrastructure. In this section, resources which are used include servers, free internet (PC) for service users, and free wi-fi in the service room, direct monitoring screen, and computers for operators.

In the development of PRIOQ KLIK, Tanjung Priok Agriculture Quarantine Center had encountered a number of obstacles. Starting from the lack of IT human resources, the service users have not been fully aware of the facilities of PRIOQ CLICK, until the low understanding of service users in the utilization of internet and smart phone.

However, these obstacles can be addressed thanks to the commitment to delivering fast, accurate and transparent services, socializing directly or through print and electronic media and social media, as well as providing free internet facilities both in the form of PC monitors and wi fi networks in the Great Quarantine Area Agriculture of Tanjung Priok.

The existence of PRIOQ CLICK certainly brings a big change in the service of Tanjung Priok Agriculture Quarantine Center. Currently, service users can monitor document verification results online. With PRIOQ CLICK, service users are also

pelayanan, layar pemantauan langsung, dan komputer bagi operator.

Dalam pengembangan PRIOQ KLIK, Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok sempat menemui sejumlah kendala. Mulai dari kurangnya SDM IT, para pengguna jasa belum seluruhnya mengetahui fasilitas PRIOQ KLIK, hingga masih rendahnya pemahaman pengguna jasa dalam pemanfaatan internet dan smartphone.

Namun berbagai kendala tersebut dapat diatasi berkat komitmen mewujudkan pelayanan yang cepat, akurat dan transparan, melakukan sosialisasi secara langsung maupun melalui media cetak dan elektronik dan media sosial, serta menyediakan fasilitas internet gratis, baik dalam bentuk PC monitor dan jaringan wifi di lingkungan Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok.

Keberadaan PRIOQ KLIK tentu membawa perubahan besar dalam pelayanan Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok. Saat ini, para pengguna layanan bisa memantau hasil verifikasi dokumen secara *online*. Dengan PRIOQ KLIK, pengguna jasa juga lebih tenang, karena ada kepastian informasi proses pemeriksaan dokumen.

Agar sistem tersebut dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan, Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok melakukan evaluasi internal dan eksternal. Evaluasi internal meliputi evaluasi Sistem *Lever Agreement* (SLA) serta perbaikan dan pengembangan PRIOQ KLIK. Sedangkan evaluasi eksternal ditempuh dengan melakukan pertemuan dengan pengguna jasa (eksportir, importir dan lokal) secara langsung setiap enam bulan sekali.

PRIOQ KLIK akan menjadi inovasi dan sistem pelayanan yang berkelanjutan. Bahkan sistem ini mengalami perbaikan dan *upgrade*, serta replikasi di berbagai wilayah kerja kantor karantina. Untuk keberlanjutannya, maka dilakukan beberapa hal. Antara lain, memastikan ketersediaan anggaran dari DIPA untuk PRIOQ KLIK setiap tahun guna menunjang kegiatan update website, perbaikan secara berkala, dan kegiatan *inhouse training*. Dalam skala luas, replikasi juga dapat dilakukan ke UPT lain di Badan Karantina Pertanian untuk menyalurkan ide dan konsep layanan yang praktis.

Terwujudnya PRIOQ KLIK tak hanya memberikan perubahan terhadap pelayanan, namun juga memberikan pembelajaran tentang revolusi pelayanan publik. Selain itu, keterbukaan komunikasi dan komitmen bersama juga mutlak diperlukan untuk menggabungkan dua layanan yang dianggap berbeda. Komitmen ini diharapkan mampu mewujudkan pelayanan yang prima.



calmer, because there is certainty of information process of examination of documents.

In order for the system to work properly and sustainably, the Tanjung Priok Agriculture Quarantine Center conducts internal and external evaluations. Internal evaluation includes evaluation of Lever Agreement System (SLA) as well as improvement and development of PRIOQ CLICK. While external evaluation is done by conducting meetings with service users (exporters, importers and local) directly every six months.

PRIOQ CLICK will be an innovation and sustainable service system. Even this system has improved and upgraded, as well as replication in various quarantine office areas. For the sustainability, then do some things. Among other things, ensure the availability of budget from DIPA for PRIOQ CLICK every year to support website update activities, regular improvements, and in house training activities. In broad scale, replication can also be done to other UPTs in the Agricultural Quarantine Agency to distribute practical ideas and service concepts.

The realization of PRIOQ CLICK not only provides changes to the service, but also provides learning about the revolution of public services. In addition, open communication and mutual commitment is also absolutely necessary to combine two different services. This commitment is expected to realize the excellent service.



SIPUHH: MEWUJUDKAN TATA KELOLA KEHUTANAN

Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan,
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- 1 Dalam rangka mengamankan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), setiap hasil hutan kayu yang dimanfaatkan dari hutan negara wajib dilakukan penatausahaan. Hal tersebut meliputi pencatatan, dokumentasi dan pelaporan kegiatan perencanaan, penebangan/pemanenan, pengangkutan/peredaran, hingga pengolahan di industri.

Selama ini penatausahaan hasil hutan dilaksanakan secara *official assessment*. Artinya, di setiap tahapan proses ditempatkan aparat pemerintah yang bertugas melakukan pemeriksaan/pengesahan untuk memastikan tahapan proses dilakukan secara benar sesuai ketentuan. Akibatnya, penatausahaan hasil hutan sangat bergantung kepada aparat pemerintah.

Pelaksanaan penatausahaan hasil hutan secara *official assessment* juga belum memenuhi prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Menyadari akan hal tersebut, maka dilakukan perubahan kebijakan penatausahaan hasil hutan dari *official assessment* dan manual menjadi *self assessment* melalui penerapan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH). Dengan SIPUHH seluruh tahapan proses pencatatan, penerbitan dokumen, dan pelaporan dilakukan melalui transaksi elektronik secara mandiri oleh pelaku usaha. Sedangkan peran aparat pemerintah digantikan oleh *otomasi sistem*.

Kebijakan tersebut merupakan inovasi pelayanan publik yang unik dan bersifat pioner. Sebab, SIPUHH merupakan satu-satunya sarana pelaksanaan penatausahaan hasil hutan. SIPUHH juga menjadi pemenuhan terhadap regulasi yang berlaku sebagai alat verifikasi dan validasi sistem. Dengan demikian SIPUHH dapat menjadi alat kendali yang menggantikan peran aparat pemerintah dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi.

Karena lingkup yang luas dan banyaknya pemangku kepentingan, dalam pengembangan aplikasi SIPUHH melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

SIPUHH: REALIZING FORESTRY GOVERNANCE

06

Directorate of Contribution of Forest Product
Directorate General of Sustainable Production Forest Management
Ministry of Environment and Forestry

- In order to secure Non-Tax State Revenues (PNBP), any timber forest products utilized from state forests shall be administered. This includes recording, documentation and reporting of planning activities, logging / harvesting, transport / distribution, to processing in the industry.

So far, the administration of forest products has been implemented in official assessment. That is, at every stage of the process placed government officials in charge of inspection / endorsement to ensure the stages of the process carried out correctly according to the provisions. As a result, the administration of forest products is highly dependent on the government apparatus.

The implementation of the administration of forest products by official assessment has not fulfilled the basic principles of good governance, namely transparency, participation, and accountability. In recognizing this, a change of forest product administration policy from official assessment and manual to self-assessment through the implementation of Information System of Forest Product Administration (SIPUHH). With SIPUHH all stages of the process of recording, issuing documents, and reporting are conducted through electronic transactions independently by business actors. While the role of government officials is replaced by system automation.

The policy is a unique and pioneering innovation of public services. Therefore, SIPUHH is the only means of administering forest products. SIPUHH is also a fulfillment of applicable regulations as a means of verification and system validation. Thus SIPUHH can be a control tool that replaces the role of government apparatus in verification and validation implementation.

Due to the wide scope and number of stakeholders, the development of SIPUHH applications involves all stakeholders. The stakeholders include the Directorate General of Sustainable Production Forest Management, Directorate of Forest Product Distribution and Distribution Unit (Production Forest Management Hall),

Adapun, para pemangku kepentingan tersebut antara lain Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan dan Unit Pelaksana Teknis (Balai Pengelolaan Hutan Produksi), Dinas Kehutanan Provinsi, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Asosiasi Panel Kayu Indonesia (APKINDO), Indonesian Sawmill and Wood Working Association (ISWA), serta pelaku usaha yang memberikan masukan serta penyediaan sumber daya manusia dan sarana penunjang di masing-masing lokasi.

Dalam penerapannya, SIPUHH membutuhkan sumber daya yang optimal. Sumber daya tersebut meliputi, 1) Sumber Daya Manusia (SDM) seperti Administrator Operator pada Unit Pelaksana Teknis dan Dinas Provinsi, dan operator pada pelaku usaha sebagai pengguna utama melaksanakan transaksi data secara elektronik;

2) Sumber Daya Keuangan yang berasal dari sumber dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan. Sumber daya keuangan juga berasal dari Instansi lain seperti Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Hutan Produksi, Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Hutan Produksi, Dinas Kehutanan Provinsi, asosiasi terkait, dan pelaku usaha, berkenaan dengan penyediaan sarana dan prasarana penunjang serta pelatihan operator pada masing-masing lokasi. Untuk penyempurnaan dan pengembangan SIPUHH telah dianggarkan dari APBN untuk tahun 2017 sebesar Rp400 juta.

Pada awal penerapan SIPUHH, permasalahan yang dihadapi antara lain penyediaan ruang kendali, penambahan tenaga Administrator/Helpdesk, penyediaan sarana komunikasi e-mail helpdesk dan telepon hotline yang dapat memberikan pelayanan selama 24 Jam.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka peran dan fungsi Tim Pengelola dioptimalkan antara lain dengan monitoring sistem selama 24 Jam penuh, analisa dan pengumpulan bahan pengembangan, peningkatan sarana/prasarana SIPUHH, dan pengembangan aplikasi.

Keberhasilan aplikasi ini tercermin dari adanya perubahan signifikan dari sebelum dan sesudah diterapkan. Jika sebelumnya setiap tahapan proses transaksi data harus melalui pemeriksaan/pengesahan dari aparat pemerintah, mulai 1 Januari 2016, seluruh tahapan proses transaksi data dari hulu sampai hilir dilakukan secara mandiri (*self assessment*) oleh pelaku usaha.

Penerapan inovasi SIPUHH telah memberikan manfaat bagi banyak pihak. Seperti pelayanan lebih optimal, pengambilan keputusan yang tepat,



Provincial Forestry Office, Indonesian Forest Entrepreneurs Association (APHI), Indonesian Wood Panel Association (APKINDO), Indonesian Sawmill and Wood Working Association (ISWA), as well as business actors who provide input and provision of human resources and supporting facilities in each location.

In its application, SIPUHH requires optimal resources. These resources include: 1) Human Resources (HR) such as Operator Administrators at Technical Implementation Unit and Provincial Service, and operators on business actors as the primary users of electronic data transactions; 2) Financial Resources derived from funding sources List of Budget Implementation List (DIPA) Directorate of Contribution and Distribution of Forest Products. Financial resources also come from other institutions such as Technical Implementation Unit of Production Forest Management Center, Technical Implementation Unit of Production Forest Management Center, Provincial Forestry Office, related associations, and business actors, concerning the provision of supporting facilities and infrastructure and training of operators in each Location. For the improvement and development of SIPUHH has been budgeted from the state budget for 2017 amounting to Rp400 million.

At the beginning of the implementation of SIPUHH, the problems encountered include the provision of control rooms, the addition of Administrator / Helpdesk personnel, the provision of e-mail tools helpdesk and telephone hotline that can provide services for 24 Hours.

To overcome these problems, the roles and functions of the Managing Team

pengamanan hak negara atas hasil hutan, dan pengendalian pemegang izin. Sebagai mekanisme pemantauan, pemerintah menerapkan *post audit* terhadap pelaku usaha yang melakukan penyalahgunaan aplikasi ini. Untuk memastikan efektivitas dan keandalan sistem ini, dilakukan evaluasi terhadap aplikasi untuk memastikan seluruh tahapan proses terfasilitasi dalam SIPUHH dan seluruh aplikasi berfungsi baik. Pemantauan juga dilakukan melalui survei kepuasan dari pemangku kepentingan yang terlibat. Survei dilakukan melalui media *online* atau secara langsung pada kegiatan pelatihan/pembekalan dan sosialisasi.

Penerapan SIPUHH memberikan pembelajaran tersendiri. Di antaranya, bahwa penerapan kebijakan baru, apalagi berhubungan dengan sistem informasi berbasis teknologi informasi, maka fasilitas berupa sosialisasi, pendampingan, serta layanan *helpdesk* merupakan hal penting. Seringkali, kegagalan proses yang berakibat pada gangguan sistem yang lebih besar diawali dari kesalahan operasional yang dilakukan oleh operator (*human error*).

Mengingat kegunaannya yang berdampak positif, SIPUHH akan terus dikembangkan dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi. Selanjutnya, SIPUHH akan direplikasi dan dikembangkan untuk hasil hutan bukan kayu. Dengan rencana sebagai berikut: *pertama*, penyiapan regulasi yang telah dimulai sejak Oktober 2016. *Kedua*, penyusunan desain aplikasi sistem informasi, *ketiga*, membuat sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu (SIPUHH-BK) yang saat ini dalam proses penyelesaian sesuai rancangan regulasi.

are optimized, among others, with full 24 hour system monitoring, analysis and collection of development materials, improvement of facilities / infrastructure of SIPUHH, and application development.

The success of this application is reflected in the existence of significant changes from before and after applied. If before each stage of transaction process the data must pass through examination / approval from government apparatus, starting 1 January 2016, all phases of data transaction process from upstream to downstream done independently (self assessment) by business actor.

The application of SIPUHH innovation has benefited many parties. Such as more optimal service, proper decision making, security of state rights on forest products, and control of license holders.

As a monitoring mechanism, the government implements post audit of business actors who abuse this application. To ensure the effectiveness and reliability of this system, an evaluation of the application is made to ensure that all stages of the process are facilitated in SIPUHH and all applications are functioning properly. Monitoring is also conducted through a satisfaction survey of the involved stakeholders. Surveys are conducted through online media or directly on training / briefing activities and socialization.

The implementation of SIPUHH provides its own learning. Among other things, that the implementation of new policies, let alone related to information systems based on information technology, then facilities such as socialization, assistance, and helpdesk services is important. Often, process failures that result in larger system failures are preceded by operational errors by operators (human error).

Given its usefulness that has a positive impact, SIPUHH will continue to be developed and adapted to the development of information technology. Furthermore, SIPUHH will be replicated and developed for non-timber forest products. With the plan as follows: the first is the preparation of the regulation that has been started since October 2016. Second, the preparation of information system application design. The third is to make the system of Information Administration of Non-Timber Forest Products (SIPUHH-BK) which is currently in the process of completion according to the draft regulation.



TEKNOLOGI *E-FILING RENEWAL* TRADEMARK DI INDONESIA

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

- 1 Setiap individu maupun kelompok memiliki hak untuk melindungi hasil olah pikir yang membuahkan suatu produk atau proses yang berguna bagi individu lainnya. Hak eksklusif yang diberikan oleh negara ini merupakan wujud penghargaan atas kreatifitas yang dihasilkan oleh individu tersebut. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) adalah instansi pemerintah di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang menangani administrasi Kekayaan Intelektual.

Dalam prosesnya, permohonan pendaftaran perpanjangan kekayaan intelektual oleh publik maupun stakeholder terus mengalami peningkatan. Ditambah dengan adanya permohonan perpanjangan yang harus melewati proses pemeriksaan formalitas pada tahun 2013 hingga 2016 sebanyak +35.426 dokumen permohonan perpanjangan merek. Sehingga sering kali dijumpai beberapa masalah dalam prosesnya. Seperti tidak adanya kepastian pelayanan dan rendahnya tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diperolehnya.

Di samping itu masih ditemukan adanya keterlambatan proses penyelesaian permohonan pendaftaran atau perpanjangan Kekayaan Intelektual, volume dokumen permohonan perpanjangan yang terus bertambah, kesulitan dalam proses penelusuran dokumen oleh pegawai, pemrosesan entry-and-capture data yang membutuhkan skill dan waktu yang cukup lama serta tidak dapat langsung di monitoring oleh publik atau stakeholder. Tak hanya itu, bila terdapat sengketa, maka dokumen permohonan akan mengalami penundaan yang cukup lama. Oleh karena itu dibutuhkan sistem baru untuk memperoleh peningkatan produktifitas dan perubahan manajemen terutama dalam administrasi permohonan perpanjangan Merek.

Visi e-filling untuk perpanjangan online merupakan salah satu program yang diprakarsai oleh Direktorat Teknologi Informasi KI DJKI bersama dengan WIPO. Motivasi yang tinggi untuk mewujudkan permintaan publik agar mendapat

TECHNOLOGY OF E-FILING RENEWAL TRADEMARK IN INDONESIA

07

Directorat General of Intellectual Property
Ministry of Law and Human Rights
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Every individual or group has a right to protect their intellectual works' results either in form of a product or a process, which is useful for other individuals. The exclusive rights given by the state are an appreciation for the creativity of those individuals. The Intellectual Property Rights Directorate General (DJKI) is a government institution under the Law and Human Rights Ministry that is responsible to handle the management of intellectual property rights.

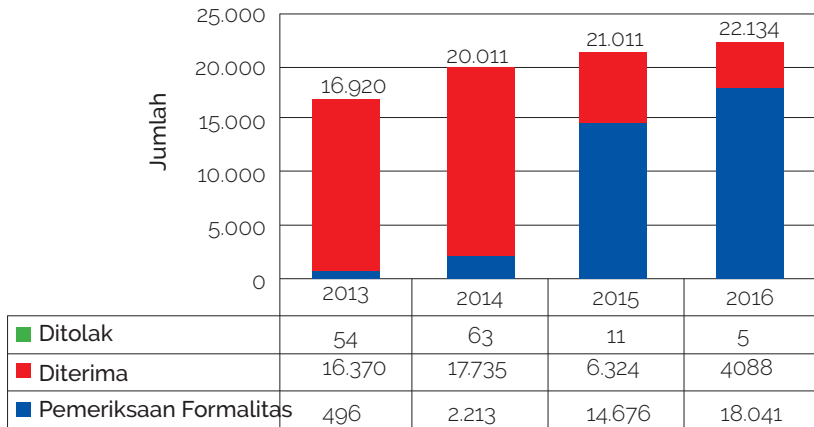
The number of registration process requests for the extension of intellectual property rights submitted by the public or stakeholders has continued to increase. During the 2013-2016 period, DJKI received 35,246 requests, which must pass a string of formal assessment processes. Several problems often emerged during the extension process of the intellectual property rights. These included a lack of service certainties and quite a low satisfaction level among customers over services they had received.

Other problems also have often been found during the process. They include slowness in the process to complete intellectual property rights registration or extension requests, a continuous increase in the number of extension request documents, difficulties faced by DJKI officials in tracing documents, and an entry-and-capture data process, which requires specific skills and quite a long time and cannot be directly monitored by the public or stakeholders.

In a certain situation, such as during disputes, request documents will be held in quite a long period of time. This is why there should be a new system, through which DJKI can increase its productivity and improve its management, especially during the handling of trademark extension request administrative procedures.

E-Filing is an online trademark extension program. This is one of programs initiated by DJKI's Intellectual Property Rights Information Technology Directorate, in cooperation with the World Intellectual Property Organization (WIPO).

Permohonan Perpanjangan Merek



pelayanan yang pasti, menyelesaikan dokumen backlog yang semakin banyak, lamanya proses administrasi perpanjangan, dan kebutuhan untuk biaya yang lebih rendah sehingga mendorong DJKI ke arah sistem perpanjangan elektronik.

Sistem administrasi pelayanan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Kemenkumham Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik. Selain itu, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 35 ayat 3 memperbolehkan pengajuan permohonan perpanjangan Merek secara Online, merupakan salah satu tonggak baru negara Indonesia dalam pelayanan Kekayaan Intelektual di ASEAN.

Pelayanan yang mengusung metode praktis agar proses maupun prosedur yang dilalui dapat lebih efisien serta mencapai kepuasan pelayanan. Dengan adanya dukungan legalitas dan kemajuan teknologi maka muncullah kreatifitas dan inovasi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk membuat sistem E-Renewal atau E-Filling Perpanjangan yakni sistem birokrasi permohonan perpanjangan yang melibatkan stakeholder sebagai partisipan dalam proses entry-and-capture data sehingga dapat memperpendek proses birokrasi dan kemudahan monitoring secara langsung oleh stakeholder dan pejabat pemroses.

Strategi dan perancangan perpanjangan merek secara online yakni dengan melakukan kajian tentang sistem IPAS (Intellectual Property Autotaion System) untuk dikembangkan dan melakukan koordinasi dengan pakar sistem automasi

Highly motivated by its desire to fulfil public demands on a more certain service, to solve its severe document backlog problems, to shorten the extension administration process time, to set up a lower administration cost, DJKI decided to create an electronic extension system.

The electronic administration system has been stipulated on Law and Human Rights Minister Regulation No. 42/2016 on Electronic Intellectual Property Rights Request Services. Moreover, Article 35 (3) of Law No.20/2016 on Trademark and Geographical Indications allows the online submission of trademark extension requests, and this has become a milestone for Indonesia in intellectual property rights services in ASEAN.

The services are delivered with a practical method so that both process and procedure conducted can be more efficient and effective in giving satisfying services to customers.

With technology advancement and legal supports, DJKI managed to develop its creativity and innovative ideas, through which it built an E-Renewal or E-Filing System for Trademark Extension. This is a bureaucratic system to request a trademark extension that involves stakeholders as participants in the entry-and-capture data process that can shorten the bureaucracy process and ease the direct monitoring by stakeholders and administration officials.

As part of strategies and processes to design the online trademark extension, DJKI carried out a study on the Intellectual Property Automation System (IPAS) it would develop and coordinated with automation system experts from WIPO. Results of both study and coordination processes were later used as materials in the design process of an online trademark extension application DJKI would implement in Indonesia.

After the designing process of the online trademark extension application, DJKI submitted a request to the Finance Ministry to ease procedures stakeholders must fulfil, so that non-tax revenue (PNBP) payments do not have to be conducted at DJKI offices. Therefore, DJKI partnered with the Finance Ministry, especially its information technology division to develop an online PNBP payment system.

Not only cooperating with the Finance Ministry, DJKI also coordinated with officials at the Trademark Directorate and all parties in the directorate on the application of digital signature, which can give document receivers or stakeholders a guarantee on the authenticity of documents. So, it will not be easy to modify all signed files or documents in computers.

di WIPO (World Intellectual Property Organization) untuk diterapkan di Indonesia. Hasil dari materi kemudian digunakan sebagai bahan untuk perancangan maupun desain aplikasi perpanjangan merek online.

Setelah proses perancangan aplikasi perpanjangan merek online dibuat selanjutnya dilakukan proses pembayaran pengajuan permohonan untuk memudahkan stakeholder sehingga pembayaran PNBP dalam pengajuan permohonan perpanjangan tidak perlu dilakukan di kantor DJKI. Oleh karena itu, dilakukan kerja sama dengan kemenkeu terutama bidang IT untuk pembayaran PNBP secara online.

Tak hanya melakukan kerja sama dengan pihak Kementerian Keuangan, koordinasi lain dilakukan dengan pihak Direktur Merek dan jajaran di lingkungan Direktur Merek mengenai tanda tangan secara digital dalam memberikan jaminan dan meyakinkan penerima dokumen/stakeholder tentang keaslian dokumen. Sehingga file atau dokumen pada komputer tidak mudah dimodifikasi setelah ditandatangani.

Langkah persiapan dan proses mekanisme pelaksanaan pembuatan e-filing perpanjangan adalah sebagai berikut. Penerbitan SK DJKI tentang Tim Pengembangan E-Filing. Mengadakan rapat koordinasi, konsultasi, dan transfer knowledge dengan pakar/pelaksana pembuatan/pengembang aplikasi. Melakukan inventarisasi kebutuhan pembuatan aplikasi dari segi SDM, bisnis manajemen maupun infrastruktur. Melaksanakan proses perancangan sistem sesuai peraturan yang berlaku. Melakukan koordinasi dengan kemenkeu untuk integrasi pembayaran PNBP secara online yaitu dengan sistem SIMPONI dengan teknik IPSEC untuk memperoleh Kode Billing. Dan pada tahun 2016, pengembangan koneksi jaringan dengan SIMPONI menggunakan jaringan Lease line antara Kemenkeu dan DJKI. Kemudian melakukan koordinasi dengan Lemsaneg (Lembaga Sandi Negara) untuk digital signature dalam Pemanfaatan algoritma RSA Digital Signature yang dapat memberikan jaminan otentikasi pengirim dan penerima dokumen digital yang didistribusikan.

Preparation processes and mechanisms in the creation of the E-Filing System for Trademark Extension comprise: First, issuing a DJKI decree on the establishment of an E-Filing Development team; Second, holding coordination, consultation and transfer of knowledge meetings with experts and builders or developers of the application; Third, inventorying all needs related to human resources, business management and infrastructure DJKI would used to develop the application; Fourth, carrying a system designing process in line with existing regulations; Fifth, coordinating with the Finance Ministry to integrate the online non-tax revenue (PNBP) payment by using a SIMPONI system with an IPSEC technique to obtain Billing codes; Sixth, in 2016, developing a network connection with SIMPONI by using a lease line between the Finance Ministry and DJKI; Seventh, coordinating with the National Encryption Agency (Lemsaneg) to get a digital signature for the use of RSA Digital Signature Algorithm that can give authentication guarantees of both senders and beneficiaries of distributed digital documents.



BPKB DELIVERY

Kepolisian Resor Brebes
Kepolisian Negara Republik Indonesia

- 1 Memberikan pelayanan yang optimal kepada seluruh masyarakat merupakan impian dari setiap instansi pemerintah, termasuk Polri. Penerbitan BPKB merupakan salah satu pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Polri. Namun, dalam prosesnya terdapat beberapa masalah, seperti adanya kesulitan bagi para pemohon BPKB baik yang diajukan oleh pihak dealer maupun perseorangan untuk memperoleh BPKB yang telah diproses yang mengakibatkan penumpukan BPKB. Kendala ini disebabkan oleh kondisi geografis dan demografis Kabupaten Brebes yang terdiri atas pegunungan, perbukitan, wilayah pantai, dan dataran rendah. Kondisi ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi para pemohon untuk memperoleh BPKB.

Hal inilah yang mendorong Polres Brebes untuk mewujudkan BPKB Delivery. Inovasi yang tak lepas dari kontribusi beberapa pihak untuk menginisiasi, merealisasikan, mendukung, memberikan arahan dan masukan bagi terlaksananya inovasi pelayanan publik BPKB Delivery. Para pihak tersebut di antaranya Kapolres Brebes, pemohon BPKB, para pemimpin dealer di Kabupaten Brebes dan Tegal serta para pimpinan perusahaan/yayasan di Kabupaten Brebes. Inovasi ini merupakan langkah utama dalam menghadapi kendala yang ada. Proses pengantaran langsung BPKB yang telah terbit kepada dealer/pemohon dapat mengurangi jumlah BPKB yang menumpuk secara signifikan.

Dengan adanya proses pengantaran langsung BPKB kepada konsumen mampu mempercepat proses penerimaan BPKB. Awalnya para pemohon akan memperoleh BPKB mereka dalam kurun waktu 7-12 bulan, setelah diterapkannya inovasi ini terjadi pemangkasan waktu yakni hanya tiga pekan hingga 1,5 bulan. Program yang sukses dilaksanakan untuk pertama kalinya pada tahun 2011 dan mendapat dukungan dari dealer-dealer yang berada di wilayah Brebes dan Tegal ini pun dapat berjalan lancar dengan adanya dukungan komunikasi yang intens antar petugas BPKB Delivery di lapangan dengan dealer/pemohon BPKB. Melalui komunikasi yang terus dibangun, target indikator yang ada dapat dengan mudah terselesaikan.

BPKB DELIVERY

08

*Brebes Resort Police
The Indonesian National Police*

- Giving an optimal service to all societal elements is the ultimate goal of all government institutions, including the National Police (Polri). The issuance of vehicle ownership documents (BPKB) is one of public services provided by Polri. Some problems, including geographical challenges, have hampered the BPKB issuance process, however. Many BPKB applicants either those who were assigned by dealers or those who submit the requests individually found difficulties to take BPKBs that had been issued by the Brebes Police due to geographical conditions in the regency. This resulted in the piling up of BPKBs at the police office. Geographically, Brebes consists of mountains, the range of hills, coastal areas and lowland. This condition poses a challenge to BPKB applicants to take their BPKBs.

This was what had pushed the Brebes Police to initiate the so-called BPKB Delivery program. This innovation cannot be separated from contributions of several parties, which have initiated, realized, supported, directed and given inputs for the successful implementation of the BPKB Delivery public service innovation. Those parties include the Brebes Police chief, BPKB applicants, heads of motor dealers in Brebes and Tegal and heads of companies and foundations in Brebes. BPKB Delivery was the first step the Brebes Police had taken to tackle existing BPKB-related problems. The direct delivery of BPKBs to dealers or applicants has managed to reduce the number of vehicle documents piling up at the police office. The direct delivery process of BPKBs to consumers can expedite the acceptance process of the documents.

Previously, applicants will receive their BPKBs within 7-12 months. After the implementation of the innovation, the delivery process can be shortened to only between three weeks to 1.5 months. The program, which was first successfully implemented in 2011 and received supports from dealers in Brebes and Tegal, can run smoothly with supports of intensive communication BPKB Delivery officials in the field and applicants and dealers have continued to build. Through the continuously improved communication, indicator targets can be more easily achieved.



Demi kelancaran program BPKB Delivery, pihak Polres Brebes memanfaatkan segala sumber daya yang ada untuk memaksimalkan kinerja program. Dalam hal kemudahan pengantaran BPKB, proses ini didukung dengan tersedianya kendaraan khusus untuk program BPKB Delivery. Dari segi dukungan keuangan, telah disiapkan dana khusus untuk biaya BBM kendaraan dari FORKAD (Forum Komunikasi Antar-Dealer). Sedangkan para petugas pelaksana program BPKB Delivery terdiri atas personel Satlantas Polres Brebes yang diberikan tugas tambahan selain tugas harian berdasarkan Surat Perintah Kapolres Brebes. Inovasi BPKB Delivery Satlantas Polres Brebes dilaksanakan setiap pekan sekali oleh personel Satlantas.

Setelah berjalannya program BPKB Delivery, dampak positif sudah mulai dirasakan oleh Polres Brebes. Selain mendapatkan banyak apresiasi yang positif dari masyarakat dengan terbitnya berita mengenai BPKB Delivery di beberapa media cetak dan media elektronik, lokal maupun nasional, program ini mendapat penambahan jumlah pemohon BPKB melalui layanan BPKB Delivery.

Tak hanya itu, jangka waktu penerbitan BPKB pun semakin cepat dan tidak ada lagi penumpukan BPKB di Polres Brebes. Manfaat lainnya yang dirasakan setelah penerapan inovasi layanan BPKB Delivery yakni keamanan BPKB lebih terjamin, menghindari penyalahgunaan BPKB, kinerja petugas BPKB meningkat, dan terciptanya kelancaran komunikasi antara petugas BPKB dengan pemohon.

Pemantauan dan analisis kemajuan serta perkembangan program BPKB Delivery

For the smooth implementation of the BPKB Delivery program, the Brebes Police have striven to optimize the use of resources they have to optimize the program's works. To ease their works in delivering the BPKBs, the Brebes Police have readied several vehicles to support the program. Meanwhile, the Dealers Communication Forum (FORKAD) has allocated special funds to cover fuel costs of the vehicles. The implementing officials of the BPKB Delivery program are personnel of the Brebes Police's traffic division (Satlantas). They are given additional tasks as BPKB Delivery officials based on an order letter signed by the Brebes Police chief. The Satlantas personnel carry out their BPKB Delivery tasks once a week.

Shortly after the BPKB Delivery program was implemented, the Brebes Police began to feel its positive impacts. Brebes residents conveyed their appreciations on the BPKB Delivery program, which was widely published by electronic and printed media companies both at local and national levels. With the media publications, the number of BPKB applicants via the BPKB Delivery service has continued to increase.

The program has not only fastened the BPKB issuance but also avoided the piling up of the vehicle documents at the Brebes Police. With the innovative service, the safety of BPKBs is more guaranteed, in which possible misuses of the documents can be prevented. The program allows the BPKB officials to improve their work performances. It also smoothens the communication between the officials and the applicants.

The Brebes Police have routinely monitored and analyzed the progress and development of the BPKB Delivery program. Several stages have been composed to monitor the program's work performances. These include analysis and evaluation activities conducted every month and once in three months. In the monitoring and evaluation program, the Brebes Police's BPKB division checks their target achievements.

Based on the targets, the Brebes Police compile a check list, which contains steps they need to take to achieve the targets. As a form of monitoring on the results of the BPKB Delivery program's works, the police have prepared a work result recapitulation book they use as a work control and monitoring tool. Along with the current communication technology development, every society member can easily convey their opinion on the implementation of the BPKB Delivery service via their social media accounts. The BPKB officials will routinely monitor people's assessments on the program via social media.

With ongoing improvement processes, the implementation of the BPKB Delivery

dilakukan secara berkala oleh Polres Brebes. Beberapa tahap telah disusun untuk memonitor kinerja program di antaranya analisis dan evaluasi kinerja bulanan yang dilaksanakan setiap satu bulan sekali dan setiap tiga bulan sekali dilaksanakan pengecekan oleh Baur BPKB tentang pencapaian target.

Dengan adanya target maka disusunlah ceklis yang berisi langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai target. Dan sebagai bentuk pemantauan hasil pekerjaan dalam BPKB Delivery, disusunlah Buku Rekapitulasi Hasil Kerja yang digunakan sebagai kontrol dan pemantauan hasil kerja. Selain itu, seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi saat ini, setiap masyarakat dapat dengan mudah mengutarakan pendapatnya mengenai perkembangan layanan BPKB Delivery melalui akun media sosial masing-masing dan petugas BPKB secara berkala memantau penilaian masyarakat atas pelayanan BPKB melalui media sosial.

Masih terus berproses, tentu saja program BPKB Delivery tidak terlepas dari beberapa kendala yang timbul. Kendala yang sering dihadapi oleh para petugas BPKB Delivery adalah jauhnya jarak para pemohon. Karena itu, proses pengantaran BPKB hanya dapat dilakukan setiap satu bulan sekali. Selain itu, terdapat pula permasalahan yang berkaitan dengan sulitnya komunikasi pihak pemohon mengenai penerbitan BPKB. Untuk mengatasinya, pada triwulan kedua tahun 2016 disediakan nomor hotline khusus untuk menerima aduan BPKB.

Sejak program ini mulai berjalan pada tahun 2011 oleh Polres Brebes, inovasi ini telah direplikasi oleh banyak Polres lainnya di Indonesia. Salah satunya dari Polres yang berada di sekitar wilayah Brebes seperti Polres Tegal Kota dan Polres Tegal. Program ini sangat mudah untuk direplikasi dan dilaksanakan di berbagai daerah lain.

Begitu banyak pembelajaran yang dapat diperoleh dengan adanya program Delivery BPKB. Berbagai saran dan masukan diterima oleh para petugas BPKB yang kemudian dapat disampaikan pada analisis dan evaluasi kinerja untuk memperbaiki dan menyempurnakan kinerja program BPKB Delivery. Tetapi, masih terdapat kekurangan dalam program ini yakni belum adanya dukungan anggaran dinas dalam pelaksanaannya. Dengan anggaran didukung langsung dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran), kinerja pelayanan BPKB Delivery akan menjadi lebih meningkat secara terukur sesuai target yang telah ditentukan, termasuk kelengkapan sarana dan prasarana pendukung yang tentu saja akan lebih baik.

still cannot be separated from several obstacles. One of most common problems facing BPKB Delivery officials is the distance between the Brebes Police and the houses or offices of the applicants. That is why BPKB officials can deliver completed documents to the applicants only once in one month. The distance-related problems have also made it difficult to BPKB officials to communicate the document issuance process with the applicants. To tackle the problem, in the second quarter of 2016, the Brebes Police opened a hotline to receive public complaints on the BPKB issuance.

Initiated by the Brebes Police in 2011, BPKB Delivery has been replicated by police precincts (Polres) in other areas across Indonesia, two of them are police precincts in Tegal city and Tegal regency. This innovation is very simple to be replicated and applicable for other areas across the country.

Many lessons have been obtained from the BPKB Delivery program. BPKB officers received various suggestions and inputs they later conveyed in their work evaluation and analysis to improve and complete the works of the BPKB Delivery program. The absence of official budgets has posed an obstacle, which still hampers the implementation of the program. With financial supports from the budget allocation list (DIPA), the BPKB Delivery's works may improve further, along with expected targets. The program may get better supporting facilities with the budgetary allocations.



BANG ELIS HADIR, KAMPUNG KAMI JADI TERANG (PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MATAHARI DI DAERAH PEDALAMAN KALBAR)

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

- 1 Provinsi Kalimantan Barat masih mengalami defisit listrik. Hingga Maret 2016, baru memiliki pembangkit listrik dengan kapasitas terpasang 582 megawatt (MW). Kapasitas ini belum mencukupi kebutuhan listrik ketika beban puncak yang mencapai 484 MW. Kondisi ini menyebabkan rasio elektrifikasi baru mencapai 79,7 %, masih di bawah angka rata-rata nasional sebesar 84,12 %. Pembangunan pembangkit listrik masih terkendala minimnya infrastruktur jalan dan kelistrikan, jarak tempuh yang jauh dari pusat pemerintahan. Guna mengatasi persoalan ini, Pemprov Kalimantan Barat menghadirkan inovasi yang dinamakan "Bang Elis Hadir, kampung kami jadi terang" (pembANGkit Energi LIStrik tenaga mataHARI DI daeRAh pedalaman Kalimantan Barat).

Pembangunan PLTS dimulai dengan koordinasi kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Landak. Pemerintah setempat mendukung rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat. Selanjutnya, tim survei berkoordinasi dengan Kepala Dusun Sebau Amel, Desa Bengkawe. Hasil koordinasi dan survei disepakati lokasi pusat pembangkit beserta area penyangga modul pada sebidang tanah berukuran 25 x 25 m² hasil hibah seorang warga dusun Sebau Amel. Selain itu disepakati, calon konsumen yang akan mendapatkan aliran listrik PLTS sebanyak 97 pelanggan yang terdiri atas 91 rumah, 4 gereja, 1 sekolah, 1 gedung serbaguna. PLTS terpusat (komunal) menghasilkan listrik dengan kapasitas sebesar 18 kilo watt peak (kWp)

Pembangunan PLTS ini melibatkan banyak pihak, mulai dari Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Prov. Kalbar, Pemkab Dinas Pertambangan dan Energi. Selain itu, perangkat desa dan pemuka masyarakat setempat dan organisasi masyarakat juga diajak berdiskusi dan diberikan pemahaman mengenai manfaat pembangunan PLTS.

Sumber daya finansial yang dibutuhkan terutama untuk membangun PLTS dan pelatihan teknis untuk operator serta pemeliharaan sistem bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Barat yang ada pada Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Barat.

BANG ELIS HADIR, OUR VILLAGE BECOMES BRIGHT (SOLAR POWER STATION IN THE COUNTRYSIDE OF WEST KALIMANTAN

09

*The Energy and Mineral Resources Agency,
West Kalimantan administration Province*

West Kalimantan is one of Indonesian's provinces, which have continued to experience an electricity deficit. As of March, the installed capacity of its power plants has reached only 582 Megawatts (MW). Such a capacity is not adequate to fulfill electricity needs in the province during its peak power use, which amounts to 484 MW. With the condition, the electrification ratio in West Kalimantan now stands at 79.7 percent, or below the average national rate of 84.12 percent. Poor road infrastructure and electricity access, as well as quite a far distance between several areas and government centers, have hampered the development of power plants in the province. To tackle the problem, the West Kalimantan administration has created an innovation called "Bang Elis hadir, kampung kami jadi terang (As Bang Elis comes, our kampong becomes so bright)". Bang Elis is an abbreviation of a message, which reads "PemBANGkit Energi LIStrik tenaga mataHARI DI daeRah pedalaman Kalimantan Barat (A solar-power plant for remote areas in West Kalimantan)".

The development of the communal solar power plant (PLTS) in Landak started with coordination between the regency administration's Mining and Energy Agency and related stakeholders. The Landak administration gave its full support to the PLTS construction plan. A survey team later coordinated with the head of Kampong Sebau Amel in Bengkawe village. During the survey and coordination activities, they agreed to build a power plant and its buffer module area on 625 square meters of plot of land granted by a Sebau Amel resident. They also agreed 97 consumers would get electricity supplied by the PLTS. They comprise 91 houses, four churches, one school, and one multifunction building. The PLTS can produce electricity with a capacity of 18 kilowatt peak (kWp).

The development of the PLTS involved many parties, including the West Kalimantan governor and deputy governor, the provincial administration regional secretary, the West Kalimantan Energy and Mineral Resources Agency, and the Landak Mining and Energy Agency. Village officials and local leaders and organizations have also been involved in discussions on the construction of the PLTS and supplied with

Untuk pembangunan PLTS Sebau Amel, dana yang digunakan sebesar Rp2.4 miliar, sedangkan untuk PLTS Terpusat PLTS yang dibangun di Desa Rantau Prapat, Kapuas Hulu sebesar Rp 1,7 miliar. Komitmen dari unsur pimpinan sangat berpengaruh terhadap pengembangan PLTS di Kalimantan Barat

Pembangunan (PLTS) terpusat menghasilkan *power hous* beserta area penyangga modul (array) instalasi PLTS Terpusat yang menghasilkan daya sebesar 18 kWp., terdiri atas instalasi panel surya, instalasi inverter dan aki, sistem kontrol dan pengkabelan yang mengintegrasikan antara panel surya dengan inverter, aki dan beban di lokasi pembangkit. Selain itu, juga dibangun ruang operator, yaitu bangunan khusus untuk menyimpan baterai dan peralatan lainnya serta ruang bagi operator dan teknisi yang memantau operasional PLTS. PLTS ini menjadi sumber penerangan fasilitas umum seperti rumah ibadah, sekolah, gedung serbaguna. Selain itu juga digunakan untuk penerangan jalan desa.

Setelah PLTS selesai dibangun, dilakukan uji coba ke setiap rumah yang dialiri listrik uji beban puncak pada penampung baterai yang telah terinstalasi. Masyarakat setempat dilibatkan dalam pemantauan dan pemeliharaan PLTS melalui wadah yang dinamai organisasi masyarakat setempat (OMS). OMS terdiri atas operator dan teknisi yang mendapat pelatihan oleh dinas ESDM Provinsi Kalimantan Barat yang nantinya bertanggung jawab terhadap pemeliharaan PLTS.

Ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam proses pembangunan PLTS Terpusat, antara lain banjir berkepanjangan, kondisi jalan yang rusak sangat menyulitkan proses pembangunan. Permasalahan ini diatasi dengan membawa peralatan pembangunan PLTS menggunakan kendaraan yang dapat melintasi medan jalan yang berat serta melibatkan masyarakat setempat.

Selain itu dari sisi sosial, ada sebagian kecil masyarakat yang menolak pembangunan, selain karena kurang familiar dengan tenaga surya, juga menginginkan daya yang diberikan lebih besar sehingga dapat menghidupkan peralatan elektronik seperti kulkas, dan mesin. Tim bersama perangkat desa dan pemuka masyarakat memberikan pemahaman bahwa teknologi tenaga surya ini relatif aman dan ramah lingkungan.

Masyarakat juga sempat keberatan harus membayar iuran, hal ini diatasi dengan musyawarah untuk menentukan besarnya iuran per bulan. Hasil pertemuan disepakati iuran yang perbulan adalah sebesar Rp 30 s.d. 50 ribu. Nominal iuran ini sebenarnya relatif kecil dibandingkan pengeluaran untuk membeli BBM

information on the benefits of the project.

Financial sources to cover the construction of the PLTS construction, technical training activities for operators, and system maintenance are from the West Kalimantan administration's budget allocated for the province's Energy and Mineral Resources Agency. The construction of the PLTS Sebau Amel costs around Rp 2.4 billion (US\$179,600.40) while for the communal PLTS in Rantau Prapat, Kapuas Hulu, the administration spent Rp 1.7 billion.

Commitments from all leadership elements were influential to the development of PLTS in West Kalimantan. The PLTS construction project has resulted in a power house and its buffer module area that can supply electricity with a capacity of 18 kWp. These comprise a solar panel installation, an inverter and storage battery installation, a control and cable system, which integrates the solar panel with the inverter, storage battery and electricity burden in the power house. An operator room was also built in the project. The special building is used to store batteries and other equipment. It also becomes a working room for operators and technicians to monitor PLTS operational activities. The PLTS becomes the lighting source of public facilities, such as houses of worship, schools, and multifunction buildings. The PLTS is also used to illuminate village roads.

After the PLTS construction was completed, authorities conducted a peak burden test on batteries installed in each house. Local people are involved in the monitoring and maintenance of the PLTS through a local community organization (OMS), which comprises operators and technicians that have got trainings from the West Kalimantan Energy and Mineral Resources Agency and will be responsible in the maintenance of the PLTS.

Several challenges, such as prolonged flooding and poor road conditions, hampered the construction process of the communal PLTS. To tackle the problem, workers carried PLTS construction equipment using vehicles specially designed for terrible road conditions. They also involved local people in the construction activities.

Some parts of the society rejected the PLTS construction plan. Not only because they had poor understanding on solar power plants, they also wanted power plants with a larger electricity capacity so they could operate refrigerators or iceboxes and other electric equipment at their houses. To tackle the problem, the PLTS construction team together with village officials and local leaders approached all community members, giving them understanding that the solar power plant technology is relatively safe and environmentally friendly.

untuk menyalakan lampu petromak maupun genset yang setiap bulannya berkisar Rp 100-200 ribu.

Sebelum adanya PLTS, desa-desa di pedalaman yang tidak terjangkau oleh aliran listrik PLN sama sekali tidak terdapat sumber listrik. Masyarakat sulit melakukan aktivitas sehari-hari saat malam, sulit melakukan komunikasi dengan pihak luar, proses belajar mengajar yang terhambat. Setelah adanya PLTS, geliat kehidupan pun mulai terasa. Masyarakat mulai dapat melakukan berbagai aktivitas yang menggunakan peralatan listrik. Siswa juga dapat belajar di malam hari karena telah ada penerangan lampu, jalan juga tidak gelap gulita lagi karena telah ada penerangan jalan umum.

PLTS merupakan salah satu jawaban dari permasalahan listrik masyarakat di daerah pedalaman karena pembangunannya dapat dilakukan tanpa harus menunggu aliran atau infrastruktur listrik dari PLN. Inovasi pelayanan publik ini juga bagian dari usaha diversifikasi energi sebagai solusi untuk menghadapi permasalahan krisis energi. Pemprov Kalimantan Barat terus melakukan pembangunan PLTS ini di daerah pedalaman yang belum terjamah aliran listrik. Sudah 19 lokasi yang telah dibangun PLTS. Pembangunan PLTS ini juga sudah berulang kali direplikasi pada daerah-daerah pedalaman dan akan terus dilakukan pada daerah-daerah lainnya mengingat masih banyak desa yang belum tersentuh listrik.

Some residents also once conveyed their objections to a regulation, which required them to pay electricity fees. To solve the problem, the team initiated a meeting to discuss the reasonable amount of electricity fees people should pay per month. It was agreed in the meeting that the monthly electricity fee was in between Rp 30,000 to Rp 50,000. Such amount of fee is relatively smaller. Previously, residents must spend in between Rp 100,000 to Rp 200,000 per month to buy fuel for their petromax (kerosene pressure lantern) or genset.

Before the PLTS was established, remote villages, which were not covered by PLN electricity networks, had no electricity sources at all. It was difficult for people in the villages to carry out daily activities in the evening. They could barely communicate with people outside their villages. Teaching and learning activities were also hampered. With the PLTS, people now can carry out various activities, which require the use of electronic devices. School students can study in the evening because of lamp lighting at their houses. Village roads are no longer dark because of street illumination that is available now.

The communal PLTS is one of responses of electricity problems faced by people in remote areas across West Kalimantan. This is because its construction of a PLTS can be conducted without having to wait for the presence of electricity infrastructure from state utility firm PLN. This public service innovation is also part of energy diversification efforts as a solution to the current energy crisis problems. The West Kalimantan administration has continued to build PLTS in remote areas, which have not yet been electrified. As of today, solar power plants have been built in 19 locations. The PLTS construction in Landak regency has been replicated in other remote areas and will continue to be expanded because many villages have not yet been electrified.



KADER PEDULI LUKA DAN PERAWATAN LUKA DIABET PUSKESMAS KECAMATAN PASAR REBO

Dinas Kesehatan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

- 1 Indonesia merupakan negara urutan ke-7 di dunia dengan kasus diabetes tertinggi. Sebanyak 15% pasien di Indonesia mengalami luka dan 24%-nya diamputasi. Angka kematian luka diabetes berkisar 23% dan 30% pasien pascaamputasi memiliki rerata umur 23,8 bulan. Salah satu persoalan adalah, penanganan luka diabetes yang masih konvensional. Penggantian balutan sehari dua kali. Cara ini selain menimbulkan nyeri hebat juga pemborosan biaya serta memperparah luka. Masalah lainnya, belum tersedia poli perawatan luka diabetes yang terjangkau baik biaya maupun akses, masih banyaknya penderita luka diabetes yang tidak ditangani karena memilih dirawat di rumah.

Tim GKM Orchid Puskesmas Pasar Rebo membuat inovasi yang dinamai Kader Peduli luka dan Perawatan Luka diabetes puskesmas Kecamatan Pasar Rebo. Puskesmas Pasar Rebo menjadi pioner dan satu satunya di Indonesia yang memiliki poli perawatan luka diabetes yang menggunakan metode modern. Inovasi ini dikategorikan kreatif karena melibatkan masyarakat yang dilatih menjadi Kader Peduli Luka untuk menemukan kasus luka diabetes yang belum terdeteksi.

Inovasi ini melalui beberapa tahapan, mulai identifikasi masalah, membuat rencana kegiatan, koordinasi dengan Top manajemen, dan membuat SOP perawatan luka berdasarkan buku pedoman *Wound Care Management dan Best Guidline Diabetic Foot Ulcer, 2013*, sosialisasi dan *Inhouse Training* perawat, dokter dan bidan. Monitoring dan evaluasi SOP setiap bulan melalui daftar tilik kepatuhan, pembinaan petugas kesehatan untuk melaksanakan perawatan dan kunjungan rumah pasien, dan pelatihan warga menjadi kader.

Inovasi ini berjalan berkat dukungan dari pemangku kebijakan, mulai Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Suku Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Puskesmas Kecamatan, Camat, dan kader.

Pembiayaan operasional inovasi ini murni bersumber dari BLUD Puskesmas

CADRE OF CARE ABOUT INJURIES AND TREATMENT OF DIABET PASAR REBO DISTRICT PUBLIC HEALTH CENTER

10

Agency of Health
Special Region of Jakarta Province

Indonesia ranks 7th of the world's countries with the highest number of diabetes cases. In Indonesia, 15 percent of diabetic patients suffer terrible wounds and 24 percent of them have resulted in amputation. The mortality rate of diabetic foot ulcers now stands at around 23 percent. Around 30 percent of patients undergoing amputation have the average age of only 23.8 months. One of major problems that lead to such a high mortality rate of diabetic foot ulcers is the diabetic wound treatment that is still conducted in conventional ways. Wound dressing change is conducted twice daily. This will not only lead to high wound care costs but also can cause severe pain and worsen the wounds. The absence of diabetic wound care clinics, which are affordable and accessible, has hampered efforts to prevent amputation and deaths from diabetic foot ulcers. Many patients with diabetic wounds are not treated well because they choose to get wound healing care at home.

To tackle such a condition, the GKM Orchid team from the Pasar Rebo community health center (Puskesmas) has developed an innovation called "Kader Peduli luka dan PErawatan LUKa diabet Puskesmas KEcamatan pasar reBO (Diabetic Wound and Wound Healing-Care Cadres from Puskesmas Pasar Rebo)". With this innovation, Puskesmas Pasar Rebo becomes a pioneer, one and the only Puskesmas in Indonesia that has a diabetic wound care polyclinic, which uses a modern method. This innovation has been categorized creative because it involves community members who will be trained to become "Kader Peduli Luka" (wound-care cadres) to find people with undetected diabetic wound cases in the society.

"Kader Peduli Luka" has passed several stages, starting from problem identification, activity planning, coordination with top management members, and the development of a wound treatment standard operating procedure (SOP) based on two handbooks titled "Wound Care Management" and "Best Guideline Diabetic Foot Ulcer (2013)"; innovation introduction activities; and In-House Training programs from nurses, doctors and midwives. SOP monitoring and evaluation activities have been conducted every month based on adherence lists and during

Kecamatan Pasar Rebo. Total biaya sebesar Rp99,6 juta. Selain itu, inovasi ini juga melibatkan perawat, dokter, bidan dan petugas kesehatan masyarakat yang telah mengikuti pelatihan.

Pelaksanaan inovasi ini menghasilkan lima keluaran. *Pertama* standar perawatan luka diabet. *Kedua*, berdirinya poli perawatan luka. *Ketiga*, angka kesembuhan naik sebesar 93-97% sejak inovasi ini dijalankan 2015. *Keempat*, biaya perawatan dengan inovasi ini empat kali lebih murah ketimbang perawatan konvensional. *Kelima*, terbentuknya kader peduli luka diabet sebagai wujud partisipasi masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, inovasi menghadapi beberapa kendala. Di antaranya, terbatasnya sarana dan prasarana. Hal ini diatasi dengan penggunaan poli tindakan bersama dengan poli perawatan luka dan kunjungan rumah. Banyaknya pasien yang memiliki keterbatasan kondisi fisik dan ekonomi. Hal ini diatasi dengan melakukan perawatan di rumah pasien. Dan yang tak kalah penting, mengubah pola pikir masyarakat agar mau mengikuti rangkaian perawatan. Selain itu dibentuk Kader Perduli Luka (KPK) untuk memantau dan melaporkan masyarakat yang memiliki luka diabet.

Persoalan lainnya, belum optimalnya kegiatan replikasi. Masih ada petugas Puskesmas Kelurahan yang belum maksimal dengan alasan keterbatasan tenaga dan waktu. Hal ini diatasi dengan melakukan kunjungan ke rumah pasien.

Inovasi pelayanan publik ini membuat pasien lebih nyaman dibandingkan metode konvensional. Rasa sakit lebih minimal dan biaya lebih sedikit. Selain itu akses pasien untuk mendapatkan perawatan lebih mudah. Pun pasien dengan keterbatasan fisik dan ekonomi dapat menikmati perawatan gratis di rumah. Inovasi ini membuat semakin banyak petugas kesehatan kompeten menangani luka diabet. Inovasi ini juga mengurangi frekuensi kunjungan sehingga menghemat tenaga petugas kesehatan. Jumlah pasien dengan kasus luka diabet yang berobat ke poli perawatan luka diabet meningkat. Pasien dengan luka diabet terhindar dari amputasi. Angka kesembuhan pasien dengan luka diabet juga meningkat.

Sebelum inovasi ini dijalankan, pasien merasakan nyeri hebat ketika menggoati perban karena perban kering dan menempel pada luka. Penggantian perban lebih sering membutuhkan biaya. Karena keterbatasan tenaga yang kompeten merawat luka diabet, perawatan pasien luka diabet jarang dilaksanakan. Karena kurangnya pengetahuan, terjadi pembiaran terhadap penderita luka diabet. Hal

the building of health worker capacity to carry out home treatments and visits and the training of community members to become diabetic wound care cadres.

The innovation can run smoothly thanks to supports from stake holders, starting from the Jakarta Health Agency and its head, the Social Affairs Agency, Puskesmas at the district level, district heads and cadres. "Kader Peduli Luka" is fully funded by regional public service fund (BLUD) for Puskesmas Pasar Rebo. It cost Rp 99.6 million (US\$ 7,463.47) in total. This innovation also involves nurses, doctors, midwives and public health officials who have attended trainings.

The innovation has resulted in five outcomes. First, a diabetic wound treatment standard. Second, the establishment of a wound treatment polyclinic. Third, the recovery level of patients with diabetic ulcers has increased by in between 93 to 97 percent since the innovation was implemented in 2015. Fourth, with the innovation, treatments costs four times cheaper than conventional treatment. Fifth, the creation of "Kader Perduli Luka" (Wound-care cadres) as part of people's participation.

In its implementation, the innovation was facing several obstacles, including limited infrastructure and facilities. This problem has been talked through a joint use of general polyclinic and wound treatment polyclinics, which are later strengthened with home visits. Many patients live in limited physical and economic conditions. This must be tackled through the extending of diabetic wound treatment services at home. Last but not least, health workers must change people's mindset and make them more willing to undergo all steps of diabetic ulcer treatment. Community members appointed to become "Kader Perduli Luka (Wound-care Cadres) or KPK" can hopefully continue to monitor and report people with diabetes wounds in their surroundings.

The replication of Kader Perduli Luka has not yet been optimal. Many health workers at Puskesmas in the sub-district level have not yet worked optimally by citing their limited time and energy as an excuse. This can be solved through patient home visits.

This innovative public service has made patients more comfortable than when they received conventional methods. Both pain and treatment costs can be minimized. Patients also can get easier access to wound treatments. Patients with physical and economic limitedness can enjoy treatment at home for free of charge. With this innovation, more health workers are now competent in handling diabetic wounds. This innovation also manages to reduce the frequency of patient visits, allowing health workers to save their energy. The number of patients with diabetic wounds seeking treatment at Puskesmas Pasar Rebo's diabetes wound healing polyclinic

ini menyebabkan luka menjadi lebih parah. Sebelum inovasi, Puskesmas jarang menerima dan memberikan pelayanan terhadap pasien luka diabet.

Setelah inovasi, pasien nyaman karena balutan dalam keadaan lembab sehingga tidak menempel pada luka. Biaya yang dikeluarkan pasien menjadi lebih sedikit. Untuk pasien puskesmas yang rata-rata memiliki Kartu Indonesia Sehat dibebaskan dari biaya. Petugas kesehatan juga melakukan kunjungan rumah untuk pasien-pasien dengan keterbatasan kondisi fisik dan ekonomi. Setelah inovasi ini, petugas yang kompeten merawat luka diabet meningkat. Ada satu orang perawat yang sudah menjalani pelatihan perawatan luka berstandar internasional dan 40 orang petugas kesehatan telah menjalani *in house training*. Dengan metode baru, frekuensi kunjungan semakin sedikit sehingga menghemat waktu dan tenaga petugas. Banyak pasien yang tadinya berobat ke klinik dan rumah sakit beralih ke Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo.

Inovasi ini membuktikan, pelayanan publik yang baik dapat terwujud dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Pelajaran terpenting adalah peran masyarakat dalam menyehatkan masyarakat. Keberhasilan inovasi ini mendorong Dinas Kesehatan DKI Jakarta mereplikasi pelayanan perawatan luka di lima Puskesmas Kelurahan di wilayah Pasar Rebo. Selain itu, untuk memastikan inovasi ini berkelanjutan, dialokasikan anggaran untuk sarana dan prasarana poli perawatan luka diabet pada anggaran BLUD Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo. Peran serta masyarakat juga memberikan jaminan inovasi ini dapat berkelanjutan.

is reported to have continuously increased. Patients with diabetes wounds can be prevented from amputation. The recovery level of patients with diabetic ulcers has also continuously improved.

Before the innovation was implemented, patients often suffered severe pain during wound dressing change because their bandages dried and stick to the wounds. Because of limited health workers competent in diabetic wound treatment, few health care facilities have managed to provide wound healing treatment to their patients. Limited knowledge has led to their negligence towards diabetic ulcer patients that will eventually worsen their wounds. More frequent wound dressing change will lead to higher treatment costs. Before it developed, Puskesmas Pasar Rebo seldom accepted and provided care services to patients with diabetic ulcers.

After the implementation of the innovation, patients feel more comfortable because their bandages continue in moist conditions, preventing them attached to the wounds. This will accelerate the healing process so patients can spend less wound care costs. Puskesmas patients who have Indonesia Health Cards (Kartu Indonesia Sehat/KIS) are released from any treatment costs. Under the innovation, health workers are encouraged to carry out home visits to patients with physical and economic limitedness.

After this innovation, the number of health workers competent in diabetic wound treatment has continued to increase. Puskesmas Pasar Rebo now has one nurse who has attended an international standardized wound care training program while 40 health workers have undergone in-house training activities. With the new method, patients with diabetic wounds have less frequent visits, allowing health workers more time and energy to give more care services. Many patients have now chosen to get a diabetic wound treatment at Puskesmas Pasar Rebo, instead of going to clinics or hospitals.

This innovation has proven that a good public service can be realized by optimizing available resources. The most important lesson from this innovation is the key role of community members in improving the health status of the society. The success of this innovation has pushed the Jakarta Health Agency to replicate wound care services in five sub-district level Puskesmas in Pasar Rebo. To ensure the sustainability of this innovation, the Jakarta Health Agency has allocated budget for infrastructure and facility improvements at diabetic wound care polyclinics on BLUD budgetary allocations of the Puskesmas Pasar Rebo. Active roles of the society have also guaranteed that this innovation can be sustainable.



LAYANAN WARAS (WISATA ARSIP UNTUK ANAK SEKOLAH)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur

- 1 Arsip dan kearsipan diidentikkan dengan hal yang bersifat fisik dan stigma minor lainnya. Arsip hanya dilihat dari sisi fisik, seperti benda mati tanpa makna. Kearsipan diposisikan sebagai urusan non-prioritas oleh pemerintahan daerah. Dampaknya, lembaga kearsipan kurang dikenal masyarakat. Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Provinsi Jawa Timur berupaya mengubah pola pikir masyarakat melalui pengenalan arsip sejak dini kepada pelajar. Pada 2015 LKD Jatim membuat inovasi layanan wisata arsip untuk anak sekolah yang diberi nama "WARAS" (Wisata Arsip untuk Anak-anak Sekolah). Melalui inovasi ini pengenalan arsip dilakukan secara edukatif, inspiratif, dan menyenangkan.

Layanan WARAS dikemas dalam satu paket yang mencakup pameran arsip, penayangan film, kunjungan pengelolaan arsip, tanya jawab masalah kearsipan, dan kunjungan lokasi bersejarah. Inovasi ini pertama kali dan satu-satunya dilakukan LKD di Indonesia. Layanan WARAS menjadi inovatif karena beberapa hal seperti, menggunakan bus wisata dengan sistem antar jemput ke sekolah, banyak destinasi, memakai peraga, jadwal menyesuaikan siswa, melibatkan *stakeholders* sebagai mitra kerja, mengeksplorasi sumber-sumber informasi arsip yang ada di lokasi destinasi,

Inovasi Layanan WARAS dilakukan melalui beberapa tahapan, meliputi perencanaan kebutuhan operasional, mempersiapkan legalitas inovasi layanan, pendataan sekolah, koordinasi dan komunikasi untuk mendapatkan sasaran program yang tepat, termasuk koordinasi dengan *stakeholders* yang memiliki benda dan arsip bersejarah seperti Museum Penerbangan TNI Angkatan Laut, Museum Empu Tantular, Museum Tugu Pahlawan, Museum Kedokteran UNAIR. Selain itu, juga melakukan penentuan destinasi lokasi layanan, serta pengaturan petugas layanan WARAS.

Pelaksanaan inovasi yang menggunakan keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur dapat terealisasi karena melibatkan pemangku kepentingan seperti LKD Kota Surabaya, Dinas Pariwisata Kota Surabaya, UPT Museum Tugu

WARAS SERVICE (ARCHIVE TOUR FOR SCHOOL CHILDREN)

11

Library and Archive Agency
East Java Province

- Archives and archival matters have often been considered identical with things that are only physical in nature. They are also often been associated with other negative stigmas. Often learned from their physical aspects only, archives and archival matters have been perceived as only dead objects that have no meaning at all. All this time, local administrations have often placed archival matters as non-priority issues. As the result, archival institutions have been less popular in the society.

The East Java-chapter Regional Archive Institution (LKD) is striving to change people's mindset on archives by giving school students an introduction to archival matters as soon as possible. In 2015, the LKD East Java initiated an innovative archive tour service called "WARAS", an abbreviation of *Wisata Arsip untuk Anak-anak Sekolah* (An archive tour for school children). Through this innovation, the introduction to archives and archival matters is conducted through educative, inspirational and fun ways.

"WARAS" is composed in a package comprising archive exhibition, movie screening, archive management, historical site visit activities and the opening of channels, through which questions and answers of archival matters can be conducted.

The LKD East Java is the first and only archive agency, which implements such an innovation. WARAS becomes innovative because of some methods it uses to deliver its services. The program, for example, uses tour buses to pick up and return back school children who want to participate in archival learning programs. It offers various archival learning destinations and uses visual aids in the learning activities. WARAS learning activities can be adjusted to students' schedules and involve stakeholders as work partners. Through WARAS, school students can explore archive information sources available in the learning destinations.

The WARAS innovative service is conducted through several stages, starting from planning operational needs, preparing the legality of the service, collecting school data, and enhancing coordination and communication to get precise targets

Pahlawan, UPT Museum Surabaya, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Lembaga Pendidikan, dan Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI),

Keluaran yang paling berhasil dari inovasi layanan WARAS adalah, jumlah pengunjung kearsipan di luar pengguna arsip terus meningkat. Jika 2014, nol pengunjung, tahun 2015 - 2016 menjadi 1.248 pengunjung, jumlah pemangku kepentingan yang bekerjasama juga meningkat dari nol menjadi 7 lembaga, keluaran lainnya adalah empat belas modul panduan informasi destinasi layanan WARAS, dua standar operasional prosedur (SOP) koordinasi layanan WARAS dan SOP pelaksanaan layanan WARAS. Layanan WARAS telah menjadi kegiatan rutin yang dievaluasi setiap bulan, semester dan tahun. Bentuk evaluasi yang dilakukan melalui perekaman data, jajak pendapat, testimoni, dan rapat evaluasi Internal.

Layanan WARAS yang telah berjalan selama dua tahun ini, menghadapi beberapa kendala. Di antaranya ketidakpastian kondisi lalu lintas. Ini mengganggu jadwal layanan, solusi yang dilakukan membuat alternatif destinasi. Perubahan jadwal kunjungan akibat kalender akademik sekolah yang tak dapat diubah, juga menjadi kendala. Untuk menyiasatinya, melakukan komunikasi dan koordinasi intensif minimal satu minggu sebelum jadwal layanan. Kendala lainnya, keterbatasan kemampuan pemandu. Solusinya, membuat modul panduan dan memberikan bimbingan pemandu. Keterbatasan anggaran operasional dan armada bus juga turut menjadi kendala, soal ini, solusi diupayakan dengan memanfaatkan dana CSR pada Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jatim.

Layanan WARAS telah memberikan manfaat. Bagi sekolah dan pelajar, layanan ini menjadi media transfer pengetahuan dan informasi kearsipan maupun sejarah. Kegiatan berkeliling Kota Surabaya, menarik perhatian masyarakat. Dampaknya, permintaan masyarakat untuk ikut kegiatan meningkat, pun kunjungan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.

Penerapan inovasi ini menghasilkan pembelajaran, di antaranya menyadarkan aparatur LKD Provinsi Jatim bahwa pemahaman arsip kearsipan dan sejarah belum menyentuh sekolah dan peserta didik. Inovasi ini memudahkan LKD Provinsi Jatim mendeteksi sejauh mana kehadiran lembaga telah menyentuh masyarakat. Sekaligus bahan untuk mengukur eksistensi dan peran LKD Provinsi Jatim.

Inovasi ini juga menjadi media pembelajaran bagi masyarakat bahwa kehadiran lembaga kearsipan tidak sekadar untuk kepentingan penelitian dan pencarian bukti, tetapi juga menambah wawasan kesejarahan. Untuk mempertahankan



of the program. Another important step is the coordination with stakeholders, which have historical objects and archives, such as the Indonesia Navy's Aviation Museum, Empu Tantular Museum, Tugu Pahlawan Museum, and the Airlangga University's (UNAIR) Medical Museum. Determining service destinations and regulating WARAS service officers are also important steps in the program.

The implementation of WARAS, which is covered by the East Java provincial administration's budget (APBD), can be realized thanks to supports from several stakeholders such as the LKD Surabaya, the Surabaya Tourism Agency, the Tugu Pahlawan Museum's technical managing unit (UPT), the Surabaya Museum UPT, the East Java administration regional secretary's general affairs bureau, education institutions and the Indonesian Archivist Association (AAI).

The most outstanding result of the WARAS innovative service is the number of LKD East Java visitors that has continued to increase. In 2014, the LKD recorded no visitor. In 2015-2016, it received 1,248 visitors. The number of stakeholders it had worked with in that period reached seven institutions, significantly improving from zero in 2014. Other outcomes are 14 modules on WARAS service destination information guidelines, two standard operating procedures (SOP) on WARAS service coordination and an SOP on the implementation of WARAS services. WARAS services have become routine activities evaluated every month, semester and year. Evaluation is conducted through data recording, surveys or pollings, testimony gathering and internal evaluation meetings.

Having been running for two years, WARAS is still facing several obstacles. Among the challenges include traffic uncertainties, which have often disrupted scheduled services and forced the program's administrators to make alternative destinations. Changes in visit schedules caused by unnegotiable academic school calendars



DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI JAWA TIMUR



Inovasi Pelayanan Publik

WARAS

Wisata Arsip Untuk Anak Sekolah

dan menjaga keberlanjutan inovasi, layanan ini dilaksanakan secara kontinyu dengan jadwal tetap setiap hari, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur mengusulkan anggaran operasional melalui APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan meningkatkan kemampuan SDM.

Sementara itu dalam konteks replikasi, layanan WARAS telah disosialisasikan kepada Arsip Nasional RI, lembaga kearsipan kabupaten/kota se-Jatim. Layanan WARAS mudah direplikasi, karena praktis, mudah ditiru dan diaplikasikan. Modifikasi tampilan dan kemasan juga memungkinkan untuk dikembangkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing pelaku kegiatan.

have also become challenges. To tackle the problem, the administrators have to carry out intensive communications and coordination at least one week before the scheduled service. Limited capacity of guides has also poses another obstacle. As a solution, the LKD created modules, which give guidelines to WARAS guides. Limited operational budget and buses have aggravated the problem and the use of corporate social responsibility funds from several East Java provincial administration-owned enterprises (BUMD) has been explored to solve the problem.

WARAS has brought a lot of benefits. For schools and students, this service has become a media for the transfer of knowledge and information on archival matters and history. Its activities in areas across Surabaya have attracted the attention of the city's society. As the result, people's demands to participate in WARAS activities have continued to increase. There has also been an increase in the number of people visiting the East Java Library and Archive Agency.

The implementation of the innovation has resulted in a lesson learned, such as making LKD East Java apparatuses realize that the understanding of archives and archival matters has not yet reached schools and students.

WARAS aims to make it easier for the LKD East Java to detect how far the presence of the institution has reached the people. The innovation also serves as a tool to measure the depth of both existence and roles of the LKD East Java.

WARAS, as an innovation, has also become a learning media for the society that the presence of archive institutions is not only for research and evidence-seeking activities but also to improve their historical outlook. To maintain and protect the sustainability of this innovation, WARAS services are conducted continuously everyday with a fixed daily schedule. The East Java Library and Archive Agency is proposing operational budgets allocated via the East Java APBD and trainings to improve its human resources' skills on archives and archival matters.

WARAS has been introduced to the National Archives of the Republic of Indonesia and archive institutions in regencies and municipalities across East Java. WARAS services are easy to be replicated because they are practical and easy to be implemented. The forms of WARAS services can be modified or developed further in line with the capacity of each implementing actor.



MENCERDASKAN SI MISKIN MENJADI GENERASI EMAS

SMA Negeri Bali Mandara
Pemerintah Provinsi Bali

- 1 Menurut data RJPMD Provinsi Bali 2012, penuntasan wajib belajar 12 tahun menemui beberapa kendala. Terbukti masih terdapat anak putus sekolah pada jenjang SD dan SMP. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemprov Bali menjalankan program bantuan pendidikan penuh di SMA Negeri Bali Mandara. Akses ini khusus diberikan pada peserta didik lulusan SMP/MTs yang berasal dari keluarga miskin namun mempunyai potensi untuk maju.

Layanan pendidikan di SMA Negeri Bali Mandara tidak hanya fokus pada bidang akademik, namun juga mengembangkan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, kepedulian sosial, berpikir kritis, meningkatkan kepedulian terhadap isu lokal dan global, serta biasa hidup bersama dalam perbedaan. Semua peserta didik wajib tinggal di asrama. Inovasi ini memberikan kepastian akses pendidikan berkualitas, kepastian siswa miskin melanjutkan ke pendidikan yang lebih baik, mengurangi angka putus sekolah.

Strategi inovasi ini dilaksanakan melalui empat tahap. Tahap pertama, Kepala Sekolah tingkat SMP/MTs menominasikan sepuluh peserta didik yang berasal dari keluarga miskin. Tahap kedua, kunjungan rumah untuk meyakinkan seluruh pendaftar sudah memasukkan informasi yang benar mengenai keadaan ekonomi keluarga, dan dukungan dari orangtua. Tahap ketiga, para finalis mengikuti serangkaian tes bakat seni, olahraga dan kreativitas; tes kemampuan bahasa Inggris dan matematika; psikologi; penggalan potensi sebagai calon pemimpin; wawancara; dan *Focus Group Discussion* (FGD).

Selama menjalani pendidikan, peserta didik mengikuti kegiatan akademik dan nonakademik. SMA Negeri Bali Mandara memiliki program pengembangan diri yang mampu mengembangkan kreativitas, bakat seni dan olahraga, jiwa kepemimpinan, rasa sosial, rasa kemanusiaan, dan kemampuan kewirausahaan. Selain itu, dilaksanakan beberapa program khusus seperti *transcendental meditation*, *silent reading*, dan *kesamaptaan*.

INTRODUCING THE POOR INTO THE GOLDEN GENERATION

12

Public High School Bali Mandara
Bali Province

- According to data RJPMD of Bali Province 2012 the completion of compulsory education 12 years to meet some obstacles. It has been proven by there are still children drop out of elementary school and junior high school. To overcome these problems, the Bali Provincial Government runs a full education assistance program at SMA Negeri Bali Mandara. This special access is given to junior high school / MTs (Islamic Junior High School) graduate students who come from poor families but have the potential to move forward.

Education services at SMA Negeri Bali Mandara not only focus on the academic field but also develop leadership potential, entrepreneurship, social awareness, critical thinking, raising awareness of local and global issues, and usually living together in differences. All learners are required to stay in dormitories. This innovation provides certainty of access to quality education, the certainty of poor students continuing to a better education, reducing dropout rates.

This innovation strategy is implemented through four stages. In the first phase, Junior High School / MTs principals nominated ten students from poor families. The second stage, home visits to ensure all applicants have entered the correct information about the state of the family economy, and support from parents. In the third stage, the finalists follow a series of artistic talent, exercise and creativity tests; Tests of English and mathematics skills; psychology; Extracting potential as a potential leader; Interview; And Focus Group Discussion (FGD).

During their education, students attend academic and non-academic activities. SMA Negeri Bali Mandara has a self-development program that is able to develop creativity, artistic and sports talent, leadership spirit, social feeling, humanity, and entrepreneurial skills. In addition, several special programs such as transcendental meditation, silent reading, and *kesamaptaan* (discipline) were conducted.

This innovation was born on the initiative of Bali Governor - Made Mangku Pastika supported by Bali provincial parliament. In addition, this innovation also has the



Inovasi ini lahir atas inisiatif Gubernur Bali Made Mangku Pastika yang didukung DPRD provinsi Bali. Selain itu inovasi ini juga mendapat dukungan Yayasan Putra Sampoerna Foundation, masyarakat, dewan pendidikan seluruh Bali, dan akademisi. Inovasi ini dirancang melalui pendekatan partisipatif dan melibatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemprov. Bali, Disdikpora Prov. Bali, Komite Sekolah, Pendidik, dan pihak ketiga yang membuka akses pendidikan, bea siswa, dan tempat magang.

Untuk menyempurnakan inovasi, berbagai sumber daya dimanfaatkan. Mulai dari BOS, pembiayaan untuk sarana prasarana, perabotan, operasional sekolah, menyiapkan tenaga pengawas *out resourcing* baik dari Indonesia maupun luar negeri yang diberdayakan semaksimal mungkin. Beberapa program yang telah dilakukan oleh *out resourcing* dari luar negeri antara lain *sex education*, *management stress*, *English course*, kursus piano, dan melukis.

Setelah 5 tahun berjalan, inovasi ini menunjukkan hasil. Prestasi peserta didik berkembang pesat hingga tingkat internasional. Alumni SMA Negeri Bali Mandara seluruhnya melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau sekolah kedinasan baik di Indonesia maupun di luar negeri seperti Amerika Serikat, Belanda, Inggris, Norwegia, dan India.

Untuk menjaga kualitas, evaluasi program dan kegiatan terus dilakukan. Beberapa jenis sistem pemantauan dan evaluasi juga dikembangkan, seperti evaluasi internal oleh auditor internal, pemantauan rutin oleh pengawas sekolah. Gubernur Bali setiap tiga bulan memantau langsung pelaksanaan inovasi ini dan memberikan motivasi kepada seluruh warga sekolah, khusus bidang keuangan, pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh inspektorat, BPKP, dan

support of Yayasan Putra Sampoerna Foundation, the community, the entire education board of Bali, and academics. This innovation is designed through a participatory approach and involves the Ministry of Education and Culture, Provincial Government of Bali, Disdikpora (Public Education Office) of Province Bali, School Committees, Educators, and third parties who open access to education, scholarships, and internships.

To refine innovation, resources are exploited. It is beginning with BOS (School Operational Cost), financing for infrastructure, furniture, school operations, preparing out-of-resourcing inspectors from both Indonesia and abroad who are empowered to the fullest. Some programs that have been done by out resourcing from abroad include sex education, stress management, English courses, piano courses, and painting

After 5 years running, this innovation shows results. Achievement of learners thrives to international level. Alumni of SMA Negeri Bali Mandara entirely proceed to higher education level or official school both in Indonesia and abroad such as United States, Netherlands, England, Norway, and India.

To maintain the quality, evaluation of programs and activities continue to be done. Several types of monitoring and evaluation systems are also developed, such as internal evaluations by internal auditors, routine monitoring by school superintendents. The Governor of Bali every three months directly monitor the implementation of this innovation and provide motivation to all the citizens of the school, specifically the Office of finance, monitoring and evaluation conducted by the inspectorate, BPKP, and BPK-RI. Supervision is also carried out by communities, NGOs, and the mass media.

During the execution of the program, there are several obstacles encountered. Among the students who come from poor families are very sensitive and the academic ability is not so good. This obstacle is overcome by generating students' confidence through the activities of The Calling, Bonfire, Inauguration, the formation of peer counseling, and General Assembly.

There are some benefits of this innovation, among others, poor students who are absorbed to get quality education, there is a paradigm shift in society that Bali Provincial Government really serious to improve access to education for poor students, there is an increasing level of family economy because parents again thinking about the cost for their children and some parents dare to open a small business thanks to the advice of his son as a result of entrepreneurship activities in schools, there is acculturation and introduction of student culture between

BPK-RI. Pengawasan juga dilakukan oleh masyarakat, LSM, dan media massa.

Selama pelaksanaan program, ada beberapa kendala yang dihadapi. Di antaranya peserta didik yang berasal dari keluarga miskin sangat sensitif dan kemampuan akademiknya tidak begitu baik. Kendala ini diatasi dengan membangkitkan rasa percaya diri peserta didik melalui kegiatan *The Calling*, *Bonfire*, *Inauguration*, pembentukan konseling sebaya, dan *General Assembly*. Ada beberapa manfaat yang diperoleh dari inovasi ini, antara lain, siswa miskin yang terserap untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, terjadi perubahan paradigma pada masyarakat bahwa Pemerintah Provinsi Bali benar-benar serius meningkatkan akses pendidikan bagi siswa miskin, terjadi peningkatan taraf ekonomi keluarga karena orang tua tidak lagi memikirkan biaya untuk anaknya dan beberapa orang tua berani membuka usaha kecil-kecilan berkat saran dari anaknya sebagai akibat adanya kegiatan *entrepreneurship* di sekolah, terjadi akulturasi dan pengenalan budaya siswa antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya sehingga di SMA Negeri Bali Mandara merupakan miniatur keberagaman budaya Bali.

Selain manfaat, penerapan inovasi ini juga menghasilkan pembelajaran yang dapat dipetik. Di antaranya, pengentasan kemiskinan melalui pendidikan ternyata efektif dilakukan melalui pemberian bantuan pendidikan, pembangunan manusia melalui pendidikan mampu mendorong percepatan pembangunan secara menyeluruh, inovasi ini juga mematahkan egosektoral yang selama ini sering menghambat pencapaian sasaran pelaksanaan pendidikan. Melihat keberhasilan inovasi ini sangat efektif, Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen untuk melanjutkan program ini. Selain itu, keberhasilan inovasi ini juga mengundang perhatian beberapa instansi untuk mereplikasi inovasi yang dijalankan SMAN Bali Mandara.



one district with other districts so that in SMA Negeri Bali Mandara is a miniature cultural diversity Bali.

In addition to the benefits, the application of this innovation also produces lessons learned. Among other things, poverty alleviation through education is effectively done through the provision of educational assistance, human development through education is able to encourage the overall development of the acceleration, this innovation also break the sectoral egoism which has often hampered the achievement of the target implementation of education. Seeing the success of this innovation is very effective, the Provincial Government of Bali is committed to continue this program. In addition, the success of this innovation also attracted the attention of several agencies to replicate the innovations run by SMAN Bali Mandara.



MR SAHDU (MANAJEMEN RISIKO SANGGAHAN DAN PENGADUAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH)

UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pemerintah Provinsi Jawa Timur

- 1 Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, terdapat risiko sanggahan dan pengaduan. Namun karena belum tersedianya mekanisme pengaduan, banyak pengaduan yang tidak ditindaklanjuti dengan baik, hal ini menyebabkan ketidakpuasan. Di sisi lain, pengaduan dan sanggahan tertulis dan lisan belum terdokumentasi sehingga tidak bisa melakukan proyeksi berapa banyak sanggahan dan pengaduan yang masuk, serta berapa banyak yang belum ditindaklanjuti. Kondisi tersebut juga menyebabkan ketidakpastian waktu penanganan sanggahan dan pengaduan.

Berangkat dari persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjalankan inovasi yang dinamai MR Sahdu. Inovasi ini memanfaatkan teknologi informasi. Sanggahan dan pengaduan didistribusikan dalam satu hari kerja dan dijawab dengan berpedoman pada perundangan. Strategi penanganan ketidakpuasan menerapkan metode humanis, responsif, dan solutif. MR Sahdu merupakan strategi penanganan sanggahan dan pengaduan pada pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah. Dimulai dari tahap inisiasi pada 2014, tahap pematangan, 2015, tahap pengembangan pada 2016.

Inovasi ini berjalan berkat sinergi para pemangku kepentingan, di antaranya internal UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, eksternal UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, terdiri atas kepala dinas/badan/kantor/sekretariat/ Rumah Sakit, Kuasa Pengguna Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah, Pejabat Pembuat Komitmen pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi, Admin Aplikasi Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, Inspektorat Provinsi, Rekanan/ Penyedia jasa pekerjaan konstruksi, barang, jasa lainnya dan konsultansi, LSM yang bergerak di bidang pengawasan kinerja pemerintah, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kepolisian Daerah Jawa Timur.

Pelaksanaan inovasi ini didukung oleh sumber daya manusia yang terbagi menjadi seksi distribusi dan pengaduan, panitia lelang, Tim ISO 9001 : 2015, Tim ISO 27001 : 2013, Tim Gelar Pra Penetapan Pemenang, dan Tim Pendampingan

MR SAHDU (RISK MANAGEMENT OPPOSE AND COMPLAINT) PROCUREMENT SERVICES OF GOVERNMENT GOODS/SERVICES

*Integrated Service Unit (UPT) of Goods Services Procurement,
Office of Investment and Integrated Services One Door,
East Java Province*

13

Protests and complaints have always existed in the procurement of goods and services. Because of the absence of a complaint mechanism, many complaints cannot be followed up well and this has led to dissatisfaction. At the same time, written and verbal protests and complaints have not yet been documented, hampering efforts to predict how many protests and complaints have been received and how many percent of them have not yet been followed up. This condition has caused uncertainty on time needed to handle protests and complaints.

Based on the problem, the East Java administration developed an innovation called MR Sahdu. This innovation makes use of information technology. In this innovation, protests and complaints are distributed within one working day and responded based on rules and laws. This strategy to handle dissatisfaction implements a humane, responsive and solutive method.

MR Sahdu is a strategy to handle protests and complaints in the procurement of government goods and services. The initiation step of this innovation began in 2014, followed by maturation and development stages in 2015 and 2016 respectively.

This innovation can run thanks to a synergy among stakeholders, comprising the East Java administration's internal and external technical managing units (UPTs) for goods and services procurements. They include heads of agencies, centers, offices, secretariats and hospitals; budget use controllers at the East Java administration's supporting organizations, budget commitment composers at the provincial administration's supporting organizations; administration authorities of goods and services procurement applications; the East Java administration's inspectorate; business partners, suppliers of goods, construction services and other services; consultants; clean government watchdogs (non-government groups); the East Java Prosecutors' Office; and the East Java Police.

The implementation of the innovation has been supported by human resources divided into several divisions, namely distribution and complaints unit, tender

Hukum. Selain itu, juga didukung sumber daya keuangan yang bersumber dari APBD Tahun 2014, 2015 dan 2016.

Berkat dukungan semua pihak, inovasi ini menghasilkan keluaran yang menggembirakan. Hal itu terlihat dengan terwujudnya pelayanan yang humanis. Selain itu, penanganan sengketa dan pengaduan secara terintegrasi dengan melibatkan pihak lain yang berkompeten, tersedianya sarana dan prasarana untuk menyampaikan keluhan, ketidakpuasan, sengketa dan pengaduan melalui teknologi informasi, ada mekanisme gelar prapenetapan pemenang sebelum paket pekerjaan ditetapkan untuk mereview hasil evaluasi panitia lelang dan meminimalisasi terjadinya kesalahan evaluasi; peningkatan kinerja panitia lelang melalui kegiatan pendampingan hukum yang dilaksanakan secara rutin; terbentuknya beberapa tim untuk meminimalisasi dan mengelola sengketa dan pengaduan.

Untuk mengukur kualitas pelaksanaan, evaluasi dilakukan melalui survei kepuasan dari pengguna layanan utama. Hasil survei menunjukkan nilai baik, yaitu antara 3 s.d. 5. Evaluasi juga dilakukan melalui *surveillance* ISO 9001 : 2015 untuk mengaudit setiap unsur pemberi pelayanan publik mematuhi SOP. Tidak cukup itu, juga dilaksanakan *surveillance* ISO 27001: 2013 untuk menjaga standarisasi perangkat teknologi informasi.

Meski usaha terbaik sudah dilakukan, tak urung, inovasi ini menghadapi kendala. Di antaranya, masih ada petugas yang belum melayani sesuai SOP. Kendala lainnya, dokumen pengadaan tak sesuai ketentuan, proses evaluasi tak dilakukan dengan benar serta kecerobohan dalam memberikan pelayanan. Menyikapi soal tersebut, dilakukan pendampingan untuk pengecekan dokumen lelang, melakukan survei harga, dan pengecekan jadwal lelang, kendala lainnya terkait ketidaktahuan mekanisme pengaduan. Persoalan ini diatasi dengan sosialisasi mekanisme pengaduan secara berkala, menyediakan fasilitas pengaduan yang lebih dekat ke pengguna jasa.

Manfaat utama yang dihasilkan dari penerapan MR Sahdu di antaranya meningkatnya kualitas pelayanan pengadaan, pelayanan menggunakan sistem pemantau petugas agar bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi; ada kepastian waktu pemberian pelayanan; tersedianya fasilitas dan pilihan untuk menyampaikan pengaduan. Selain manfaat, inovasi ini juga menghasilkan pembelajaran, seperti komitmen perbaikan pelayanan, terwujudnya manajemen risiko kesalahan dalam pengadaan barang/jasa, adanya upaya meminimalikan risiko terjadinya sengketa dan pengaduan. Melihat dampak positif yang dihasilkan, pemerintah provinsi Jawa Timur bertekad mengembangkan inovasi

organizing committee, ISO 9001 : 2015 team, ISO 27001 : 2013 team, tender's winner determining teams and lawyer teams. The innovations development also supported by financial sources from the East Java Budget (APBD) 2014, 2015 and 2016.

Because of supports from all parties, the innovation managed to produce several positive outcomes, including the creation of more humane services. The handling of protests and complaints has now been integrated and involved other competent parties. With the innovation, infrastructure and facilities are now available for customers to convey their protests, dissatisfaction, and complaints through information technology. The East Java administration has now had a pre-tender winner determining mechanism, which is conducted before it officially announces the winner of project packages. The mechanism is aimed at reviewing evaluation results of tender committees and minimizing evaluation errors. The innovation has improved work performances of tender committees through legal assistance activities held routinely. Several teams have also been established to minimize and manage protests and complaints.

To measure the quality of the innovation implementation, the East Java administration has conducted evaluation through satisfaction surveys to main service users. The surveys have showed good results, scoring in between 3 to 5. The evaluation has also been conducted through ISO 9001 : 2015surveillance to audit every element providing public services and assess on whether they have adhered to SOP. The administration has also conducted ISO 27001: 2013 surveillance to maintain the standardization of information technology equipment.

Despite best effort conducted, the implementation of MR Sahdu is still facing various obstacles. Many officials have not provided services along with standard operating procedures (SOP). Other obstacles are the frequent submission of procurement documents that are not in line with existing regulations, improper evaluation processes and sluggishness in the delivery of services.

Responding the problems, the East Java administration is now providing assistance to its counterparts in checking tender documents, carrying out price surveys, and in checking tender schedules. Poor understanding on complaint mechanism has also posed another obstacle. To solve this problem, the East Java administration has routinely introduced complaint mechanism to stakeholders and provided complaint facilities much closer to service users.

Main benefits resulted from the implementation of MR Sahdu are improved quality of procurement services, the use of a monitoring system in procurement services so

ini. Hal itu diwujudkan melalui dukungan anggaran, meningkatkan sarana prasarana. MR Sahdu merupakan inovasi yang dapat direplikasi oleh instansi pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah.

that officials can work along with its main duties and functions, a more certain time in the delivery of services, and wider facilities and choices available for customers to convey complaints. In addition to benefits, the innovation has also resulted in several lessons, such as on commitments for service improvements, the creation of an error risk management in goods and services procurement activities, and on efforts to minimize protest and complaint risks.

Looking at resulted positive impacts, the East Java administration is committed to developing further this innovation by, among others things, providing financial supports to improve its infrastructure facilities. MR Sahdu is an innovation that can be replicated by other institutions, which handle government goods and services procurements.



PELUK MY DARLING (PERAWATAN LUKA KUSTA MENYELURUH DENGAN GARDEN HEALING)

RSUD Kelet Jepara
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

- 1 Permasalahan perawatan luka kusta tidak hanya faktor penyakitnya saja, tetapi juga yang lebih mengarah pada kondisi psikologis pasien. Pengobatan yang lama, gangguan fungsi tubuh, tidak nyaman akibat luka adalah contoh kondisi yang menurunkan kondisi psikologis pasien. Penelitian RSUD Kelet dengan menggunakan instrument DASS (Depression Anxiety and Stress Scale) 2014 menunjukkan 70% pasien mengalami stres ringan sampai berat. Assesment menggunakan Tes Psikologi 16PF tahun 2015 menunjukkan, sebagian besar pasien belum menerima kondisinya, pesimistis bahkan ada yang berniat bunuh diri.

Unit Rehabilitasi Kusta RSUD Kelet menerapkan program inovasi Peluk My Darling (Perawatan Luka Kusta Menyeluruh dengan Garden Healing). Program ini menerapkan pelayanan kolaboratif antara dokter, perawat, fisioterapi, psikolog, ahli NLP dan vocational training yang dilaksanakan di taman-taman perawatan untuk mencapai pelayanan yang holistik. Dengan konsep ini selain mempercepat penyembuhan luka juga memperbaiki psikologis pasien. Perbaikan aspek biopsikososiospiritual yang optimal diharapkan mampu mengurangi lama rawat pasien, serta meningkatkan kualitas hidup pasien kusta.

Nilai kreatif program "Peluk My Darling" terlihat penerapan prinsip patient centre care, dimana pelayanan kesehatan merupakan hasil kolaborasi antara praktisi kesehatan, pasien dan keluarga. Pelayanan dilaksanakan praktisi kesehatan profesional dengan tetap menghormati keinginan, kebutuhan, pilihan pasien, dan menjamin pasien mendapatkan pengetahuan untuk mengambil keputusan.

Strategi yang diambil dalam pelaksanaan inovasi Peluk My Darling yaitu perawatan luka bersifat holistik menggunakan metode garden healing dan terintegrasi konsep patient centre care. Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan meliputi penyusunan kebijakan Direktur RSUD Kelet dan

PELUK MY DARLING (WHOLE LEPROSY TREATMENT WITH GARDEN HEALING)

14

Regional General Hospital Kelet Jepara
Central Java Province

- The problem of wound leprosy treatment is not only the factor of the disease itself, but also more toward the psychological condition of the patient. Prolonged treatment, impaired body function, uncomfortable due to injury are examples of conditions that reduce the patient's psychological condition. RSUD Kelet's research using DASS (Depression Anxiety and Stress Scale) 2014 showed 70% of patients experienced mild to severe stress. Assessment using the Psychological Test of 16PF in 2015 shows, most patients have not received the condition, pessimistic and some even intend to commit suicide.

Leprosy Rehabilitation Unit RSUD Kelet implement innovation program My Darling (Leprosy Treatment with Garden Healing). The program implements collaborative services between physicians, nurses, physiotherapists, psychologists, NLP experts and vocational training conducted in treatment parks to achieve holistic services. Within this concept, patient also improve the patient psychologically besides accelerate their wound healing. Improved optimum aspect of biopsychosociospiritual is expected to reduce patient's length of stay, and improve the leprosy patients' quality of life.

The creative value of the "Hug My Darling" program is seen in the application of the center care principles, where health services are the result of collaboration between health practitioners, patients and families. The services are carried out by professional health practitioners while respecting the patients' wants, needs and preferences, and ensuring the patient gets the knowledge to make decisions.

Strategies taken in the implementation of the Hug My Darling innovation is holistic wound care using garden healing method and integrated patient center care concept. The form of activities undertaken include drafting the policy Director of Kelet Hospital and prepare a garden of care.

Implementation My Darling embrace involving Director of Kelet Hospital, Head of Special Services and Nursing Division, Head of Administration, Medical Committee,

menyiapkan taman perawatan.

Pelaksanaan Peluk My Darling melibatkan Direktur RSUD Kelet, Kepala Bidang Pelayanan dan Keperawatan Khusus, Kepala Bagian Tata Usaha, Komite Medis, Komite Keperawatan, Kepala Unit Rawat Inap, Asset Management Unit (AMU). Selain itu juga melibatkan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten se Jawa Tengah, Puskesmas se-Jawa Tengah, BPJS, dan pasien.

Pelaksanaan inovasi ini menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh Unit Rehabilitasi Kusta RSUD Kelet yaitu sumber daya alam seluas ±200 hektar yang dijadikan taman perawatan.

Inovasi ini menggunakan sumber dana yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah. Dalam pelaksanaannya melibatkan sumber daya manusia yang terdiri atas Tim Medis, Tim Keperawatan, Tim psikospiritual, dan Tim sosial. Berkat kerja sama tim, inovasi ini menghasilkan keluaran yang cukup menonjol, di antaranya proses penyembuhan luka lebih cepat, meningkatkan kondisi psikologis pasien, tersusunnya Kebijakan Direktur RSUD Kelet, Pedoman Pelayanan, Pedoman Pengorganisasian dan SOP Peluk My Darling, tersedianya beberapa taman perawatan di lingkungan Unit Rehabilitasi Kusta.

Untuk memastikan inovasi berjalan sesuai target, Direktur RSUD Kelet memimpin monitoring dan evaluasi setiap bulan dan tahun. Evaluasi kegiatan ini juga melibatkan pasien. Setiap sesi kegiatan ditanyakan secara langsung hal-hal yang menjadi keinginan, koreksi serta masukan yang diharapkan oleh pasien. Dengan cara ini pasien merasa dihargai dan memiliki peran atas kesehatan dirinya.

Selama pelaksanaan inovasi ini, penyelenggara menghadapi beberapa kendala. Dari sisi pasien misalnya, kondisi kesehatan pasien berubah-ubah. Pendidikan pasien, bahasa dan budaya juga menjadi tantangan, pun emosi dan kepribadian pasien, cukup berpengaruh. Sebagai solusi, pemilihan metode Peluk My Darling disesuaikan dengan tingkat ketergantungan pasien, selain itu, dilakukan pendampingan dan menyediakan penerjemah, termasuk melakukan pendekatan secara personal dan pemilihan metode yang tepat.

Peluk My Darling telah dilaksanakan di Unit Rehabilitasi Kusta RSUD Kelet sejak akhir 2015. Selama penerapan, telah memberikan manfaat. Di antaranya



Nursing Committee, Head of Inpatient Unit, Asset Management Unit (AMU). It also involves Provincial Health Offices, District Health Offices throughout Central Java, Central Java Health Centers, BPJS, and patients.

The implementation of this innovation using the resources owned by Leprosy Rehabilitation Unit RSUD Kelet is natural resources covering an area of ± 200 hectares which is used as a rehabilitation park.

This innovation uses the funds sourced from the Central Java Provincial Regional expenditure budget. In its implementation it involves human resources consisting of Medical Team, Nursing Team, Posicospiritual Team, and Social Team. Thanks to teamwork, this innovation produces quite prominent outputs, including faster wound healing process, improved patient psychological condition, drafting of Director Poly Kelet Policies, Service Guidelines, Organizing Guidelines and Operational Standard Hugs My Darling, the availability of several treatment parks within the Leprosy Rehabilitation Unit.

To ensure innovation runs on target, RSUD Kelet Director leads monitoring and evaluation in monthly and yearly basis. Evaluation of this activity also involves the patient. Each activity session is asked directly the things they desired, correction and input expected by the patient. Within this way the patient feels appreciated and has a role for his own health.

During the implementation of this innovation, organizers faced several obstacles. From the patient side for example, the patient's health condition is changing. Patient language and cultural education are also challenges, even the emotions and personality of the patient, influential enough. As a solution, the selection of

terbukti mempercepat proses penyembuhan luka kusta, meningkatkan kondisi psikologis pasien, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pasien.

Inovasi ini juga menghasilkan nilai pembelajaran, salah satunya membuktikan upaya perbaikan pelayanan, tidak selalu menggunakan biaya yang besar. Pembelajaran berikutnya adalah bahwa manusia ditakdirkan sebagai pribadi utuh berupa fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Dalam pelayanan kesehatan, kesatuan nilai biopsikososiospiritual dapat diartikan sebagai kesehatan yang sempurna. Inovasi yang dilakukan oleh RSUD Kelet ini dalam rangka mewujudkan keseimbangan tersebut.

Pembelajaran yang tak kalah penting adalah bagaimana meningkatkan kerja sama dalam melayani publik. Inovasi ini membuat para pemberi layanan yang terdiri atas berbagai macam disiplin ilmu diharuskan dapat memberikan pelayanan secara kolaborasi. Komunikasi yang baik pun menjadi tuntutan dalam memberikan pelayanan langsung kepada pasien.

Melihat berbagai dampak positif yang dihasilkan oleh inovasi ini, pihak RSUD Kelet memasukkan inovasi ini dalam program kerja Unit Rehabilitasi Kusta dan pelaksanaannya didukung APBD Provinsi Jawa Tengah. Ke depan direncanakan diterapkan pada pasien kusta rawat jalan dan pada pelayanan non-kusta di RSUD Kelet. Dengan prinsip yang sama, diharapkan perawatan yang bersifat holistik ini memberikan dampak yang lebih baik terhadap pasien di RSUD Kelet. Transfer of knowledge telah dilakukan kepada beberapa Puskesmas yang selama ini menjadi jejaring RSUD Kelet dalam perawatan kusta. Hal ini dilakukan dalam rangka pengembangan program agar dapat dilaksanakan di Puskesmas.

Hug My Darling method is tailored to the patient's dependency level, in addition, mentoring and providing translators, including personal approaches and appropriate method selection.

Hug My Darling has been implemented in Leprosy Rehabilitation Unit of RSUD Kelet since end of 2015. During its implementation, it has provided benefits. Among them proved to accelerate the healing process of leprosy, improve the patient's psychological condition, improve the knowledge and skills of the patient.

This innovation also produces learning value, one of which proves the effort of service improvement, not always use big cost. The next lesson is that man is destined to be the integrate person in the form of physical, psychological, social, and spiritual. In health services, unity of biopsychosociospiritual value can be interpreted as perfect health. Innovation conducted by RSUD Kelet is in order to realize the balance.

Lesson that is not less important is how to improve cooperation in serving the public. This innovation makes service providers consisting of various disciplines are required to provide services in collaboration. Good communication becomes a demand in providing direct services to patients.

Seeing the various positive impacts generated by this innovation, the RSUD Kelet incorporates this innovation in the work program of Leprosy Rehabilitation Unit and its implementation is supported by Central Java Provincial Regional Expenditure Budget (APBD). The future is planned to be applied to outpatient leprosy patients and to non-leprosy services in RSUD Kelet. With the same principle, it is hoped that this holistic treatment will give a better impact to the patient in RSUD (Regional Public Hospital) Kelet. Transfer of knowledge has been done to several Puskesmas which have been the network of RSUD Kelet in the treatment of leprosy. This is done in the framework of program development to be implemented in Community Health Center (Puskesmas).



PENA BERKARIB (PETA BENCANA.ID) BERSAMA KURANGI RISIKO BENCANA

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

- 1 Banjir merupakan bencana yang terjadi hampir setiap tahun di Jakarta. Semua kelompok sosial masyarakat sangat terpengaruh oleh bencana banjir tersebut. Kegiatan ekonomi masyarakat terganggu, lalu lintas barang dan mobilisasi warga akan terhenti. Dalam kondisi ini, dibutuhkan pemetaan wilayah terdampak banjir. Hal ini penting agar warga dapat menyiapkan diri terhadap segala kemungkinan yang terjadi.

Selama ini pemetaan lokasi terdampak banjir hanya berasal dari pejabat berwenang, laporan tersebut diterima oleh Badan Penanggulangan Bencana DKI Jakarta kemudian dipetakan secara manual. Dengan mekanisme seperti ini penerimaan laporan memakan waktu yang lama. Masyarakat umum tidak dapat aktif dalam pelaporan wilayah terdampak banjir.

Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD Provinsi DKI Jakarta meluncurkan layanan platform PetaBencana.id berbasis web yang dapat di akses publik. Platform ini menghasilkan visualisasi bencana secara *real time* dalam skala kota besar yang diberi nama Pena Berkarib. Secara sederhana Pena-Berkarib adalah sebuah situs yang memantau kicauan tentang banjir di Twitter dan menerjemahkannya menjadi sebuah peta yang menunjukkan di daerah mana pengguna Twitter melaporkan banjir. Untuk berpartisipasi, pengguna tinggal mengeposkan kicauan dengan tagar #banjir dan mention @petajkt sambil mengaktifkan fitur lokasi alias geotag. Informasi tersebut dapat membantu warga masyarakat mendapat informasi mengenai daerah mana saja yang terdampak banjir, sehingga masyarakat dapat menghindari wilayah yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan. Atau jika ada warga masyarakat yang ingin menyalurkan bantuan dan jenis bantuan yang dibutuhkan ke lokasi yang terdampak bencana mereka dapat melihatnya di situs tersebut.

Untuk menjaga akurasi, pelapor harus menggunakan Kartu Laporan yang didalamnya memuat empat pertanyaan sederhana. Pengguna diminta untuk memasukkan informasi mengenai ketinggian genangan, foto genangan,

PENA BERKARIB (PETABENCANA.ID): TOGETHER REDUCE DISASTER RISK)

15

*Regional Disaster Management Agency
Special Region of Jakarta Province*

E *Flooding occurs almost every year in Jakarta. All societal elements in the province have been heavily affected by the natural disaster. Flooding disrupts people's economic activities and hampers the flow of goods and services. People's flood-disrupted mobility aggravates the situation.*

In this condition, mapping out flood-affected areas will become crucial. This is important to ensure that people can prepare themselves from any possibilities that can happen.

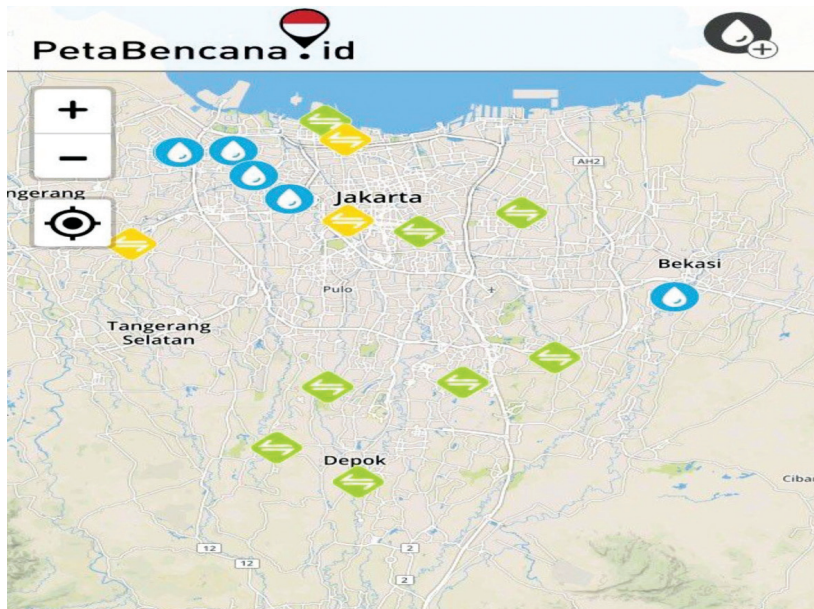
All this time, the mapping of flood-affected locations has always been initiated by authorized officials. The Jakarta Disaster Mitigation Agency (BPBD) will accept the report before it later maps out the areas manually. With such mechanism, the acceptance of a report will take quite a long time. Residents also cannot play an active role in reporting flooded areas.

The BPBD Jakarta's Disaster Information and Data Center has launched a web-based public service platform called PetaBencana.id that can be accessed by the public. This platform produces Pena-Berkarib, a real time disaster visualization in a big city level.

In principle, Pena-Berkarib is a site, which monitors tweets about flooding on Twitter and then translates them into a map showing the location that, according to a Twitter user, has been flooded. To participate, Pena-Berkarib users need to only post their tweets with a hashtag #banjir and mention @petajkt while activating geotags.

The information can help residents to get accurate information on areas affected by flooding so that they can avoid flooded areas that cannot be passed by vehicles.

Any residents who want to give assistance or to know specific assistance that may be needed by people in a flooded area can also use the site.



deskripsi singkat mengenai situasi di sekitar, dan konfirmasi lokasinya.

Penerapan PetaJakarta merupakan proyek interdisipliner yang melibatkan banyak pihak yaitu pakar geografi kependudukan, sosial, kebencanaan dan teknik lingkungan. Dalam pelaksanaannya, inovasi ini melibatkan seluruh aparat pemerintah daerah dan instansi yang terlibat dalam kegawatdaruratan, mulai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta, Dinas Kominfomtik, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Kehutanan, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perindustrian dan Energi, PLN, Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Tata Air, Dinas Bina Marga, Kepolisian, SAR Jakarta

Para pemangku kepentingan tersebut bahu-membahu memastikan pelayanan Pena-Berkarib dapat diakses selama 24 jam dan terintegrasi sistem penanggulangan bencana yang ada di Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD Prov. DKI Jakarta. Sistem Aplikasi Pena-Berkarib menggunakan dana yang bantuan proyek InAWARE Fase II, yang didukung oleh USAID dan melalui kerja sama dengan Pacific Disaster Center (PDC) dan Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT). Studi awal menggunakan platform CogniCity OSS telah dilakukan pada tahun 2013-2016 sebagai bagian dari proyek riset terapan PetaJakarta.org

Sejak diterapkan, aplikasi ini menghasilkan beberapa keluaran, di antaranya memetakan lokasi dan titik bencana banjir secara realtime, memudahkan

To maintain the accuracy of the information, application users must use a report card, which contains four simple questions. Users will be asked to submit information on the depth of puddles or flooding, attached the picture of the puddles or flooding, give a short description on the situation in nearby areas, and confirm the flooding locations.

Peta Jakarta is an interdisciplinary project, which involves many parties including experts in the field of geography, demography, social affairs, disaster relief and environmental engineering.

In its implementation, Pena-Berkarib involves all local administration officials and agencies related with emergency responses. They comprise the Jakarta Disaster Mitigation Agency, the Communications and Information Technology Agency, the Social Affairs Ministry, the Health Agency, the Forestry Ministry, the Fire Control and Rescue Agency, the Industry and Energy Agency, state utility firm PLN, the Environment Agency, the Public Order Agency (Satpol PP), the Transportation Agency, the Water Management Agency, the Jakarta Bina Marga road agency, the Jakarta Police and the Jakarta Search and Rescue Agency (SAR).

All stakeholders are working together to make sure Pena-Berkarib services can be accessed 24 hours and are integrated to the disaster mitigation agency at the BPBD Jakarta's Disaster Information and Data Center.

The Pena-Berkarib application system used funds from the second phase of the InAWARE project, which was supported by USAID and through a partnership with Pacific Disaster Center (PDC) dan Humanitarian Open Street Map Team (HOT). The initial study using the CogniCity OSS platform has been conducted during 2013-2016 as part of the Peta Jakarta.org application research project.

Following its implementation, the application has resulted in several outcomes: Mapping out flooding locations and spots in realtime; Making it easier for all local administration's working units (SKPD) and emergency-related institutions to coordinate and identify assembly points or locations; Giving professional services in line with aspirations and complaints of Jakarta residents in quite a fast response time; and allowing the people to play an active role so that the data can be more accurate and two-way communications can take place.

Pena-Berkarib gives benefits, such as making it easier for Jakarta residents to give information on disaster locations and helping officials to move faster to respond reports. The innovation has also improved the close relations between the BPBD

koordinasi dan jaringan lokasi atau titik temu di lokasi bencana baik kepada seluruh SKPD dan instansi samping terkait kegawatdaruratan, memberikan pelayanan yang profesional sesuai dengan aspirasi pengaduan dari warga dengan waktu respon yang cepat, masyarakat dapat berperan aktif sehingga datanya lebih akurat dan terjadi komunikasi dua arah.

Inovasi Pena-Berkarib memberikan manfaat, di antaranya memudahkan masyarakat memberikan informasi lokasi bencana, hal ini membantu aparat lebih cepat menindaklanjuti pengaduan. Selain itu, inovasi ini meningkatkan kedekatan hubungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta dengan masyarakat.

Sebelum Pena-Berkarib berjalan, tidak ada pemetaan dan laporan genangan dan banjir secara geospasial sehingga tidak terlihat sebaran dan data secara *real time*. Setelah inovasi ini bergulir, pemetaan dan laporan terdata secara geospasial sehingga terlihat sebaran dan data secara *real time*. Hal ini memudahkan pengerahan bantuan penanggulangan bencana. Inovasi ini juga sudah bisa terintegrasi dengan berbagai sosial media seperti ; twitter, facebook, whatsApps, Qlue dan Pasang mata.com

Terdapat beberapa kendala dalam penerapan inovasi ini, seperti terbatasnya partisipasi hanya pada masyarakat yang melek media sosial. Kelompok usia lanjut dan masyarakat yang tidak mempunyai akses terhadap gawai yang tidak terkoneksi dengan internet menjadi sebuah kendala tersendiri. Selain itu manfaat inovasi ini juga belum tersosialisasi sehingga belum banyak peggunganya, untuk itu perlu digencarkan sosialisasi ke masyarakat.

Selain manfaat langsung, penerapan inovasi ini juga memberikan pembelajaran berharga. Melalui Platform Peta Bencana ini, pemerintah menjadi yang lebih peka dan pintar dalam menyikapi kebutuhan masyarakat; Hasil analisa atau filter sosial media hendaknya dapat disambungkan secara sistem; Pemerintah yang responsif dapat memberikan kepercayaan yang lebih dan dukungan masyarakat.

Keberlanjutan dari platform ini sangat bergantung juga pada antusiasme warga terhadap perkembangan sosial media yang berarti juga bergantung pada teknologi informasi. Di masa mendatang warga masyarakat akan semakin lekat dengan sosial media. Informasi secara *real-time* sangat dibutuhkan untuk membangun ketahanan warga terhadap bencana yang terjadi.

Jakarta and residents.

Before Pena-Berkarib was implemented, there was no geospatial mapping and report on puddles and flooding so that the spread and data on the flooded areas could not be seen in real time. After this innovation runs, the mapping and report are recorded geospatially so that the spread and data on flooded areas can be seen real time. This innovative measure has also eased the dispatch of disaster mitigation assistance. Pena-Berkarib can now be integrated with various social media, such as Twitter, Facebook, WhatsApps, Qlue and Pasangmata.com

Several obstacles have hampered the implementation of this innovation, such on people's participation that has been limited to only those who are friendly with social media. The elderly and people with no access to Internet-connected devices will suffer difficulties to participate. The benefits of this innovation also have not yet been introduced well so that only few people have used it. That is why Pena Berkarib must be introduced deeper to the society.

The implementation of this innovation not only gives direct benefits but also results in invaluable lessons. The lessons are: Through the Disaster Map platform, the government has become more sensitive and smarter in responding people's needs; Analysis results or social media filters should be connected systematically; A responsive government can give more trust and get people's support.

The sustainability of this platform depends very much on the antusiasms of residents on the development of social media, which means it also relies on information technology. In the future, all people will be connected closer to social media. Real time information will be really needed to develop people's resilience to disasters.



SI BINA CANTIK (SISTEM BRIDGING SIMRSMS, BPJS, DAN INA-CBGS MENUJU AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN EFISIENSI PELAYANAN KESEHATAN JKN SECARA PARIPURNA)

RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

- 1 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo menjadi rumah sakit rujukan regional bagi 78 RS dan 289 Puskesmas di Jawa Tengah. Banyaknya pasien menimbulkan beberapa persoalan, di antaranya, prosedur yang panjang dan harus input di sistem SIMRS, BPJS, dan INA-CBG's, menyebabkan waktu pendaftaran rawat jalan, gawat darurat, rawat inap, dan informasi mengenai tambahan biaya, membutuhkan waktu yang lama. Data yang tersimpan di tiga sistem juga memungkinkan terjadinya perbedaan. Karena petugas harus mengecek data secara manual di tiga sistem, membuat proses alur klaim menjadi panjang dan sulit melakukan evaluasi.

Berangkat dari persoalan ini, RSUD Dr. Margono meluncurkan program inovasi yang dinamai Si Bina Cantik. "Si Bina Cantik" Sistem Bridging SIMRS, BPJS dan INACBG's merupakan inovasi untuk mewujudkan pelayanan yang akuntabel, transparan, dan efisien.

Program ini merupakan sistem bridging yang menghubungkan SIMRS, BPJS dan INA-CBG's. Sistem ini menggunakan web service yang memungkinkan ketiga sistem yang berbeda ini berjalan bersamaan tanpa saling mengintervensi, sehingga tingkat keamanan dan kerahasiaan masing-masing sistem tetap terjaga.

Pelaksanaan inovasi ini dimulai dengan melakukan inventarisasi keluhan pasien. Langkah berikutnya adalah melakukan rapat koordinasi bidang untuk menemukan pemecahan masalah, setelah itu manajemen bersama tim IT menyiapkan desain sistem untuk menjembatani tiga sistem, langkah berikutnya melakukan advokasi dengan BPJS dan Kemenkes terkait kesiapan tim IT. Sebagai tindak lanjut dari advokasi, tim IT ketiga pihak membahas penerapan dan kebutuhan yang diperlukan dalam penerapan sistem bridging. Selanjutnya dilakukan uji coba dan penerapan.

Pelaksanaan inovasi ini melibatkan beberapa pihak, dari mulai pasien peserta

SIBINA CANTIK (BRIDGING SIM RSMS, BPJS, AND INA-CBG'S SYSTEM INTO ACCOUNTABILITY, TRANSPARENCY, EFFICIENCY OF JKN HEALTH SERVICE IN PLENARY

*Prof.Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Regional General Hospital
Central Java Province*

16

E Prof.Dr. Margono Soekarjo Regional General Hospital (RSUD) serves as a regional referral hospital for 78 hospitals and 289 community health centers (Puskesmas) in Central Java. A high influx of patients has created several problems, including a long patient care service procedure. As the hospital must input data on its Hospital Information Management System (SIMRS), the Healthcare and Social Security Agency (BPJS) and the standard healthcare tariff system called the Indonesia Case Based Groups (INA-CBGs), registration processes for in-patient and out-patient services and emergency treatments and consultations to get information on additional costs take quite a long time.

Recording data in three systems – SIMRS, BPJS and INA-CBGs -- has led to an unsynchronization. As hospital officers must check data in the three systems manually, insurance claiming processes become very long and it is quite difficult for them to carry out evaluation.

To solve the problem, RSUD Dr Margono has launched an innovative program called "Si Bina Cantik", an abbreviation of "the SIMRS, BPJS and INA-CBGs Bridging System". This innovation aims to create a health-care service that is accountable, transparent and efficient.

Si Bina Cantik is a bridging system, which connects SIMRS, BPJS and INA-CBGs. This system uses a web service that allows these three different system to walk together without intervening each other so that the security and secrecy of data in each system can be still maintained well.

The implementation of the innovation started with the listing of patient complaints. Another step was a coordination meeting to find problem solving strategies. The hospital's management and the IT team later prepared a design to bridge the three systems, namely SIMRS, BPJS and INA-CBGs. In the next step, a team from RSUD Dr.Margono carried out a program advocacy to BPJS and the Health Ministry to explain the readiness of its IT team. As a follow up, IT teams of the three parties -- RSUD Dr. Margono, BPJS and the Health Ministry – discussed the application of Si



JKN, BPJS, Kementerian Kesehatan, dan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo. Inovasi ini terlaksana berkat dukungan Tim IT RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, dukungan dana dari BLUD RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, serta payung hukum berupa Nota Kesepakatan Kerja Sama tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan, serta Kebijakan Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo tentang penerapan sistem *bridging*.

Penerapan "Si Bina Cantik" menghasilkan beberapa keluaran. Pertama dengan sistem *bridging* input data pendaftaran cukup sekali dan hanya memakan waktu satu menit. Kedua, waktu pemberian informasi mengenai tambahan iuran lebih cepat dan transparan, sekitar satu menit, sehingga pasien dapat mempersiapkan tambahan biaya yang harus dibayarkan. Ketiga, tingkat kesalahan entry data menjadi nol dan dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, alur kerja klaim menjadi lebih cepat. Keenam, evaluasi kendali mutu dan kendali biaya mudah dilakukan.

Demi memastikan berjalan sesuai harapan, pelaksanaan inovasi ini dipantau dan dievaluasi. Mulai evaluasi waktu pembuatan SEP, evaluasi waktu purifikasi dan verifikasi, evaluasi waktu klaim, evaluasi berkaitan dengan sistem *bridging* (user interface, performance sistem, keamanan sistem, server yang dipakai, dan reliabilitas jaringan). Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan secara periodik setiap bulan.

Manfaat yang dihasilkan setelah pelaksanaan 'Si Bina Cantik', Pertama prosedur

Bina Cantik and needs the bridging system might require for its implementation. Si Bina Cantik was trialed before it was fully implemented.

The implementation of this innovation involves several parties, starting from JKN patients, BPJS, the Health Ministry, and RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo. The innovation can be implemented thanks to technical supports from RSUD Dr. Margono's IT team and financial assistance from the hospital's regional public service unit (BLUD). Umbrella laws, which consist of a Memorandum of Understanding on Referral Healthcare Services for JKN Participants and policies from the RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo on the implementation of the bridging system, have also ensured the successful implementation of the innovation.

The implementation of Si Bina Cantik results in several outcomes. First, with the data input bridging system, a patient needs to carry out a registration process only once and it takes only one minute. Second, the extending of information on additional fees a patient must pay can be faster and more transparent, only around one minute, so that the patient can prepare additional costs needed to pay. Third, the innovation pushes down the failure level in data entry to zero and everything can be held responsible. Fourth, work flows for claiming process become much shorter. Fifth, it is now easier for the hospital to carry out evaluation on quality and cost controls.

To ensure that the program runs along with expectations, the innovation implementation is continuously monitored and evaluated. The evaluation is conducted during the issuance of Participant Eligibility Letter (SEP) and purification and verification processes. An evaluation is also conducted on average time of an insurance claiming process. The evaluation is conducted related with the bridging system (user interface, system performance, system security, server readiness, and network reliability). The evaluation is conducted periodically every month.

The implementation of Si Bina Cantik results in several outcomes. First, it simplifies the patient registration procedure so that patients' data input waiting time becomes much shorter. Under the bridging system, hospital officers need to input data into the SIMRS only once and automatically, the data will be recorded in both BPJS and INA-CBG systems. Second, the process to get information on additional medical costs becomes faster. This is because with the bridging system, the grouping process can be done only with one "click", which takes less than one minute.

With the implementation of the innovation, the claiming process becomes more certain because data exchanges are conducted inter-systems, no longer manually, so that cash flow of the hospital can be more guaranteed. This eases the evaluation process. The implementation of the innovation also creates several lessons people

pendaftaran menjadi lebih sederhana sehingga waktu tunggu input data pasien di pendaftaran lebih cepat. Setelah penerapan sistem bridging input data cukup satu kali di sistem SIMRS maka secara otomatis data akan masuk ke sistem BPJS dan sistem INA-CBG's. Manfaat kedua, proses mendapatkan informasi biaya tambahan menjadi lebih cepat. Setelah dilakukan *bridging*, proses *grouping* cukup satu kali klik dan waktu yang dibutuhkan kurang dari satu menit.

Berkat penerapan inovasi ini proses klaim lebih pasti karena pertukaran data dilakukan antar-sistem tidak lagi manual, sehingga *cashflow* rumah sakit terjamin. Hal ini memudahkan proses evaluasi. Penerapan inovasi ini juga membuahakan pembelajaran yang dapat dipetik. dari sisi eksternal RS, masyarakat teredukasi untuk disiplin memenuhi kebutuhan persyaratan kepesertaan BPJS agar mendapatkan pelayanan sesuai hak sebagai peserta JKN.

Sedangkan dari sisi internal RS, pegawai RSUD terinternalisasi untuk mendorong ketepatan jumlah dan waktu klaim sehingga ada kepastian pendapatan yang memengaruhi *cash flow* rumah sakit, pegawai BLUD khususnya tenaga medis dan keperawatan didorong melakukan kendali mutu dan kendali biaya atas koneksi sistem yang diterapkan.

Bagi Pemprov, Jawa Tengah, pelaksanaan inovasi ini menjadi alat edukasi bagi masyarakat luas dan institusi lainnya untuk memanfaatkan inovasi ini sehingga dapat direplikasi, dimodifikasi dan diimplementasikan oleh institusi lain yang terkait dengan pelayanan kesehatan. Pun bagi BPJS., inovasi ini memberikan jaminan kepastian pembiayaan peserta JKN yang menerima pelayanan di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, dan bagi Kementerian Kesehatan, dapat melakukan evaluasi terkait dengan sistem pentarifan, sistem penganggaran dan sistem pelayanan kesehatan dengan JKN.

Inovasi yang merupakan *bridging* tiga sistem pertama di Indonesia dan menjadi percontohan *bridging* di rumah sakit lain sangat terbuka untuk direplikasi. Dengan adanya dampak positif yang dihasilkan, menjadi kesempatan bagi rumah sakit lain untuk dapat melakukan aplikasi inovasi ini. Apalagi sudah banyaknya permintaan studi banding dari berbagai rumah sakit di Indonesia.



can learn. Externally, people are educated to be more discipline in fulfilling BPJS membership requirements if they want to get services in line with their rights as JKN participants.

Internally, RSUD Margono employees are internalized to push for accuracy in terms of time and number of claim requests so there will be certainties on revenues that can affect the cash flow of the hospital. Under this innovation, regional public service agency (BLUD) officials, especially nursing and medical workers, are pushed to carry out quality and cost controls on the implemented connectivity system.

For the Central Java administration, the innovation has become an education tool for the people and other health-care related institutions to benefit the system so that they can replicate, modify and implement it. For BPJS, the innovation gives a certainty on medical costs to National Health Insurance (JKN) patients receiving treatment at RSUD Prof.Dr.Margono Soekarjo. For the Health Ministry, the innovation allows the government to evaluate the tariff system, the budgeting system and the delivery system of health-care services provided by JKN.

Si Bina Cantik, first innovation to bridge three systems in Indonesia that has become a model of a hospital bridging system, is very open for replications. Other hospitals may apply this innovation, give positive impacts it can result in. Several hospitals across Indonesia have submitted comparative study requests to RSUD Dr.Margono to learn deeper about this innovation.



PLANET KAKAO: PENGELOLAAN DAN EDUKASI TERPADU KAKAO MELALUI KEBUN RAKYAT DEMI INDONESIA DAULAT COKLAT

Dinas Perkebunan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur

- 1 Indonesia adalah produsen biji kakao terbesar ketiga di dunia. Posisi Indonesia berada di bawah Pantai Gading dan Ghana. Namun, prospek tersebut dihantui sejumlah masalah. Kakao sejatinya bukan tanaman asli Indonesia. Tanaman ini bisa tumbuh dan berbuah banyak jika mendapatkan perlakuan khusus. Upaya penanaman kakao oleh masyarakat yang dirintis sejak akhir 1990-an berkembang lambat karena beberapa permasalahan, antara lain, kurangnya pengetahuan budidaya kakao, tidak memiliki akses pembibitan, dan harga jual biji kakao rendah.

Untuk menyelamatkan produksi kakao sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sejak 2010, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur merintis gerakan rakyat tanam kakao dengan pola mandiri. Tujuan utamanya penanaman kakao seluas-luasnya, agar memenuhi skala ekonomis dan membuka akses pasar. Agar program ini bisa terlaksana, Dinas Perkebunan melakukan pendekatan personal kepada para petani kakao di Blitar, Trenggalek, Madiun, Pacitan, Nganjuk. Salah satunya tokoh petani kakao setempat bernama Kholid Mustofa, tokoh muda petani kakao.

Pada 2010, Dinas Perkebunan membawa Kholid untuk belajar di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao (Puslitkoka) Indonesia di Jember. Kholid juga diarahkan untuk belajar ke PTPN 12 yang dikenal memiliki kebun kakao edel (mulia) maupun kakao baik (lindak) terbaik di Jawa Timur. Kholid juga diikutkan pelatihan khusus cara pembibitan kakao yang diadakan Dinas Perkebunan.

Sepulang dari pelatihan-pelatihan tersebut dia mulai mengembangkan bibit yang diberikan Dinas Perkebunan. Setelah berhasil, bibit tersebut disumbangkan ke warga sekitar agar ditanam di lahan-lahan kosong. Dari situ mulai terbentuk kelompok-kelompok petani kakao. Perkembangan tersebut ditindaklanjuti dengan terus mendorong lebih banyak petani kakao lainnya mengikuti pelatihan budidaya dan pengembangan wawasan.

Program ini sangat inovatif karena mengelola kakao dari hulu ke hilir. Planet Kakao

PLANET KAKAO: INTEGRATED MANAGEMENT AND EDUCATION OF COCOA THROUGH PEOPLE'S GARDEN FOR INDONESIAN CHOCOLATE DAULAT

17

Plantation Agency
East Java Province

Indonesia is the third biggest cacao beans in the world, following Ivory Coast and Ghana. However, the country's potential has been hampered by several problems. Cacao is not Indonesia's native plant. It can grow rapidly and yields a good harvest if it gets a special treatment. Cacao planting efforts initiated by Indonesian people since the end of 1990s have developed slowly because of some problems. These include a lack of knowledge on cacao cultivation, poor access to cultivation of seedlings and low cacao bean prices.

To save the cacao production and to increase people's prosperity, since 2010, the East Java Plantation Agency has initiated a people's movement to plant cacao with an independent pattern. The movement aims to expand cacao planting activities as wide as possible, to achieve the economic price of the commodity and to open access to the market. To that end, the East Java Plantation Agency has taken personal approaches to cacao farmers in Blitar, Madiun, Nganjuk, Pacitan and Trenggalek. One of the local cacao farmers is Kholid Mustofa. He is a young cacao farmer involved in the agency's program.

In 2010, the East Java Plantation Agency gave Kholid an opportunity to learn at the Coffee and Cacao Research Center (Puslitkoka) Indonesia in Jember. Kholid was also directed to learn at state plantation company PTPN XII, which has best supreme cacao (edel cacao) and lindak cacao (bulk cacao) plantations in East Java. Kholid was also involved in a special training on cacao seedling techniques held by the East Java Plantation Agency.

Completing the training activities, Kholid began to cultivate cacao seeds provided by the Plantation Agency. Kholid later distributed the cacao seeds to people who live in nearby areas. They planted the seeds in idle land. The progress was later followed up by encouraging more cacao farmers to attend cultivation training and outlook development activities.



dilengkapi dengan program adopsi pengolahan kakao menjadi produk sekunder yang selama ini dikuasai oleh pabrik sehingga berhasil melahirkan Kampung Coklat di Blitar.

Inovasi Planet Kakao terobosan yang melibatkan kelompok petani rakyat dan pemangku kepentingan, mulai Dinas Perkebunan, pusat usaha dan kegiatan kakao, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, Bank Jatim, Asosiasi Petani Kakao. Melalui sinergi ini, sumber daya alam berupa lahan seluas ± 50 ribu hektare di 10 kabupaten dikelola untuk penanaman kakao. Adapun dana yang digunakan sebesar Rp63 miliar berasal dari APBD Provinsi Jawa Timur.

Ada beberapa keluaran yang dihasilkan Planet Kakao. *Pertama*; pada 2016 luas perkebunan kakao rakyat berhasil mencapai 41.332 hektare. *Kedua*; petani menjadi paham dan memiliki keterampilan dalam penanaman dan pemeliharaan kakao bahkan pandai membuat makanan dari coklat. *Ketiga*, biji kakao yang diterima dari petani di Blitar terus meningkat baik jumlah maupun kualitas. *Keempat*; berhasil memacu produksi kakao dan pengelolaan kakao, sekaligus pemasaran. *Kelima*; edukatif yang konsisten dan berkesinambungan.

Berjalan lebih dari 6 tahun, sistem pemantauan dilakukan secara bertahap dan setiap saat. Dinas Perkebunan terus melakukan supervisi dan evaluasi terhadap lokasi pengembangan kakao, unit pengolahan, kualitas biji, jumlah produksi. Evaluasi tahunan juga terus dilakukan dengan menggandeng Puskoka Indonesia. Terutama dalam hal penelitian terbaru terkait pembasmian hama tanaman kakao secara efektif.

Kendala yang muncul terjadi di awal pelaksanaan. Meski berhasil meyakinkan para petani di Blitar, hampir semua petani tidak merawat kakao karena menganggap

The program, called Planet Kakao, is very innovative as it aims to manage the cacao industry from the upstream to downstream levels. Planet Kakao is equipped with a program, which aims to process cacao beans into secondary products that all this time has been dominated by factories. This has led to the creation of "Kampung Coklat" (Chocolate Village) in Blitar.

Planet Kakao is a breakthrough innovation, which involves people's farmer groups and stakeholders, starting from the Plantation Agency, cacao business and activity centers, Puslitkoka, state lender Bank Jatim, and the Cacao Farmers Association. Through this synergy, around 50,000 hectares of land in 10 regencies have been benefitted to cultivate cacao. The cultivation activities used Rp 63 billion (US\$4.71 million) worth budgetary allocations from the East Java provincial administration's budget (APBD).

Planet Kakao has resulted in several outcomes. First, in 2016, people's cacao plantations increased to 41,332 ha of plot of land. Second, farmers now have adequate knowledge and skills in growing and treating cacao trees. They even can now produce food products from chocolate. Third, cacao beans accepted from farmers in Blitar have continued to improve both in terms of quality and quantity. Fourth, the program has managed to accelerate cacao production and processing activities and improve the commodity's product marketing. Fifth, the innovation has led to a consistent and sustainable education.

Having run for more than six years, Planet Kakao's monitoring system has been conducted routinely and in layers. The East Java Plantation Agency has continued to supervise and evaluate cacao development locations, cacao processing units, the quality of cacao beans and harvest yields. Annual evaluation programs have also continued to be conducted by involving the Indonesia Coffee and Cacao Research Center (Puskoka), especially in developing new research on effective eradication of cacao plant pests.

Most of problems occurred in the beginning of the implementation of the program. Although motivators managed to grow Blitar farmers' trust to the program, almost all farmers in the city still considered cacao plants did not need special treatment. In fact, many cultivation technologies need to be conducted. That is why the East Java Plantation Agency is striving to carry out assistance in form on agricultural extension, field schools and workshops.

Other problems occurred after harvests. Many farmers were not aware of the importance of fermentation and sorting activities. This resulted in low cacao bean prices. The farmers' cacao beans were bought at prices, which were lowest

tanaman biasa tidak perlu dirawat. Padahal, banyak teknologi budidaya yang harus dilakukan. Karena itulah, Dinas Perkebunan melakukan pendampingan. Baik penyuluhan, sekolah lapang maupun *workshop*.

Masalah lainnya muncul pasca panen. Banyak petani yang tidak memahami pentingnya fermentasi dan sortasi. Akibatnya, harga jual biji kakao rendah karena pengepul membeli dengan kisaran harga paling rendah dari harga jual biji kakao dunia.

Namun, semua itu berhasil diatasi melalui inovasi Planet Kakao yang berdampak positif bagi budidaya kakao Jawa Timur. Salah satunya peningkatan pengetahuan tentang budidaya kakao. Para petani kini mengenal dengan detail bagaimana cara mengembangkan kakao. Mereka tidak lagi sembarangan menanam kakao. Hampir semua kebun kakao di wilayah binaan Dinas Perkebunan diperlakukan sesuai standar penanaman kakao. Peningkatan pengetahuan dalam budidaya kakao itu berakibat langsung pada produksi biji kakao secara umum di Jawa Timur, sehingga produktivitas biji kakao meningkat rata-rata 922 kg/hektare, jauh lebih tinggi dibanding sebelum dimulai inovasi ini yang hanya mencapai 800 kg/hektare.

Setelah program inovasi ini berjalan, areal kakao rakyat terus meningkat dibarengi peningkatan produksi kakao mencapai 20.564 ton pada 2016. Produktivitas kakao meningkat menjadi rata-rata 977 kg per hektare. Peningkatan produksi juga diikuti dengan peningkatan kualitas biji kakao. Masyarakat kini sadar, kakao harus memenuhi SNI. Stimulus jumlah bibit yang terus berkurang menunjukkan petani mampu melakukan pembibitan secara mandiri. Petani juga sudah menguasai teknologi pabrikasi.

Kesuksesan inovasi ini memberi banyak pembelajaran. *Pertama* perubahan yang terkesan mustahil bisa dilakukan jika ide dan visinya jelas. Sekitar 15 tahun lalu, tidak ada yang berpikir bahwa petani tradisional bisa menggarap tanaman kakao. Kini, di Jawa Timur, kakao menggantungkan produksinya pada petani tradisional. Pembelajaran kedua, untuk menyukseskan komoditas baru, bukan sekadar membenahi teknis melainkan juga pola pikir. Mengubah pola pikir tidak gampang dan butuh waktu. Dan yang tidak kalah penting menanamkan paradigma bahwa dalam perkebunan harus berpikir bagaimana menguasai sektor hulu dan hilir dari suatu komoditas.

Planet Kakao akan terus berkelanjutan. Cita-cita besarnya adalah menciptakan *cocoa belt* alias garis perkebunan kakao di Jawa Timur. Dalam fase saat ini, Planet Kakao sudah mencapai level "autopilot". Pengelolaannya sudah bergerak rutin dengan melibatkan semua pihak yang ada di kawasan tersebut.

compared to the world's current cacao prices. However, all of those problems managed to be resolved through Planet Kakao's innovations, which had brought positive impacts to cacao cultivation in East Java. One of the impacts is improved knowledge on cacao cultivation. Cacao farmers in East Java now know in details best techniques to develop cacao. They no longer cultivate cacao as they like. Almost all cacao plantations in the East Java Plantation Agency's working areas have been treated in line with standardized cacao planting techniques. Improved knowledge in cacao cultivation has brought direct impacts to the production of cacao beans in East Java, increasing the plantation productivity to 922 kilograms per hectare, much higher than the average production of 800 kg per ha when the innovation was not yet introduced.

After the innovative program was introduced, people's cacao plantation areas have continued to expand, accompanied by increases in the cacao production, which reached 20,564 tons in 2016. The cacao productivity has now increased to 977 kg per ha on average. Increases in the cacao production have also been followed with efforts to improve the quality of cacao beans. Farmers are now aware that cacao must fulfill Indonesian National Standards (SNI). The number of the government's cacao stimulus that has continued to decline shows that local farmers can now cultivate seedlings independently. They have also mastered factory technology.

The innovation ran successfully. It has given a lot of lesson learned. First, any chance efforts, which sound impossible, can be conducted as long as their idea and vision are clear. Around 15 years ago, no one dared to think traditional farmers could grow cacao plants. But now, in East Java, the cacao industry depends on traditional farmers for its production. Second, all related parties are aware that to make a new commodity successful, they need to improve not only technical matters but also their mindset. It is not that easy to change people's mindset. It takes time. Last but not least, it is important to cultivate a paradigm that in plantation-related matters, all stakeholders must think how they can have control over the management of a commodity from the upstream to downstream.

Planet Kakao will be continued. Its biggest goal is to create a cocoa belt of a line of cacao plantations in East Java. In the current phase, Planet Kakao has reached the level of "autopilot". Its management has moved routinely and involved all parties in the area.



SIMAS-LH ONLINE (SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS ONLINE)

Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

- 1 Pelayanan informasi lingkungan hidup secara manual menghadapi banyak permasalahan. Banyak produk informasi lingkungan hidup yang diproduksi belum bisa diakses secara luas dan belum terdokumentasikan. Penyampaian laporan pengelolaan oleh pemrakarsa usaha juga cenderung tidak efektif dan efisien, serta cenderung pemborosan. Tumpukan dokumen laporan cenderung menyulitkan untuk dievaluasi.

Berangkat dari berbagai permasalahan tersebut, Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup meluncurkan inovasi "Simas-LH Online" (Sistem Informasi Lingkungan Hidup Berbasis Online). Sistem ini menjadi tempat instansi lingkungan hidup di Sulsel untuk menyimpan dan mempublikasi data hasil pemantauan lingkungan di daerahnya serta berbagai data perizinan yang diterbitkan. Pemrakarsa usaha dapat dengan mudah menyampaikan kewajibannya.

Sistem Informasi Lingkungan Hidup berbasis Online ini merupakan prototipe pertama di Indonesia. Sistem ini berperan untuk membangun data base produk informasi lingkungan hidup dan saat bersamaan juga menyediakan informasi kepada publik. Sistem data base inovasi ini terkoneksi dengan 24 Instansi Lingkungan Hidup di kabupaten/kota se-Sulsel dan Pemrakarsa Usaha yang tergabung dalam jaringan SILHD Sulsel. Jaringan admin yang luas dan terkontrol memungkinkan sistem ini memuktahirkan data dan informasi secara berkala dalam jumlah yang banyak. Secara umum sistem ini menyediakan sembilan informasi yaitu kualitas air, kualitas udara, izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3, pelaporan dokumen lingkungan, data base usaha dan kegiatan, data pemantauan kualitas lingkungan perusahaan, dan data beban pencemaran.

Strategi pengembangan Inovasi ini dimulai dari identifikasi masalah, penelusuran data dan informasi yang diproduksi Instansi lingkungan hidup serta dibutuhkan publik, menyusun *grand* desain sistem yang akan dibangun, menyusun alokasi anggaran, membuat model sistem informasi, mengimplementasikan

SIMAS-LH ONLINE (ONLINE BASED ENVIRONMENTAL INFORMATION SYSTEM)

18

*Environmental Management Agency
South Sulawesi Province*

- *Environmental information services manually face many problems. Many of the environmental information products produced have not been widely accessed and have not been documented. Submission of management reports by the initiator also tends to be ineffective and efficient, and tends to waste. Stacks of report papers tend to make it difficult to evaluate.*

Departing from these issues, the Office of Environmental Management launched the "Simas-LH Online" innovation (Online Environment Information System). This system is a place of environmental agencies in South Sulawesi to store and publish data of environmental monitoring results in the area as well as various licensing data published. The initiator of the business can easily deliver its obligations.

This online-based information system is the first prototype in Indonesia. This system serves to build a data base of environmental information products and at the same time also provides information to the public. This innovation data base system is connected to 24 environmental agencies in districts / cities throughout South Sulawesi and Business Proponents who are members of the SILHD network of South Sulawesi. The wide and controlled network admin enables the system to update data and information on a regular basis in large quantities. In general, the system provides nine informations such as water quality, air quality, environmental permit, environmental protection and conservation permits, B3 waste management, environmental document reporting, business and activity base data, environmental quality monitoring data and pollution load data.

This Innovation development strategy begins with problem identification, tracking of data and information produced by environmental agencies as well as required by the public, preparing the grand design of the system to be built, preparing budget allocations, modeling information systems, implementing application systems, developing and testing, launching on May 2016, supervision and development. This system involves the South Sulawesi Environmental Management Agency and 24 Environmental Institutions in the districts/municipalities as administrators,

sistem aplikasi, mengembangkannya dan uji coba, peluncuran pada Mei 2016, pengawasan dan pengembangan.

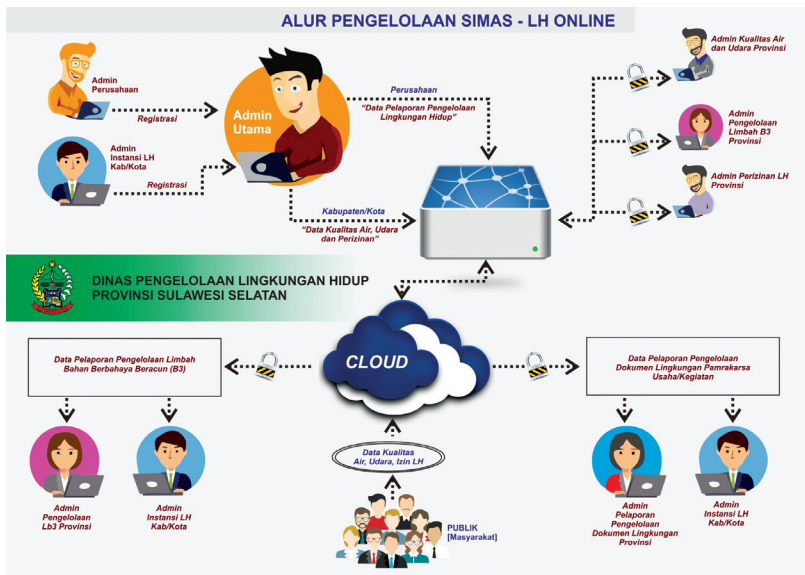
Sistem ini melibatkan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Sulsel dan 24 Instansi Lingkungan Hidup di daerah kabupaten/kota sebagai administrator, serta pemrakarsa usaha. Untuk mendukung pelaksanaan inovasi ini, disediakan sumber daya finansial dan sumber daya manusia. Pada awalnya disediakan anggaran untuk pengembangan sebesar Rp150 juta. Untuk keberlanjutan, setiap tahun dialokasikan dana dari APBD untuk pengembangan inovasi. Sedangkan untuk sumber daya manusia, dilaksanakan pendampingan melalui sosialisasi, *workshop* dan *coaching clinic* berkala.

Setelah implementasi Simas -LH Online, kini tersedia sebanyak 921 informasi perizinan lingkungan hidup dari berbagai jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, 97 informasi kualitas udara ambien di 24 kab/kota, 225 informasi kualitas air di 24 kab/kota, dan 48 Pemrakarsa Usaha yang telah menyampaikan laporan pengelolaan lingkungan hidup melalui sistem ini. Semua data tersebut dapat diakses dengan cepat sesuai kebutuhan.

Metode penyampaian laporan dengan *paperless* menghemat pengeluaran. Selain itu, pemrakarsa usaha dapat menyampaikan laporan dan menerima bukti penyapaiannya, hanya dengan duduk depan komputer. Bagi pihak Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup juga lebih mudah melakukan evaluasi dan pengawasan tanpa harus membuka tumpukan dokumen.

Saat ini masyarakat dapat dengan mudah mengetahui informasi kualitas air dan udara di sekitar mereka bermukim. Masyarakat juga dapat mengetahui usaha di daerahnya yang tidak memiliki izin pengelolaan lingkungan hidup, sehingga dapat diteruskan ke ranah pengaduan lingkungan. Pada akhirnya hasil tupoksi instansi lingkungan hidup dapat diketahui lebih luas sehingga *image* terhadap instansi lingkungan hidup dapat lebih baik.

Untuk memantau dan mengevaluasi, Simas-LH Online memiliki alat untuk mengetahui berapa pengunjung portal. Selain itu, sistem ini dapat menampilkan data yang tersimpan di database, dan mengetahui pengguna yang mengupdate data. Dari sini, diketahui administrator yang aktif dan tidak. Sistem ini memungkinkan admin utama berkomunikasi dengan semua user. Untuk memaksimalkan penggunaan sistem ini, telah dibuat tutorial penggunaan menu-menu yang tersedia. Selain itu, juga rutin dilaksanakan pertemuan-pertemuan untuk mengetahui kendala dalam pemanfaatan sistem ini.



as well as the initiator of the business. To support the implementation of this innovation, The Government provided financial resources and human resources. Initially, the Government provided budget for the development of Rp150 million. For sustainability, each year is allocated funds from APBD for innovation development. As for human resources, it conducted assistance through socialization, workshops and periodic coaching clinic. After the implementation of Simas-LH Online, there are now 921 environmental permit information from various types of environmental protection and environmental permits, 97 ambient air quality information in 24 districts / cities, 225 water quality information in 24 districts and 48 Business Initiatives Which has submitted a report on environmental management through this system. All data can be accessed quickly as needed.

Method of reporting with paperless saves expenditure. In addition, the initiator can submit reports and receive evidence of delivery, just by sitting in front of the computer. For the Environmental Management Agency it is also easier to evaluate and supervise without having to open the pile of documents. Nowadays people can easily find out about the quality of water and air around them. The community can also know the business in the area that does not have permission to manage the environment, so it can be forwarded to the realm of environmental complaints. In the end, the results of the environmental agency main tasks can be known more widely so that the image of the environment agency can be better.

To monitor and evaluate, Simas-LH Online has the tools to know how many portal visitors. In addition, the system can display data stored in the database, and find

Kendala utama yang dihadapi dalam implementasi sistem ini, adalah ketersediaan jaringan internet. Untuk mengatasinya, disiapkan mekanisme pengimputan secara *offline*. Selain itu, Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup mengundang seluruh administrator untuk melakukan pengimputan bersama di kantor Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kendala lainnya, keaktifan admin kab/kota untuk mengupdate data. Strategi yang digunakan membuat edaran dan pendekatan persuasif, ke depan, direncanakan pemberian honor bagi admin yang mengelola Simas-LH ini.

Secara umum inovasi ini mendatangkan banyak manfaat, di antaranya, instansi lingkungan hidup daerah lebih mudah menyediakan informasi lingkungan hidup sesuai tupoksi dan layanan utama yang menjadi kewenangan instansi lingkungan hidup, publik dapat mengupdate kualitas lingkungan hidup di sekitarnya dan mengetahui pelaku usaha di daerahnya yang memiliki izin pengelolaan lingkungan, sekaligus meningkatkan kepedulian dengan kondisi lingkungan. Manfaat berikutnya, perusahaan lebih mudah dan hemat dalam melaporkan pengelolaan dan pemantauan lingkungannya. Bagi instansi lingkungan hidup, inovasi ini menjadi database pelaku usaha di daerahnya dan terintegrasi dalam satu sistem untuk memudahkan dalam pengawasan.

Untuk menjamin keberlanjutan, setiap tahun dialokasikan anggaran untuk mendukung implementasi dan pemanfaatan inovasi ini. Saat ini, Simas -LH Online menjadi bahan sosialisasi pada studi banding instansi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengapresiasi inovasi ini dan berencana untuk direplikasi.

out which users are updating the data. From here, it is known that the administrator is active and not. This system allows the primary admin to communicate with all users. To maximize the use of this system, tutorials have been made using the menus available. In addition, there are also regular meetings to find out the obstacles in the utilization of this system.

The main obstacle faced in the implementation of this system, is the availability of Internet network. To fix this, set up the offline loading mechanism. In addition, the Environmental Management Agency invites all administrators to conduct inputs in the Office of Environmental Management. Another obstacle is the liveliness of the Regency / City admin to update the data. The strategy used to make a persuasive and persuasive approach, in the future, is planned to give honorarium to the admin who manages the Simas-LH.

In general, these innovations bring many benefits, among others, local environmental agencies more easily provide environmental information in accordance tupoksi and the main services that become the authority of environmental agencies, the public can update the quality of the environment around it and know the business actors in the area who have permission Environmental management, while raising awareness with environmental conditions. The next benefit, the company more easily and economically in reporting the management and monitoring of its environment. For environmental agencies, this innovation becomes a database of business actors in the region and integrated in one system to facilitate the supervision.

To ensure sustainability, every year is allocated a budget to support the implementation and utilization of this innovation. Currently, Simas-LH Online becomes the socialization material in the agency's comparative study. The Ministry of Environment and Forestry has appreciated this innovation and plans to replicate it.



2H2 CENTER KERABAT IBU DAN BAYI

Dinas Kesehatan
Pemerintah Kabupaten Flores Timur

- 1 Tingginya angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Flores Timur dari tahun 2007 hingga 2010 sangatlah memprihatinkan. Kondisi demikian terjadi, di antaranya, karena data sasaran ibu hamil dan melahirkan secara riil belum diketahui, data yang diperoleh hanya data proyeksi yang didapatkan dari Kementerian Kesehatan, dan tingginya angka kehamilan yang berisiko membahayakan ibu dan bayi saat proses persalinan.

Selain itu, tradisi melahirkan dibantu oleh dukun bersalin yang tidak memiliki kompetensi masih mendarah daging di masyarakat Kabupaten Flores Timur. Sehingga bila terjadi komplikasi saat proses persalinan, pasien tidak dapat diberikan pertolongan pertama. Ditambah lagi hanya terdapat satu rumah sakit rujukan yang lokasinya cukup jauh yakni di Larantuka.

Setelah dilakukan pengkajian terhadap masalah tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur dr. Yosep Usen Aman melakukan strategi *out of the box*, yakni mendata sasaran ibu hamil *by name, by adress, by case*, memasang bendera Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak berwarna *pink* di rumah setiap ibu hamil, dipantau setiap saat sampai waktunya melahirkan. Jika ada kegawatdaruratan obstetri dan neonatal maka langsung berkonsultasi dengan para dokter obstetri, dokter kandungan, dan dokter anak di RS, tentang penanganan awal sebelum dirujuk. Layanan melalui telepon dan atau sms untuk konsultasi selama 24 jam.

Inovasi berbasis gerakan moral yang melibatkan semua elemen masyarakat untuk peduli ibu hamil, ibu melahirkan dan bayi baru lahir itu dinamakan 2H2 Center Kerabat Ibu dan Bayi. Definisi 2H2 sendiri merujuk pada penanganan masa-masa kritis 2 hari sebelum dan 2 hari sesudah melahirkan. Mengingat Kabupaten Flores Timur adalah kabupaten kepulauan maka sarana yang digunakan untuk memudahkan komunikasi adalah menggunakan teknologi sederhana tapi dimiliki sebagian besar masyarakat yaitu *handphone*.

2H2 CENTER OF MOTHER'S AND INFANT RELATIVES

19

Health Agency
East Flores Regency

- The high maternal and infant mortality rate in Kabupaten Flores Timur (East Flores Regency) from 2007 to 2010 is very alarming. Such conditions occur, among other things, because the data on the target of pregnant women and delivery in real terms is not known, the data obtained only projection data obtained from the Ministry of Health, and the high pregnancy rate at risk of endangering the mother and baby during the process of childbirth.

In addition, the tradition of childbirth assisted by birth attendants who do not have the competence is still ingrained in the community of East Flores Regency. So when there is a complication during labor, the patient can not be given first aid. Plus there is only one referral hospital located far enough in Larantuka.

After an assessment of the problem, The Head of East Flores Regency Health Office dr. Yosep Usen Aman performs an out-of-the-box strategy of registering pregnant women by name, by adress, by case, installing a pink and pink child's Revolutionary Health flag at home every expectant mother, monitored at any time until the time of delivery. If there is an obstetric and neonatal emergency, consult directly with obstetricians, obstetricians, and pediatricians in the hospital, about the initial treatment before referral. The services are by phone and or SMS (short Message Service) for consultation for 24 hours.

Moral-based innovation that involves all elements of society to care for pregnant women, mothers and newborns is named 2H2 Center of Relatives of Mother and Infant. Definition 2H2 itself refers to the handling of critical periods 2 days before and 2 days after delivery. Given East Flores Regency is an archipelagic district, the means used to facilitate communication is to use simple technology but owned by most people, namely mobile phones.

Through the joint movement strategy, Head of Health also requires the heads of health centers and midwives throughout East Flores Regency to make mapping the real targets of pregnant women, sending complete data to 2H2 Center, in

Melalui strategi gerakan bersama, Kadis Kesehatan juga mengharuskan kepala Puskesmas dan bidan di seluruh Kabupaten Flores Timur agar membuat pemetaan sasaran riil ibu hamil, mengirim data lengkap sasaran ke 2H2 Center, bekerja sama dengan RSUD Dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, dan menjalin komunikasi yang baik dengan para sopir maupun anak buah kapal motor yang biasa berada di pelabuhan laut pada malam hari agar dapat dihubungi dan memberi bantuan mengantar pasien dari wilayah kepulauan ke rumah sakit.

Inovasi ini dinilai sangat inovatif dan kreatif karena memiliki database sasaran ibu hamil, ibu melahirkan, dan bayi baru lahir secara lengkap berdasarkan nama, alamat, dan kasus. Memiliki nomor para jejaring peduli ibu dan bayi mulai dari kader kesehatan, dukun bersalin, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Selain itu, terdapat 3,95 % jejaring peduli ibu dan anak yang merespons sms dari 2H2 Center dan menindaklanjuti sesuai kewenangannya.

Untuk mempermudah proses rujukan ibu hamil dengan risiko tinggi maka dibuat link dengan 2H2 Center RSUD Dr. Hendrikus Fernandez Larantuka. Penanganan kasus gawat darurat yang sistematis dan tuntas serta tim 2H2 Center yang kompeten dalam menangani kasus kebidanan dan neonatal dilengkapi dengan perangkat kerja yang sederhana terdiri atas 1 unit handphone dan 1 unit laptop lengkap dengan software PC Suite.

Para pemangku kepentingan yang ikut terlibat dalam pelaksanaan 2H2 Center di antaranya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur sebagai inisiator, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT sebagai pendorong utama program 2H2 Center, Para camat dari 19 kecamatan, para kepala desa di 250 desa/kelurahan, kader dan petugas kesehatan, dukun bersalin, ketua tim penggerak PKK, hingga LSM *Australia Indonesia Partnership For Maternal And Neonatal Health (AIPMNH)* dan *Australia Indonesia Health System Strengtening (AIPHSS)*.

Terlaksananya inovasi ini tak lepas dari peran serta sumber daya yang berkualitas. Tim 2H2 terdiri dari tim teknis dengan orang-orang yang kompeten di bidangnya baik dari kalangan D3, S1, S2 Kebidanan dan lainnya. Ditambah dengan adanya dukungan dana dari APBN sebesar Rp.15.000.000 per tahun dengan alokasi pulsa Rp. 9.000.000/tahun dan bahan bakar minyak ambulance Rp. 6.000.000/tahun.

Saat pelaksanaan inovasi, terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Salah satunya capaian kematian bayi masih fluktuatif. Maka dikembangkan 2H2 Center plus yang terfokus pada pemantauan bayi baru lahir rendah. Namun setelah dilaksanakannya program 2H2 Center banyak keluaran maupun manfaat yang



collaboration with RSUD Dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, and established good communication with the drivers and crew of motor boats who used to be at the sea port at night to be contacted and to help bring patients from the archipelago to the hospital.

This innovation is considered very innovative and creative because it has a target database of pregnant women, mothers giving birth, and newborn complete by name, address, and case. Own numbers of networking care of mothers and babies ranging from health cadres, birth attendants, religious leaders, community leaders, and other concerned parties. In addition, there are 3.95% of maternity and child care networks that respond to SMS from 2H2 Center and follow up according to their authority.

To facilitate the process of referral pregnant women with high risk then made a link with 2H2 Center RSUD Dr. Hendrikus Fernandez Larantuka. Comprehensive and systematic handling of emergency cases and competent 2H2 Center team in handling obstetric and neonatal cases equipped with simple work tools consisting of 1 unit of mobile phone and 1 unit of laptop complete with PC Suite software.

The stakeholders involved in implementing the 2H2 Center include the Head of East Flores District Health Office as the initiator, Head of NTT Provincial Health Office as the main driver of the 2H2 Center program, the sub-district heads from

didapatkan antara lain sebanyak 8.240 kasus rujukan gawat darurat obtetri dan neonatal yang dilakukan rujukan secara terencana dan sistematis ke RSUD Dr. Hendrikus Fernandez Larantuka. 2H2 Center memiliki bank data ibu hamil, ibu melahirkan dan bayi yang dapat diakses oleh lintas program lain seperti gizi, Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Biro statistic. Selain itu, menurunnya angka kematian ibu hamil, ibu melahirkan dari 14 kasus kematian pada tahun 2009 menjadi 5 kasus kematian pada tahun 2016, menurunnya angka kematian bayi dari 96 kasus pada tahun 2009 menjadi 80 kasus pada tahun 2016, peningkatan kepedulian masyarakat terhadap ibu hamil dan ibu melahirkan dan lain sebagainya.

Untuk lebih menjaga kualitas dari inovasi maka dilakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring diadakan setiap hari maupun setiap bulan oleh tim 2H2 Center, evaluasi kasus luar biasa/kasus kematian 1x24 jam setelah kejadian, tiap Desember dilakukan Pertemuan Akbar Bidan, dan setiap Mei secara rutin dilakukan rapat evaluasi bersama pihak terkait.

Hingga saat ini 2H2 Center sudah direplikasi oleh 22 kabupaten yang ada di Provinsi NTT. Beberapa daerah dan provinsi lain juga sudah banyak yang melakukan kunjungan. Penerapan inovasi ini memang sangat terbuka bagi daerah lain sejauh adanya komitmen tinggi dan konsistensi sehingga makin sempurna dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

19 sub-districts, the village heads in 250 villages, And health workers, dukun (local baby midwife) maternity, PKK team leader, to Australian Indonesia Partnership For Maternal And Neonatal Health (AIPMNH) and Australia Indonesia Health System Strengthening (AIPHSS).

Implementation of this innovation cannot be separated from the role of quality resources. The 2H2 team consists of a technical team with people who are competent in their fields from D3, S1, S2 Midwifery and others. These are coupled by the support of funds from the state budget of Rp.15.000.000 per year with the allocation of credit Rups (Rp) 9,000,000 / year and ambulance fuel oil Rp. 6,000,000 / year.

When the implementation of innovation, there are several obstacles encountered. One of the achievements of infant mortality is still fluctuating. So, it was developed 2H2 Center plus that focused on monitoring of low-birth newborns. However, after the implementation of 2H2 Center program many outputs and benefits are obtained, among others, as many as 8,240 cases of emergency referral obstetri and neonatal conducted referral in a planned and systematic to RSUD Dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, 2H2 Center has a data bank of pregnant women, mothers and babies accessible by cross other programs such as nutrition, Family Planning and Women's Empowerment, Population and Civil Registry, Statistics Bureau. In addition, the decline in maternal mortality, maternal mortality from 14 deaths in 2009 to 5 deaths by 2016, decreased infant mortality rate from 96 cases in 2009 to 80 cases in 2016, increased public awareness of pregnant women and Mother giving birth and so forth.



ALARM PERSALINAN

UPTD Puskesmas Kecamatan Kerinci Kanan
Dinas Kesehatan
Pemerintah Kabupaten Siak

- 1 Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Siak, Provinsi Riau menjadi salah satu permasalahan yang hingga kini terus diatasi. Berdasarkan data tahun 2014 terdapat 138,5 AKI per 100.000 kelahiran hidup. Hal itu diakibatkan masih banyaknya keluhan ibu hamil yang tidak tertangani dengan tepat dan cepat sehingga berakibat fatal.

Berangkat dari permasalahan di atas, Dinas Kesehatan Kabupaten Siak melalui UPTD Puskesmas Kecamatan Kerinci Kanan membuat inovasi layanan bernama Alarm Persalinan. Inovasi ini bertujuan untuk mencegah keterlambatan, yakni terlambat dalam mengambil keputusan, terlambat sampai ke tempat rujukan, dan terlambat dalam mendapat pelayanan di fasilitas kesehatan, dan mencegah kehamilan lewat waktu (serotinus) atau disingkat 3T dan Serotinus.

Inovasi ini muncul dari pemikiran Bidan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) UPTD Puskesmas Kerinci Kanan yang merasa perlu untuk mengurangi angka Kematian Ibu dan Bayi serta angka Kesakitan Ibu dan Bayi yang disebabkan oleh persalinan terlambat dan asfiksia.

Strategi pembuatan aplikasi alarm persalinan dilaksanakan dengan menggunakan rencana aksi. *Pertama*, perencanaan (*Planning*). Tahap ini dimulai dengan membentuk tim kecil untuk merumuskan konsep, membuat aplikasi, hingga mensosialisasikan dan mengaplikasikan di Puskesmas Kerinci Kanan

Kedua, pelaksanaan (*Actuating*). Kepala puskesmas beserta bidan koordinator melakukan komunikasi dengan tenaga IT. Konsultasi dan diskusi itu menghasilkan sebuah konsep yang dijadikan sebuah aplikasi. Aplikasi ini kemudian disosialisasikan di tingkat puskesmas dan kepada bidan-bidan desa. Alarm persalinan ini telah dilaksanakan sejak 1 tahun terakhir, mulai Januari 2016 hingga saat ini.

BIRTH ALARMS

20

Community Health Center Kerinci Kanan District
Health Agency
Siak Regency

- Infant Mortality Rate (IMR) in Siak Regency, Riau Province becomes one of the problems that until now continue to be overcome. Based on 2014 data there are 138.5 MMR per 100,000 live births. This is due to the number of pregnant women's complaints that are not handled properly and quickly causing fatality.

Depart from the above problems, Siak District Health Office through UPTD Puskesmas Kerinci Kanan District made an innovation service called Alarm Birthing. This innovation aims to prevent delays, ie late in making decisions, late arrivals to referrals, and late in getting services at health facilities, and preventing pregnancy over time (serotonus) or abbreviated as 3T and Serotinus.

This innovation arises from the thought of the Midwife of Maternal and Child Health (KIA) UPTD Puskesmas Kerinci Kanan who sense the need to reduce the number of Maternal and Infant Mortality and Mother and Infant Maturity caused by late childbirth and asphyxia.

The strategy of making the alarm app is done by using action plan. First, planning. This stage begins by forming a small team to formulate concepts, make applications, to socialize and apply in Puskesmas Kerinci Kanan.

Second, the implementation (Actuating). Head of Community Health Center (Puskesmas) along with midwife coordinator communicate with IT staff. The consultation and discussion resulted in a concept being made into an application. This application was then socialized at the Puskesmas level and to the village midwives. Alarm birth has been implemented since the last 1 year, starting January 2016 until today.

To monitor and evaluate this innovation activity, the system used is as follows. First, carry out supervision directly to the village midwife. Second, provide guidance and direction to the village midwife. And third, hold an annual evaluation meeting to review the results and constraints and plan for the following year.

Untuk memantau dan mengevaluasi kegiatan inovasi ini, sistem yang dipakai adalah sebagai berikut. *Pertama*, melaksanakan pengawasan secara langsung ke bidan desa. *Kedua*, memberikan bimbingan dan arahan kepada bidan desa. Dan *ketiga*, mengadakan rapat evaluasi tahunan untuk mereview hasil dan kendala serta merencanakan tahun selanjutnya.

Adapun para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proyek ini antara lain Bupati Siak, Kepala Dinas kesehatan, Kabid kesehatan masyarakat, Kepala puskesmas, Bidan koordinator, dan Bidan puskesmas dan bidan desa sebagai pelaksana aplikasi alarm persalinan ini. Alarm persalinan dibuat berdasarkan data kohort antenatal dari seluruh desa dan data yang ada di Puskesmas Kerinci Kanan.

Sasaran alarm persalinan adalah seluruh ibu hamil yang terdaftar di Kohort Antenatal wilayah kerja UPTD Puskesmas Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, dimana setiap bulannya bertambah sesuai jumlah K1. Semua ibu hamil diklarifikasikan berdasarkan informasi bidan desa dan sepengetahuan bidan koordinator. Dari tanggal tafsiran persalinan, kemudian akan dilihat apakah ibu hamil tersebut sudah melewati tanggal persalinan atau belum.

Jika bersalin sebelum tanggal persalinan, alarm persalinan tidak berbunyi. Sebaliknya, jika ibu hamil belum bersalin di tanggal tafsiran, maka alarm berbunyi *BUZZ* dan bidan puskesmas segera menghubungi bidan desa untuk melakukan pemantauan sekaligus menyarankan agar dilakukan USG pada ibu hamil tersebut.

Setelah melakukan USG, ibu hamil yang telah diperiksa harus melaporkan hasil USG kepada bidan desa. Jika tidak melaporkan, bidan desa akan mengunjungi ibu tersebut, dan bidan desa tetap melakukan pemantauan hingga bersalin di tempat yang tepat dan melahirkan bayi dengan selamat.

Puskesmas Kerinci Kanan memiliki tenaga kesehatan yang terdiri dari 9 orang bidan, 6 orang di Poli KIA, dan 3 orang di pelayanan UGD. Bidan koordinator membagi tupoksi sesuai dengan tingkat kemampuannya, yaitu Bagian Ibu, Bagian Anak, KB, Remaja, Lansia, dan Desa Siaga. Khusus Alarm Persalinan ini yang berperan penting adalah pemegang program ibu dan didukung oleh Kepala Puskesmas.

Pendekatan ini sangat kreatif dan inovatif karena merupakan terobosan terbaru menggunakan teknologi IT yang lebih efektif dan efisien dibandingkan cara-cara lama. Selama menggunakan alarm persalinan ini, pemantauan terhadap

The stakeholders involved in this project include Siak Regent, Head of Health Office, Head of Public Health, Head of Public Health Center, Midwife Coordinator, and Midwife of Public Health Center and Village Midwife as the executor of this Birth Alarm Application. Birth alarms were made based on antenatal cohort data from all villages and data available at the Puskesmas Kerinci Kanan.

The target of birth alarm is all pregnant women registered in Cohort Antenatal working area of UPTD Puskesmas Kerinci Kanan, Siak District, where every month increase according to K1 number. All pregnant women are clarified based on the village midwife information and the knowledge of the coordinator midwife. From the date of interpretation of labor, then will be overlooked whether the pregnant woman has been overdue.

If delivery before the date of birth, the birth alarm does not ring. Conversely, if the pregnant mother has not been maternity on the date of interpretation, then the alarm sounds BUZZ and the midwife of the Puskesmas immediately contact the village midwife to monitor as well as suggest to perform ultrasound to the pregnant woman.

After performing ultrasound, pregnant women who have been examined should report the results of ultrasound to the village midwife. If not reported, the village midwife will visit the mother, and the village midwife will keep monitoring until delivery at the right place and deliver the baby safely.

Puskesmas Kerinci Kanan has health personnels of 9 midwives, 6 people in Poli KIA, and 3 people in ER service. Coordinating midwives divide duties and functions according to their level of ability, ie Section of Mother, Child Section, Family Planning, Youth, Elderly, and Desa Siaga. This particular Birth Alarm that plays an important role is the mother program holder and is supported by the Head of Puskesmas.

This approach is very creative and innovative because it is the latest breakthrough using IT technology more effectively and efficiently than the old ways. During the use of this birth alarm, monitoring of pregnant women is maximal. In addition, this application can reduce maternal mortality, maternal and postpartum mothers since January-December 2016.

One of the obstacles faced in the implementation of Birthing Alarm application is that there are still some families, especially pregnant women, who do not want to go to the village midwife. Nevertheless, even Village counselor officers involving village heads, and community leaders, consistently and continuously advocate and counsel to the community.

ibu hamil lebih maksimal. Selain itu, aplikasi ini mampu mengurangi angka kematian ibu hamil, ibu bersalin dan nifas sejak Januari-Desember 2016.

Salah satu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan aplikasi Alarm Persalinan adalah masih terdapat beberapa keluarga, khususnya ibu hamil, yang tidak mau memeriksakan diri ke bidan desa. Meski demikian, para petugas bahkan Babinsa yang melibatkan kepala desa, dan tokoh masyarakat, secara konsisten dan berkelanjutan melakukan advokasi dan penyuluhan kepada masyarakat.

Pelaksanaan inovasi aplikasi ini telah dirasakan manfaatnya, baik oleh para petugas kesehatan, maupun masyarakat itu sendiri. Manfaat itu berdampak positif pada perbaikan pelayanan kesehatan di Kabupaten Siak. Antara lain menurunnya jumlah kematian ibu dan bayi; meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kerinci Kanan; dan memudahkan pemantauan ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Kerinci Kanan.

Dampak positif tersebut juga tercermin dari sebelum dan sesudah adanya aplikasi Alarm Persalinan. Sebelum inovasi ini dilaksanakan terdapat beberapa permasalahan, *pertama*, tingginya jumlah kematian ibu dan bayi; *Kedua*, sulitnya memonitor ibu hamil di wilayah Kerinci Kanan; dan *Ketiga*, derajat kesehatan masyarakat kerinci kanan masih belum maksimal.

Namun setelah adanya inovasi, pertama, jumlah kematian ibu tidak ada (nihil) dan penurunan jumlah kematian bayi dari 7 kasus di 2016, menjadi 4 kasus; kedua, mudahnya memonitor ibu hamil di wilayah kerja puskesmas kerinci kanan; dan *ketiga*, derajat kesehatan masyarakat Kerinci Kanan pun kian meningkat.

Atas keberhasilannya, Inovasi Alarm Persalinan telah menjadi program yang berkelanjutan dan telah dianggarkan pada DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Siak dalam program BOK 2017. Bahkan, pelayanan ini telah ditetapkan oleh kepala Dinas Kesehatan Siak dan kepala Puskesmas Kerinci Kanan sebagai program unggulan.

Adapun, pembelajaran yang dapat diambil dari program aplikasi alarm persalinan ini, di antaranya komitmen yang kuat dari para pemangku kepentingan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Selain itu, dengan TI sederhana, ternyata mampu menjadi sarana deteksi dini terhadap ibu hamil dan dapat menjaikan dasar untuk bertindak cepat untuk mengantisipasi kematian ibu hamil dan bayi yang disebabkan faktor keterlambatan.

Implementation of this application innovation has been perceived benefits, either by health workers, as well as the community itself. The benefits have a positive impact on the improvement of health services in Siak Regency. Among others, the declining number of maternal and infant deaths; Increasing public health status of Kerinci Kanan; And facilitate the monitoring of pregnant women in the working area of Puskesmas Kerinci Kanan.



The positive impact is also reflected from before and after the birth alarm application. Before this innovation was implemented there were several problems, firstly, the high number of maternal and infant deaths; Second, it is difficult to monitor pregnant women in the area of Kerinci Kanan; And Third, the right public health status of the Kerinci Kanan is still not maximal.

However, after the innovation, first, the number of maternal deaths is none (zero) and the decrease of infant mortality from 7 cases in 2016, to 4 cases; Secondly, it is easy to monitor pregnant women in the work area of puskesmas in the right kerinci; And thirdly, the health status of the Kerinci Kanan community is increasing.

For its success, Birth Alarm Innovation has become an ongoing program and has been budgeted at DPA District Health Office Siak in BOK program 2017. In fact, this service has been established by the head of Siak Health Office and head of Puskesmas Kerinci Kanan as the flagship program.

The lesson that can be taken from this program of alarm alarm application, among which strong commitment from stakeholders in improving public health degree. In addition, with simple IT, it can be a means of early detection of pregnant women and can make the basis for quick action to anticipate the deaths of pregnant women and infants caused by delay factors.



IMPLEMENTASI E-VB DI BANYUWANGI

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

- 1 Sejak 2015, penganggaran dan pengawasan program pembangunan desa di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur digarap dengan sistem *online*. Sistem yang diberi nama *e-Village Budgeting (e-VB)* itu telah dilaksanakan di semua desa (189 desa) yang ada di Banyuwangi. *E-Village Budgeting (e-VB)* merupakan sistem keuangan desa seperti sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang telah ada di kabupaten/kota. Hanya saja, sistem ini berlaku untuk skala desa dan terhubung langsung dengan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Bappekab). *E-VB* terdiri atas tiga bagian, yakni perencanaan, tata kelola, dan evaluasi. Semuanya berbasis *online*.

Adanya inovasi ini tak lepas dari berbagai permasalahan yang ada. *Pertama*, adanya ketidaksinambungan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dalam pengalokasian Anggaran Desa. *Kedua*, belum optimalnya pemahaman aparatur desa mengenai Peraturan Desa (Perdes) dan Teknologi Infomasi. *Ketiga*, adanya sistem manual dalam proses perencanaan, penatausahaan dan pelaporan keuangan desa, sehingga sulit untuk menyajikan laporan yang akuntabel. Dan *keempat*, validasi data yang ada, kurang dapat diwujudkan sehingga berdampak pada perumusan kebijakan yang kurang optimal.

Sebelum diberlakukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah Desa sebenarnya telah mengelola keuangan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa, namun jumlahnya tidak terlalu besar, kurang lebih sebesar Rp150 juta sampai dengan Rp200 juta per tahun. Dengan pengelolaan keuangan yang kecil itu pun, tak jarang masih ditemukan berbagai permasalahan. Berbagai permasalahan tersebut tentu akan semakin kompleks, terlebih mulai diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang mengisyaratkan bahwa setiap desa akan menerima kucuran dana dari APBN sebesar Rp1 miliar per tahun.

Inisiatif pembangunan aplikasi *E-Village Budgeting* dilakukan oleh Badan

IMPLEMENTATION OF E-VB IN BANYUWANGI

21

Community and Village Empowerment Agency
Banyuwangi Regency

- Since 2015, the budgeting and supervision of rural development programs in Banyuwangi Regency, East Java is cultivated with an online system. The system called e-Village Budgeting (e-VB) has been implemented in all villages (189 villages) in Banyuwangi. E-Village Budgeting (e-VB) is a village financial system such as an existing district financial management information system. However, this system applies to the village scale and is directly linked to the District Development Planning Board (Bappekab). E-VB consists of three parts, namely planning, governance, and evaluation. Everything is online based.

The existence of this innovation can not be separated from various existing problems. First, there is a discrepancy between the Village Mid Term Development Plan (RPJMDes) and the Rural Government Work Plan (RKPDDes) in the Village Budget Allocation. Secondly, lack of knowledge of village apparatus on Village Regulation (Perdes) and Information Technology. Third, the existence of a manual system in the planning process, administration and reporting of village finances, making it difficult to present accountable reports. And fourth, validation of existing data, can not be realized so that the impact on the policy formulations are less than optimal.

Prior to the enactment of Law Number 6 Year 2014, the Rural Government has actually managed the finances sourced from the Village Fund Allocation, but the amount is not too large, approximately Rp150 million to Rp200 million per year. With such a small financial management, various problems frequently still found. The problems will be more complex, especially the enactment of Law No. 6 of 2014 on the Village, which implies that every village will receive funding from the state budget of Rp 1 billion per year.

The E-Village Budgeting application development initiative is carried out by the Community Empowerment and Village Governance Agency of Banyuwangi Regency, which is now transformed into the Community Empowerment and Village Development Office of Banyuwangi Regency. E-Village Budgeting is run

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi, yang sekarang berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi. *E-Village Budgeting* dijalankan berbasis *website* dan *online* (evb.banyuwangikab.go.id) dengan data yang *real time* dalam rangka membangun transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di Desa.

Perencanaan aplikasi *E-Village Budgeting* melibatkan beberapa SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. SKPD tersebut antara lain Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi, Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Banyuwangi, Bagian Hukum dan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Pembangunan sistem aplikasi *E-Village Budgeting* tentunya memerlukan sumber daya. Secara umum sumber daya yang diperlukan untuk membangun sistem ini terdiri dari, *pertama*, sumber daya finansial. Pembangunan aplikasi *E-Village Budgeting* mulai direncanakan sejak tahun 2014 melalui penyedia alokasi anggaran di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

Kedua, sumber daya teknis/sarana prasarana. Pada bagian ini telah tersedia jaringan internet di setiap desa yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama dengan Pemerintah Desa se-Kabupaten Banyuwangi, dengan biaya *bandwith* dari Pemerintah Kabupaten. Pemkab Banyuwangi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi bersama Dinas Komunikasi, Informasi, dan Persandian Kabupaten Banyuwangi juga membangun kerja sama dengan beberapa penyedia jasa layanan guna memaksimalkan jaringan internet yang ada di desa.

Ketiga, sumber daya manusia. Adanya tenaga teknis di Dinas Komunikasi, Informasi, dan Persandian Kabupaten Banyuwangi telah mampu mengembangkan aplikasi sesuai dengan peruntukannya dan tidak tergantung dengan pihak ketiga.

Pada tahap implementasi, berbagai kendala tentu banyak dihadapi. Misalnya pembuatan sistem aplikasi masih minim literasi sehingga memerlukan beberapa kali perubahan. Selain itu, keterbatasan kemampuan tenaga operator di desa menjadi kendala tersendiri. Namun demikian, Pemkab Banyuwangi telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya belanja jasa internet dan pemberdayaan perangkat desa melalui peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa. Yakni berupa pelatihan, refresh, pendampingan, dan klinik

website and online (evb.banyuwangikab.go.id) with real time data in order to build transparency and accountability of village budget management.

E-Village Budgeting application planning involves several SKPDs in accordance with their main tasks and functions. SKPD include the Office of Community Empowerment and Village Banyuwangi District, Office of Communications and Informatics Banyuwangi District, Regional Planning Board Banyuwangi, Legal Section and Government Section Regional Secretariat Banyuwangi.

E-Village Budgeting application system development requires resources. In general the resources needed to build this system consist of, first, financial resources. E-Village Budgeting application development is planned from 2014 through the provision of budget allocations in the 2014 Budget Revenue and Expenditure Budget.

Secondly, technical resources / infrastructure. In this section internet network has been available in every village built by the Government of Banyuwangi District together with the Village Government as Banyuwangi District, with the cost of bandwidth provided by District Government. Banyuwangi regency through Community and Village Empowerment Office of Banyuwangi District along with Communication, Information and Banyuwangi District Office also build cooperation with several service providers to maximize the existing internet network in the village.

Third, human resources. The presence of technical personnel in the Office of Communications, Information, and Persandian Banyuwangi has been able to develop applications in accordance with its designation and not dependent with third parties.

In the implementation phase, many obstacles are faced. Such as creating the application system is still minimal literasi so require several changes. In addition, the limited ability of operators in the village to be a separate constraint. However, Banyuwangi Regency has made various efforts. One of them is internet service expenditure and empowerment of village apparatus through capacity building of village government apparatus. Namely in the form of training, refresh, mentoring, and clinics for village government officials in operating E-Village Budgeting.

This system is creative and innovative because it is able to answer the challenges of the village government, especially related to the funding to the big village government that comes from the Village Fund (DD), the Village Fund Allocation (ADD) and the Regional Tax Revenue and Retribution.

bagi aparaturnya pemerintahan desa dalam mengoperasikan *E-Village Budgeting*.

Sistem ini terbilang kreatif dan inovatif karena mampu menjawab tantangan pemerintah desa, khususnya terkait kucuran dana kepada pemerintah desa besar yang bersumber dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berbagai dampak positif terlihat setelah dibangunnya inovasi *E-VB* ini. Antara lain 1) pengelolaan keuangan dilakukan by system sehingga secara *real time* dapat dipantau efektifitasnya; 2) adanya peningkatan manajemen keuangan desa bagi aparaturnya Desa, 3) memudahkan pengendalian dan pengawasan; 4) pola perencanaan desa lebih terarah dengan perencanaan sebelumnya, 5) efisiensi dan efektifitas pelaku kegiatan secara administratif.

Sejalan dengan hal tersebut, aplikasi *E-Village Budgeting* terus dikembangkan dan digunakan secara berkelanjutan. Bahkan, sejak dibangun beberapa tahun lalu, sejumlah pimpinan kabupaten/kota telah melaksanakan *study comparative* atau *sharing* tentang pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi *E-Village Budgeting*. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga telah melakukan kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman bersama (MoU) antara lain dengan Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.

Untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan *E-Village Budgeting*, Pemkab Banyuwangi memiliki sistem pengendalian dan pemantauan tersendiri. Diantaranya 1) melakukan rapat evaluasi pada tingkat kabupaten, kecamatan dan desa, 2) melakukan optimalisasi Sistem Pengendalian Internal (SPI), 3) monitoring dan evaluasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kesuksesan pembangunan aplikasi ini memberikan pembelajaran yang positif. Salah satunya sinergisitas dan koordinasi antar SKPD dan Pemerintahan Desa mutlak diperlukan.

Many positive impacts are seen after this E-VB innovation. Among others 1) financial management is done by system so that in real time can be monitored its effectiveness; 2) improvement of village financial management for village apparatus, 3) facilitate control and supervision; 4) village planning pattern is more focused on previous planning, 5) efficiency and effectiveness of administrative actors.

In line with this, the E-Village Budgeting application continues to be developed and used in a sustainable manner. In fact, since it was built several years ago, a number of district / city leaders have conducted comparative study or sharing on village financial management through E-Village Budgeting application. The Government of Banyuwangi Regency has also cooperated through the signing of a memorandum of understanding (MoU), among others denagan Situbondo East Java and Pangandaran, West Java.

To monitor and evaluate the progress of E-Village Budgeting, Banyuwangi Regency has its own control and monitoring system. Among them 1) conducting evaluation meetings at district, sub-district and village level, 2) optimizing Internal Control System (SPI), 3) monitoring and evaluation by Community and Village Empowerment Office. Successful development of this application provides a positive learning. One of the synergy and coordination between SKPD and Village Government is absolutely necessary.



LASITER AMB (LAYANAN TRANSPORTASI TERPADU ANGKUTAN MASYARAKAT BINTUNI)

UPT Angkutan Masyarakat Bintuni
Dinas Perhubungan
Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni

- 1 Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat pada tahun 2003 tercatat sekitar 38 ribu jiwa. Sedangkan pada tahun 2015 jumlah penduduk daerah tersebut mencapai 59.167 jiwa atau meningkat sekitar 55,7 %. Peningkatan jumlah penduduk terbesar terjadi di Distrik Bintuni dan Manimeri yang merupakan kawasan pemerintahan dan perdagangan (bisnis). Pada tahun 2000, jumlah penduduk di Distrik Bintuni tercatat hanya sebanyak 6.369 jiwa meningkat menjadi 22.489 jiwa di tahun 2015. Sedangkan jumlah penduduk di Distrik Manimeri meningkat dari 4.557 jiwa di tahun 2000 menjadi 5.617 jiwa di tahun 2015.

Seiring meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi masyarakat, ketersediaan alat transportasi menjadi kebutuhan vital. Sejak tahun 2003 hingga 2014, alat transportasi alternatif yang menjadi andalan masyarakat adalah Ojek. Namun alat transportasi alternatif tersebut dinilai tidak efisien. Selain daya muat yang terbatas, ojek juga menerapkan tarif yang mahal.

Melihat kondisi tersebut, pemerintah daerah mulai menggagas alat transportasi publik yang murah, aman dan nyaman untuk masyarakat. Ide tersebut muncul pada tahun 2012 melalui diskusi bersama antara Drg. Alfons Manibui. DESS (Bupati Teluk Bintuni periode 2005 - 2010 dan 2010-2015), Drs. Wim Fimbay. MM (Asisten I) dan Drs. Yosep Roni Samuel. MM (Sekretaris BAPPEDA).

Dan pada tanggal 1 Januari 2015 terbentuklah sistem transportasi darat bernama LASITER AMB (Layanan Transportasi Terpadu Angkutan Masyarakat Bintuni) yang dijalankan oleh UPT AMB yang berada dibawah Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Teluk Bintuni.

Transportasi Publik LASITER AMB sangat inovatif dan kreatif karena belum pernah diterapkan di daerah lain di Provinsi Papua/Papua Barat. Transportasi Publik ini juga memiliki beberapa keunikan. Antara lain dapat menjangkau daerah-daerah di luar jalur utama yang dilalui oleh Bus AMB karena dilengkapi

LASITER AMB (INTEGRATED TRANSPORTATION SERVICE OF BINTUNI PUBLIC TRANSPORTATION)

22

*Integrated Service Unit of Public Transport Bintuni
Transportation Agency
Teluk Bintuni Regency*

Based on data from the Central Bureau of Statistics (BPS), the total population of Bintuni Bay Regency, West Papua in 2003 recorded about 38 thousand inhabitants. While in 2015 the population of the area reached 59.167 people or increased about 55.7%. The largest population increase occurred in the Bintuni and Manimeri districts, which are the areas of government and commerce (business). In 2000, the number of residents in the Bintuni District recorded only 6,369 inhabitants increased to 22,489 in 2015. While the population in Manimeri District increased from 4,557 in 2000 to 5,617 in 2015.

In accordance with the increasing number of population and economic activity, the availability of transportation become vital requirement. Since 2003 until 2014, the alternative means of reliable transportation of the community is the motorcycle taxi (ojek). But this alternative means of transportation is considered to be inefficient. In addition to limited liability, motorcycle taxis also apply an expensive tariff.

Realizing these conditions, local governments began to initiate cheap, safe and comfortable public transportation for the community. The idea emerged in 2012 through a joint discussion between Drg. Alfons Manibui. DESS (Bintuni Bay Regent for the period of 2005 - 2010 and 2010-2015), Drs. Wim Fimbay. MM (Assistant I) and Drs. Yosep Roni Samuel. MM (Secretary of BAPPEDA).

And on January 1, 2015 a land transportation system called LASITER AMB (Integrated Transportation Service Bintuni Public Transportation) established, run by UPT AMB under the Department of Transportation of Informatics and Communications of Bintuni Bay District.

Public Transport LASITER AMB is very innovative and creative because it has never been applied in other areas in Papua / West Papua Province. Public Transport also has some uniqueness. Among others, it can reach areas outside the main lane traversed by AMB Bus as it is equipped by a feeder transport (feeder car). Feeder

oleh angkutan feeder (mobil pengumpan). Angkutan Feeder berperan melayani penumpang yang berada diluar jalur utama dari dan ke halte bus AMB.

Selain melayani penumpang biasa, transportasi publik AMB juga melayani masyarakat yang akan menjual hasil buminya langsung ke pasar sentral Bintuni. Tarif yang dikenakan pun relatif murah. Untuk koridor I Pasar Sentral Bintuni-Kantor Bupati Bintuni misalnya, hanya bertarif Rp. 10.000,- per orang (umum) dan Rp. 5.000,- per orang (pelajar). LASITER AMB mampu melayani sekitar 28.106 jiwa atau 47,5 % dari total penduduk Teluk Bintuni. Sistem transportasi ini telah melayani penduduk di dua distrik terbesar, yaitu Manimeri (5.617 jiwa) dan Bintuni (22.489 jiwa).

Sistem transportasi publik ini tentu tidak akan berhasil tanpa adanya komitmen dari para pemangku kepentingan. Mulai dari Pemerintah Daerah melalui Sekretariat Daerah, Dinas Perhubungan Infokom, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendapatan Daerah, Kepolisian Resort (Polres) Teluk Bintuni, Samsat Teluk Bintuni, dan Kementerian Pemberdayaan Daerah Tertinggal.

Sementara itu sumber daya pendukung keberhasilan inovasi ini antara lain, *pertama*, sumber dana keuangan. Biaya operasional UPT AMB berasal dari APBD Kabupaten Teluk Bintuni melalui DPA Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi. Anggaran yang dialokasikan pada tahun 2015 sebesar Rp. 7.545.475.000,- dan pada tahun 2016 sebesar Rp. 7.614.054.000,-.

Kedua, sumber daya manusia (SDM). UPT AMB yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor (Eselon IV/a) memiliki jumlah SDM sebanyak 56 orang, dimana 10 orang merupakan petugas administrasi dan 46 orang merupakan petugas lapangan. *Ketiga*, sumber daya teknis. Peralatan teknis yang digunakan dalam operasional pelayanan transportasi AMB, meliputi perangkat komunikasi standard seperti Radio/HT, Drown dan CCTV yang tersedia pada setiap Bus AMB.

Keberlanjutan Inovasi ini menjadi komitmen dari Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni salah satunya dengan menyiapkan anggaran setiap tahunnya. Tak hanya itu, dasar hukum yang sebelumnya Peraturan Bupati (PERBUP) akan ditingkatkan mejadi Peraturan Daerah (PERDA) sehingga akan menambah jangkauan pelayanan.

Sistem Layanan Transportasi Terpadu Angkutan Masyarakat Bintuni (LASITER AMB) bisa diterapkan di beberapa daerah lainnya, khususnya di Papua dan

serves passengers outside the main line, come and go to AMB bus stop.

Besides serving regular passengers, AMB's public transport also serves people who will sell their produce directly to the central market of Bintuni. Their Rates are relatively cheap. For corridor I Bintuni Central Market-Bintuni Regent Office for example, only Rp. 10.000, - per person (general) and Rp. 5.000, - per person (student). LASITER AMB is able to serve approximately 28,106 people or 475% of the total population of Bintuni Bay. This transport system has served residents in the two largest districts, namely Manimeri (5,617 inhabitants) and Bintuni (22,489 inhabitants).

This public transport system certainly will not succeed without the commitment of the stakeholders. Starting from the Local Government through the Regional Secretariat, Department of Transportation Infokom, Public Works Department, Regional Revenue Service, Bintuni Bay Resort Police (Polres), Samsat Bintuni Bay, and Ministry of Empowerment of Disadvantaged Areas.

In the meantime the resources supporting the success of this innovation, among others, firstly, the source of financial funds. The operational cost of UPT AMB is derived from APBD of Bintuni Bay Regency through DPA of Transportation Department of Informatics and Communication. The budget allocated in 2015 is Rp. 7545.475.000, - and in the year 2016 of Rp. 7.614,054.000, -.

Secondly, human resources (HR). The UPT AMB led by a Head of Office (Echelon IV / a) has a total of 56 people, of whom 10 are administrative and 46 are field officers. Thirdly, technical resources. The technical equipment used in AMB's transportation service operations includes standard communication devices such as Radio / HT, Drown and CCTV available on each AMB Bus.

Sustainability of this Innovation is a commitment of the Regional Government of Bintuni Bay, one of them by preparing a budget every year. Not only that, the previous legal basis of Regent Regulation (PERBUP) will be increased to become Regional Regulation (PERDA) so it will increase the reach of service.

Integrated Transportation Service System Bintuni Community Transport (LASITER AMB can be applied in several other areas, especially in Papua and West Papua which have similar geographical location, community traditions and so on.

To monitor and evaluate the performance of AMB's public transportation services, the stakeholders undertook several ways, including 1). Conducting briefings every day before and after conducting oprasi to field officers; 2) Conducting a joint

Papua Barat yang memiliki kesamaan letak geografis, tradisi masyarakat dan sebagainya.

Untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelayanan transportasi publik AMB para pemangku kepentingan melakukan beberapa cara, diantaranya 1). Melakukan briefing setiap hari sebelum dan sesudah melakukan operasi kepada para petugas lapangan; 2) Melakukan rapat bersama antara kepala UPT dan para Kepala Unit dan juga bersama semua staf AMB; 3) Menempatkan petugas-petugas pengawas disejumlah titik, seperti halte, bengkel kerja dan lain – lain.

Tak hanya transportasi darat, Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi dalam waktu dekat juga akan mewujudkan transportasi air atau laut. Dengan demikian diharapkan kedepannya daerah pesisir yang jauh dengan ibu kota Kabupaten (Distrik Bintuni) serta ibu kota distrik lainnya akan terjangkau oleh masyarakat. Hal ini diharapkan akan menjawab masalah transportasi pada daerah pesisir yang selama ini memiliki keterbatasan alat transportasi dan tingginya biaya. Karena Bus AMB mulai beroperasi dari jam 06.00-18.00 WIT, anak-anak sekolah juga dapat terlayani sehingga masuk dan pulang sekolah bisa tepat waktu.

Pembangunan sistem transportasi publik ini memberikan pembelajaran yang bisa dipetik. *Pertama*, pentingnya dukungan pemerintah daerah dan legislatif untuk dapat meningkatkan dasar hukum UPT AMB. *Kedua*, partisipasi publik sangat penting untuk keberhasilan tujuan. *Ketiga*, kepercayaan, kenyamanan dan kepuasan masyarakat menggunakan transportasi Angkutan Masyarakat Bintuni merupakan prasyarat untuk keberhasilan Pelayanan.



*meeting between the head of UPT and the Head Unit and also with all AMB staff;
3) Locate supervisory officers at some point, such as bus stops, workshops and others.*

Not only land transportation, the Local Government through Transportation Department of Informatics and Communications in the near future will also realize the transportation of water or sea. Thus, it is hoped that the far coastal areas with the district capital (Bintuni District) and other district capitals will be reached by the people. This is expected to address the problem of transportation in coastal areas that have limited transportation tools and high costs. Since AMB Buses start operating from 06.00-18.00 WIT, school children can also be served so that school entry and return can be on time.

The development of this public transportation system provides lesson that can be learned. First, the importance of local government and legislative support to improve the legal basis of UPT AMB. Second, public participation is critical to the success of the objectives. Third, the trust, comfort and satisfaction of the people using Bintuni Community Transport is a prerequisite for the success of the Service.



MODEL PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA (PILKADES) MELALUI SISTEM ELEKTRONIK VOTING

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pemerintah Kabupaten Batang Hari

- 1 Di Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, telah dilaksanakan pemilihan kepala desa (Pilkades) secara serentak bergelombang sebanyak 33 Desa di 8 kecamatan dengan cara pemilihan Sistem Elektronik Voting yang menggunakan KTP-elektronik. Pelaksanaan Pilkades secara voting itu pun berlangsung dengan baik dan sukses. Atas keberhasilan tersebut, banyak kalangan mulai anggota DPR, Mendagri, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kabupaten Batang Hari yang sangat tertarik. Sebagian kalangan menilai, Sistem Elektronik Voting yang menggunakan KTP-elektronik sebagai salah satu bentuk solusi atas beberapa kesalahan dari sistem pemilihan kepala desa secara langsung/teknik mencoblos.

Teknik Pemilu Kepala Desa E-voting menggunakan KTP-elektronik merupakan pertemuan dua kutub yang berbeda, yaitu kutub demokrasi dan kutub efisiensi. Artinya, di samping tetap menghargai kesepakatan setiap orang, teknik voting sangat efisien dari segi biaya dan waktu, hemat biaya hingga 70% di bandingkan dengan biaya pilkades dengan sistem yang selama ini berlangsung dengan sistem coblos.

Sedangkan dari sisi waktu, dari pelaksanaan di 33 desa, dapat mempercepat pemilihan untuk mengetahui hasil pemilihan kepala desa. Sesuai dengan pengalaman, pemungutan suara selesai pukul 13.00, begitu diproses kira-kira satu jam atau pukul 14.00 sudah diketahui siapa pemenangnya. Jadi tidak menunggu selama 30 hari untuk mengetahui hasil pemungutan suara pemilihan kepala desa.

Di samping menjadi alternatif solusi terhadap masalah-masalah dalam Pilkada dan Pilkades, meskipun dalam skala yang masih relatif kecil, secara keseluruhannya (tingkat desa) penerapan sistem e-voting dengan menggunakan KTP-elektronik di Kabupaten Batang Hari perlu mendapatkan apresiasi sekaligus perhatian. Karena Pilkades secara serentak bergelombang sebanyak 33 desa yang dapat memperaktekkan penggunaan teknologi

MODEL OF VILLAGE HEAD SELECTION (PILKADES) THROUGH VOTING ELECTRONIC SYSTEM

23

Population and Civil Registration Agency
Batang Hari Regency

E In Batang Hari District, Jambi Province, there have been elections of village heads (Pilkades) simultaneously undulating by 33 villages in 8 sub-districts by electing Voting Electronic System using electronic ID (resident) card. Pilkades implementation by voting it went well and successful. For this success, many people started from the House of Representatives, the Minister of Home Affairs, the Provincial DPRD (regional Parliament), and the DPRD of Batang Hari Regency who were very interested. Some people judge, Electronic Voting System that uses electronic resident card as one form of solution for some errors of the village head election system directly / technique to vote.

Election Technique Head of Village E-voting using electronic-KTP (resident card) is a meeting of two different poles, namely pole democracy and pole efficiency. This means that in addition to respecting everyone's agreement, voting techniques are very efficient in terms of cost and time, cost savings of up to 70% in comparison with the cost of Pilkades with systems that have been going on with the piercing system.

While, in terms of time from implementation in 33 villages, it can accelerate the election to find out the results of village head elections. In accordance with experience, voting finished at 13.00 o'clock, once processed approximately one hour or at 14.00 o'clock it is known who the winner is. So, the people do not wait for 30 days to know the result of election of village head election.

In addition to being an alternative solution to the problems in Pilkada and Pilkades, although on a relatively small scale, overall (village level) implementation of e-voting system by using Electronic-KTP (residen card) in Batang Hari Regency needs to be appreciated as well as attention. Because the Pilkades are simultaneously undulating as many as 33 villages that can practice the use of e-voting technology using NIK-based ID card is Batang Hari Regency.

Technically, the implementation of Pilkades e-voting System using Electronic-KTP

e-voting dengan menggunakan KTP-elektronik berbasis NIK adalah Kabupaten Batang Hari.

Secara teknis, penerapan Pilkades Sistem e-voting dengan menggunakan KTP-elektronik, KK, Akta Kelahiran berbasis NIK ini diprakarsai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Langkah ini seiring dengan penerapan kebijakan nasional KTP elektronik (KTP-el), KK SIAK, dan Akta Kelahiran SIAK berbasis NIK yang telah melahirkan *database* kependudukan yang lebih akurat.

Penggunaan KTP elektronik berbasis NIK merupakan cikal bakal sekaligus syarat awal bergulirnya penggunaan elektronik-voting pemilihan kepala desa dengan menggunakan KTP-el karena data kependudukan yang bersifat tunggal telah mengurangi risiko timbulnya pada aspek data pemilih. Pemilihan kepala desa dengan sistem e-voting di Kabupaten Batang Hari bahkan menggunakan layar sentuh sebagai media penyalur aspirasi dan KTP-elektronik sebagai kartu pemilih.

Berkaitan dengan prosedur pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak bergelombang dengan sistem e-voting, terdapat prosedur tetap pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari yang terdiri dari 16 tahap pelaksanaan.

Pada pelaksanaan pertama, Juli 2016, di Desa Lopak Aur, Kecamatan Pelayung, dihadiri oleh pejabat dari Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, BPPT Jakarta, pejabat Provinsi Jambi, dan instansi terkait di Kabupaten Batang Hari. Pilkades dengan sistem e-voting perdana di Desa Lopak Aur pun dinilai sukses. Setelah itu dilanjutkan dengan desa lain hingga mencapai 33 desa.

Dalam penerapannya, setelah finalisasi DPT, proses yang tak kalah penting adalah fasilitasi TPS. TPS tidak hanya berfungsi sebagai tempat pemungutan suara tetapi juga merupakan tempat sosialisasi pelaksanaan Pilkades dengan *e-voting*. Di TPS selain peralatan pemilihan harus terdapat dua unsur lain, yaitu DPT yang ditempelkan dan petugas keamanan. Selain itu, di lokasi TPS minimal harus terdapat dua bilik pemilihan dan satu tempat untuk melakukan verifikasi. Peralatan *e-voting* minimal terdiri atas dua buah komputer *voters*, satu buah komputer *server*, satu buah komputer cadangan, satu buah laptop, satu buah LCD proyektor, dan satu buah layar. Setelah proses finalisasi TPS tuntas, tahapan sebelum hari-H yang juga harus dilalui adalah tahapan sosialisasi. Tujuan dari sosialisasi adalah untuk mengetahui dan mencoba mempraktikkan pemilihan dengan metode *e-voting*.

(residen card), KK (Family card), Birth Certificate based on NIK was initiated by the Department of Population and Civil Registration. This step is in line with the implementation of the national policy of electronic ID card (KTP-e), KK SIAK, and NIK-based Birth Certificate Birth which has generated more accurate population databases.

The use of NIK-based Electronic-KTP (residen card) is the origin of the initial requirement of electronic voting-voting of village head election by using Electronic-KTP (residen card) because single population data reduces the risk of occurrence in the voter data aspect. The election of village head with e-voting system in Batang Hari Regency even uses touch screen as aspiration medium and Electronic-KTP (residen card) as voter card.

In relation to the procedure of electing village head electors simultaneously way with e-voting system, there is a fixed implementation procedure issued by the Government of Batang Hari Regency which consists of 16 stages of implementation.

In the first implementation, in July 2016, in Lopak Aur village, Pelayung sub-district, attended by officials from the Directorate of Population and Civil Registration, Ministry of Home Affairs, BPPT Jakarta, Jambi Province officials, and related agencies in Batang Hari Regency. Pilkades with the first e-voting system in Lopak Aur Village was considered a success. After that continued with other villages up to 33 villages.

In its implementation, after the finalization of the DPT (permanent voter data base), a process that is not less important is the facilitation of TPS (voting/polling station). TPS not only functions as a polling station but also a place of socialization of the implementation of Pilkades by e-voting. In polling stations other than electoral equipment there should be two other elements, that is DPT attached and security officers. In addition, at the TPS site there should be at least two voting booths and one place to verify. The e-voting equipment consists of at least two computer voters, one server computer, one backup computer, one laptop, one LCD projector, and one screen. After the finalization process of TPS is complete, the stage before the H-day which must also be passed is the socialization stage. The purpose of socialization is to know and try to practice the election by e-voting method.

Mature preparation is also supported by human resources who have mastered information and communication technology and support sources of financing derived from the Regional Budget Expenditure Batang Hari District to finance and purchase tools execution Pilkades e-voting

Persiapan yang matang tersebut juga didukung sumber daya manusia yang telah menguasai teknologi informasi dan komunikasi serta dukungan sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari untuk membiayai dan pembelian alat-alat pelaksanaan Pilkades *e-voting*. Adapun kendala yang dihadapi adalah adanya warga masyarakat yang buta huruf yang tentu kesulitan saat berhadapan dengan mesin *e-voting*. Solusi yang sudah dilaksanakan yaitu mengadakan sosialisasi pada waktu gladi resik untuk warga yang tidak bisa membaca dan menulis dituntun dan dibantu oleh petugas TPS untuk dapat memilih dan menentukan pilihan dengan cara menyentuh gambar calon kepala desa.

Dengan beragam manfaat yang bisa diraih, ke depannya tentu kelanjutan dan replikasi Pilkades dengan sistem *e-voting* ini perlu dikaji lebih mendalam, terutama pada beberapa aspek berikut: Kelebihan dan kekurangan sistem pemungutan suara; keuntungan dan risiko penerapan teknologi; perbandingan biaya penerapan sistem dan pemeliharaan perawatan mesin *e-voting*; konsultasi dengan para pemangku kepentingan, terutama yang ada di daerah; dan untuk replikasi agar dapat dibuat peraturan daerah (Perda) dan Peraturan Bupati tentang tata cara pemilihan kepala desa secara *e-voting*.

The obstacles faced are the existence of an illiterate citizen who is certainly difficult when dealing with the e-voting machine. The solution that has been implemented is to conduct socialization at rehearsal time for people who cannot read and write is guided and assisted by TPS officers to be able to choose and make choices by touching the picture of the candidate of village head.

With the various benefits that can be achieved, in the future, the continuation and replication of Pilkades with e-voting system needs to be studied more deeply, especially in the following aspects: The advantages and disadvantages of the voting system; Advantages and risks of application of technology; Cost comparison of system implementation and maintenance of e-voting machine maintenance; Consultations with stakeholders, especially those in the regions; And for replication in order to make local regulations (Perda) and Bupati Regulations on the procedures for election of village heads by e-voting.



MP-TGR (MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN)

Badan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Gorontalo

- 1 Sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi atau disingkat MP-TGR adalah proses persidangan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk mengadili penyelenggara pemerintahan dan atau pihak ketiga (badan usaha/cv/pihak ketiga) terkait temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Sidang MP-TGR diselenggarakan dengan berlandaskan pada Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara. Dalam waktu satu bulan, Sidang MPTGR diselenggarakan minimal satu kali. Sidang MPTGR dipimpin oleh seorang Ketua Majelis (Sekretaris Daerah) dan Enam Anggota Majelis (Asisten Sekretaris Daerah I, II, III, Kepala Dinas PPKAD, Inspektur, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat, serta Kepala Bagian Hukum).

Sebelum ada Sidang MP-TGR, Pemerintah Kab. Gorontalo sebenarnya sudah memiliki sidang dengan tujuan untuk menuntut ganti rugi dari para pegawai maupun pihak-pihak yang terikat dalam pekerjaannya. Namun, sidang yang diselenggarakan ini tidak berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Beberapa hal lain yang tidak sesuai dengan peraturan adalah tuntutan bisa selesai meski tanpa sidang terlebih dahulu. Tertuntut bisa menyelesaikan kasusnya meski tanpa mengikuti sidang hanya dengan membayar ganti rugi sesuai dengan jumlah yang terdapat dalam temuan; Tanpa adanya sidang, tim penagih yang sudah ditunjuk oleh Pemkab Gorontalo akan kesulitan melakukan penagihan kepada para tertuntut dikarenakan ketiadaan SK Bupati yang terkait langsung dengan alasan penagihan tersebut; Pemkab Gorontalo kesulitan memilah jenis temuan yang masuk ke dalam piutang atau ke aset tetap lainnya. Dalam konteks itulah lahir MP-TGR dan sesuai dengan isi dari Peraturan Bupati

MP-TGR (ASSEMBLY CONSIDERATION OF INDEMNIFICATION)

24

Finance Agency
Gorontalo Regency

- The Session of the Indemnification Assembly of Indemnification (Sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi) or abbreviated as MP-TGR is a trial process organized with the aim of adjudicating the administration of the government and / or third parties (business entities / third party) related to the findings of the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI) In Report of Examination Result (LHP).

MP-TGR Session is held based on Regent Regulation No. 29 of 2013 on Procedural Law of Consideration of Financial Complaints and Regional Goods and Regent Regulation No. 54 of 2009 on Procedures for Changes of Loss of the Region Against Non-Treasury Civil Servants. Within a month, MPTGR Session shall be held at least once. The MPTGR session is chaired by a Chairman of the Assembly (the Regional Secretary) and the Six Members of the Assembly (Assistant to the Regional Secretary I, II, III, Head of PPKAD Office, Inspector, Head of Employment and Training Agency, and Head of Legal Division).

Prior to the MP-TGR Session, the Government of Gorontalo Regency actually already has a trial with the aim to demand compensation from employees and parties who are bound in their work. However, this trial is not run in accordance with the laws and regulations.

Some other things that are not in accordance with the rules are the demands can be completed even without a trial first. Demanded to settle the case even without following the trial only by paying compensation in accordance with the amount contained in the findings; In the absence of a hearing, the team of collectors who have been appointed by Gorontalo regency will have difficulties in making billing to the prosecutors due to the absence of the Bupati's Decree directly related to the reason for the collection; Pemkab (District Government) of Gorontalo difficulty sorting out the types of findings that enter into receivables or to other fixed assets. In that context, the birth of MP-TGR and in accordance with the contents of Gorontalo Regent Regulation No. 29 of 2013 on Procedural Laws of the Assembly Consideration of Financial and Regional Compensation Claims, Chapter I Article



Gorontalo Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah, Bab I Pasal 1 poin 8 dan 9 maka pihak- pihak atau kelompok yang terkena pengaruh Sidang MP TGR adalah sebagai berikut: 1. Semua PNS bukan bendahara di lingkungan pemerintah daerah, termasuk pegawai tidak tetap; 2. pejabat negara (Bupati/ Wakil Bupati); 3. pimpinan dan anggota DPRD; 4. pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah; dan 5. pihak lainnya seperti kepala desa dan perangkat desa atau pihak ketiga selaku penyedia barang/jasa atau badan organ lainnya.

Inisiatif pelaksanaan Sidang MP-TGR sendiri diusulkan oleh Yusran Lapananda, SH. MH., selaku kepala dinas PPKAD Kabupaten Gorontalo dengan dukungan penuh dari Bupati David Bobihoe Akib (2005-2010 dan 2010-2015), serta Sekretaris Daerah Ir. Hadijah U. Thayeb, MM yang juga menjabat selaku Ketua Majelis dalam Sidang MPTGR.

Sidang MP-TGR dianggap mampu memecahkan masalah yang sudah diuraikan di atas karena pelaksanaan dan komponennya sama dengan persidangan pada pengadilan umumnya. Unsur-unsur dalam Sidang MP-TGR yang menyerupai persidangan di pengadilan di antaranya adanya hakim yang direpresentasikan oleh Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi. Ketua MP-TGR, wakil ketua MP-TGR, anggota MP-TGR, sekretaris/wakil sekretaris MP- TGR yang bertindak selaku Penuntut; Adanya saksi. MP-TGR berwenang untuk meminta tertuntut untuk mendatangkan saksi yang mengunggulkannya dalam persidangan; Adanya SKTJM (Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak); Adanya Surat Keputusan Pengenaan Ganti Kerugian Negara/Daerah bagi tertuntut yang dinyatakan harus membayar ganti rugi kepada daerah. Surat keputusan ini

1 point 8 and 9 then the parties or groups affected by the Session MP TGR is as follows: 1. All civil servants are not treasurer in the local government environment, including non-permanent employees; 2. state officials (Bupati (Regent) / Deputy Regent); 3. the leadership and members of the DPRD; 4. an employee of the Regional Public Service Agency; And 5. other parties such as village heads and village apparatus or third parties as providers of goods / services or other organs.

Initiative of the MP-TGR Session itself is proposed by Yusran Lapananda, SH. MH., Head of PPKAD Kabupaten (Regency) Gorontalo with full support from Bupati (Regent) David Bobihoe Akib (2005-2010 and 2010-2015), and Secretary of the Ir. Hadijah U. Thayeb, MM who also served as Chairman of the Assembly in MPTGR Session.

The MP-TGR session is deemed to be able to solve the problems outlined above as the implementation and its components are in common with the courts in general courts. Elements in the MP-TGR Session that resemble trial in court include the presence of a judge represented by the Consideration of Indemnification Assembly. Chairman of MP-TGR, vice chairman of MP-TGR, MP-TGR member, secretary / deputy secretary of MP-TGR acting as Prosecutor; The presence of witnesses. MP-TGR is authorized to require the prosecution to bring witnesses to their advantage in court; The existence of SKTJM (Certificate of Absolute Responsibility); The existence of a Decision on the Imposition of Indemnification of the Country / Region for the prosecutor who is declared to have to pay compensation to the region. This decree is issued by the Regional Head; And The existence of Decree of the State / Region Compensation Exemption for the prosecutor who is declared free from the demand to pay compensation to the region.

With the support of the Bupati, Sekda, as well as other work units, the MP-TGR session is held regularly at least once a month. The working units involved in the process of holding the MP-TGR session are the Inspectorate and the District Finance Agency of Gorontalo. The cost for the implementation of the MP-TGR Session is taken from the Regional Budget of Gorontalo Regency. While the space and funding for operational MP-TGR Secretariat in PPKAD Office is supported from DPA (List of Budget Implementation) of PPKAD Office.

To monitor and evaluate the implementation of MP-TGR Session, Gorontalo regency observed from three benchmarks. First, Number of Findings. With the MPTGR Meeting held regularly, Gorontalo regency hopes that the number of findings obtained by the Inspectorate or BPK RI can be minimized annually. Second, the speed of case settlement, and third is the nominal return.

dikeluarkan oleh Kepala Daerah; dan Adanya Surat Keputusan Pembebasan Ganti Kerugian Negara/Daerah bagi tertuntut yang dinyatakan terbebas dari tuntutan untuk membayar ganti rugi kepada daerah.

Dengan dukungan dari Bupati, Sekda, dan juga satuan kerja lainnya, sidang MP-TGR diselenggarakan secara rutin minimal satu bulan satu kali. Satuan kerja yang terlibat di dalam proses penyelenggaraan sidang MP-TGR adalah Inspektorat dan Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo. Biaya untuk pelaksanaan Sidang MP-TGR diambil dari APBD Pemkab Gorontalo. Sementara ruangan dan dana untuk operasional Sekretariat MP-TGR di Kantor Dinas PPKAD didukung dari DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) Dinas PPKAD.

Untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Sidang MP-TGR, Pemkab Gorontalo melihat dari tiga tolak ukur. *Pertama*, Jumlah Temuan. Dengan adanya Sidang MP-TGR yang diselenggarakan secara rutin, Pemkab Gorontalo berharap agar jumlah temuan yang didapatkan oleh Inspektorat atau BPK RI setiap tahunnya dapat terus diminimalisir. Kedua, kecepatan penyelesaian kasus dan ketiga, nominal pengembalian.

Meki kerap terkendala adanya emosi tertuntut setelah sidang diselenggarakan, secara umum Sidang MP-TGR telah menunjukkan beberapa capaian, yakni Dampak Sosial dan Kultural, semua tertuntut bahkan publik akan mengetahui bahwa di Pemkab Gorontalo sudah ada penegakan hukumnya. Dengan demikian, masyarakat maupun pihak-pihak terkait dengan pengelolaan keuangan/barang daerah diharapkan agar dapat mencegah dirinya dari semua tindakan yang menyebabkan munculnya temuan setelah diperiksa oleh BPK RI. Karena jika tidak, maka besar kemungkinan mereka akan diberi status sebagai tertuntut.

Sementara Dampak Ekonomi yang dirasakan, banyak daerah yang menjadikan Kabupaten Gorontalo sebagai daerah studi banding. Saat ini, Sidang MP-TGR memang sedang direplikasi atau didiseminasi oleh daerah-daerah lainnya di Indonesia. Frekuensi kunjungan daerah-daerah lain pun hadir lebih dari satu kali hanya untuk melihat dan mempelajari jalannya proses persidangan MP-TGR di Kabupaten Gorontalo. Para peserta bahkan datang langsung membawa pejabat di daerahnya seperti Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, serta Anggota DPRD. Sejak Tahun 2011 hingga Januari 2016, jumlah daerah yang melakukan studi banding telah mencapai 64 Daerah, baik itu Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Pemerintah Kabupaten.



Meki is often constrained by the emotion demanded after the session is held, in general MP-TGR Session has shown some achievements, namely Social and Cultural Impact, all prosecuted even the public will know that in Gorontalo regency already existing law enforcement. Thus, the public as well as the parties concerned with financial management / local goods are expected to prevent themselves from all actions that cause the emergence of findings after review by BPK RI. Because if they did not do it then, it most likely they will be given the status as prosecuted.

While the perceived economic impacts, many regions make Gorontalo Regency the study area of appeal. Currently, MP-TGR Session is indeed being replicated or disseminated by other regions in Indonesia. The frequency of visits to other areas is present more than once just to see and learn the course of the trial process of MP-TGR in Kabupaten Gorontalo. The participants even came directly bring officials in the area such as the Regent, Vice Regent, Regional Secretary, and Members of the DPRD. Since 2011 to January 2016, the number of regions conducting the comparative study has reached 64 Regencies, be it Provincial Government, Municipal Government, District Government.



PANTASI MART (PUSAT PENGADAAN FASILITAS SANITASI MASYARAKAT)

Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan,
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Pemerintah Kabupaten Sumedang

- 1 Faktor yang paling besar mempengaruhi derajat kesehatan adalah Lingkungan yang mempengaruhi sebesar 45%, selain faktor perilaku 30%, pelayanan kesehatan 20% dan keturunan 5%. Dan berbicara masalah lingkungan hingga saat ini, Indonesia masih terbelenggu dengan kondisi sanitasi lingkungan yang buruk antara lain Indonesia masih menjadi juara ke-2 sedunia dalam hal buang air besar sembarangan.

Kesadaran yang masih rendah juga terjadi di Kabupaten Sumedang. Sampai tahun 2005, misalnya, cakupan (jumlah masyarakat yang memiliki sarana) jamban keluarga masih di bawah 50% dari jumlah penduduk sekitar satu juta orang. Demikian pula dengan akses (keterjangkauan masyarakat akan sarana) jamban masih di bawah 50% sehingga hampir setiap tahun sampai dengan tahun 2009 terjadi kejadian luar biasa (KLB) diare. Diare juga selalu masuk ke dalam sepuluh besar pola penyakit yang ada di Kabupaten Sumedang (laporan dari semua Puskesmas) juga kematian bayi dan balita akibat diare yang cukup tinggi.

Pembenahan sistem pendekatan untuk mengubah perilaku dan memicu kesadaran masyarakat untuk memperhatikan sanitasi yang buruk mulai dilakukan pada tahun 2006. Gerakan ini juga dibangun sebagai respons ketidakberdayaan dukungan anggaran yang tidak seimbang dengan persoalan sanitasi yang ada di masyarakat. Diawali dengan FGD dengan difasilitasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang mengusulkan penerapan metode CLTS. Namun karena keterbatasan sumber daya dan juga anggaran maka seksi Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan kabupaten Sumedang juga HAKLI Cab. Sumedang mulai bergerak secara sukarela dan merekrut tim sukarela tingkat kabupaten yang siap bergerak.

Inisiatif PANTASI MART Minimarket Sanitasi sendiri digagas POKJA AMPL (Kelompok Kerja Air Minum Penyehatan Lingkungan) Kabupaten Sumedang pada tahun 2012 bergerak dengan hati dan keikhlasan yang dikenal dengan

PANTASI MART (COMMUNITY SANITATION FACILITIES PROCUREMENT CENTER)

25

*Water and Sanitation Working Group,
Regional Planning and Development Agency
Sumedang Regency*

- E** *The biggest factor affecting the health status is the environment that affects 45%, in addition to behavioral factors 30%, health services 20% and 5% offspring. And speaking of environmental issues to date, Indonesia is still shackled with poor environmental sanitation conditions, among others, Indonesia is still the 2nd world champion in terms of defecation carelessly.*

Awareness is still low also occurred in Sumedang Regency. Until 2005, for example, the coverage (number of people who have the means) family latrines is still below 50% of the population of about one million people. Similarly, the access (public affordability for facilities) latrines are still below 50%, so almost every year until 2009 extraordinary events (KLB) diarrhea occurred. Diarrhea is also always get into the top ten in disease patterns that exist in Sumedang (reports from all health centers) also infant and child mortality due to diarrhea which is quite high.

Revamping the approach system to change behavior and triggering public awareness to pay attention to poor sanitation began in 2006. This movement was also built in response to the helplessness of budget support that is not balanced with the existing sanitation issues in the community. Beginning with FGD with facilitated West Java Provincial Health Office which proposed the application of CLTS method. However, due to limited resources and also budget, the Health Department of Sumedang Regency Health Office also HAKLI Branch of Sumedang started to volunteer and recruit volunteer team at district level ready to move.

PANTASI MART Initiative Minimarket Sanitation itself was initiated by POKJA AMPL (Working Group of Water Supply for Environmental Health) Sumedang Regency in 2012 moved with heart and sincerity known as "Tim Romli" (Lillaahitaala and Welas Asih Group). PANTASI MART is present as a component of supply for the community that has been triggered in the sense of the importance of water and sanitation and wants to fix their own sanitation facilities in accordance with economic conditions and payment capabilities. Therefore, PANTASI MART provides space for information, consultation also provides various models of



"Tim Romli" (Rombongan Lillaahitaala dan Welas Asih). PANTASI MART hadir sebagai komponen penyedia (*supply*) bagi masyarakat yang sudah terpicu dalam artian menyadari akan pentingnya air dan sanitasi dan ingin membenahi sarana sanitasi mereka sendiri sesuai dengan kondisi ekonomi dan kemampuan pembayaran. Karena itu, PANTASI MART menyediakan ruang informasi, konsultasi juga menyediakan berbagai model sarana yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan masyarakat dengan berbagai model pembayaran yang dapat dipilih sesuai kemampuan masyarakat itu sendiri (kontan, dicicil baik dengan tabungan uang harian, atau dicicil dengan tabungan sampah maupun dicicil dengan bekerja sama melalui Kredit Sehati Bank Sumedang atau melalui BMT Assalam dengan menggunakan kartu.

Gerilya terus dilakukan dengan melakukan pembenahan sistem dan mekanisme tetap dengan segala keterbatasan. Dua strategi lain yang dikembangkan yaitu penguatan kapasitas kelembagaan dan penguatan fasilitasi implementasi di masyarakat bermitra dengan seksi Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan, BAPEDA, PDAM, BPMPOKBPP, Dinas Lingkungan Hidup, SETDA dan semua yang peduli lingkungan, gerakan ini mulai menampakkan hasil.

Tidak ada lagi KLB diare di Kabupaten Sumedang. Hingga akhir 2015 sudah 146 desa/kelurahan mencapai Stop Buang Air Besar sembarangan, 93% masyarakat sudah terakses oleh sanitasi dan diakhir 2013 diare sudah tidak lagi masuk ke dalam 10 besar pola penyakit yang ada di Kabupaten Sumedang.

Keberhasilan itu tentu tak lepas dari sosialisasi dan advokasi yang dilakukan terus-menerus sejak 2011 dan 2012 baik kepada seluruh SKPD dalam POKJA AMPL, para pemangku kebijakan (bupati dan Sekada), lintas program di Dinas Kesehatan, jajaran Puskesmas dan kecamatan serta ke tingkat desa dan para

facilities in accordance with the wishes and capabilities of the community with a variety of payment models that can be selected according to the ability of the community itself (cash, installments either with daily cash savings, or installments with waste savings as well Installments by working together through Credit Sehat Bank Sumedang or through BMT Assalam by using the card.

Guerrilla continues to be done by revamping the system and mechanism remains with all the limitations. Two other strategies developed include strengthening institutional capacity and strengthening facilitation implementation in the community in partnership with the Environmental Health Section of the Health Office, BAPEDA, PDAM, BPMPDKBPP, the Environment Agency, SETDA and all those concerned about the environment, the movement is beginning to show results.

No more outbreaks of diarrhea in Sumedang Regency. Until the end of 2015 already 146 villages / neighborhoods reached Stop Pooping arbitrary, 93% of people are accessible by sanitation and at the end of 2013 diarrhea was no longer entered into the top 10 patterns of disease in Sumedang Regency.

The success is certainly not separated from the socialization and advocacy conducted continuously since 2011 and 2012 both to all SKPD in POKJA AMPL, the stakeholders of the policy (bupati and Sekada), cross program in the Health Office, the ranks of Puskesmas and kecamatan and to the village level and Environmental health cadres. In addition, the establishment of Sanitation Sanitation Management Unit (UPS) Minimarket Sanitation of POKJA AMPL and Management of Water and Sanitation Management Facility and other institutional institute in each village / kelurahan.

The next step is the training of PARTNERS MART UPS Minimarket Sanitasi from District level to village / kelurahan; Mapping of market potentials, managers of PARTNERS MART UPS villages / municipalities mapping potency of drinking water and sanitation related market to see economic opportunity from minimarket sanitation. The other three steps are the Compassionate Sanitation Guerrilla, the preparation and implementation of UPS MART UPS both administratively and the provision of sanitation facilities themselves, as well as assisting the verification of the stop BABS (Buang Air Besar Sembarangan - Pissing Shit Smashed) at around the village area.

The implementation of PANTASI MART innovation has now contributed to various achievements. Among other things, the Center for Procurement of Sanitation Facilities of the Community at the district, sub-district, and village / kelurahan

kader kesehatan lingkungan. Selain itu juga dilakukan pembentukan PANTASI MART Unit Pengelola Sanitasi (UPS) Minimarket Sanitasi POKJA AMPL dan Pengelola Sarana Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi maupun badan kelembagaan lainnya yang ada di tiap desa/kelurahan.

Langkah selanjutnya adalah pelatihan pengelola PANTASI MART UPS Minimarket Sanitasi dari tingkat Kabupaten hingga desa/kelurahan; pemetaan potensi pasar, para pengelola PANTASI MART UPS desa/kelurahan melakukan pemetaan potensi pasar terkait air minum dan sanitasi untuk melihat peluang ekonomi dari minimarket sanitasi. Tiga langkah lainnya adalah Gerilya Sanitasi Welas Asih, penyiapan dan implementasi PANTASI MART UPS baik secara administratif maupun penyediaan sarana-sarana sanitasi itu sendiri, serta membantu verifikasi desa stop BABS (Buang Air Besar Sembarangan).

Implementasi inovasi PANTASI MART pun kini telah menyumbang beragam pencapaian. Di antaranya, adanya Pusat Pengadaan Fasilitas Sanitasi Masyarakat di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan; tercapainya 145 desa/kelurahan stop BABS; 93% masyarakat sudah terakses sanitasi; tidak ada lagi KLB diare sejak 2010 dan diare tidak masuk ke dalam 10 besar pola penyakit di Kab. Sumedang sejak 2013; angka kematian bayi balita akibat diare menurun drastis.

Mengubah perilaku memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, namun dengan beragam pendekatan dan komitmen, bukanlah hal yang mustahil. Karena itu, Tim Minimarket Sanitasi Pokja AMPL Kab. Sumedang terus mencoba mengendalikan semua hambatan dan kendala dengan terus berbenah diri dan juga menangkap segala peluang dan tantangan. Inisiatif pun terus berlanjut hingga sekarang dengan terus melakukan peningkatan dan pembenahan baik secara kuantitas fasilitas maupun kualitas. Apalagi kini sudah 40 desa/kelurahan dan 35 Puskesmas mereplikasi UPS Minimarket Sanitasi ini.



levels; Reach 145 village / kelurahan stop BABS; 93% of people have access to sanitation; No more outbreaks of diarrhea since 2010 and diarrhea does not enter into the top 10 patterns of disease in Kab. Sumedang since 2013; Infant mortality due to diarrhea decreased dramatically.

Changing behavior is not as easy as turning the palm of the hand, but with a variety of approaches and commitments, it is not impossible. Therefore, the Minimarket Sanitation Team of WSS Working Group of Sumedang Regency continues to try to control all obstacles and obstacles by continuing to clean up and also catch all opportunities and challenges. The initiative continues until now with continuous improvement and improvement both in quantity of facilities and quality. Moreover, now 40 villages / urban villages and 35 health centers have replicated this Minimarket Sanitation UPS.



PATUH SELAM (PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KELURAHAN SELAT DALAM)

Kelurahan Selat Dalam
Pemerintah Kabupaten Kapuas

- 1 Keberadaan kelurahan sebagai garda terdepan pemerintahan di daerah sangatlah penting dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, akurat, efektif dan efisien menjadi keharusan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan penyelenggaraan *good governance*.

Sebagai salah satu dari 17 (tujuh belas) kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Kelurahan Selat Dalam merupakan kelurahan yang berada di pusat kota dan sentra bisnis serta karakteristik kelompok sosial masyarakat yang beraneka ragam strata sosial, profesi dan latar belakang pendidikannya. Dengan jumlah penduduk lebih dari 11 ribu jiwa, tentu kelurahan dituntut untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih mudah, dan lebih sederhana, namun tetap transparan dan akuntabel kepada masyarakatnya.

Secara faktual, jenis layanan langsung yang diberikan kepada masyarakat yaitu berjumlah 69 jenis layanan yang menimbulkan kesulitan bagi aparat Kelurahan Selat Dalam untuk melayani masyarakat secara maksimal. Pelayanan yang masih dilakukan secara manual dan konvensional serta birokrasi yang masih berbelit-belit menjadi sesuatu yang dianggap 'wajar' oleh masyarakat selaku pengguna layanan, ditambah pula belum adanya standar pelayanan serta regulasi yang ideal bagi peningkatan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat.

Inisiator yang mengusulkan gagasan atau ide terhadap pemecahan masalah dan melihat fenomena tersebut untuk segera diatasi adalah Lurah Selat Dalam. Adapun gagasan atau ide kreatif ini sebenarnya adalah proses adaptasi dari program PATEN dari pemerintah dan dimodifikasi sedemikian rupa sistem dan prosedurnya sesuai dengan kewenangan dan tupoksi kelurahan serta dipadukan dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang sederhana dan mudah.

PATUH SELAM (INTEGRATED ADMINISTRATION SERVICE SELAT DALAM VILLAGE)

26

*Selat Dalam Sub-Districts
Kapuas Regency*

- *The existence of kelurahan (village) as the front guard of government in the region is very important in providing direct service to the community. The quality of public services that is fast, easy, accurate, effective and efficient becomes a necessity in the framework of bureaucracy reform to realize the implementation of good governance.*

As one of 17 (seventeen) urban villages in Kapuas Regency, Central Kalimantan Province, Selat Dalam Village is an urban center and a business center as well as the characteristics of social groups that various social strata, profession and educational background . With a population of more than 11 thousand people, the kelurahan is required to provide faster, easier, simpler, yet transparent and accountable services to the community.

In fact, the direct service given to the community is 69 types of services that cause difficulties for the Selat Dalam urban village to serve the community maximally. Services that are still done manually and conventionally and bureaucracy are still convoluted into something that is considered 'reasonable' by the community as a service user, plus the lack of service standards and regulation ideal for improving the quality of excellent service to the community.

The initiator who proposes ideas or ideas on problem solving and sees the phenomenon to be addressed immediately is the Village Head of Selat Dalam. The idea or creative idea is actually the process of adaptation of the PATENT program from the government and modified in such a way the system and procedures in accordance with the authority and tupoksi kelurahan and combined with applying information and communication technology (ICT) is simple and easy.

This initiative is also the answer and the right solution to overcome the problems that occur in the framework of improving the service to the community, especially in the area of Selat Dalam Subdistrict (Village) so that the public service innovation is called PATUH SELAM (Integrated Administration Service of Selat Dalam Village).

Inisiatif ini juga menjadi jawaban dan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rangka perbaikan layanan kepada masyarakat khususnya di wilayah Kelurahan Selat Dalam sehingga inovasi pelayanan publik ini dinamakan PATUH SELAM (Pelayanan Administrasi Terpadu Kelurahan Selat Dalam). Inovasi PATUH SELAM merupakan "suatu inovasi kegiatan layanan publik di tingkat kelurahan yang dimulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen / surat yang dilakukan di satu tempat (meja/loket pelayanan) secara terpadu". Inovasi ini dibuat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, akurat, sederhana, namun tetap transparan dan akuntabel dalam rangka reformasi birokrasi dan mewujudkan penyelenggaraan *good governance* sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah.

Untuk menerapkan inovasi, terlebih dahulu dilakukan berbagai pendekatan. Di internal misalnya, mengubah *mindset* aparatur kelurahan untuk memberikan pelayanan yang lebih responsif, lebih mudah, lebih cepat dan lebih profesional melalui inovasi PATUH SELAM.

Sedangkan strategi inovasi yang diterapkan inisiator dengan menggunakan strategi empirik rasional. Dalam kaitannya dengan ini, inisiator melakukan perubahan dan inovasi untuk bidang pelayanan publik di tingkat kelurahan berdasarkan pemikiran, ide, dan pengalaman dalam bidang tersebut dengan tujuan akhirnya adalah dapat memberikan manfaat bagi masyarakat selaku pengguna layanan.

Untuk mencapai target itu, penerapan inovasi PATUH SELAM dilakukan dalam beberapa tahap. *Pertama*, menjalankan prinsip 'one stop services', karena untuk keperluan apa pun sudah disiapkan petugas layanan khusus. Tujuan utamanya, memangkas alur birokrasi dan menghindari pungutan liar. *Kedua*, merancang aplikasi yang sederhana dan tanpa biaya yaitu sistem informasi dan manajemen pelayanan publik yang berbasis *database* dan *user friendly*. *Ketiga*, menyiapkan media informasi pelayanan dan pengaduan baik yang bersifat langsung maupun berbasis *online* melalui media sosial. Tahap ini mewujudkan transparansi dan keterbukaan informasi publik serta meminta umpan balik dari para *stakeholders*.

Melalui inovasi pelayanan administrasi secara lebih terpadu dan modern ini, Kelurahan Selat Dalam mampu melakukan perbaikan layanan publik dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Kelurahan Selat Dalam sendiri dapat dikatakan sebagai satu-satunya kelurahan di Kabupaten Kapuas bahkan di Provinsi Kalimantan Tengah yang telah berhasil menerapkan dan



PATUH SELAM is an "innovation of public service activities at urban village level starting from the stage of application to the publication of documents / letters conducted in one place (desk / counter service) in an integrated manner".

This innovation is made to improve the quality of public services that is fast, easy, accurate, simple, yet transparent and accountable in the framework of bureaucratic reform and realizing good governance in line with the vision and mission of local government.

To apply innovation, first approaches are made. Internally, for example, changing the mindset of the kelurahan (Village) apparatus to provide a more responsive, easier, faster and more professional service through PATUH SELAM innovation.

While the innovation strategy applied by the initiator by using rational empirical strategy. In this regard, the initiator makes changes and innovations for the field of public services at the kelurahan (village) level based on ideas, ideas, and experience in the field with the ultimate goal is to provide benefits for the community as users of the service.

To achieve that target, the implementation of PATUH SELAM innovation is done in several stages. First, to run the principle of 'one stop services', because for any purpose has been prepared by special service personnel. Its main purpose is to cut the bureaucracy and avoid illegal fees. Second, designing a simple and no-cost application of information systems and public service management that is database-based and user friendly. Third, prepare media information services



menjalankan inovasi PATUH SELAM ini. Sejak diimplementasikan pada 31 Desember 2017 dan diresmikan oleh Bupati Kapuas, inovasi ini terus konsisten dijalankan oleh Kelurahan Selat Dalam dalam rangka memberikan layanan publik yang prima kepada masyarakatnya.

Keberhasilan tersebut tak lain karena dibangun berlandaskan komitmen yang kuat dari inisiator dan aparatur kelurahan secara bersama-sama yang menghasilkan *team work* kelurahan. Selanjutnya adalah memaksimalkan sumber daya aparatur yang meski terbatas jumlahnya untuk dimobilisasi karena pada prinsipnya program ini sangat mudah untuk diaplikasi oleh seluruh aparatur kelurahan.

Komitmen juga diwujudkan dengan memperbaiki dan menambah fasilitas guna mendukung kelancaran inovasi ini yaitu berupa pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor, pemeliharaan gedung kantor dan penyediaan fasilitas pendukung lainnya senilai Rp28,790 juta yang bersumber dari dana Penyisihan PBB kabupaten Tahun 2015, APBD Kabupaten Tahun 2016, swadaya aparatur kelurahan dan sumbangsih dari mitra kerja kelurahan.

Untuk menjaga performa, disediakan juga fasilitas layanan pengaduan baik secara langsung maupun secara online 24 jam sehingga adanya fungsi kontrol dan partisipasi aktif dari masyarakat. Adapun media online adalah Website www.selatdalam.blogspot.com, facebook [patuh.selam](https://www.facebook.com/patuh.selam), twitter [@keL_selat_dalam](https://twitter.com/keL_selat_dalam), instagram: [selatdalam](https://www.instagram.com/selatdalam), email kelurahan.selat.dalam@gmail.com, dan Youtube: Channel Kelurahan Selat Dalam.

and complaints either directly or online based through social media. This stage embodies transparency and openness of public information and requests feedback from stakeholders.

Through this more integrated and modernized administrative service innovation, Selat Dalam Urban Village is able to improve public services and provide direct benefits to the community. Kelurahan (Village) Selat Dalam itself can be regarded as the only village in Kapuas Regency even in Central Kalimantan Province that has successfully implemented and run this PATUH SELAM innovation. Since it was implemented on December 31, 2017 and inaugurated by the Regent of Kapuas, this innovation has been consistently run by the Selat Dalam Urban Village in order to provide excellent public services to its people.

The success is none other because it is built based on a strong commitment from the initiator and the kelurahan (village) apparatus together which resulted in the kelurahan (village) team work. Next is to maximize the resources of the apparatus, although limited in number to be mobilized because in principle this program is very easy to be applied by the entire kelurahan (village) apparatus.

Commitment is also realized by improving and adding facilities to support the smoothness of this innovation in the form of procurement of equipment and office equipment, office building maintenance and provision of other supporting facilities valued at Rp28, 790 million sourced from the UN Disbursement Fund of 2015, APBD (Regional Revenue Budget Plan) Kabupaten (Regency) 2016, the kelurahan (village) apparatus and the contribution of the kelurahan (village) partners.

To maintain the performance, there is also a facility of complaint service either directly or online 24 hours so that the control function and active participation from the community. The online media is Website www.selatdalam.blogspot.com, facebook [patuh.selam](https://www.facebook.com/patuh.selam), twitter [@keL_selat_dalam](https://twitter.com/keL_selat_dalam), instagram: [selatdalam](https://www.instagram.com/selatdalam), email kelurahan.selat.dalam@gmail.com, and Youtube: Channel Kelurahan Selat Dalam.



RUMAH TUNGGU KELAHIRAN (RTK) BAHARI

Dinas Kesehatan
Pemerintah Kabupaten Sinjai

- 1 World Health Organization (WHO) memperkirakan lebih dari 585.000 ibu meninggal per tahun saat hamil, proses persalinan, dan aborsi tidak aman akibat kehamilan yang tidak diinginkan. Sementara itu, Sustainable Development Goals menargetkan Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 70/100.000 Kelahiran Hidup (KH) dan Angka Kematian Neonatus (AKN) 17/1.000 KH. Berdasarkan hasil Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, angka kematian ibu di Indonesia masih tinggi yaitu 359 per 100.000 kelahiran hidup sedangkan Angka Kematian Neonatus (AKN) 19/ 1.000 KH.

Untuk mencapai target SDGs 2030, diperlukan percepatan penurunan AKI/ AKB khususnya pelayanan kesehatan ibu dan anak bagi masyarakat terpencil terutama di wilayah kepulauan. Data Riskesdas 2013 menunjukkan bahwa 48,2% persalinan di Sulawesi Selatan masih dilakukan di rumah. Hal ini dapat mengakibatkan keterlambatan penanganan apabila terjadi komplikasi obstetrik maupun neonatal.

Akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan memang masih menjadi persoalan di sebagian wilayah Indonesia, khususnya di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Pun demikian di wilayah Kabupaten Sinjai. Kondisi geografis yang tidak semuanya datar dengan akses jalan yang baik menyebabkan beberapa kasus keterlambatan ibu bersalin datang ke pelayanan kesehatan.

Kecamatan Pulau Sembilan merupakan kecamatan di Kabupaten Sinjai yang terpisah dari daratan Sinjai dan berupa kepulauan. Kecamatan ini terdiri dari sembilan pulau dengan luas wilayah yaitu 7,55 km² dan terletak sekitar 12 mil dari ibukota kabupaten. Jumlah penduduk kecamatan Pulau Sembilan 7.963 jiwa dengan kepadatan 1.055 jiwa/km².

Untuk mencapai fasilitas pelayanan kesehatan, Puskesmas Poned dan RS Ponok terdekat harus ditempuh dengan transportasi laut dengan lama tempuh rata-rata 2 - 3 jam. Menyadari kondisi yang menyulitkan ibu hamil tersebut pemerintah

Health Agency
Sinjai Regency

E The World Health Organization (WHO) predicts more than 585,000 women die every year during pregnancy, childbirth and unsafe abortion due to unwanted pregnancy. Meanwhile, the UN Sustainable Development Goals (SDGs) is targeting that by 2030, the global maternal mortality can be less than 70 per 100,000 live births and the neonatal mortality rate will stand at 17 per 1,000 live births. Based on the 2012 Indonesia Health Demography Survey (SDKI) data, Indonesia has quite a high maternal mortality rate, which stands at 359 per 100,000 live births. Meanwhile, the country's neonatal mortality rate is 19 deaths per 1,000 live births.

To achieve the 2030 Agenda for Sustainable Development's targets, accelerated efforts to reduce maternal and neonatal mortality rates, especially health care services for mothers and children in remote communities, particularly those who live in islands, need to be conducted. The 2013 Basic Health Research (Riskesdas) data shows 48.2 percent of childbirths in South Sulawesi still take place at home. This can lead to a delayed treatment, which will be dangerous for a mother who suffers from obstetric fistula and a newborn with neonatal complications.

Poor access to health care facilities remains a problem for people in areas across Indonesia, especially in remote areas, borders and outermost islands. Sinjai also shares a similar problem. Geographical conditions in the regency, in which some of its areas are not flat and has poor road conditions, have led to delayed arrivals of women in labor at health care facilities.

Pulau Sembilan is a district, which is separated from Sinjai's mainland. It comprises nine islands with a total area of 7,55 square kilometers. Located around 12 miles from Sinjai regency's capital, Pulau Sembilan has 7,963 populations with a density of 1,055 people per square kilometer.

Local residents must travel by sea for at least two or three hours to reach community health centers with basic essential neonatus (newborn infant) obstetric services (Puskesmas PONED) and hospitals with comprehensive emergency neonatal



bersama masyarakat Kecamatan Pulau Sembilan berinisiatif menyediakan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) yang pada awalnya dilakukan dengan menyewa rumah penduduk di sekitar dermaga penyeberangan di Kelurahan Lappa.

Selanjutnya atas dukungan masyarakat Kelurahan Lappa, ditetapkanlah sebuah rumah sebagai RTK. Bangunan rumah tersebut merupakan rumah salah seorang warga kelurahan Lappa yang secara sukarela menyediakan sebagian rumahnya untuk dijadikan RTK masyarakat Kecamatan Pulau Sembilan. Selain bangunan, ruangan yang menjadi RTK tersebut disediakan pula fasilitas oleh tuan rumah.

Bentuk pelayanan yang disediakan dalam RTK menyesuaikan kondisi setempat. Berdasarkan letak geografis, Kecamatan Pulau Sembilan terdiri dari 9 gugusan pulau yang terbagi dalam 4 desa, yang dapat dijangkau dengan menggunakan transportasi laut.

Berdasarkan hal tersebut maka pembentukan RTK Bahari adalah Rumah Tunggu Kelahiran Rumah Sakit. Rumah Tunggu Kelahiran Rumah Sakit dimaksudkan mendekatkan ibu hamil berisiko ke RS Ponok (tempat rujukan).

Langkah membangun RTK tersebut pada dasarnya merujuk terobosan kebijakan Kementerian Kesehatan yang disediakan untuk ibu bersalin, terutama ibu hamil dengan risiko tinggi dalam upaya percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

RTK adalah suatu tempat atau ruangan yang berada di dekat Fasyankes (Poskesdes, Puskesmas, Rumah Sakit) yang dapat digunakan sebagai tempat

obstetric services (PONEK Hospitals).

Concerning to geographical conditions that pose challenges to pregnant women, local administration and residents in Pulau Sembilan district initiated to set up a birth waiting house (RTK). They managed to establish an RTK in Lappa sub-district, thanks to supports from residents in the area.

The RTK is located in a house, near a crossing quay in Lappa, which belongs to a family that was willing to provide a part of their house to be used as a waiting house for people in Pulau Sembilan district. The family also equipped the room it gave for an RTK with several facilities.

According to the Health Ministry, services provided in an RTK should be based on local conditions. Geographically, Pulau Sembilan district comprises nine islands, which cover four villages that can be reached by sea transportations.

Based on those conditions, RTK Bahari was set as "Rumah Tunggu Kelahiran Rumah Sakit" (a waiting house for women to give birth at hospital). With such a function, RTK Bahari aims to bring women with high-risk pregnancy to PONEK referral hospitals.

The development of RTK Bahari was based on a breakthrough policy of the Health Ministry that aims to help a woman in labour, especially mothers with high-risk pregnancy. This is part of the government's efforts to accelerate the reduction of maternal and neonatal mortality rates.

RTK is a building located near health care facilities such as community health centers (Puskesmas), village health posts (Poskesdes) and hospitals that can be used as a temporary place for pregnant mothers and their companions (husbands/cadres/families) for several days before and after their childbirth.

RTK is prioritized for mothers with high-risk pregnancy from areas with difficult access to health care facilities. RTK aims to bring closer health care services to pregnant women, women in labour, women in a nifas period (the 40-day period after childbirth during which sexual intercourse is forbidden) and newborn babies so that there will be an increase in the number of women giving birth at a health-care facility. RTK also aims to reduce complications in pregnant women, women in labour, women in a nifas period and newborn babies.

RTK Bahari provides services to women detected to have high-risk pregnancy through Antenatal Care (ANC) and must be referred to a general hospital. It offers

tinggal sementara bagi ibu hamil dan pendampingnya (suami/kader/keluarga) selama beberapa hari sebelum saat persalinan tiba dan beberapa hari setelah bersalin.

Sasaran Rumah Tunggu Kelahiran diutamakan adalah ibu hamil yang berasal dari daerah dengan akses sulit yang memiliki faktor risiko atau risiko tinggi. Rumah Tunggu Kelahiran ini bertujuan untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir sehingga terjadi peningkatan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan serta menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

Di RTK Bahari memberikan pelayanan antara lain, ibu hamil berisiko yang terdeteksi melalui Antenatal Care (ANC) dan harus dirujuk ke rumah sakit umum; menyediakan ruangan/ tempat tidur dan kamar mandi untuk ibu hamil dan keluarga pendamping sebelum dan beberapa hari setelah melahirkan untuk pemulihan; apabila terjadi tanda-tanda bahaya, maka kader akan menghubungi Bidan Desa yang bertugas di lokasi RTK; setiap hari bidan memantau perkembangan kesehatan ibu hamil; apabila terjadi kegawatdaruratan, kader pengelola akan menghubungi *Call Center* Rujukan RSU 118 atau menelepon ke (0482) 23116 dan nomor *handphone* kepala Puskesmas Pulau Sembilan (081241735547) untuk memanggil Ambulans Rujukan khusus pulau Sembilan.

Dengan dukungan penuh dari Dinas Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten Sinjai, RTK Bahari pun terus menunjukkan peran pentingnya. Beberapa capaian yang diraih antara lain mampu mendekatkan ibu hamil berisiko/komplikasi ke tempat rujukan, terbentuknya *call center* rujukan antara Puskesmas Balangnipa, Puskesmas Pulau Sembilan, RTK dan RSUD Sinjai. Selain itu, tertanganinya ibu hamil berisiko/komplikasi di Puskesmas Pulau Sembilan dan mampu menurunkan kematian ibu akibat keterlambatan dirujuk.

Untuk efektivitas, Dinas Kesehatan terus melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan RTK dengan menggunakan indikator kriteria keberhasilan rumah tunggu, yaitu: jumlah ibu hamil berisiko yang datang beberapa hari sebelum bersalin dan beberapa hari setelah melahirkan, pendampingan keluarga, jumlah komplikasi *obstetric* dan *neonatal* yang tertangani, jumlah kematian ibu, dan jumlah kematian *neonatal*.

Meski harus terus melakukan edukasi dan sosialisai, sebagai inovasi layanan publik, RTK sangat layak direplikasi dan untuk kelanjutannya, perlu dukungan dana operasional dari pemerintah daerah, promosi, dan RTK dapat dikembangkan di kecamatan lain yang kesulitan akses ke fasilitas pelayanan kesehatan.

rooms or beds equipped with bathrooms for pregnant mothers and their family members before and several days after they give birth to their children until they recover. Once they see dangerous signs, RTK Bahari cadres will contact village midwives assigned at the waiting house. Every day, midwives will monitor the development of the health condition of pregnant mothers. In an emergency situation, RTK Bahari cadres will contact the Hospital Referral Call Center at 118, call (0482) 23116, or contact directly the Puskesmas Pulau Sembilan head's mobile number 081241735547 to get a referral ambulance specially prepared for Pulau Sembilan district.

With full supports from the Sinjai administration and the regency's Health Agency, RTK Bahari has continued to play its important roles. Some of RTK Bahari's major achievements include its ability to bring mothers with high-risk pregnancy or complications closer to referral facilities and to create a referral call center, which connects the waiting house with Puskesmas Balangnipa, Puskesmas Pulau Sembilan and Sinjai Regional General Hospital (RSUD). With the presence of RTK Sinjai, mother with high-risk pregnancy and complications in Puskesmas Pulau Sembilan could be handled well, reducing the number of maternal deaths caused by a late referral.

For its effectiveness, the Sinjai Health Agency has continued to monitor and evaluate the use of RTK by using indicators of success of a birth waiting home. They comprise the number of mothers with high-risk pregnancy coming several days before and after childbirth; family assistance; the number of obstetric and neonatal complications successfully handled; and the number of maternal and neonatal mortality cases.

Although more education and introduction activities need to be done, as a public service innovation, RTK is worth to be replicated. To ensure its sustainability, RTK needs to get operational fund and promotion supports from local administrations. RTK can be developed in other districts, which still find difficulties to access health care facilities.



SELEMPANG MERA (SELAMATKAN PASIEN PASUNG MELALUI TIM SAMURAI ODGJ)

UPTD Puskesmas Omben
Dinas Kesehatan
Pemerintah Kabupaten Sampang

- 1 Kesehatan jiwa masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Data Riset Kesehatan Dasar 2013 mencatat prevalensi gangguan jiwa berat Indonesia mencapai 1,7 per mil. Artinya, 1 - 2 orang dari 1000 penduduk di Indonesia mengalami gangguan jiwa berat (UGM, 2015). Sedangkan Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kesehatan mencatat 731 warga penderita gangguan jiwa di 26 Kabupaten/Kota masih di pasung, hal ini tertinggi di bandingkan Provinsi lain di Indonesia.

Tingginya angka pemasangan di Jawa Timur disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya, faktor budaya yang menganggap penderita gangguan jiwa sebagai aib keluarga, faktor ekonomi dan keluarga tersebut tidak mampu mengobati, karena itu pemasangan banyak terjadi di daerah pedesaan salah satunya di Sampang Madura. (Bapedda Jatim,2017)

Demikian juga di Kabupaten Sampang. Di wilayah kerja Puskesmas Omben, misalnya, data Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) pada tahun 2013, gangguan jiwa berat 45 orang dan gangguan jiwa dengan pasung 28 orang. Tahun 2014, gangguan jiwa berat 57 orang dan gangguan jiwa dengan pasung 30 orang.

Kondisi demikian terjadi karena pelayanan kesehatan jiwa masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Omben belum optimal. Penanganan yang kurang adekuat, selain mengganggu kualitas hidupnya sendiri, juga memberikan dampak bagi keluarga dan lingkungannya. Padahal penanganan kasus gangguan jiwa di masyarakat memerlukan keterlibatan keluarga, masyarakat, serta unsur lintas sektor agar ODGJ yang sudah lepas pasung dapat sembuh sosial, bisa tertangani lebih manusiawi dan berkelanjutan.

Permasalahan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Omben belum optimal juga disebabkan oleh: 1) Kurangnya Pendampingan petugas terhadap pasien jiwa dan keluarganya; 2) Akses pelayanan jiwa jauh

SELEMPANG MERA (SAVE PATIENT TROUGH ODGJ SAMURAI TEAM)

28

Community Health Center of Omben
Health Agency
Sampang Regency

❶ Mental health remains a serious problem in Indonesia. The 2013 Basic Health Research (Riskesdas) data records the prevalence of people with severe mental disorders in Indonesia stands at 1.7 per mil. It means one to two out of 1,000 Indonesian populations suffer severe mental disorders (UGM, 2015). According to the Health Agency data, 731 people with mental illness in 26 regencies and municipalities across East Java are still being shackled, making it a province with the highest number of shackles in Indonesia.

Such a high number of shackles in East Java come from several factors, including culture conditions in the country's society, in which many family members of relatives with mental illness still consider their loved ones as a shame. Many families cannot give medical treatment to relatives with mental illness because of economic difficulties. This is why shackles are rampant in villages, one of which in Sampang, Madura. (Bappeda East Java, 2017).

Data on the number of people with mental disorders (ODGJ) from the Omben Community Health Center (Puskesmas), Sampang, shows that in 2013, there were 45 people with severe mental disorders while the number of shackled mentally-ill people reached 28. In 2014, the number of people with severe mental disorders and shackled mentally-ill people increased to 57 and 30 respectively.

Such a condition can happen because mental health services in the Puskesmas Omben's working areas have not yet been optimal. Inadequate treatment will disrupt the life quality of people with mental illness and can bring impacts to their families and environment. In fact, the handling of people with mental health problems needs the involvement of families, society members, and cross sector elements with a hope that shackled patients can recover socially and can be handled more humanely and sustainably.

Less optimal mental health services at the Puskesmas Omben are caused by several factors: 1) A lack of health workers' assistance to mental health patients

dan tidak merata; 3) Petugas belum kapabel dalam memberikan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat; 4) Belum terbentuk tim Pelayanan Kesehatan Jiwa yang efektif; 5) Kurangnya sosialisasi tentang penanganan pasien jiwa.

Secara nasional, dalam penanganan penyakit jiwa, pemerintah mencanangkan Program "Indonesia Bebas Pasung 2019". Sejalan dengan program nasional itu, di Jawa Timur Gubernur telah mengeluarkan Surat Edaran mengenai komitmen "Jawa Timur Bebas Pasung 2019".

Pasung merupakan wujud pengingkaran martabat manusia, khususnya terhadap pasien gangguan jiwa. Pemasungan dalam waktu yang lama dapat mengakibatkan kecacatan dan kelumpuhan. ODGJ akan mengalami atrofi pada otot sehingga tidak mampu berjalan dan menggerakkan anggota tubuhnya serta dapat mengalami kecacatan. Penanganan kasus gangguan jiwa di masyarakat dukungan berbagai pihak, tidak saja keluarga tetapi juga lingkungan sekitarnya.

Merespon dari permasalahan dan kendala pelayanan kesehatan jiwa masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Omben, maka Puskesmas Omben melakukan strategi pemecahan masalah yang disebut dengan "SELEMPANG MERA ODGJ" (Selamatkan Pasien Pasung melalui Tim Samurai Orang Dengan Gangguan Jiwa). SELEMPANG MERA ODGJ dilaksanakan Puskesmas Omben sejak tahun 2014 dengan kegiatan pembentukan Tim Samurai (Pasukan Pemutus Rantai), melaksanakan *home visit* terpadu pada ODGJ terutama korban pasung, dan melaksanakan *family gathering* untuk evaluasi dan monitoring.

SELEMPANG MERA ODGJ, sebagai inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Puskesmas Omben melalui Tim Samurai ODGJ adalah inovasi yang unik dan mampu menyelesaikan masalah kesehatan jiwa masyarakat. Hal tersebut terwujud karena:

1. Inovasi pertama di tingkat Kabupaten Sampang dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
2. Melibatkan Lintas Program dalam penanganan ODGJ melalui *home visit* terpadu, yaitu dokter penanggung jawab jiwa, perawat, PHN, ahli gizi, promkes, dan analis.
3. Memosisikan tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai penggerak masyarakat dalam identifikasi dan penjangkaran ODGJ disesuaikan dengan kultur masyarakat Madura.
4. Melibatkan Lintas Sektor (Camat, Koramil, dan Kapolsek) untuk mendukung pasien dan keluarga dalam pengobatan dan pelepasan.
5. Bekerja sama dengan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

and their families; 2) Problems of geographic accessibility to mental health care service centers; 3) A lack of capability among health workers in providing mental health care services; 4) An effective mental health care service team has not yet been established; 5) Information on the handling of mental health patients has not yet been adequately informed to the society.

To handle mental illnesses nationally, the government has declared the 2019 Shackle-Free Indonesia program. Along with the national program, East Java governor Soekarwo issued a circular on the provincial administration's "2019 Shackle-Free East Java" commitment.

Shackle is a violation of human rights, especially the rights of people with mental health disorders. Shackling a mental health patient in quite a long period may lead to his or her disablement. The ODGJ will suffer muscle atrophy so he or she can barely walk or move their body parts and has a potential to suffer paralysis. The handling of mental health problems in the society needs supports of various parties, not only from families but also from surrounding communities.

To address problems and challenges in the delivery of mental health services in its working area, the Puskesmas Omben created a problem-solving strategy called "SELEMPANG MERA ODGJ", an abbreviation of a motto, which reads "Selamatkan Pasien Pasung melalui Tim Samurai Orang dengan Gangguan Jiwa (Save shackled patients through the ODGJ Samurai team)". The SELEMPANG MERA ODGJ was first implemented in 2014 through the establishment of so-called "Pasukan Pemutus Rantai (Samurai)", or a force aiming to break the chains of shackle in the society. The Samurai team was assigned to conduct an integrated home visit to ODGJ, especially shackling victims, and to carry out family gathering activities for evaluation and monitoring.

SELEMPANG MERA ODGJ, as a public service innovation delivered by the Puskesmas Omben through its Samurai ODGJ team, is a unique innovation, which manages to solve mental health problems in the society. The program's success can be achieved because:

1. SELEMPANG MERA ODGJ is the first innovation in the handling of people with mental disorders in Sampang.
2. In the handling of ODGJ, it involves cross-platform programs through an integrated home visit approach, which involves a doctor who is responsible in the treatment of the ODGJ patient; a nurse; a nutritionist; an analyst and health promotion and public health nursing (PHN) facilities.
3. SELEMPANG MERA ODGJ places religious leaders and community figures as the prime driver of awareness in the society in identifying and finding ODGJ, in

Kabupaten Sampang dalam pemberdayaan pasien pasca-pasung, dengan memberikan pelatihan keterampilan melalui *Family Gathering*.

6. Efektif dalam meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat sehingga semua ODGJ mendapatkan pelayanan yang semestinya.

Selain itu, *output* yang dihasilkan inovasi ini, yaitu: *pertama*, terbitnya payung hukum dalam penanganan jiwa; *kedua*, terlaksananya kemudahan akses pelayanan; *ketiga*, terlaksananya komitmen bersama dengan *stakeholder* dan lintas sector; dan *keempat*, tercapainya penurunan angka ODGJ pasung tahun 2015 dan 2016.

Keberhasilan juga terwujud karena adanya komitmen dan dukungan dari *stakeholder* lintas sektor serta mereplikasi inovasi di seluruh Puskesmas di Kab. Sampang sebagai realisasi dari Deklarasi Sampang Bebas Pasung 2017. Sementara dukungan dari sisi pendanaan, SELEMPANG MERA ODGJ mendapat suntikan dana baru mulai pada tahun kedua. Pada tahun pertama, 2013, tidak ada pembiayaan karena semua program fokus pada MDG's. Baru pada 2014 ada dukungan dana sebesar Rp1.110.000 dari JKN; tahun 2015 sebesar Rp2.530.000 (JKN); tahun 2016 mendapat dukungan dana sebesar Rp4.277.000 (BOK) dan Rp1.970.000 (JKN); sementara pada tahun 2017, Rp8.624.000 (BOK), Rp8.234.000 (JKN), dan Rp65.725.000 (APBN).

SELEMPANG MERA ODGJ sebagai inovasi satu-satunya yang ada di Kabupaten Sampang bahkan menjadi hal yang baru di Kepulauan Madura, sangat unik dan sangat layak untuk direplikasikan oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas) ataupun di replikasi oleh program-program lain selain bidang kesehatan.

line with cultures in Madurese people.

- 4. The program involves cross sectors, including district heads, military sub-district command (Koramil) commanders, and sub-precinct police chiefs (Kapolsek), to support both patients with mental illness and their families during medical treatments and in returning the patients back to the society.*
- 5. SELEMPANG MERA DGJ works with the Sampang administration's Social Affairs Agency and Public Works and Public Housing Agency in empowering ex-shackled patients by training their skills through Family Gathering activities.*
- 6. SELEMPANG MERA DGJ is effective in expanding the coverage of public mental health services; hence, all ODGJ can get proper treatment.*

The innovation has resulted in several outputs: First, the issuance of an umbrella law for the handling of mental health; Second, the implementation of an easy access for mental health services; Third, the implementation of a joint commitment between stakeholders and cross sectors to improve mental health services; and Fourth, the Sampang administration's successful effort to reduce the number of ODGJ and shackling practices in 2015 and 2016.

The Sampang administration can get such achievements because of commitments and supports from cross sector stakeholders. It has also replicated the innovation in all Puskesmas across Sampang regency as the realization of its 2017 Shackles-Free Sampang Declaration. On financial supports, SELEMPANG MERA ODGJ received funds in the second year of its implementation. In 2013, it did not receive any financial support because all government programs were focused on the Millenium Development Goals (MDGs). In 2014, it received Rp 1.11 million (US\$83,06) worth funds from the national health insurance (JKN) program, followed by Rp 2.53 million from JKN in the following year. SELEMPANG MERA ODGJ received Rp 1.97 million funds from JKN and Rp 4.27 million from the Health Operational Fund (BOK) in 2016. Meanwhile for 2017, the program is provided with Rp 8.23 million funds from JKN, Rp 8.62 million from BOK and Rp 65.72 million from the State Budget (APBN).

SELEMPANG MERA ODGJ as one and the only innovation in Sampang regency that even has become a new thing in Madura Islands is very unique and worth to be replicated by other Puskesmas or implemented in non-health programs.



SI JEMPOL (SISTEM INFORMASI JARINGAN ELEKTRONIK MEDIK PASIEN ONLINE)

RSUD Balaraja
Pemerintah Kabupaten Tangerang

- 1 Pelayanan di bidang kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang paling banyak dibutuhkan masyarakat. Rumah sakit, misalnya, harus mampu mewujudkan pelayanan kesehatan masyarakat (*public services*) khususnya pelayanan kesehatan rujukan yang komprehensif, terpadu dan efisien, serta dapat memberikan pelayanan kesehatan bermutu.

Salah satu ukuran keberhasilan yang sangat penting dalam layanan kesehatan di rumah sakit adalah kepuasan pasien (*customer satisfaction*) yang dapat terwujud melalui proses pengelolaan yang baik (*good clinical governance*). Untuk mereduksi komplain di rumah sakit, kenyamanan pasien, informasi yang jelas dan kepastian layanan, tentu harus mendapatkan perhatian utama pihak manajemen RS. Terlebih bagi rumah sakit umum daerah (RSUD), harus mempunyai bisnis proses dan analisa secara mendalam dengan ide-ide kreatif serta melibatkan masyarakat, dan harus mampu bersaing dengan RS swasta sebagai fasilitas layanan BPJS.

Tantangan inilah yang dihadapi RSUD Balaraja, Kabupaten Tangerang. Menjadi tantangan karena justru kondisi sebaliknya yang dihadapi, yakni masih lama dan lambatnya layanan registrasi pasien. Hal ini menyebabkan menumpuknya antrean dan waktu tunggu lama. Pada tahun 2014 rata-rata waktu tunggu di pendaftaran rawat jalan hingga pasien diperiksa adalah 120 menit dan tahun 2015 yaitu 90 menit, masih jauh dari standar pelayanan minimal (SPM), yaitu 30 menit.

Kondisi lainnya, kapasitas loket pendaftaran tidak sebanding dengan jumlah pasien; proses registrasi pasien tidak simultan dan berulang-ulang (duplikasi), registrasi dan antrean pasien baru di RSUD Balaraja rata-rata membutuhkan waktu lebih lama yaitu 120 menit; pasien peserta BPJS harus mengalami 3 kali antrean; informasi tempat tidur dan hasil pemeriksaan laboratorium yang tidak konsisten. Komplain pasien terhadap informasi ketersediaan tempat tidur terus meningkat. Pada tahun 2014 jumlah komplain mencapai 150 kali dan komplain

THE THUMB (ELECTRONIC PATIENT MEDICAL NETWORK INFORMATION SYSTEM)

29

Balaraja Regional General Hospital
Tangerang Regency

Health care services are one of most-needed public services. Hospitals, for instance, must manage to realize public health services, especially referral health services that are comprehensive, integrated and efficient, and to give quality health care services.

One of important indicators of successful health care services at hospitals is customer satisfaction, which can be realized through good clinical governance. To reduce complaints, hospital managements must give close attention to the delivery of quality services so that patients can feel comfortable and clear information and certainties in the services. The development of Regional General Hospitals (RSUD), in particular, must be preceded with a thorough business process and analysis, combined with creative ideas, and should involve the society. As providers of BPJS (Healthcare and Social Security Agency)-covered health care services, RSUD must be able to compete with private hospitals.

RSUD Balaraja in Tangerang regency has once faced such challenges. Patients must deal with quite a long waiting time and patient registration processes ran very slowly. Such a condition led to a long queue, forcing patients to wait very long before they could get services. In 2014, an average waiting time for outpatient-service visitors reached 120 minutes, which later reduced to 90 minutes in 2015. It was still far from a minimum service standard (SPM) of 30 minutes.

The capacity of registration windows, which was not proportional with the number of patients, became another poor condition people must deal with at RSUD Balaraja. The patient registration process was not simultaneous and there were often duplications. A new patient at RSUD Balaraja must spend 120 minutes on average both to register and to queue before he or she could get a treatment. Even worse, a BPJS patient must deal with three queuing process. Information on the availability of beds and results of laboratory checks at the hospital reportedly were often inconsistent. As the result, patient complaints about poor information on the availability of beds continued to increase. In 2014, RSUD Balaraja received 150



tentang waktu pemeriksaan laboratorium pada tahun 2015 sebanyak 96 kali.

Berangkat dari kesadaran tersebut, RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang berupaya memberikan pelayanan yang terbaik sehingga masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang cepat dan tepat. Salah satu solusi yang dilakukan RSUD Balaraja yakni berinovasi membuat aplikasi teknologi informasi dalam pelayanan pasien dan tata kelola rumah sakit. Inovasi tersebut diberi nama "Si Jempol" (Sistem Informasi Jaringan Elektronik Medik Pasien Online).

Si Jempol merupakan gabungan dari beberapa inovasi pelayanan untuk Reservasi Pasien *Online*; Informasi Tempat Tidur *Online*; Anjungan Pendaftaran Pasien Mandiri; Sistem Informasi Hasil Pemeriksaan Melalui SMS; penulisan dan pemrosesan resep terintegrasi; Bayi Lahir pulang bawa Akte; dan tata kelola rumah sakit lainnya.

Penetapan inovasi Si Jempol sendiri dibahas dalam *Focus Group Discussion (FGD)* yang dibentuk untuk mewadahi gagasan-gagasan inovatif individual menjadi lebih sistemik dan terlembaga. Di dalamnya melibatkan Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Daerah, Bappeda, Dinas Kesehatan, BPKAD, Dewan Pengawas, Inspektorat, Direktur, Manajemen dan Staf, serta *Stakeholder* yang kompeten di bidangnya. FGD menganggap penting adanya aplikasi yang berfungsi melakukan program percepatan proses layanan di RSUD Balaraja.

Si Jempol sendiri merupakan gabungan dari beberapa inovasi pelayanan yaitu: Si Respon (Sistem Reservasi Pasien Online), reservasi pasien *online* melalui *mobile apps* yang dapat di-install pada *smartphone* pasien, dengan fitur: Informasi umum RS/ jadwal dokter, reservasi poliklinik untuk dirinya sendiri maupun

complaints. In 2015, the number of complaints on laboratory checks reached 96.

Based on such conditions, RSUD Balaraja in Tangerang regency strove to give best services so the people could get a fast and accurate hospital service. One of solutions taken by RSUD Balaraja was it made an innovation on information technology application for patient services and hospital management. The innovation is called "Si Jempol", an abbreviation of "Sistem Informasi Jaringan Elektronik Medik Pasien Online (Online Patient Medical Electronic Network Information System)".

Si Jempol comprises several health care service innovations for online patient reservation, online bed information, patient auto reservation, SMS-based information system for the delivery of medical examination results, integrated drug prescription and dispensary process, birth certificate issuance for newborn babies and other hospital management programs.

Innovations to be delivered under Si Jempol were discussed in a Focus Group Discussion (FGD) established to accommodate individual innovative ideas so they could be more systemized and institutionalized. The FGD involved the Tangerang regent, the Tangerang administration regional secretary, regional assistants, the Tangerang Development Planning Board (Bappeda), the Health Agency, the Tangerang Asset and Financial Management Body (BPKAD), the Tangerang administration inspectorate, Supervision Council members, the RSUD Balaraja's director, managerial board members and staffers, and other related stakeholders. The FGD considered it was important to have an application, which could accelerate patient service processes at RSUD Balaraja.

Health-care service innovations that become the elements of Si Jempol are: Si Respon: Sistem Reservasi Pasien Online (Online Patient Reservation System) – This is an online patient reservation feature operated via mobile apps that can be installed on smartphones of patients. This feature offers general information on RSUD Balaraja, schedules of physicians working in the hospital, polyclinic reservation for a consumer or his or her family members who have been registered on his or her account, the history of patients' personal medical services, and a space for patients to submit their criticisms and suggestions; Infoton: Informasi Tempat Tidur Online (Online Bed Information) – This is a system used to give real time information on available beds at RSUD Balaraja. This information can be accessed openly via the hospital's official website; Autoprama (Auto Reservation Machine): Anjungan Pendaftaran Pasien Mandiri (Independent Patient Registration Machine) – This system aims to cut queues at registration counters at RSUD Balaraja's polyclinics; Sihakmas: Sistem Informasi Hasil Pemeriksaan Melalui SMS

pasien lain (keluarga) yang sudah terdaftar dengan akunnya, *history* pelayanan medis pribadi serta pengisian kritik dan saran dari pasien; Infoton (Informasi Tempat Tidur OnLine) yang mampu memberikan informasi ketersediaan tempat tidur secara *real time*, dapat diakses terbuka melalui *website* RSUD Balaraja; Autoprama (*Auto Reservation Machine*), yakni sistem yang berfungsi untuk memangkas antrean pada loket pendaftaran poliklinik; Sihakmas (Sistem Informasi Hasil Pemeriksaan Melalui SMS); e-Resep (Sistem penulisan dan pemrosesan resep terintegrasi), sistem informasi dalam penulisan resep melalui sistem elektronik terintegrasi dengan SIMRS; dan *e-Brojol* (Bayi Lahir Pulang Bawa Akte), pelayanan akta kelahiran bayi baru lahir online di RSUD Balaraja hasil kerja sama dengan Dinas DUKCAPIL Kab. Tangerang.

Ukuran tingkat keberhasilan dari inovasi **Si Jempol** secara umum dapat dilihat dari meningkatnya kepuasan pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari RSUD Balaraja. Secara keseluruhan, output dari **Si Jempol** yang paling berhasil dicapai adalah sebagai berikut:

- Terurainya penumpukan pasien di pendaftaran, laboratorium, farmasi/apotik dan poliklinik;
- ketersediaan berkas rekam medik pada saat pasien berobat menjadi lebih cepat karena dapat disiapkan sebelum pasien datang;
- antrean pasien lebih singkat (rata-rata 2 jam); kepuasan pasien meningkat disertai dengan peningkatan jumlah pasien yang ditangani per hari;
- adanya kepastian bagi pasien yang datang dan harus dirawat;
- tidak ada lagi kecurigaan keberadaan "calo" atau "oknum" yang memperjualbelikan ketersediaan tempat tidur pasien;
- hingga tingkat kedisiplinan RS dalam pencatatan pasien pulang menjadi lebih baik dan tepat waktu.

Meski dalam realisasinya ada sejumlah kendala, di antaranya adanya rotasi SDM yang membutuhkan transfer *knowledge* kembali, kurangnya sosialisasi prosedur tetap, hingga monitoring yang belum optimal, penerapan aplikasi Si Jempol adalah inovatif dan kreatif original yang belum diterapkan pada RSUD manapun di Indonesia.

Untuk menerapkan Si Jempol perlu pendekatan yang harus dilakukan adalah: *Pertama*, pendekatan kelembagaan, membentuk Tim Kerja melalui Surat Keputusan Direktur sebagai landasan dalam pembuatan rencana aksi dan anggaran program; *Kedua*, pendekatan sistem. Si Jempol adalah aplikasi berbasis TI dengan keunikan *Easy Use*, *Two Ways Communication*, *Self Choice*, *Bed Information Service*, dan *Less paper*.

(SMS-based Information System for the Delivery of Medical Check-up Results); E-Resep (An integrated system to prescribe and formulate medicines) – This is an information system for the prescribing of medication. This electronic system is integrated with RSUD Balaraja's information management system (SIMRS); and E-Brojol (A system to ensure each baby born in the hospital can go home with his or her birth certificate) – This birth certificate issuance online system for newborns is jointly developed by RSUD Balaraja and the Disdukcapil Tangerang.

One of indicators of the successful implementation of Si Jempol is an increase in the satisfaction level of patients who have received health care services from RSUD Balaraja. In overall, most significant achievements resulted from the implementation of Si Jempol are:

- A lesser patient queue length at registration windows, laboratory services, pharmacy/dispensary, and polyclinics.*
- During checks up, patients can get their medical record documents more quickly because they can be prepared before they arrive at the hospital.*
- The waiting time of a patient becomes much shorter, reaching only two hours on average.*
- The satisfaction patients get from RSUD Balaraja has continued to improve, along with constant increases in the number of patients handled every day.*
- There is more certainty for people who seek in-patient care services at the hospital.*
- There is no more suspicion on the presence of "broker", "middleman" or "irresponsible parties" that might have traded patient beds.*
- The hospital's discipline in recording the leaving date and time of patients with in-patient services continues to improve and on time.*

Some obstacles have hampered the implementation of Si Jempol. They include the rotation of human resources, which has always required repeated transfers of knowledge; standard procedures that have not yet been introduced optimally and less optimal monitoring activities. Nevertheless, Si Jempol is an innovation and original creativity that has never been implemented in any RSUD across Indonesia.

Several approaches must be taken to implement Si Jempol: First, the institutional approach, which is conducted by establishing a working team via the issuance of an RSUD Balajara Director decree as the basis in the composing of a plan of action and in the program budgeting; Second, the systemic approach, in which Si Jempol becomes an IT-based application with five uniqueness: Easy Use, Two Ways Communication, Self Choice, Bed Information Service, and Less paper.



SIGAP SRATUS 369 PLUS (AKSI TANGGAP PADA SAPI MADURA BUNTING DAN PARTUS)

Dinas Ketahanan dan Peternakan
Pemerintah Kabupaten Pamekasan

- 1 Pulau Madura dikenal sebagai gudang ternak sapi potong dan penghasil garam. Sapi madura merupakan plasma nutfah unggul asli Indonesia yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dengan kontribusi populasi sapi potong sebesar ± 30% di Jawa Timur.

Sektor peternakan sapi potong di Kabupaten Pamekasan cukup berkembang dengan pesat. Hal ini dapat dibuktikan bahwa 70% petani mempunyai ternak sapi walaupun masih merupakan usaha sampingan. Tingkat kepemilikan sapi potong di Kabupaten Pamekasan sekitar 2-3 ekor sapi/Rumah Tangga Peternak (RTP), dengan populasi sapi potong sebesar 156.706 ekor tersebar di 13 kecamatan (Data Dinas Peternakan, 2016).

Namun sayangnya, pemeliharaan sapi, khususnya sapi betina, banyak dilakukan oleh peternak tanpa melaksanakan kaidah-kaidah pola pemeliharaan yang benar (*good practical management*). Peternak sapi betina cenderung sama, baik pada saat sapi tidak bunting, bunting, dan partus. Sebagian peternak bahkan beranggapan memelihara sapi jantan yang digemukkan selama 6 bulan lebih menguntungkan daripada memelihara sapi betina karena jarak kelahiran yang lama (18 bulan).

Pola pemeliharaan yang tidak sesuai dengan kaidah *good practical management* itu jelas berakibat pada menurunnya produktivitas induk sapi betina, status kesehatan pedet (anak sapi) yang dilahirkan jelek, dan rendahnya nilai jual ternak. Menyikapi berbagai permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan meluncurkan inovasi "SIGAP SRATUS dengan Formula SIGAP 369 Plus" sebagai solusi untuk meningkatkan produktivitas reproduksi induk sapi betina dan status kesehatan pedet. Bagi sapi betina bunting, SIGAP SRATUS 369 merupakan merupakan gerakan pelayanan hingga partus (melahirkan).

Gerakan SIGAP SRATUS 369 sasaran utamanya adalah sapi betina produktif

SIGAP SRATUS 369 PLUS (ACTION RESPONSE TO MADURA PREGNANT AND PARTUS CATTLE)

30

*Food and Livestock Agency
Pamekasan Regency*

- *Madura Island has been popularly known as a salt industry center and beef cattle producer. Madurese cattle have been determined by the Indonesian government as an original Indonesian prime germ plasm, which contributes around 30 percent to total beef cattle populations in East Java.*

The beef cattle sector in Pamekasan, Madura, has grown rapidly. This can be proven from a fact that 70 percent of farmers in the regency breed cattle although this is only their side business.

A 2016 Animal Husbandry Agency data shows the ownership of beef cattle in Pamekasan is around 2-3 individual animals per breeder household (RTP), in which the total population number of beef cattle in the regency reaches 156,706, which spread in 13 districts.

Unfortunately, many breeders do not apply good management practices in raising their cattle, especially female cattle. The breeders tend to apply a similar approach, even to their pregnant and calving cattle. Some breeders are of an opinion that having male cattle they can fatten up in six months is economically more promising than keeping the female ones because of their quite a long calving interval (18 months).

A cultivation pattern that is not in line with good management practice principles has eventually led to a decline in the productivity of mother cows, poor health conditions of calves and the low selling value of the cattle.

Responding to these problems, the Pamekasan administration through its Food Security and Animal Husbandry Agency has launched an innovation called "SIGAP SRATUS with SIGAP 369 Plus Formula". This innovation is a solution to increase the productivity of mother cows and to improve the health status of calves. For pregnant cattle, SIGAP SRATUS 369 is a movement to serve them until they are calving in cows.

dimana populasinya 61.115 ekor (data sementara tahun 2016) dengan populasi sapi potong sebanyak 156.706 ekor yang dipelihara oleh rumah tangga peternak (RTP) sapi potong berjumlah ± 75.000 RTP.

Pelaksanaan inovasi SIGAP SRATUS 369 Plus sendiri meliputi: Angka 3 merupakan strategi pelayanan aksi tanggap pada umur kebuntingan 3 bulan; Angka 6, strategi pelayanan aksi tanggap pada umur kebuntingan 6 bulan; Angka 9, strategi pelayanan aksi tanggap pada umur kebuntingan 9 bulan. Sementara "Plus" adalah strategi pelayanan aksi tanggap pada induk melahirkan yang dilanjutkan dengan pelayanan pasca-melahirkan pada periode satu bulan dan periode dua bulan.

Hasil dari penerapan inovasi SIGAP SRATUS 369 Plus antara lain, status kesehatan ternak sapi bunting dan melahirkan baik dan terjamin. Hasil lainnya, diperoleh peningkatan populasi sapi yang signifikan, dari 152.045 ekor (tahun 2014) menjadi 156.706 ekor (tahun 2016); pedet yang dilahirkan dalam kondisi sehat dan kuat; interval kelahiran pedet menjadi 12 bulan (sebelumnya 16-18 bulan); pendapatan peternak meningkat menjadi Rp4,6 juta per tahun (sebelumnya Rp3,3 juta). Kerugian ekonomi akibat masyarakat atau peternak memelihara sapi betina produktif yang tertunda perkawinannya atau memelihara sapi betina yang steril / majir (mandul) dapat dihindari.

Pencapaian tersebut diraih karena dalam pelaksanaan SIGAP SRATUS 369 Plus melalui pendekatan persuasif dan partisipatif dengan sasaran masyarakat peternak khususnya peternak sapi betina produktif. Pendekatan tersebut adalah: 1) Melalui wilayah/desa dengan membentuk desa binaan dengan jalan pendataan populasi sapi betina produktif sebagai sasaran prioritas; 2) Struktural/personal/petugas dengan mengevaluasi dan mengkaji perolehan akseptor (untuk inseminasi buatan) dan pasien ternak sapi (bagi petugas kesehatan Hewan) sehingga masyarakat peternak dapat berdaya, peduli dan berimpati pada pelayanan yang diberikan. 3) Memberdayakan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Hewan dan Pos Inseminasi Buatan; 4) Membuat standart operasional prosedur pelayanan SIGAP SRATUS 369 Plus; 5) Memberikan bantuan pemeriksaan kesehatan hewan dan pemberian mineral untuk pakan tambahan ternak sapi betina produktif; dan 6) Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada peternak betina produktif.

Sebagai sebuah inovasi, SIGAP SRATUS dengan Formula SIGAP 369 Plus terkategori inovatif (original) dan baru dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Pamekasan. Dukungan penuh pun ditunjukkan para pemangku kepentingan, yakni Bupati Pamekasan berperan dalam hal

The SIGAP SRATUS 369 movement has a main target of productive female cows, with the current population number reaching 61,115 individual animals (a temporary data from 2016), which are part of 156,706 beef cattle raised by around 75,000 RTP.

The SIGAP SRATUS 369 innovation comprises three elements: Number 3 refers to a responsive act for mother cows with a three-month pregnancy; Number 6 is to symbolize the responsive act for six month-pregnant cows; while Number 9 refers to a service strategy when mother cows have been nine-months pregnant.

Meanwhile "Plus" is a responsive act strategy for calving cows that will be followed by post-calving services. The services will be provided in the first and second month after the cows calve in.

The implementation of SIGAP SRATUS 369 results in several outcomes, including a good and guaranteed health condition in pregnant and calving cows. Data shows the innovation has produced significant results, which include an increase in the number of cattle populations from 152,045 (in 2014) to 156,706 (in 2016). Born calves are in health and strong conditions thanks to the intervention. The calving interval also can reduce to 12 months only from previously in between 16 to 18 months. The higher productivity has increased breeders' income to Rp 4.6 million (US\$343,82) per year from previously Rp 3.3 million. The innovation can also minimize economic losses among locals or breeders because they can prevent themselves from raising sterile or late-mating female cows.

These benefits could be achieved because of the implementation of SIGAP SRATUS 369 Plus through persuasive and participatory approaches, with cattle breeders, especially breeders of productive female cows, as main targets.

In the approaches, SIGAP SRATUS 369 is delivered via: 1) Areas or villages through the establishment of program-designated villages, in which productive female cow populations as priority targets will be registered; 2) Personnel or officers, in which they will evaluate or examine the availability of acceptors (for artificial insemination programs) and get cows with health problems (for animal health officials). With such efforts it is hoped all breeders can be more empowered, care and have empathy to services provided in this innovative program; 3) the empowerment of the Pamekasan administration's Regional Technical Implementing Unit (UPTD) for Animal Health Post (Puskesmas) and Artificial Insemination Post; 4) the composing of SIGAP SRATUS 369 Plus service standard operating procedures; 5) animal health examination and mineral supplementation for productive female cows' additional food; and 6) assistance programs for productive female cow breeders.

membuat kebijakan dalam menentukan kelanjutan pelaksanaan inovasi ini, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Kepala Bidang Kesehatan Hewan, petugas UPTD Puskesmas dan Pos IB, Kader Kesehatan Hewan, dan Kelompok Tani Ternak/Peternak.

Dukungan dari sisi pendanaan berasal dari Pemerintah (APBD Kabupaten Pamekasan), yaitu tahun 2015 sebesar Rp430 juta, tahun 2016 Rp500 juta, dan pada tahun 2017 sebesar Rp569,206 juta. Selain dari APBD, sumber dana dapat juga berasal dari swadaya masyarakat (peternak mandiri).

Untuk menjaga pencapaian, pada pelaksanaan inovasi ini juga dilakukan evaluasi yang melibatkan unsur pelaksana lapangan antara lain petugas pemeriksa kebuntingan (PKB), petugas medis dan paramedis, petugas inseminator (IB) dan asisten teknis reproduksi (ATR). Pemantauan pelaksanaan kegiatan SIGAP SRATUS 369 Plus pada peternak menggunakan kartu SIGAP SRATUS 369 Plus untuk mengetahui atau memonitor pelaksanaan inovasi ini. Adanya kartu SIGAP SRATUS 369 Plus ini juga mendorong peternak turut aktif dalam mengingatkan petugas untuk melakukan pelayanan lanjutan. Selain itu ada juga stiker SIGAP SRATUS 369 Plus sebagai identitas akseptor pelayanan SIGAP SRATUS. Evaluasi dilakukan dalam waktu mingguan dan bulanan untuk memantau pelaporan sekaligus monitoring dan pengawasan.

Dengan konsep yang komprehensif tentu saja inovasi pelayanan publik dari Kabupaten Pamekasan ini bisa direplikasi oleh daerah lain/Instansi lain selama masih ada sapi betina produktif dan adanya dukungan dari para pemangku kepentingan.

SIGAP SRATUS with SIGAP 369 Plus Formula can be categorized innovative because it is only the Pamekasan administration's Food Security and Animal Husbandry Agency that has implemented the innovation. Several stakeholders have also shown their full supports to the program. They include the Pamekasan regent who has made a policy, which determines the sustainability of the implementation of the innovation. The Food Security and Animal Husbandry Agency head, the Animal Health Division head, UPTD Puskesmas officials, Artificial Insemination Post experts, animal health cadres and breeder groups.

Financial supports for the innovation have been provided by the Pamekasan regional budget (APBD), which allocates Rp 569.21 million in 2017, up from Rp 500 million in 2016 and Rp 430 million in 2015. In addition to APBD, fund sources have also been generated independently by members of the community (from independent breeders).

To maintain the achievements, the implementation of the innovation is accompanied by evaluation activities, which involve implementing elements in the field, such as pregnancy assessment officials (PKB), medical and paramedical workers, artificial insemination officers (IB) and reproduction technical assistants (ATR). Monitoring activities on breeders use SIGAP SRATUS 369 Plus cards so that progress of the implementation of the innovation can be observed.

The SIGAP SRATUS 369 Plus cards also help push breeders to be active in reminding officials to carry out follow up services. Stickers emblazoned with a writing, which reads "SIGAP SRATUS 369 Plus" are also provided to make it easier for officers to identify acceptors of SIGAP SRATUS services. Evaluation activities can be conducted weekly or monthly to monitor reporting and to supervise the program implementation.

With a comprehensive concept, the public service innovation from Pamekasan regency can be replicated in other regions or institutions as long as they still have productive female cows and related stakeholders are willing to give their supports.



TELAT BERKEMAS (TETAP LESTARI BERDAYAKAN KELOMPOK MASYARAKAT)

Dinas Perikanan dan Peternakan
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

- 1 Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) yang berada di wilayah Kalimantan Selatan merupakan wilayah yang memiliki kawasan perairan rawa dan sungai yang termasuk dalam Daerah Aliran sungai (DAS) Batangalai dan DAS Negara. Kondisi demikian membuat wilayah ini memiliki keunikan dan karakteristik yang beragam. Potensi perairan umum yang dimiliki Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebesar 80.790 hektare, meliputi perairan rawa 60.697 hektare dan perairan sungai 20.093 Ha.

Potensi yang cukup besar ini dapat terus dikembangkan dan harus mampu dijaga pengelolaannya. Namun, ada beberapa permasalahan yang muncul, antara lain, terjadinya usaha penangkapan ikan secara ilegal dengan menggunakan alat setrum, potas, dan bahan berbahaya lainnya sehingga banyak merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya perikanan dan ekosistem perairan itu sendiri. Kasus ini khususnya terjadi di daerah perairan umum yang ada di Kecamatan Daha Selatan, Daha Utara, Daha Barat, Angkinang, Simpung, Kalumpang, Kandangan, dan Sungai Raya.

Kenyataan itu jelas mengancam potensi sumber daya ikan dan non-ikan yang dimiliki perairan umum Kabupaten HSS yang sangat kaya dan tergolong alamiah. Berdasarkan data statistik tahun 2016 tercatat 1.879 orang dari jumlah penduduk Kabupaten HSS yang berprofesi sebagai nelayan dan nelayan musiman, bermata pencaharian dari menangkap ikan di perairan umum. Dalam kondisi normal, mereka mampu menghasilkan tangkapan bermacam-macam jenis ikan dan ukuran minimal 3-5 Kg/hari, sedangkan di musim kemarau mereka mampu menangkap ikan 10-20 kg/hari.

Sayangnya, mereka menangkap ikan dengan cara setrum. Menurut nelayan lokal secara ekonomi dengan menyetrum sangat menguntungkan. Sekali penangkapan bisa mendapatkan satu-dua juta rupiah. Namun Tentu dalam jangka panjang akan berdampak negatif terhadap ekologi perairan dan ekonomi masyarakat lokal. Aktivitas *illegal fishing* tidak hanya melemahkan gerak ikan

TELAT BERKEMAS (STAYING SUSTAINABLE EMPOWERS COMMUNITY GROUPS)

31

Fisheries and Animal Husbandary Agency
Hulu Sungai Selatan Regency

• *Hulu Sungai Selatan, a regency in South Kalimantan, has swamp waters and rivers included in Batangalai and Negara river basin areas (DAS). With such a vast waterbody, this area has a diverse uniqueness and characteristics. Waters in Hulu Sungai Selatan cover 80,790 hectares of areas, comprising 60,697 ha of swamps and 20,093 ha of rivers.*

The regency's quite a huge potential can continue to be developed and its management must be maintained. However, several problems have emerged and might bring damage in Hulu Sungai Selatan. These include illegal fishing practices using electric shock, potassium and other dangerous tools, which have caused great losses and threatened the sustainability of fisheries resources and water ecosystem in the area. The destructive fishing practices are rampant in eight districts, which comprise Angkinang, Kalumpang, Kandangan, North Daha, Simpung, South Daha, Sungai Raya and West Daha.

These have clearly threatened the potentials of fish and non-fish resources in Hulu Sungai Selatan's waters that are very rich and still in a natural condition.

Based on 2016 statistics data, 1,879 people in Hulu Sungai Selatan regency worked as fishermen and seasonal fishermen, in which they caught fish in open waters as their livelihood.

In normal conditions, they can catch at least 3 to 5 kilograms of fish with various types and size per day while in the dry season, they can get 10 to 20 kg of fish every day.

Unfortunately, they caught the fish using electricity. According to local fishermen, fishing with electricity shock is profitable economically. They could get Rp 1 million (US\$74.84) to Rp 2 million per fishing. In the long term, however, this could bring negative impacts to the waters' ecology and the economic condition of local communities.

sasaran, mematikan ikan-ikan kecil tetapi juga menyebabkan ikan-ikan menjadi infertile. Kondisi ini dapat dilihat dari semakin menurunnya produktivitas ikan dan kelangkaan jenis-jenis ikan tertentu, serta menurunnya penghasilan nelayan lokal.

Sebagai antisipasi, pada tahun 2010 Pemerintah Kabupaten HSS selaku pemegang kebijakan melalui Dinas Perikanan melakukan terobosan inovasi yang berbasis pemberdayaan masyarakat sekitar. Menjadikan kelompok masyarakat sebagai bagian dari jaringan sistem pengawasan dan pengelolaan wilayah sehingga produktivitas ikan dan non-ikan tetap terjaga.

Strategi ini merupakan sinergi antara Pemerintah Daerah Kabupaten HSS dengan membentuk Tim Koordinasi Pengawasan dan Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan dan Kelompok Pengawas Masyarakat (Pokmaswas) yang berfungsi sebagai penggerak dan pengarah bagi proses pengawasan, pengaturan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan dengan melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna sehingga terwujud kelestarian sumber daya serta keseimbangan ekosistemnya.

Tim Koordinasi secara aktif bekerjasama dan memberdayakan Pokmaswas untuk memberikan pembinaan, penyuluhan dan sosialisasi serta mengikutsertakan dalam kegiatan pengawasan dan razia *illegal fishing*. Pola kerja sama ini mulai memperlihatkan hasil dan mulai dirasakan masyarakat manfaatnya sehingga Dinas Perikanan menggagas sebuah kegiatan "Telat Berkemas" atau Tetap Lestari Berdayakan Kelompok Masyarakat.

Kegiatan ini memberdayakan kelompok masyarakat di sekitar perairan untuk ikut serta berperan aktif dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan sumber daya perikanan. Kerja sama Tim Koordinasi dan Pokmaswas juga memiliki fungsi di antaranya: *pertama*, melaporkan adanya pelanggaran kepada aparat penegak hukum, Polsek dan Dinas Perikanan; melakukan pengawasan usaha penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan; serta penjagaan pelestarian ekosistem perairan umum.

Inovasi Telat Berkemas makin besar perannya dengan adanya berbagai dukungan, antara lain Perda Kabupaten HSS No. 17 tahun 2005 tentang Perlindungan Sumber Daya Ikan dan Larangan Penangkapan Ikan dengan alat setrum dan putas atau sejenisnya; Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan dan Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan; Pengukuhan Pokmaswas sebagai mitra Tim Koordinasi; Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tentang Penunjukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang

With destructive fishing methods, such as using electricity, fishermen could not only get targeted fish but also kill fish seeds. Electricity shock can make fish to become infertile as well. This condition can be seen from the decline of fish productivity, in which certain fish species become rare. With the destructive fishing practice, the income of local fishermen reduced drastically.

As an anticipatory measure, in 2010, the Hulu Sungai Selatan administration as the policy holder via the Fisheries Agency made a breakthrough innovation based on local community empowerment. In this innovation, community groups were included as part of a local management and monitoring system to maintain the productivity of fish and non-fish resources.

In this strategy, the Hulu Sungai Selatan administration established a Fisheries Crime Handling and Monitoring Coordination Team and a Community Monitoring Group (Pokmaswas). In their synergy, the Coordination Team and Pokmaswas serve as the prime mover and director of a process to monitor and regulate the use of fisheries resources through various useful activities so that the preservation of fisheries resources and balanced-ecosystem in Sungai Hulu Selatan waters can be realized.

The Coordination Team has actively worked with and empowered Pokmaswas to give fisheries extension to, to manage and to involve local communities in anti illegal fishing operations and monitoring activities. The partnership resulted in concrete outcomes and people could get benefits of its presence. That was why the Fisheries Agency initiated "Telat Berkemas", an abbreviation of "Tetap Lestari Berdayakan Kelompok Masyarakat" (Long-lasting to Empower Community Groups).

This activity aims to empower community groups around Hulu Sungai Selatan waters areas to participate actively in monitoring and controlling the use of fisheries resources in the regency. The partnership between the Coordination Team and Pokmaswas has several functions: First, to report violations to law enforcers, the sub-precinct police (Polsek) and the Fisheries Agency; second, to monitor fishing and fish cultivation activities; and third, to preserve ecosystem in the waters.

Telat Berkemas' roles have been later getting bigger thanks to supports from authorities. These include the issuance of Hulu Sungai Selatan Bylaw (Perda) No.17/2005 on the protection of fisheries resources and the prohibition of fishing with electricity and potassium and other similar tools; the establishment of the Fisheries Crime Handling and Monitoring Coordination Team; the establishment of the Community Monitoring Group (Pokmaswas) as a partner of the Coordination Team; the issuance of a Law and Human Rights Minister decree on the appointment

Perikanan Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan; dan Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten HSS dan pemerintahan kabupaten tetangga tentang peningkatan kerjasama pembangunan masyarakat di daerah perbatasan.

Sementara sebagai bentuk evaluasi, Dinas Perikanan melalui Bidang Perikanan Tangkap memberikan dan membuat laporan bulanan mengenai penyuluhan dan pembinaan kepada kelompok masyarakat pengawas yang telah dilaksanakan. Selain itu, dilakukan juga Laporan Kegiatan Pengawasan/razia bersama Tim Koordinasi Kabupaten bersama-sama Pokmaswas yang rutin dilakukan setiap bulan.

Melalui optimalisasi kerja sama sekaligus pengawasan, pada tahun pertama realisasi inovasi Telat Berkemas, Tim Koordinasi dan Pokmaswas telah berhasil menangkap 4 orang pelaku; 8 orang (2011), 2 orang (2013), 6 orang (2014), dan 6 orang (2015). Data pelanggaran tersebut mengalami penurunan bila dibandingkan data pelanggaran tindak pidana perikanan pada tahun 2003 sebanyak 24 orang, tahun 2004 sebanyak 14 orang, tahun 2007 sebanyak 12 orang. Di sisi lain, tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan mengawasi sumberdaya dan ekosistem perairan juga meningkat. Masyarakat antusias membentuk Pokmaswas pada masing-masing desa di setiap kecamatan yang mempunyai potensi sumberdaya perairan umum. Dari data jumlah Pokmaswas pada 2010 berjumlah 9 kelompok dan pada tahun 2015 sudah dikukuhkan sebanyak 30 kelompok atau naik 300% dari jumlah semula. Keberhasilan Pemerintah Kabupaten HSS dalam melaksanakan program pemberdayaan Pokmaswa melalui Tim Koordinasi Pengawasan dan Penanganan Tindak pidana di Bidang Perikanan menjadi acuan dan contoh bagi kabupaten lain baik dalam provinsi maupun luar Provinsi Kalimantan Selatan yang datang langsung melihat dan belajar dari program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan.

of civil servant investigators (PPNS) for fisheries in South Kalimantan; and the signing of a memorandum of understanding between the Hulu Sungai Selatan administration and administrations of neighboring regencies on the strengthening of partnership to develop communities in border areas.

As part of its evaluation program, the Fisheries Agency gives and submits monthly reports on fisheries extension and management activities that have been conducted to Pokmaswas. The agency also reports results of monitoring or sudden inspection activities it conducts together with the Hulu Sungai Selatan coordination team and Pokmaswas routinely every month.

By optimizing cooperation and monitoring activities, in the first year of the realization of Telat Berkemas, the coordination team and Pokmaswas managed to arrest four perpetrators of destructive fishing practices, followed by eight perpetrators (2011) , two perpetrators (2013), six perpetrators (2014) and six others (2015). This data shows a decline in violations compared to the one from 2003, during which 24 perpetrators were arrested, followed by 14 people in 2014 and 12 others in 2007.

At the same time, the level of people's awareness on the importance of preserving and monitoring waters resources and ecosystem has continued to improve. People are getting more enthusiastic to create Pokmaswas in every village in every district, which has waters resources potentials. Official data shows the number of Pokmaswas reached nine groups in 2010 and by 2015, 30 groups have been established, or up by 300 percent.

The Hulu Sungai Selatan administration's success in implementing the Pokmaswa empowerment program through the Fisheries Crime Handling and Monitoring Coordination Team has become a guideline and model for representatives from other regencies both in and outside South Kalimantan who have directly come to see and learn the program and activities that have been conducted.



- 1 Kota Surabaya, sebagai kota besar tentu tak luput dari berbagai permasalahan sosial seperti kebakaran, konflik sosial, bangunan runtuh, orang tenggelam, papan reklame roboh, pohon tumbang, kemacetan, orang gantung diri, penemuan bayi, kecelakaan lalu lintas, anak hilang dan permasalahan lainnya. Dengan berbagai permasalahan tersebut, seringkali masyarakat Kota Surabaya mengalami kebingungan dalam menyampaikan keluhan/laporan/pengaduan atau permasalahan lainnya. Hal ini disebabkan karena cukup banyak nomor telepon dari beberapa instansi yang menangani keluhan/laporan/pengaduan atau permasalahan lainnya. Sehingga masyarakat lebih menyukai untuk menyampaikan keluhan ke pihak swasta melalui media cetak maupun media elektronik.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut Walikota Surabaya membentuk suatu pelayanan publik terpadu agar lebih mempermudah dalam mengakses pelayanan publik tersebut, masyarakat cukup menghubungi satu nomor yang mudah diingat dan bebas biaya serta dapat diakses selama 24 jam penuh tanpa libur. Inovasi pelayanan publik tersebut adalah *Command Center 112*.

Dengan adanya *Command Center* masyarakat mendapatkan kemudahan dalam menyampaikan keluhan/laporan/pengaduan atau permasalahan lainnya. Kemudahan tersebut diberikan berupa layanan publik tanpa persyaratan dan tanpa biaya serta dapat ditangani secara cepat, tepat, efektif dan efisien. Layanan publik terpadu tersebut melibatkan semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan masalah. Selain itu Pemerintah Kota juga melibatkan Polrestabes Surabaya, PLN, PDAM, PMI dan Telkom selaku pemberi pelayanan publik lainnya.

Adapun tujuan utama dari pelayanan publik terpadu ini adalah memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali untuk menyampaikan keluhan/laporan/pengaduan atau permasalahan lainnya. Pemerintah Kota Surabaya juga dapat segera menindaklanjuti dan menangani segala keluhan/

E The city of Surabaya, as a big city certainly can not escape from various social problems such as fire, social conflict, collapsed buildings, drowning people, billboards collapsed, fallen trees, and congestion, hanging people (suicide), baby invention, traffic accidents, lost children and other problems. With these various problems, often the people of Surabaya City experienced confusion in complaints / reports / complaints or other problems. This is because quite a number of phones numbers from several agencies that handle complaints / reports / complaints or other problems. So the public would prefer to submit complaints to the private sector through print and electronic media.

To overcome these problems the Mayor of Surabaya established an integrated public service to make it easier to access the public service, the public simply contact a number that is easy to remember and free of charge and can be accessed for 24 hours full without holiday. The public service innovation is the Command Center 112.

With the existence of Command Center community get ease in complaint / report / complaint or other problem. Ease is provided in the form of public services without requirements and no cost and can be handled quickly, precisely, effectively and efficiently. This integrated public service involves all the OPD (Organization of Regional Devices) who have the authority to solve the problem. In addition, the City Government also involves Polrestabes (Police Department) Surabaya, PLN, PDAM, PMI and Telkom as other public service providers.

The main purpose of this integrated public service is to provide convenience for the whole community without exception to submit complaints / reports / complaints or other problems. Surabaya City Government can also follow up and handle all complaints / reports / complaints or other problems quickly, accurately, effectively and efficiently.

laporan/pengaduan atau permasalahan lainnya secara cepat, tepat, efektif dan efisien.

Inovasi pelayanan publik ini bersifat unik dan kreatif karena dapat bersinergi antara OPD di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dengan instansi di luar Pemkot Surabaya dalam memecahkan masalah sosial masyarakat Kota Surabaya. Selain itu pelayanan publik terpadu tersebut memangkas alur birokrasi penanganan bencana. Bila selama ini, OPD yang menangani masalah darurat seperti Dinas Pemadam Kebakaran atau Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat memiliki posko sendiri-sendiri namun Command Center 112 ini, dapat bersinergi dalam satu ruangan untuk menangani keluhan/laporan/pengaduan atau permasalahan lainnya dari masyarakat.

Selain itu inovasi ini juga memiliki keunikan dengan adanya integrasi ratusan CCTV yang tersebar di Kota Surabaya dengan layar pantau yang ada di Command Center Room. Dengan adanya fasilitas ini, petugas operator dapat secara langsung memvalidasi keluhan/laporan/pengaduan atau permasalahan lainnya yang disampaikan oleh masyarakat yang terekam dalam CCTV.

Keunikan lainnya adalah setiap mobil pemadam kebakaran dilengkapi dengan GPS (*Global Positioning System*) sehingga dapat diketahui lokasinya. Ketika terjadi kondisi gawat darurat maka dapat diketahui posisi mobil pemadam kebakaran yang terdekat dengan lokasi kejadian sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat, tepat, efektif dan efisien.

Inovasi ini juga kreatif karena menggunakan Sistem SIAGA (Sistem Informasi Cepat Tanggap) yang merupakan sistem berbasis GIS (Geographic Information System). Mengenai anggaran, *Command Center* 112 sumber anggaran berasal dari APBD Pemerintah Kota Surabaya. Anggaran pengadaan infrastruktur untuk ruangan Command Center 112 sejumlah Rp 3.943.982.900,-.

Command Centre 112 memiliki aplikasi SIAGA yang berbasis peta data spasial. Dari aplikasi tersebut dapat diketahui lokasi sarana penunjang terdekat dengan lokasi kejadian seperti sumur PMK, UPTD dan Pos PMK, puskesmas, pos polisi, rumah sakit, rumah sakit bersalin termasuk juga mobil PMK dan jumlah petugas teknis.

Dalam pelaksanaan Comand Center 112, kurangnya jumlah SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat menerima keluhan/laporan/pengaduan atau permasalahan lainnya yang disampaikan masyarakat melalui telepon menjadi kendala. Hal ini dapat diatasi dengan penambahan jumlah SDM pada tahun

This public service innovation is unique and creative because it can synergize between OPD in Surabaya City Government environment with the outside of Surabaya City Government in solving social problems of Surabaya City society. In addition, this integrated public service cuts the flow of disaster management bureaucracy. If during this time, the OPD that handles emergency problems such as Fire Department or Disaster Management Agency and Community Protection has its own post but this Command Center 112 can synergize in one room to handle complaints / reports / complaints or other problems from the community.

In addition, this innovation also has a uniqueness with the existence of integration of hundreds of CCTV spread across the Surabaya City with a monitor screen in the Command Center Room. With this facility, dispatchers can directly validate complaints / reports / complaints or other issues submitted by communities recorded on CCTV.

Another uniqueness is each fire truck equipped with GPS (Global Positioning System) so it can be known location. When the emergency conditions occur then it can be seen the position of the fire engine closest to the scene so that handling can be done quickly, precisely, effectively and efficiently

This innovation is also creative because it uses the SIAGA System (Quick Response Information System) which is a GIS-based system (Geographic Information System). Regarding budget, Command Center 112 source of budget comes from APBD of Surabaya City Government. The infrastructure procurement budget for the Command Center room 112 amounts to Rp 3,943,982,900, -.

Command Center 112 has a SIAGA application based on spatial data maps. From these applications can be seen the location of the nearest supporting facilities with the location of events such as wells FMD, UPTD and PMK Post, public health center, police posts, hospitals, maternity hospitals including FMD cars and the number of technical officers.

In the implementation of Command Center 112, the lack of human resources (Human Resources) that can receive complaints / reports / complaints or other problems conveyed by the public through the telephone becomes an obstacle. This can be overcome by increasing the number of human resources in the next budgeting year so that all incoming calls can be received and acted upon.

Coordination lines using HT (Handie Talkie) or Rig kredit are often misused by irresponsible individuals so that acceptance is often unclear. This can be overcome by improving the quality of HT lines so that communication between

anggaran berikutnya sehingga semua telepon yang masuk dapat diterima dan ditindaklanjuti.

Jalur koordinasi menggunakan HT atau Rig kredit sering disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab sehingga penerimaannya sering kali tidak jelas. Hal tersebut dapat diatasi dengan peningkatan kualitas jalur HT sehingga komunikasi antar petugas penanganan bencana dapat berjalan dengan baik. Petugas operator pengecekan melalui CCTV atau melakukan koordinasi dengan petugas teknis di lapangan yang terdekat dengan lokasi kejadian yang dilaporkan.

Setelah adanya Command Center 112 Masyarakat cukup menghubungi ke satu call center untuk menyampaikan semua keluhan/laporan/pengaduan atau permasalahan lainnya. Operator akan melakukan koordinasi dengan OPD terkait untuk menangani keluhan/laporan/pengaduan atau permasalahan lainnya yang masuk.

Command Center 112 dilakukan secara berkelanjutan dengan melakukan pengembangan sistem yang diperlukan untuk melakukan peningkatan pelayanan publik. Juga dilakukan penambahan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat.

Meskipun baru setahun Command Center 112 ini diimplementasikan, banyak Pemerintah Daerah dan lembaga lain tertarik untuk melakukan studi banding ke Kota Surabaya guna mereplikasi inovasi ini.

disaster handlers can run well. The operator checks by CCTV or coordinates with the technical officer in the field nearest to the location of the reported incident.

After the Command Center 112 Community just contact to one call center to deliver all complaints / reports / complaints or other problems. The operator will coordinate with the relevant OPD to handle complaints / reports / complaints or other incoming issues.

Command Center 112 is conducted in a sustainable manner by developing the system necessary to improve public services. Also added facilities and infrastructure needed by the community.

Although only one year the Command Center 112 has been implemented, many local governments and other institutions are interested in conducting comparative studies to Surabaya to replicate this innovation.



BCL (BISNIS CAKEP LALU LINTAS LANCAR) PENGATURAN DAN PENGENDALIAN LALU LINTAS MELALUI SMARTPHONE

Dinas Perhubungan
Pemerintah Kota Pontianak

1. Kepadatan lalu lintas dan cenderung semrawut, kondisi inilah yang kerap terjadi di kawasan pusat perdagangan dan jasa (CBD) di Kota Pontianak, tepatnya di sekitar Jl. Tanjungpura, Jl. Diponegoro, dan Jl. H. Agus Salim. Sebagai pusat perdagangan dan jasa, aktivitas lalu lintas di kawasan ini memang sangat padat, apalagi dilewati oleh berbagai jenis moda angkutan, termasuk angkutan petikemas yang melakukan aktivitas bongkar muat dari pelabuhan yang berada di sekitar kawasan tersebut. Belum lagi terbatasnya jumlah petugas untuk mengawasi kawasan tersebut sepanjang waktu.

Keterbatasan personel untuk selalu hadir pada kawasan dalam mengatur dan mengendalikan lalu lintas kemudian digantikan oleh kamera CCTV yang telah dilengkapi dengan pengeras suara. Untuk memudahkan pemantauan dan upaya pengaturan lalu lintas, Dinas Perhubungan Kota Pontianak kemudian memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dengan memanfaatkan aplikasi yang terdapat pada *smartphone* yang telah dipergunakan secara luas di masyarakat.

Kamera CCTV yang terpasang pada ruas jalan dan titik tertentu kemudian dihubungkan dengan *smartphone* yang dipergunakan oleh personel Dinas Perhubungan. Dengan demikian apabila adanya aktivitas yang melanggar aturan dan berpotensi dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dengan mudah dapat diketahui oleh petugas dan dapat langsung diberikan arahan melalui pengeras suara. Apabila arahan tersebut tidak diindahkan petugas dapat langsung bergerak ke lokasi tersebut karena keberadaannya terpantau melalui GPS dan dapat dihubungi dengan mudah melalui radio panggil (HT) yang sudah disediakan.

Penggunaan *smartphone* sebagai alat pemantau kondisi lalu lintas telah dilakukan oleh beberapa kota di Indonesia, namun pemanfaatannya sebagai alat pengatur dan pengendali lalu lintas baru dilakukan di Kota Pontianak. Pengembangan tersebut yakni melalui inovasi BCL (Bisnis Cakep Lalu Lintas Lancar). Untuk mewujudkannya, dibentuk sebuah tim kecil yang berasal dari

BCL (BUSINESS GOOD CURRENT TRAFFICT) ARRANGEMENT AND CONTROL OF TRAFFIC THROUGH SMARTPHONE

33

*Transportation Agency
Pontianak City*

- *Traffic density and tend to be chaotic, this condition that often occurs in the central area of trade and services (CBD) in the city of Pontianak, precisely around Jl. Tanjungpura (Tanjungpura Street), Jl. Diponegoro, and Jl. H. Agus Salim. As a center of trade and services, traffic activity in this area is very crowded, let alone crossed by various types of transportation modes, including container transport that performs loading and unloading activities from ports located around the area. Not to mention the limited number of officers to supervise the area all the time.*

Limitations of personnel to always be present in the region in regulating and controlling traffic then replaced by CCTV cameras that have been equipped with loudspeakers. To facilitate monitoring and traffic management efforts, Pontianak City Transportation Agency then utilizes the development of information technology by utilizing the applications contained on smart phones that have been widely used in the community.

CCTV cameras mounted on roads and certain points are then connected to smart phones used by personnel of the Transportation Department. Thus, if any activity that violates the rules, and potentially can disrupt the smoothness of traffic can easily be known by the officers and it can be directly given direction through loudspeakers. If the directive is not heeded officers can directly move to the location because of its presence monitored via GPS and can be contacted easily via the radio dial (HT) that has been provided

The use of smart phones as a traffic monitoring tool has been done by several cities in Indonesia, but its utilization as a new traffic control and regulator is done in Pontianak City. The development is through innovation BCL (Bisnis Cakep Lalu Lintas Lancar). To make it happen formed a small team that comes from cross-field at the Department of Transportation Pontianak City. The team is in charge from the planning, implementation, to the monitoring and evaluation stages.

This small team works under the direct coordination of Head of Service so that

lintas bidang pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Tim ini bertugas sejak dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga tahapan monitoring dan evaluasi.

Tim kecil ini bekerja di bawah koordinasi langsung Kepala Dinas sehingga kerja tim ini berjalan efektif dan dapat dilaksanakan serta dievaluasi secara langsung perkembangannya. Koordinasi secara eksternal dilakukan melalui forum resmi pada Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Forum LLAJ) Kota Pontianak, maupun secara langsung dengan pihak-pihak terkait sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi.

Sumber pembiayaan yang dipergunakan memanfaatkan kegiatan yang ada pada Bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, seperti pembuatan rambu dan marka, pemasangan CCTV, serta kegiatan patroli dan razia lalu lintas. Untuk pengadaan kelengkapan personel berupa radio panggil (HT) maupun GPS berada pada anggaran yang dikelola oleh Sekretariat Dinas Perhubungan.

Sumber daya manusia yang terlibat selain berasal dari Bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, juga melibatkan Bidang Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Bidang Teknik Kendaraan dan Perbengkelan, UPT LPSE, UPT Perparkiran, dan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor. Aplikasi yang dipergunakan melalui *smartphone* tidak menggunakan aplikasi khusus, namun memanfaatkan aplikasi bawaan dari kamera CCTV yang dipasang. Jaringan yang dipergunakan memanfaatkan jaringan fiber optic dari sistem ATCS bantuan Kementerian Perhubungan Tahun 2008 serta jaringan radio internet yang dikelola oleh Bidang Kominfo. Demikian pula aplikasi pemantau petugas melalui GPS juga memanfaatkan aplikasi bawaan dari GPS tersebut.

Keberhasilan inovasi pelayanan publik BCL di Kota Pontianak secara konkret terutama dirasakan oleh personel Dinas Perhubungan dalam mengatur dan mengendalikan lalu lintas pada kawasan CBD Kota Pontianak. Secara fungsional inovasi pelayanan publik BCL menjadi bagian dari kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak dalam mewujudkan lalu lintas yang tertib, lancar dan aman sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Seluruh pejabat struktural di Bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan serta Kepala Dinas telah menggunakan aplikasi yang dapat memantau kondisi lalu lintas pada kawasan CBD melalui *smartphone* yang dimiliki.

Meski demikian, kendala tetap ada dan yang sering mengganggu adalah terputusnya koneksi CCTV apabila terdapat gangguan aliran listrik dari PLN. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah dengan menyediakan tenaga cadangan melalui penyediaan tenaga baterai yang dipasang pada lokasi

this team work effectively and can be implemented and evaluated directly its development. External coordination is conducted through official forums at the Road Traffic and Transportation Forum (Forum LLAJ) Pontianak City, as well as directly with the relevant parties in accordance with the needs and problems encountered.

Source of financing used utilize existing activities in the Field of Traffic and Road Transport, such as the manufacture of signs and markers, installation of CCTV, as well as activities of patrols and traffic raids. For the procurement of personnel in the form of radio call (HT) and GPS are on a budget that is managed by the Secretariat of the Department of Transportation.



Human resources involved in addition to coming from the Office of Traffic and Road Transport, also involves the Office of Communications and Informatics (Kominfo), Office of Vehicle Engineering and Workshop, UPT LPSE, UPT Parking, and UPT Testing of Motor Vehicles. Applications used on smart phones do not use special applications, but take advantage of built-in applications from installed CCTV cameras. The network utilized fiber optic network from ATCS system of Ministry of Transportation assistance in 2008 and internet radio network managed by Kominfo Office. Similarly, monitoring application officers through GPS also take advantage of the default application from GPS.

The success of BCL public service innovation in Pontianak City is concretely felt especially by personnel of Transportation Department in regulating and controlling traffic in CBD area of Pontianak City. Functionally BCL public service innovation becomes part of the activities undertaken by the Department of Transportation Pontianak City in order to realize the traffic orderly, smoothly and safely in accordance with the authority possessed. All structural officials in the Field of Traffic and Road Transport as well as Head of Service have been using applications that can monitor traffic conditions in the CBD area through owned smartphones.



CCTV. Kendala lain adalah kesadaran masyarakat yang masih rendah, sehingga kehadiran petugas untuk memberikan teguran dan peringatan masih harus sering dilakukan. Keterbatasan petugas untuk selalu hadir di kawasan tersebut disiasati dengan patroli yang selalu melintasi kawasan tersebut setiap saat.

Evaluasi terhadap seluruh kegiatan dilakukan secara rutin pada pertemuan mingguan setiap hari Senin yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas. Seluruh pelaksanaan kegiatan termasuk inovasi BCL dievaluasi untuk diketahui permasalahannya dan dicarikan solusi penyelesaiannya.

Kini, aktivitas parkir yang selama ini bercampur antara roda dua dan roda empat telah dapat dipisahkan. Aktivitas naik turun penumpang di sembarang tempat telah jauh berkurang, kebiasaan sopir angkutan penumpang menaikkan dan menurunkan penumpang di atas jembatan dan di persimpangan sudah hampir tidak terjadi lagi karena selalu terpantau oleh petugas. Akitivitas bongkar muat barang juga telah diatur waktunya dan secara jelas tertulis pada rambu peringatan yang terpasang pada kawasan tersebut. Jumlah petugas yang terbatas dapat bekerja lebih efektif dan efisien dan jangkauan pelayanannya menjadi semakin luas.

Ke depan inovasi yang saat ini telah dilakukan akan diterapkan pada seluruh kawasan strategis yang ada di Kota Pontianak, sehingga kehidupan Kota Pontianak yang mempunyai aktivitas utama dibidang perdagangan dan jasa menjadi semakin baik dan masyarakat menjadi semakin sejahtera.

However, obstacles remain and often interrupt is the disconnection of CCTV connection if there is disruption of electricity flow from PLN. Efforts are made to overcome this is to provide backup power through the provision of battery power installed on the location of CCTV. Another obstacle is public awareness that is still low, so the presence of officers to provide warning and warning must still be done often. Limitations of officers to always be present in the area anticipated with patrols that always cross the area at any time.

Evaluation of all activities carried out regularly at weekly meetings every Monday, led by the Head of Department. All execution of activities including BCL innovation is evaluated for knowing problems and finding solution of the problems.

Now, the parking activities that have been mixed between the two-wheeled and four-wheeled can be separated. Up and down passenger activity in any place has been much reduced, the habits of passenger transport drivers raise and lower passengers on the bridge and at the intersection is almost no longer happening because it is always monitored by officers. The loading and unloading activities activity has also been timed and clearly written on the warning signs installed on the area. The limited number of officers can work more effectively and efficiently and the scope of service becomes wider.

In the future innovations that have been done will be applied to all strategic areas in the city of Pontianak, so the living society in Pontianak City which has a major activity in the field of trade and services become well and the community becomes more prosperous.



CETEK (CUKUP E-KTP SERTAKAN KARTU KELUARGA)

RSUD Al Muluk
Pemerintah Kota Sukabumi

- 1 Kota Sukabumi hanya memiliki satu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H. RSUD ini juga ditunjuk menjadi Rumah Sakit Rujukan regional bagi rumah sakit di wilayah Kota/Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur dengan cakupan jumlah penduduk sasaran sekitar 9,1 juta jiwa. Angka hunian tempat tidur di RSUD R. Syamsudin, khususnya kelas tiga menjadi sangat tinggi, tercatat selama tahun 2014 mencapai angka 116,25% (nilai normal 60-85%).

Hal tersebut terjadi salah satunya dikarenakan RSUD R. Syamsudin masih melayani berbagai penyakit yang seyogyanya dapat ditangani di fasilitas rujukan tingkat pertama. Sehingga beberapa jenis penyakit seperti demam tifoid, diare dan gastroenteritis, demam berdarah, tuberkulosis dan diabetes melitus masih termasuk dalam 10 besar penyakit rawat inap di RS R. Syamsudin.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan pelayanan kesehatan rujukan tersebut, maka Pemerintah Kota Sukabumi berinisiatif menambah RSUD baru yang dinamakan RSUD Al-Muluk. RSUD ini menerapkan program inovatif berupa CETEK (Cukup E-KTP sertakan Kartu Keluarga). Melalui program ini seluruh masyarakat Kota Sukabumi dengan tanpa melihat status sosial dan ekonominya akan mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis di RSUD Al Muluk dengan hanya menyertakan fotokopi e-KTP dan Kartu Keluarga (KK) sebagai persyaratan administrasi.

Melalui program CETEK ini, terdapat sejumlah perbaikan kondisi pelayanan kesehatan rujukan di Kota Sukabumi seperti terdapatnya satu RSUD baru di Kota Sukabumi, jumlah penduduk Kota Sukabumi yang mengajukan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) menjadi berkurang, angka hunian tempat tidur di RSUD R. Syamsudin, khususnya kelas tiga menjadi berkurang sehingga tidak lagi terjadi penumpukan pasien, dan semakin banyak penduduk Kota Sukabumi yang memanfaatkan program CETEK.

CETEK (SIMPLY E-ID CARD SUBMIT A FAMILY CARD)

34

*Al Mulk Regional General Hospital
Sukabumi City*

- ❶ *Sukabumi city has only one Regional General Hospital (RSUD) R. Syamsudin, S.H. The RSUD is also designated as a Regional Referral Hospital for hospitals in Sukabumi City, Bogor and Cianjur districts with a target population of approximately 9.1 million people. Bed occupancy rate in RSUD R. Syamsudin, especially the third grade becomes very high, recorded during the year 2014 reached 116.25% (normal value 60-85%).*

It happened one of them because RSUD R. Syamsudin still serve various diseases that absolutely can be handled in first level reference facility. So some types of diseases such as typhoid fever, diarrhea and gastroenteritis, dengue fever, tuberculosis and diabetes mellitus are still included in the top 10 inpatient diseases in RS R. Syamsudin.

To overcome the various problems of referral health services, the Sukabumi Municipal Government took the initiative to add new hospitals, called RSUD Al-Mulk. RSUD is implementing innovative program of CETEK (Simply E-Resident Card Include Family Card). Through this program all people of Sukabumi City without regard to their social and economic status will get free health service at Al Mulk Hospital by only include photocopy of e-KTP and Kartu Keluarga (KK) as administrative requirements.

Through this CETEK program, there are a number of improvements in referral health care conditions in Sukabumi City such as the presence of a new hospital in Sukabumi City, the number of residents of Sukabumi City who submitted the Certificate of Not Able (SKTM) to be reduced, the number of bed occupancy in hospitals R. Syamsudin, Especially the third grade is reduced so that no more patient accumulation occurs, and more and more residents of Sukabumi City are using CETEK program.

The CETEK program since it was inaugurated on January 15, 2015, has served as many as 42,700 patients by December 2016. Thus, there have been enough people

Program CETEK sejak diresmikan tanggal 15 Januari 2015, telah melayani sebanyak 42.700 pasien sampai bulan Desember 2016. Dengan demikian telah cukup banyak masyarakat yang merasakan manfaat dari program ini.

Anggaran yang digulirkan untuk pendirian dan pelaksanaan pelayanan kesehatan di RSUD Al-Mulk seluruhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sukabumi, adalah APBD untuk penyusunan *Fisibility Study*; Upaya Pemantauan Lingkungan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL-UKL); *Master Plan* dan *Detail Engineering Design* (DED) APBD senilai Rp3.577.305.000; biaya operasional pelayanan kesehatan dan penyediaan alat kesehatan di RSUD Al-Mulk tahun 2015 APBD Kota Sukabumi sebesar Rp14.210.495.080; pada tahun 2016 melalui Dinas Kesehatan untuk operasional, pengadaan alat kesehatan, pembangunan poli rawat jalan dan penunjang medik; serta perluasan bangunan untuk penambahan kapasitas rawat inap menjadi 50 Tempat Tidur (TT) APBD senilai Rp5.900.000.000; pada tahun 2016 yang merupakan Dana Insentif Daerah (DID) yang disalurkan melalui Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman yang dipergunakan untuk pembangunan ruangan bedah sentral dan ruang *High Care Unit*; bantuan dari Badan Amil dan Zakat Kota Sukabumi (BAZ) sebesar Rp100 juta untuk renovasi ruangan bersalin; dan bantuan dari Bank Jabar Banten (BJB) berupa satu unit mobil ambulans.

Untuk monitoring penyerapan anggaran dan output kegiatan, dilakukan per triwulan yang juga dijadikan sebagai Perjanjian Kinerja Kepala RSUD Al Mulk. Selain itu dilakukan penyusunan laporan kegiatan pelayanan kesehatan bulanan dan tahunan dari RSUD kepada Dinas Kesehatan, yang selanjutnya dilaporkan kembali ke Tingkat Pemerintah Kota Sukabumi melalui Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Bidang Pelayanan Kesehatan sebagai supervisor kegiatan. Selain laporan kegiatan, dilakukan pula survei kepuasan masyarakat kepada para pasien dan penduduk sekitar secara berkala yaitu setiap 6 bulan sekali, *Early Warning System* melalui pesan singkat ke nomor 08111144633 untuk kritik dan saran atas kualitas pelayanan; dan adanya SOP Manajemen Pengaduan sebagai acuan dalam penanganan pengaduan masyarakat pengguna layanan.

Di masa datang perlu diselenggarakan sistem informasi yang handal dalam menunjang pelayanan yang lebih berkualitas, di mana sistem tersebut terintegrasi dengan data e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penyediaan sarana prasarana dan SDM sesuai standar harus terus dilakukan dengan tujuan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan di RSUD Al-Mulk. RSUD Al-Mulk harus didorong untuk mengikuti proses Akreditasi Rumah Sakit-

who have benefited from the program.

The budget for the establishment and implementation of health services at Al-Mulk General Hospital is derived entirely from the Regional Budget (APBD) of Sukabumi City, is the APBD for the preparation of Feasibility Study; Environmental Monitoring Efforts and Environmental Management Efforts (UPL-UKL); Master Plan and Detail Engineering Design (DED) APBD worth Rp3,577,305,000; Operational cost of health services and provision of medical equipment at RSUD Al-Mulk 2015 APBD Sukabumi for Rp14,210,495,080; In 2016 through the Department of Health for operational, medical equipment procurement, development of outpatient poly and medical support; And expansion of the building for the addition of inpatient capacity to 50 Beds (TT) APBD worth Rp5,900,000,000; In 2016 which is the Regional Incentive Fund (DID) channeled through the Spatial Planning, Housing and Settlement Service used for the construction of the central surgical room and the High Care Unit room; Assistance from the Amil and Zakat Agency of Kota Sukabumi (BAZ) amounting to Rp100 million for the renovation of the maternity room; And assistance from Bank Jabar Banten (BJB) in the form of one unit of ambulance car.

For monitoring of budget absorption and activity output, quarterly is also made as Performance Head of RSUD Al Mulk. In addition, preparation of monthly and annual health service activities report from RSUD to Dinas Kesehatan, which subsequently reported back to Sukabumi City Government Level through Health Service Section Referral on Health Services Division as activity supervisor. In addition to the activity report, also conducted a survey of community satisfaction to patients and residents around regularly that is every 6 months, Early Warning System through a short message to the number 08111144633 for criticism and suggestions on the quality of service; And the existence of SOP Grievance Management as a reference in the handling of complaints community service users.

In the future, there should be a reliable information system to support a higher quality service, where the system is integrated with e-ID data in the Department of Population and Civil Registration. The provision of infrastructure and human resources according to the standard must be continuously carried out with the aim to continuously improve the quality of service in RSUD Al-Mulk. RSUD Al-Mulk must be encouraged to follow the process of Accreditation of Al-Mulk Hospital in cooperation with local government around its territory for the implementation of the guarantee of poor community health services coming from outside Sukabumi.

RSUD Al-Mulk bekerja sama dengan pemerintah daerah di sekitar wilayahnya untuk pelaksanaan jaminan pelayanan kesehatan masyarakat kurang mampu yang berasal dari luar Kota Sukabumi.

Program CETEK dijadikan sebagai program prioritas pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan dan dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan sehingga keberlangsungan program ini harus menjadi prioritas utama bagi Dinas Kesehatan dan Pemerintah Daerah. Sebagai sebuah apresiasi, program CETEK dipilih sebagai *Best Practice* Kota Sukabumi oleh Kementerian Dalam Negeri tentang tata kelola pemerintahan yang baik.

The CETEK program serves as a priority program of local government through the Dinas Kesehatan (Public Health Office) and serves as the Main Performance Indicator (IKU) of Local Government and Public Health Office so that the sustainability of this program should be a top priority for Public Health Office and Local Government. As an appreciation, CETEK program was chosen as Best Practice of Sukabumi City by the Ministry of Home Affairs on good governance.



APLIKASI I-JUS MELON (IJIN USAHA MIKRO MELALUI ONLINE)

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Pemerintah Kota Semarang

- 1 Nama iJUS MELON (Ijin Usaha Mikro melalui Online) merupakan aplikasi yang memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat yang memiliki usaha mikro. Aplikasi ini dibuat berdasarkan tuntutan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil dan Permendagri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil di dalamnya diatur bahwa Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) dikeluarkan oleh Camat.

Berangkat dari latar belakang tersebut, Pemerintah Kota Semarang membuat sistem aplikasi bernama "iJUS MELON" yang memudahkan masyarakat untuk mengurus IUMK. Hanya membutuhkan waktu kurang dari 5 menit setelah semua syarat terpenuhi maka IUMK langsung terbit. Aplikasi iJUS MELON terhubung langsung dengan server database milik Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sehingga dapat diketahui data usaha mikro yang sudah mengurus izin usahanya secara *valid* dan *real*, sehingga memudahkan Pemerintah Kota Semarang dalam memberikan pembinaan dan pengembangan usaha secara umum pengurusan izin usaha mikro secara online.

Prosedurnya, pelaku IUMK meminta pengantar dari RT/RW tempat usahanya berada dengan melampirkan fotokopi KTP dan KK tempat tinggal; Surat pengantar RT/RW dibawa ke kelurahan untuk dibuatkan pengantar dari kelurahan; Pelaku usaha membawa surat pengantar disertai dengan Pas foto 4x6 ke kecamatan, kemudian operator kecamatan mengisi data pelaku usaha tersebut melalui aplikasi iJUS MELON untuk kemudian langsung dicetak, setelah ditempel foto ukuran 4x6 dan stempel kecamatan maka IUMK dapat langsung diberikan kepada pelaku usaha.

Saat ini tercatat 6.553 UMKM Kota Semarang yang telah mengurus iJUS MELON sejak pertama kali diluncurkan tanggal 9 Oktober 2015. Oleh karena itu, agar UMKM atau khususnya pelaku UMK (PUMK) Kota Semarang dapat "naik kelas" dan mengakses dana bergulir APBD Kota Semarang maka perlu inovasi dalam

I-JUS MELON (MICRO BUSINESS LICENSE THROUGH ONLINE)

35

*Cooperative and Micro Enterprises Agency
Semarang City*

- E** Name *iJUS MELON (Micro Business License through Online)* is an application that provides convenience services for people who have micro businesses. This application is made based on the demands of Presidential Regulation No. 98 of 2014 on Licensing for Micro and Small Enterprises and Permendagri Number 83 of 2014 concerning Guidelines for the Granting of Micro and Small Business Licenses in it stipulated that the Small and Micro Business License (IUMK) issued by the Camat.

Departing from the background, the Government of Semarang City make an application system called "iJUS MELON" which allows people to take care of IUMK. It only takes less than 5 minutes after all conditions are met then IUMK is published. The iJUS MELON application connects directly to the database server belonging to the Office of Cooperatives and Micro Enterprises of Semarang City so that it can be known that the micro business data that has taken care of its business license is valid and real, making it easier for Semarang City Government to provide guidance and business development in general the processing of micro business license on line.

The procedure, the IUMK actor requested an introduction from RT / RW where his business is located by attaching a copy of ID card and resident KK; The RT / RW introductory letter was taken to the kelurahan to create an introduction from the kelurahan; Business actors bring a cover letter accompanied by 4x6 photo pass to subdistrict, then subdistrict operator fill the data of business actor through iJUS MELON application to then directly printed, after attached 4x6 size photo and stamp of sub-district then IUMK can be directly given to business actor.

Currently carrying 6,553 SMEs Semarang city that has been taking care of iJUS MELON since first launched on October 9, 2015. Therefore, for SMEs or especially SMEs (PUMK) Semarang City can "up grade" and access funds revolving Semarang City budget is necessary Innovation in coaching to such business actors. As a result, Semarang City Government must make a groundbreaking effort based online.

pembinaan kepada para pelaku usaha semacam ini. Alhasil, Pemerintah Kota Semarang harus melakukan upaya terobosan yang berbasis *online*.

Aplikasi iJUS MELON terbukti telah memangkas urutan birokrasi yang rumit untuk mendapatkan IUMK. Bagi Pemerintah Kota Semarang, iJUS MELON memberikan solusi untuk memperoleh data pelaku usaha mikro di Kota Semarang yang riil dan dapat dipertanggungjawabkan, karena pelaku usaha yang telah terdaftar di iJUS MELON secara tidak langsung telah terverifikasi keberadaannya oleh RT/RW domisili usaha pelaku usaha mikro. Kemudian data tersebut dapat digunakan untuk kegiatan pembinaan dan pengembangan pelaku usaha mikro di Kota Semarang.

Biaya operasional untuk kegiatan pelayanan iJUS MELON ini berasal dari APBD Pemerintah Daerah. Kegiatan yang dilakukan meliputi pelatihan bagi operator iJUS MELON di tingkat kecamatan, pemeliharaan sistem aplikasi dan kegiatan sosialisasi bagi pelaku usaha di setiap kecamatan di Kota Semarang.

IUMK, sebagai keluaran utama dari aplikasi iJUS MELON merupakan tanda legalitas bagi pelaku usaha mikro di Kota Semarang. Dengan memiliki IUMK maka pelaku usaha tersebut dapat mengakses fasilitas lainnya yang ditawarkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang antara lain; Mendapatkan informasi agenda pelatihan, pameran dalam dan luar kota, serta agenda kegiatan fasilitasi dan kemitraan melalui SMS *GATEWAY*, kesempatan mengikuti pelatihan manajemen, keterampilan usaha dan banyak lagi.

Demi kelancaran aplikasi, perlu dilakukan evaluasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat langsung. Untuk pelayanan iJUS MELON dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang telah membuka *call center* di (024) 3584086 juga terdapat saluran pengaduan melalui SMS LAPOR HENDI. Sampai saat ini evaluasi warga yang disampaikan oleh masyarakat dilakukan melalui aplikasi SMS LAPOR HENDI 1708 mengenai pelayanan iJUS MELON.

Perihal kendala, terjadi pertama pada awal pada pelaksanaan inovasi ini bersamaan waktunya dengan akhir tahun anggaran di tahun 2015, sehingga *stakeholders* internal SKPD masing-masing mempunyai tugas tanggung jawab sesuai bidang tugasnya sendiri, seperti kecamatan, Bagian PDE dan DPKAD Kota Semarang masih sibuk dengan kegiatan di SKPD masing-masing. Kendala kedua, Adanya kekurangsiapan petugas pelayanan iJUS MELON. Kendala ketiga, sempat adanya masalah pada jaringan IT pada iJUS MELON, solusi yang dilakukan yaitu melakukan koordinasi dengan Bagian Pengolah Data Elektronik untuk perbaikan jaringan dan Konsultan IT untuk pengamanan sistem. Di



The iJUS MELON application proved to have cut the complex bureaucratic order to get IUMK. For Semarang City Government, iJUS MELON provides solution to obtain data of micro business actor in Semarang City that real and can be accounted for, because business actor who has been registered in iJUS MELON indirectly has been verified existence by RT / RW domicile of micro business perpetrator business. Then the data can be used for development activities and development of micro business actors in Semarang City.

The operational cost for iJUS MELON service activities is derived from Local Government Budget (APBD). Activities undertaken include training for iJUS MELON operators at sub-district level, maintenance of application systems and socialization activities for business actors in each sub-district in Semarang City.

IUMK, as the main output of iJUS MELON application is a sign of legality for micro business actors in Semarang City. By owning IUMK, the business actor can access other facilities offered by the Office of Cooperatives and Micro Enterprises of Semarang City, among others; Obtain training agenda information, in and out of town exhibitions, as well as facilitation and partnership activities agenda via SMS GATEWAY, opportunity to attend management training, business skills and more.

For the sake of the smooth application, it is necessary to do an evaluation that can be done by the community directly. For iJUS MELON service from the Office of Cooperatives and Micro Enterprises Kota Semarang has opened a call center at (024) 3584086 there is also a complaint channel via SMS REPORT HENDI. Until now the evaluation of citizens submitted by the community is done through SMS application HENDI 1708 REPORT concerning iJUS MELON service.

About the obstacle, the first occurs at the beginning of the implementation of this innovation coincided with the end of the budget year in 2015, so that internal stakeholders SKPD each have responsibilities in accordance with their own duties, such as kecamatan, PDE and DPKAD Semarang is still busy with activities In each SKPD. The second obstacle, the existence of the lack of service personnel iJUS MELON. The third constraint, had a problem on the IT network on iJUS MELON,

internal juga menyiapkan tenaga terampil yang dilatih oleh konsultan IT untuk mengatasi apabila ada masalah yang harus segera diatasi.

Kendala keempat, perlu diketahui untuk merangsang para pelaku usaha mendaftarkan IUMK dengan memberi fasilitas kredit tanpa agunan dengan pinjaman bunga hanya 3% per tahun, permasalahan yang muncul adalah adanya kekhawatiran pada *stakeholder* perbankan terhadap dampak pemberian pinjaman tanpa agunan kepada pelaku usaha mikro. Sehingga perlu menjelaskan dengan gamblang dan meyakinkan stakeholder perbankan mengenai maksud dan tujuan iJUS MELON. Termasuk, menggandeng Lembaga Penjamin Kredit, menyiapkan regulasi, menyiapkan persyaratan kredit dan SOP penyaluran, memperketat verifikasi pada calon penerima kredit, dan menurunkan tim pemantau/pengawasan dana bergulir.

Meski demikian, dengan menerapkan pelayanan menggunakan aplikasi iJUS MELON, pelayanan menjadi mudah, cepat, dan gratis. Mudah karena cukup sampai di tingkat kecamatan maka IUMK dapat diperoleh. Saat ini aplikasi iJUS MELON terus dikembangkan dan dilanjutkan. Bagi instansi yang akan mereplikasi iJUS MELON ini, tentu saja program dalam aplikasi ini dapat mudah ditiru dan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan.

the solution is to coordinate with the Electronic Data Processing Section for network repair and IT Consultant for system security. Internally also prepare skilled personnel trained by IT consultants to address if there are problems that must be addressed immediately.

Fourth obstacle, it is necessary to know to stimulate business actors to register IUMK by giving credit facility without collateral with interest loan only 3% per year, the problem that arises is the concerns of banking stakeholders on the impact of lending without collateral to micro business actors. So it is necessary to explain clearly and convince the banking stakeholders about the intent and purpose of iJUS MELON. Including, partnering with the Credit Guarantee Institution, preparing regulations, preparing credit requirements and dispatching SOPs, tightening verification to prospective credit recipients, and lowering revolving fund monitoring / monitoring teams.

However, by implementing services using iJUS MELON applications, service becomes easy, fast, and free. It is easy because it is enough to reach the sub-district level then IUMK can be obtained. Currently iJUS MELON app continues to be developed and continued. For agencies that will replicate iJUS MELON, of course the program in this application can be easily imitated and modified as needed.



LORONG SEHAT (LONGSET)

Dinas Kesehatan
Pemerintah Kota Makassar

- 1 Gerakan revolusi kebersihan Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali kota dan Wakil Wali kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto dan Syamsu Rizal dimulai. Hal itu ditandai dalam acara akbar *A'bbulo Sibatang Lompoo* dalam rangka peluncuran program "Makassar"Ta Tidak Rantasa" (MTR) yang digelar di Celebes Convention Centre (CCC), 15 Juni 2014.

Program MTR merupakan program baru yang mengukuhkan suatu perubahan mendasar dalam menangani persoalan Kota Makassar dalam hal persampahan. Sampah yang dihasilkan oleh masyarakat yang ada di Kota Makassar kurang lebih 1.000 ton/hari (sumber DPK Makassar, 2016). Dampak yang ditimbulkan dari banyaknya sampah adalah masalah kesehatan khususnya dari aspek lingkungan dan perilaku masyarakat. Dari persentase yang belum ber-PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) sekitar 54% dari 46 jumlah lorong yang dibina oleh Dinas Kesehatan Makassar melalui 46 Puskesmas. Sementara harapan Pemerintah Kota Makassar, cakupan PHBS mencapai 75% hingga tahun 2019 (RPJMD 2014 - 2019). Selain itu, program ini merupakan salah satu program prioritas dalam pencapaian Kota Sehat dan Kota Adipura.

Untuk mewujudkannya, Pemkot Makassar pun melakukan inovasi lorong sehat atau longset. Program ini menjadi andalan mengenai perubahan mendasar dalam menangani persoalan perubahan pola pikir serta perilaku masyarakat mengenai kesehatan dan kebersihan di Kota Makassar. Melalui program ini telah banyak potensi yang dikembangkan, misalnya dalam hal penanganan kesehatan lingkungan dengan konsep 3R (*reuse, reduce, recycle*), peran partisipasi masyarakat, serta perubahan wilayah dalam pola PHBS. Di Kota Makassar sendiri ada 7.520 lorong yang sebagian besar kondisinya terkesan kumuh, masyarakatnya hidup dalam kondisi kurang sehat dan berperilaku belum ber-PHBS.

Dalam aplikasinya, program Lorong Sehat (Longset) menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan dan secara teknis dikerjakan oleh Puskesmas bersama

LONGSET (HEALTHY ALLEY)

36

Health Agency
Makassar City

- Movement of clean revolution Government of Makassar City under the leadership of Mayor and Deputy Mayor of Makassar, Moh Ramdhan Pomanto and Syamsu Rizal begins. It was marked in the grand event A'bbulo Sibatang Lompoa in order to launch the program "Makassar-Ta Tidak Rantasa" (MTR) held at Celebes Convention Center (CCC), June 15, 2014.

The MTR program is a new program that establishes a fundamental change in dealing with Makassar matters in terms of solid waste. Garbage generated by the community in the city of Makassar approximately 1,000 tons / day (source DPK Makassar, 2016). The impacts were caused by the amount of waste are health problems, especially from environmental aspects and community behavior. From the percentage that has not been PHBS (Clean and Healthy Behavior) about 54% of 46 the number of alley built by Makassar Health Office through 46 health center. Meanwhile, the expectation of Makassar City Government is PHBS coverage reaches 75% until 2019 (RPJMD 2014 - 2019). In addition, this program is one of the priority programs in achieving Healthy City and Adipura City.

To make it happen, Makassar City Government also made a healthy hallway or Longset innovation. This program is a mainstay of fundamental changes in dealing with issues of mindset change and public behavior regarding health and hygiene in Makassar City. Through this program has many potentials developed, for example in terms of handling environmental health with the concept of 3R (reuse, reduce, recycle), the role of community participation, and regional changes in PHBS pattern. In the city of Makassar alone there are 7,520 alleys that most of the conditions seem to be slum, people live in unhealthy conditions and behave not PHBS.

In its application, the Lorong Sehat (Longset) program is the responsibility of the Health Office and is technically done by the Puskesmas with the community. The alley activity starts from health data collection (PHBS, Healthy Family, Baduta, if there are under-five year), P4K (if any pregnant), healthy house card, free of larvae),



masyarakat. Kegiatan lorong tersebut dimulai dari pendataan kesehatan (PHBS, Keluarga Sehat, Baduta, jika ada balita di bawah 2 tahun), P4K (jika ada yang hamil), kartu rumah sehat, bebas jentik), lingkungan yang bersih, hijau serta perubahan perilaku kesehatan pada setiap anggota keluarga.

Program Longset ini penting karena dapat menurunkan persentase PHBS dalam waktu yang relatif singkat dengan adanya perubahan lingkungan, yaitu lingkungan dalam Lorong Sehat menjadi bersih, hijau dan indah sehingga perilaku masyarakat berubah, termasuk sarana kesehatan yang berada di dalam lorong, hingga mampu menurunkan angka kesakitan yang disebabkan karena belum ber-PHBS.

Program Lorong Sehat yang diinisiasi oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar ini pada pengembangan lanjutannya, didukung penuh oleh para pimpinan kecamatan dari 14 wilayah ditambah 143 kelurahan. Hingga saat ini, dukungan kecamatan bertambah menjadi 15 kecamatan dan 153 kelurahan yang ada di Kota Makassar seiring dengan pengembangan organisasi baru di Pemerintahan Kota.

Pada tahun pertama penerapannya yaitu pada tahun 2015, Lorong Sehat berjalan dengan menggunakan pendanaan yang menempel pada program lain yang dijalankan secara paralel seperti sosialisasi PHBS. Pada saat itu, program ini memang belum masuk perencanaan anggaran dalam kegiatan-kegiatan yang dianggarkan Dinas Kesehatan Kota Makassar dalam APBD 2015. Tahun 2015, program ini dimasukkan dalam penganggaran kegiatan pada Dokumen



clean environment, green and health behavior change at Every member of the family.

Longset program is important because it can reduce the percentage of PHBS in a relatively short time with the existence of environmental changes, such as the environment in the Lorong Sehat program be clean, green and beautiful so that people's behavior changes, including health facilities in the hall, to be able to reduce the morbidity rate Because it has not been PHBS.

The Healthy Hallway (Longset) program, initiated by the Makassar City Health Office, is continuously supported by sub-district leaders from 14 regions plus 143 urban villages. Until now, kecamatan (districts) support has grown to 15 sub-districts and 153 urban villages in Makassar along with the development of new organizations in the City Administration.

In its first year of implementation, in 2015, the Healthy Hallway (Longset) is running by using funding attached to other programs run in parallel such as PHBS socialization. At that time, the program was not yet included in budget planning in activities budgeted by the City Health Office of Makassar in APBD 2015. In 2015, the program is included in budgeting activities on the Budget Dispensary Document (DPA) of Makassar City Health Office, with an available budget of Rp 260,000,200 Socialization of PHBS and in 2016 budgeted funds increased to and focused on Longset activities of Rp 400,118. 000, and by 2017 the Longset Activity is set at Rp 610,517,800. Meanwhile, no less important is the technical support and human resources (HR) from 46 health centers spread evenly throughout the city of

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan APBD Kota Makassar, dengan anggaran Sosialisasi PHBS yang tersedia sebesar Rp 260.000.200 dan pada tahun 2016 dana yang dianggarkan meningkat menjadi dan terfokus pada kegiatan Longset Rp 400.118.000, dan pada tahun 2017 dianggarkan Kegiatan Longset sebesar Rp 610.517.800. Sementara itu, yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan teknis dan sumber daya manusia (SDM) yang berasal dari 46 Puskesmas yang tersebar merata di seluruh Kota Makassar.

Keberhasilan dari program Lorong Sehat dapat dilihat dari adanya peningkatan pendataan kesehatan jika dibandingkan awal peluncurnya. Selain dengan besarnya manfaat yang dirasakan langsung warga masyarakat, maka setiap masyarakat juga akan menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan. Perubahan perilaku PHBS dari sebelum ber-PHBS 54% menjadi ber-PHBS 63% pada tahun 2016.

Pada proses pelaksanaan program Lorong Sehat, pengendalian dan pemantauan serta evaluasi dilakukan secara berkala dan terus-menerus dengan sistem berjenjang dalam pelaksanaannya. Kini, dengan adanya layanan Lorong Sehat membuat pelayanan kesehatan di Kota Makassar menjadi lebih sempurna, holistik dan komprehensif. Untuk mengubah perilaku masyarakat diawali dengan pemetaan dan penyuluhan, deteksi dini masyarakat belum menerapkan hidup ber-PHBS di Lorong Sehat.

Model Program Lorong Sehat ini sedang berusaha diadopsi dan direplikasi oleh Pemerintah Kota Makassar ke dalam beberapa rancangan program pelayanan publik yang lain, seperti Lorong Garden maupun Lorong KB. Aplikasi ini juga akan dikembangkan oleh kelurahan dan Badan Keluarga Berencana (KB) Kota Makassar.

Makassar.

The success of the Lorong Sehat program can be seen from the increase in health data collection compared to the beginning of the launching. In addition to the large benefits directly felt by the community, then every community will also maintain the cleanliness of the environment and health. Changes in PHBS behavior is from PHBS (before) 54% to PHBS 63% in 2016.

In the process of implementation of Lorong Sehat program, control and monitoring and evaluation are conducted periodically and continuously with tiered system in its implementation. Now, with the service of Healthy Lorong make health service in Makassar City become more perfect, holistic and comprehensive. To change the behavior of the community starting with mapping and counseling, early detection of the community has not implemented the life of PHBS in Lorong Sehat.

The Lorong Sehat Program Model is being attempted to be adopted and replicated by the Makassar City Government into several other public service program designs, such as Lorong Taman or Lorong KB. This application will also be developed by Kelurahan (Village) and Family Planning Board (KB) Makassar City.



SAMPAH MENJADI GAS, BERKAH BAGI WARGA

Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota
Pemerintah Kota Banda Aceh

- 1 Bertolak belakang dengan pemahaman yang umumnya menilai bahwa sampah adalah sisa material yang tidak bernilai guna lagi, Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh mencoba untuk memulihkan energi gas metan yang terdapat di lahan urug TPA Kota Banda Aceh sebagai hasil dari dekomposisi anaerob sampah organik. Gas metan yang dihasilkan dari proses tersebut kemudian dikumpulkan dan disalurkan ke rumah warga yang berada di sekitar lokasi TPA Kota Banda di Gampong Jawa, Kecamatan Kuta Raja.

Penggagas utama dari program ini adalah Pemerintah Kota Banda Aceh melalui DLHK3 selaku dinas yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah perkotaan. Dalam pelaksanaannya, DLHK3 berkerja sama dengan YKU (Yayasan Kemaslahatan Ummat) yang memberikan bantuan teknis perancangan instalasi pengumpul dan penyaluran gas metan TPA. Untuk mendukung kelancaran program ini DLHK3 telah mengalokasikan dana sebesar Rp443.000.000 melalui anggaran tahun 2015 dan tahun 2016.

Program ini dilaksanakan dalam enam tahapan yang yaitu: tahap perencanaan pemanfaatan dan penyaluran gas metan; pekerjaan teknis pemasangan alat pengumpul dan penangkap gas metan; identifikasi calon penerima manfaat dari gas metan TPA; penyaluran gas metan ke rumah warga tahap pertama; operasional dan perawatan modul pengumpul dan penyalur gas metan; penyaluran gas metan ke rumah warga tahap kedua.

Program ini telah menghasilkan keluaran berupa: (1). Pemasangan pipa vertikal sebanyak 18 unit dan pipa horizontal sebanyak 60 unit sebagai upaya untuk menangkap gas metan; (2). Pemasangan pipa distribusi gas metan ke rumah-rumah warga; (3). Penggunaan sumber energi alternatif yaitu gas metan TPA oleh 48 KK di Gampong Jawa.

Tak hanya itu, program ini juga memberikan dampak positif bagi lingkungan

RUBBISH BECOMES GAS, BLESSING FOR THE PEOPLE

37

*Environment, Hygiene and the Beauty of the City Agency
Banda Aceh City*

- ❶ *Contrary to common understanding that rubbish is a waste of wasteful material, City Environment, Hygiene and Beauty Agency (DLHK3) Banda Aceh tries to recover methane gas energy in the urban landfill of Kota Banda Aceh as a result of decomposition Anaerobic organic waste. Methane gas generated from the process is then collected and distributed to the homes of residents who are located in the vicinity of Banda Landfill Banda in Gampong Jawa, Kuta Raja District.*

The main initiator of this program is the Banda Aceh City Government through DLHK3 as the agency responsible for urban waste management. In its implementation, DLHK3 cooperates with YKU (Yayasan Kemaslahatan Ummat) which provides technical assistance in the design of the TPA methane gas collection and distribution installation. To support the smooth running of the program DLHK3 has allocated Rp443,000,000,- through its 2015 and 2016 budgets.

The program is implemented in six stages: the planning stage of utilization and distribution of methane gas; Technical work of the installation of methane gas collection and catching apparatus; Identification of potential beneficiaries of landfill methane gas; Distribution of methane gas to the first phase of a citizen's house; Operation and maintenance of methane gas collection and distribution modules; Distribution of methane gas to second-generation citizens' homes.

This program has produced the following outputs: (1). Installation of vertical pipes of 18 units and horizontal pipes of 60 units in an effort to capture methane gas; (2). Installation of methane gas distribution pipes to people's houses; (3). The use of alternative energy sources is methane gas TPA by 48 families in Gampong Jawa.

Not only that, this program also has a positive impact on the natural environment is the reduction of GHGs in the urban atmosphere of Banda Aceh. The benefits of this program are also felt directly by the Banda Aceh City TPA by reducing the risk of landfill fires. The positive impact is most certainly felt directly by the people living in the vicinity of TPA Landfill Banda Aceh who get the methane gas TPA for free.

alam yaitu berkurangnya GRK yang berada di atmosfer kawasan perkotaan Banda Aceh. Manfaat dari program ini juga dirasakan langsung oleh TPA Kota Banda Aceh yaitu dengan mengurangi risiko kebakaran lahan urug TPA. Dampak positif tersebut tentu paling besar dirasakan langsung oleh masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi TPA Kota Banda Aceh yang mendapat gas metan TPA secara gratis.

Adapun target dari program ini adalah masyarakat pesisir Gampong Jawa yang sebagian besar masih berpenghasilan menengah kebawah dan tinggal dalam radius 2-3 km dari TPA Kota Banda Aceh. DLHK3 mendorong semua pihak untuk memasyarakatkan penggunaan energi terbarukan (*renewable energy*) sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil yang terbatas ketersediaannya. Energi terbarukan yang dihasilkan dari penguraian sampah merupakan upaya untuk memanfaatkan sampah yang selama ini dianggap tidak bernilai menjadi sumber energi yang memiliki nilai tinggi (*waste to energy*).

Sampai saat ini, belum banyak TPA di Indonesia yang sudah memanfaatkan gas metan yang dihasilkan sebagai sumber energi, salah satu pengecualiannya adalah TPA Kota Banda Aceh. Sejak dibangun kembali pasca tsunami dan dioperasional dengan sistem *sanitary landfill* pada awal tahun 2009, Pemerintah Kota Banda Aceh terus berupaya melengkapi fasilitas yang ada di TPA agar benar-benar layak disebut *sanitary landfill*, yang dibangun dengan teknologi yang baik serta dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang dibutuhkan sehingga operasional TPA aman dan tidak menimbulkan dampak pencemaran terhadap lingkungan baik.

Keberhasilan pelaksanaan program ini juga tidak terlepas dari kerja sama antara YKU dan DLHK3 yang menurunkan tim teknis yang sudah berpengalaman dalam pemulihan energi gas metan TPA dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya sistem perpipaan tersebut DLHK3 telah berhasil mengurangi risiko kebakaran lahan urug akibat terlepasnya gas metan ke udara bebas. Selain daripada itu, penyaluran gas metan ke rumah-rumah warga juga mengurangi emisi gas metan sebagai salah satu penghasil GRK pada sector pengelolaan sampah. Pemasangan pipa distribusi gas metan yang berhasil menyalurkan gas metan TPA yang dihasilkan melalui dekomposisi sampah organik ke rumah-rumah warga.

Program ini sangat mungkin direplikasi oleh pemerintah kota/daerah lainnya. Apalagi jika dana yang dibutuhkan untuk pembuatan instalasi penangkapan dan penyaluran gas metan untuk 25 KK tidaklah besar, yaitu Rp348 juta. Teknis sistem penangkapan dan penyaluran gas metan TPA juga tidaklah rumit.

The targets of this program are coastal communities of Gampong Jawa, most of whom are still middle-income and live within a 2-3 km radius of TPA Kota Banda Aceh. DLHK3 encourages all parties to promote the use of renewable energy as an effort to reduce dependence on limited fossil energy availability. Renewable energy resulting from the decomposition of waste is an attempt to utilize waste that has been considered not valuable to be a source of energy that has a high value (waste to energy).

Until now, not many landfills in Indonesia are already utilizing methane gas produced as a source of energy, one of the exceptions is TPA Kota Banda Aceh. Since it was rebuilt after the tsunami and operated with a sanitary landfill system in early 2009, the Banda Aceh City Government continues to complement the existing facilities in the TPA in order to truly be called sanitary landfills, built with good technology and equipped with various facilities needed So that the TPA operation is safe and does not cause pollution impact to the environment either.

The successful implementation of this program is also inseparable from the cooperation between YKU and DLHK3 which lowers the technical team that has been experienced in the recovery of methane gas energy TPA and community empowerment. With the piping system DLHK3 has succeeded in reducing the risk of land fires due to the release of methane gas into free air. In addition, the distribution of methane gas to the homes of citizens also reduces methane gas emissions as one of the producers of GHG in the sector of waste management Installation of methane gas distribution pipes that successfully deliver methane gas TPA generated through decomposition of organic waste to the homes of citizens. The use of alternative energy sources is methane gas TPA by 48 KK as a substitute of conventional energy source of LPG. The methane gas of this landfill is used daily by residents for cooking. With the free methane gas, beneficiaries can save 60% of their monthly spending.

As an innovation, this program is very likely to be replicated by other municipal/ regional governments. Especially when considering the funds needed for the installation of fishing and methane gas transportation for 25 families is not large, which is Rp348.000.000. In addition, technical planning and workmanship of methane gas fishing and distribution system is not complicated.



“SODA MOLEK” K 5-1

Kelurahan Naikoten II
Pemerintah Kota Kupang

- 1 SODA MOLEK adalah seni menghadirkan *self and full time public service* sebagai sebuah program inovasi lanjutan dari Kelurahan Digital Naikoten II yang tahapannya telah dimulai sejak tahun 2011. Penataan dimulai dengan membuat Standart Operation Procedure (SOP) serta pola layanan One Stop Service yang membagi kantor menjadi 2 (dua) bagian yaitu front office dan back office. Atas inovasi itu, pada tahun 2012 Kelurahan Naikoten II mendapat Juara 1 Lomba Kelurahan tingkat Kota Kupang dan Juara 2 Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi NTT.

Tahun 2013 pelayanan ditingkatkan dengan membangun DIGITAL VILLAGE atau KELURAHAN DIGITAL pertama di NTT berkerjasama dengan STIKOM Uyelindo dengan mengusung program SMS Gateway (pelayanan informasi di luar jam kantor), Digital Layout dan Thin Client. Atas inovasi ini, Kelurahan Naikoten II meraih Juara 1 Lomba Kelurahan tingkat Kota Kupang, Juara 1 Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi NTT, dan Juara 2 Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Nasional serta meraih Adhykarya Bhakti Praja Madya dari Menteri Dalam Negeri.

Selain informasi, masyarakat juga membutuhkan layanan administrasi di luar jam kantor, sehingga sebagai wujud komitmen akan pelayanan prima, Kelurahan Naikoten II mengembangkan pola layanan administrasi di luar jam kantor yang terintegrasi dengan basis data kependudukan dan penertiban perpajakan.

Dengan konsep SMART VILLAGE, Kelurahan Naikoten II bersama STIKOM Artha Buana meluncurkan “SODA MOLEK” untuk selalu menyapa warga dalam bentuk pelayanan 24 jam sehari dan tujuh hari seminggu.

Selama ini, ada lima masalah di Naikoten, yakni pertama, kinerja aparatur pemerintahan yang dinilai masih kurang baik; kedua, kurangnya validitas basis data kependudukan Kelurahan Naikoten II; ketiga, limit jam kerja masyarakat bersamaan dengan selesainya waktu pelayanan kelurahan (jam kerja efektif di

“SODA MOLEK” K 5-1

38

*Naikoten II Sub-District
Kupang City*

E SODA MOLEK is the art of presenting self and full time public service as an advanced innovation program from Kelurahan Digital (Digital Village) Naikoten II which its stages have been started since 2011. The arrangement started by making Standard Operation Procedure (SOP) and service pattern of One Stop Service which divide the office into 2 (Two) parts of the front office and back office. On that innovation, in 2012 Kelurahan Naikoten II got 1st Place Competition Urban Village Kupang and 2nd Winner Village and Village Competition at NTT Provincial Level.

In 2013, the service will be enhanced by building the first DIGITAL VILLAGE or DIGITAL BRIGHT in NTT in collaboration with STIKOM Uyelindo with SMS Gateway program (off the clock information service), Digital Layout and Thin Client. Upon this innovation, Kelurahan (Village) Naikoten II won 1st Place Urban Village Competition Kupang, 1st Winner Village Competition and Village Level NTT Province, and 2nd Winner of Village and National Village Competition and Adhykarya Bhakti Praja Madya from Minister of Home Affairs

In addition to information, the public also requires administrative services outside office hours, so as a form of commitment to excellent service, Kelurahan (Village) Naikoten II develop administrative service patterns outside office hours are integrated with data base population and taxation regulation.

With the concept of SMART VILLAGE, Kelurahan (Village) Naikoten II together with STIKOM Artha Buana launched “SODA MOLEK” to always greet the citizens in the form of service 24 hours a day and seven days a week.

So far, there are five problems in Naikoten, namely first, the performance of government apparatus that is considered still not good; Secondly, the lack of validity of the population database of Kelurahan (Village) Naikoten II; Third, the limit of working hours of the community along with the completion of the service time of the village (effective working hours in Kupang City starting from 0730 - 16.00 Wita/Eastern time zone of Indonesia). This is indicated by the fact that in

Kota Kupang mulai dari pukul 07:30 – 16.00 Wita). Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa pada tahun 2014 terjadi sekitar 15 kasus dan tahun 2015, 23 kasus. 4. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya data diri. 5. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap manfaat Pajak.

Kelurahan Naikoten II mencoba untuk menyelesaikannya hanya dengan 1 (satu) program solusi yang di sebut SODA MOLEK, sehingga diambil judul K-51 atau pelayanan dalam sebuah Kantor yang memiliki 5 (lima) masalah dan diselesaikan dengan 1 (satu) solusi.

Nama SODA MOLEK adalah sebuah ungkapan dan sapaan "salam sejahtera" bagi sesama dalam bahasa daerah NTT (Pulau Rote), yang dalam konteks ini (pelayanan diluar jam kantor) filosofi SODA MOLEK merupakan komitmen Pemerintah Kelurahan Naikoten II bagi masyarakatnya untuk siap sedia memberikan layanan bahkan hingga di luar jam kantor, sehingga sekalipun sudah tidak lagi dalam jam pelayanan reguler Kantor Lurah Naikoten II, masyarakat tetap mendapatkan pelayanan dan selalu disapa dalam bentuk pelayanan mandiri (self service) sebagaimana ATM dalam sistem perbankan. Pada ATM, input adalah kartu serta PIN, setelah proses transaksi keuangan, dengan output adalah uang. Pada SODA MOLEK input adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK), prosesnya pelayanan administrasi (bagi yang sudah melunasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)), output surat keterangan.

Metode pelayanan yang *self service* ini akan menghindarkan masyarakat dari pelayanan *face to face* dengan aparat pemerintah dan panjangnya antrian pada jam layanan reguler Kantor Lurah Naikoten II. Esensi administrasi pemerintahan yang baik dengan memenuhi basis data kependudukan yang dapat dipisahkan perkategori dalam sekali input, sehingga dalam pengecekan datanya menjadi lebih efektif dan efisien. Melayani 24 jam setiap hari, tujuh hari seminggu Sistem layanan yang Berbasis NIK sehingga masyarakat yang mengesampingkan adanya administrasi kependudukan dengan sendirinya akan secara sadar memenuhi kewajibannya sebagai penduduk dan memotivasi masyarakat dalam hal Pelunasan PBB.

Seni pelayanan SODA MOLEK, diharapkan dapat menopang multi aspek dan dimensi kehidupan berpemerintahan dan pembangunan. Pengoperasian SODA MOLEK juga dapat dilihat dalam tautan youtube: Tutorial Video (Link : https://www.youtube.com/watch?v=lsDAX_pe1MI).

Kini tersedianya program layanan di luar jam kantor dengan nama SODA MOLEK, terlayani 10 jenis surat pengantar, yaitu: Surat Keterangan Domisili,

2014 there were about 15 cases and in 2015, 23 cases. 4. Lack of public awareness of the importance of self data. 5. Lack of public awareness of Tax benefits

Kelurahan Naikoten II tries to solve it with only 1 (one) solution program called SODA MOLEK, so it takes K-51 title or service in an Office that has 5 (five) problems and solved with 1 (one) solution.

The name SODA MOLEK is a phrase and a greeting of "best wishes" for fellow in NTT (Rote Island) language, which in this context (ministry outside office hours) SODA MOLEK philosophy is the commitment of the Naikoten II District Government to the community to be ready to provide services even Until outside the office hours, so even though it is no longer in the regular service hours Office of Naikoten II, people still get the service and always greeted in the form of self-service (self service) as ATM in the banking system. At the ATM, the input is a card as well as a PIN, after a financial transaction process, with output is money. In SODA MOLEK input is the Population Identity Number (NIK), the process is administrative service (for those who have paid Land and Building Tax (PBB)), output of certificate.

This self service service method will prevent the public from face to face service with government apparatus and the length of queue at regular service hour of Head Office of Naikoten II. The essence of good government administration to meet the demographic data base that can be separated perkategori in one input, so that in checking the data becomes more effective and efficient. Serve 24 hours daily, seven days a week NIK-based Service system so that people who rule out the existence of population administration by themselves will consciously fulfill their duties as residents and motivate the community in the event of UN Repayment.

Art services SODA MOLEK, is expected to sustain multi aspects and dimensions of governance and development life. The operation of SODA MOLEK can also be viewed in YouTube links: Video Tutorial (Link: https://www.youtube.com/watch?v=lsDAX_pe1MI).

Nowadays the service program is available outside office hours under the name of SODA MOLEK, served by 10 types of cover letter, namely: Domicile Certificate, Certificate of Move, Certificate of Not Able, Certificate of KTPN, Certificate of Unmarried, Death Certificate, Birth Certificate, Police Note Certificate, Business Certificate, and Certificate of Others. There is also a service box as a medium for SODA MOLEK program operation.

In the implementation, the control system becomes something that is very important in maintaining the stability of the continuity of this

Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Tidak Mampu, Surat Keterangan KTPN, Surat Keterangan Belum Menikah, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Surat Keterangan Usaha, Surat Keterangan Lain-lain. Tersedia juga kotak layanan (service box) sebagai media operasionalisasi program SODA MOLEK.

Dalam penyelenggaraannya, sistem kontrol menjadi sesuatu yang sangat penting dalam menjaga stabilitas keberlangsungan program ini, maka untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi sistem yang dipakai adalah:

1. *Report* dan *history* data yang tersimpan *by day-by time* dalam sistem yang memudahkan proses monitoring. Yang dimaksud dengan *report* dan *history* adalah dimana setiap masyarakat selesai mengurus administrasinya, maka arsip surat tersimpan secara otomatis pada perangkat dalam bentuk papperless (arsip digital). Selain itu, tersimpan juga detail waktu kepengurusan administrasi dimaksud.
2. Melaksanakan monitoring ke masyarakat dalam bentuk anjongsana dan mencari tahu masalah secara langsung. Hasil monitoring dibawa dalam rapat evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui titik-titik lemah agar dapat diperbaiki dan disempurnakan secara bertahap.

Kini, program SODA MOLEK mampu men-*deliver* hasil berupa tumbuhnya budaya diskusi aparaturnya terkait jenis-jenis pelayanan yang harus disediakan serta adanya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia akademik dan pihak swasta dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Tersedianya basis data kependudukan yang akurat (digital based). Memberikan kemudahan akses pelayanan administrasi pemerintahan bagi warga Kelurahan Naikoten II. Juga meningkatnya persentase pengurusan administrasi kependudukan. Dan tak kalah penting adalah meningkatnya realisasi pembayaran PBB sebesar Rp.61.264.595 (60,92%) dari peningkatan jumlah wajib pajak yang membayar sebesar 151 Wajib Pajak (55,18%).

program, so to monitor the progress and evaluate the system used are:

1. Report and history of data stored by day-by-time in the system that facilitates the monitoring process. What is meant by report and history is where every society finished administering its administration, then archive letter is automatically stored on device in paperless form (digital archive). In addition, there are also details of administrative stipulations.
2. Implement monitoring to the community in the form of anjangsana and find out the problem directly. The results of the monitoring are carried out in the evaluation meeting conducted to find out the weak points in order to be improved and refined gradually.

Now, SODA MOLEK program is able to deliver the result of the growth of the discussion culture of the apparatus related to the types of services that must be provided and the collaboration between the government, the community, academic world and private parties in the administration and public service. The availability of an accurate data base (digital based) of the community. Provide easy access to government administration services for Naikoten II District residents. Also for increasing the percentage of population administration. And no less important is the increased realization of PBB payments amounting to Rp.61.264.595 (60.92%) of the increase in the number of taxpayers who pay 151 Taxpayers (55.18%).



TAMAN ANAK CERDAS: PAPAN SARANA WASIS BOCAHE, WARAS RAGANE LAN MAPAN BUDI PEKERTINE

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat
Pemerintah Kota Surakarta

- 1 Tahun 2006 Kota Surakarta ditunjuk oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan sebagai salah satu proyek percontohan Pengembangan Model Kota Layak Anak, bersama Gorontalo, Jambi, Sidoarjo, Kutai Kartanegara. Pada Tahun 2008-2017 Kota Surakarta telah mengembangkan Kota Layak Anak di Kelurahan dan Kecamatan. Tahun 2018 diharapkan Kota Surakarta benar-benar menjadi kota yang layak untuk anak (Kota Layak Anak). Konsep dari Kota Layak Anak adalah Kota yang Ramah Anak dengan terpenuhinya hak-hak anak yaitu Hak Hidup, hak tumbuh dan berkembang, hak mendapat perlindungan, dan hak ikut berpartisipasi.

Untuk pemecahan masalah sebagai Kota yang mengembangkan kebijakan Kota Layak Anak (KLA), Kota Surakarta mewujudkan melalui Taman Cerdas yang merupakan Taman Terbuka Ramah Anak dan menjadi bagian integral dari upaya pengembangan Kota Layak Anak. Sasaran Taman Cerdas adalah anak dari keluarga yang tidak mampu di sekitar lokasi Taman Cerdas khususnya untuk anak-anak yang termarginalkan seperti anak pengamen, anak keluarga miskin, kaum defable dan lain-lain yang sangat membutuhkan fasilitas tempat bermain mendapatkan pendidikan, pengetahuan melalui pengenalan IT, membaca dan pengembangan bakat dan kreasi seninya secara gratis. Taman Anak Cerdas di Surakarta juga dapat dilihat di link: https://www.youtube.com/watch?v=O6_Y1XDFEqc

Pada awal tahun 2014 Kota Surakarta sudah memiliki 6 Taman Cerdas yang tersebar di berbagai kelurahan, antara lain yaitu Taman Cerdas Sumber, Kadipiro, Mojosongo, Gandekan, Joyotakan dan Pajang. Tahun 2008 merupakan tahun pertama diresmikannya Taman Cerdas di Surakarta. Ada 3 Taman Cerdas yang diresmikan secara bersamaan, diantaranya yaitu Taman Cerdas Kadipiro (Banjarsari), Sumber (Banjarsari) dan Jambon (Serengan). Sedangkan 3 Taman Cerdas lainnya diresmikan pada tahun 2009. Dan untuk Taman Cerdas Semanggi untuk pembangunannya sudah selesai 50%. Tahun 2018 akan dibangun 2 Taman Cerdas yaitu di Kelurahan Bumi dan Kelurahan Tipes.

SMART KIDS PARK: BOCAHE WASIS FACILITY BOARD, WARAS RAGANE, LAN MAPAN BUDI PEKERTINE

39

*Women Empowerment, Child Protection, and
Community Empowerment Agency
Surakarta City*

E In 2006 the city of Surakarta was appointed by the Ministry of Women Empowerment as one of the model projects for the Development of Model of City for Children, along with Gorontalo, Jambi, Sidoarjo, Kutai Kartanegara. In the Year 2008-2017 Surakarta City has developed Municipal Decent Cities in Kelurahan (Village) and Kecamatan (District). Year 2018 is expected to Surakarta City really become a decent city for children (City Eligible Children). The concept of Decent City Children is a Child-Friendly City with the fulfillment of the rights of the child, namely Right to Life, right to grow and develop, right to protection, and the right to participate.

For problem solving as a City that develops the Municipal Decent City (KLA) policy, Surakarta City manifests through Intelligent Park which is a Child Friendly Open Park and becomes an integral part of efforts to develop the Children's Worthy Town. The target of Smart Kids Park is the children of disadvantaged families in the vicinity of Taman Cerdas, especially for marginalized children such as street children, poor children, defable and others who are in desperate need of playground facilities to get education, knowledge through the introduction of IT, Reading and developing his talent and art creations for free. Taman Anak Cerdas in Surakarta can also be seen at link: https://www.youtube.com/watch?v=O6_Y1XDFEqc.

At the beginning of 2014, Surakarta already has 6 Smart Kids Park spread in various urban villages, such as Taman Cerdas Sumber, Kadipiro, Mojosongo, Gandekan, Joyotakan and Pajang. Year 2008 is the first year of the inauguration of Smart Park in Surakarta. There are 3 Smart Park which inaugurated simultaneously, such as Taman Cerdas Kadipiro (Banjarsari), Sumber (Banjarsari) and Jambon (Serangan). While 3 other Smart Park was inaugurated in 2009. And for Taman Cerdas Semanggi for the construction has finished 50%. Year 2018 will be built 2 Smart Park in the Village of Earth and Village Tipes.

The development of Taman Cerdas in Surakarta aims to provide public facilities such as educational playgrounds to get education / knowledge, talent development, developing art creations, skills, village libraries, introduction of

Pembangunan Taman Cerdas di Surakarta mempunyai tujuan untuk memberikan fasilitas umum berupa Taman bermain yang edukatif untuk mendapatkan pendidikan/ pengetahuan, pengembangan bakat, mengembangkan kreasi seni, ketrampilan, perpustakaan kampung, pengenalan Teknologi Informasi, taman bermain, tempat rekreasi, tempat memperkenalkan lingkungan, dan tempat beradaptasi dengan lingkungan, serta untuk memanfaatkan aset tanah pemerintah yang belum terolah.

Sedangkan sasaran Taman Cerdas itu sendiri adalah anak dari keluarga yang tidak mampu di sekitar lokasi Taman Cerdas khususnya untuk anak-anak yang termarginalkan seperti anak pengamen, anak keluarga miskin, kaum difable dan lain-lain yang sangat membutuhkan fasilitas tempat bermain mendapatkan pendidikan, pengetahuan melalui pengenalan IT, membaca dan pengembangan bakat dan kreasi seninya secara gratis.

Misi Taman Cerdas adalah untuk memberikan pelayanan secara sukarela, seluruh fasilitas gratis untuk membangun warga Surakarta menjadi lebih makmur dan mendukung Program Kota Layak Anak.

Seluruh masyarakat Kota Surakarta, pihak swasta/CSR, Walikota beserta Perangkat Daerah terkait bersama-sama bertanggung jawab mewujudkan Taman Cerdas untuk memajukan anak bangsa di Kota Surakarta.

Pengelolaan Taman Cerdas di Surakarta diatur didalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Taman Cerdas. Berdasarkan Peraturan Walikota tersebut telah disusun Kepengurusan Organisasi Taman Cerdas yang terdiri dari Pengurus dan Pengelola Taman Cerdas.

Taman Cerdas memiliki fasilitas berupa; Ruang Teknologi Informasi (Komputer), Ruang Perpustakaan, Ruang/tempat kreasi seni/ pengembangan bakat, Tempat bermain dan alat-alat bermain, Ruang/tempat untuk olahraga, Kamar Mandi dan WC.

Perihal sumber dana, Taman Cerdas anggarannya berasal dari; APBD Kota Surakarta, melalui anggaran DPA di Dinas PP,PA dan PM Kota Surakarta untuk Pembinaan Taman Cerdas dan anggaran DPA di Kelurahan yang mempunyai Taman Cerdas yang digunakan untuk biaya operasional. Stakeholder CSR/ partisipasi masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk bantuan dana maupun fasilitas. *Supporting* dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia berupa uang untuk biaya operasional

Information Technology, playgrounds, recreation areas, environments and places Adapt to the environment, as well as to capitalize on unprocessed government land assets.

While the target of Taman Cerdas itself is the children of poor families in the vicinity of Taman Cerdas especially for marginalized children such as street children, poor families, disabled citizen and others who are in desperate need of playground facilities to get education, knowledge through The introduction of IT, reading and development of talent and art creations for free.

The Smart Park mission is to provide voluntary services, all free facilities to build Surakarta residents become more prosperous and support the Municipal Children's Care Program.

The entire community of Surakarta City, the private sector / CSR, the Mayor and the relevant Regional Apparatus are jointly responsible for realizing Taman Cerdas to advance the nation's children in Surakarta City.

Management of Smart Park in Surakarta is regulated in Surakarta Mayor's Regulation Number 6 Year 2008 on the Implementation Guidelines of Smart Park Management. Based on the regulation of the Mayor has been prepared Management of Smart Park Organization consisting of Smart Park Management and Management.

Taman Cerdas has facilities such as; Space Information Technology (Computer), Library Room, Space / Place of art creations / talent development, Playground and playground, Space / Place for sport, Bathroom and WC.

About the source of funds, Taman Cerdas the budget comes from; APBD of Surakarta City, through DPA budget in Dinas PP, PA and PM of Surakarta for Smart Park Development and DPA budget in Kelurahan which have Smart Park used for operational cost. CSR stakeholders / community participation embodied in the form of financial aid and facilities. Supporting from Ministry of Women Empowerment and Child Protection Republic of Indonesia in the form of money for operational cost Year 2016, equal to Rp.30.000.000, - and robotik for Taman Cerdas Pucang Sawit. Supporting the financing is the implementation of Surakarta Mayor's Regulation Number 6 of 2008 on the Implementation Guidance of Smart Park Management Surakarta Circular Letter of Secretary of Surakarta City Number 420/138 on the Procedure of Smart Garden Implementation in Surakarta City.

Currently, in the implementation in the field, the obstacle faced is the number

Tahun 2016, sebesar Rp.30.000.000,- dan robotik untuk Taman Cerdas Pucang Sawit. Yang mendukung pembiayaan merupakan implementasi dari Peraturan Walikota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Taman Cerdas Kota Surakarta Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Surakarta Nomor 420/138 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Taman Cerdas di Kota Surakarta.

Saat ini, dalam pelaksanaan di lapangan, kendala yang dihadapi adalah jumlah relawan yang terlibat dalam mengelola masih kurang. Bantuan dari stakeholder masih kurang untuk fasilitas Taman Cerdas. Pengembangan fasilitas Taman Cerdas baru terkendala lahan dan anggaran. Untuk kegiatan di Taman Cerdas belum maksimal karena kurangnya inovasi dan kreatifitas (event- event) sehingga pemanfaatan Taman Cerdas masih minim. Penganggaran masih kurang sehingga Pengembangan Taman Cerdas, Program dan Kegiatan serta fasilitas lainnya seperti alat permainan, buku-buku, IT dan Komputer belum maksimal.

Keberadaan taman Cerdas kini dapat memberikan fasilitas pada masyarakat dari segala lapisan tanpa diskriminasi mempunyai fasilitas gratis yang sarana dan prasarananya dapat dimanfaatkan seperti Taman bermain, Perpustakaan dan IT (internet). Masyarakat bebas biaya dan sewaktu-waktu dapat memanfaatkan fasilitas sarana prasarana yang ada di Taman Cerdas gratis. Mereka juga dapat meningkatkan pengetahuan dan menggunakan IT dan pemanfaatan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan. Dan yang tak kalah penting adalah melakukan kebersamaan keluarga terbentuk secara otomatis orang tua menemani anak-anaknya untuk menggunakan fasilitas Taman Cerdas. Selain itu terbentuk sosial kemasyarakatan pengguna/pemanfaat Taman Cerdas di wilayah tersebut tanpa diskriminasi, serta terbentuk kreatifitas anak dalam seni budaya.

Saat ini telah ada 9 Taman Cerdas di Kota Surakarta di 9 Kelurahan dan 3 Wilayah Kelurahan sudah dianggarkan di APBD Tahun 2017. Replikasi Taman Cerdas akan dikembangkan di 51 Kelurahan di Kota Surakarta. Sedangkan untuk Tingkat Daerah, Propinsi dan Nasional dapat dikembangkan sebagai salah satu Program Kegiatan dalam Pengembangan Kota Layak Anak yaitu pemenuhan hak-hak anak antara lain tumbuh kembang dan pendidikan.

of volunteers involved in managing is still lacking. Help from stakeholders is still lacking for Taman Cerdas facilities. The development of new Smart Park facilities is constrained by land and budget. For activities in Taman Cerdas have not been maximized due to lack of innovation and creativity (event-event) so that the utilization of Taman Cerdas is still minimal. Budgeting is still lacking, so the development of Smart Park, Programs and Activities and other facilities such as games, books, IT and Computer are not maximized.

The existence of Smart Park can now provide facilities to the community from all walks of life without any discrimination having free facilities whose facilities and infrastructures can be utilized such as playground, library and IT (internet). The community is free of charge and at any time can take advantage of existing facility facilities in Taman Cerdas is for free. They can also improve their knowledge and use IT and library utilization as needed. And no less important is to make family togetherness is formed automatically parents accompany their children to use Taman Smart facility. In addition to forming social community users / users of Smart Park in the area without discrimination, and formed the creativity of children in the arts of culture.

Currently, there are 9 Smart Parks in Surakarta City in 9 Sub-districts and 3 Urban Villages have been budgeted in APBD 2017. Replication of Smart Park will be developed in 51 urban villages in Surakarta. While for the Regional, Provincial and National Levels can be developed as one of the Program Activities in the Development of Decent City Children is the fulfillment of the rights of children, among others, growth and education.



SAHABAT LATANRO (SEJAHTERA BERKAT LAYANAN TASPEN PERSERO)

Divisi Layanan dan Manfaat
PT Taspen (Persero)

- 1 Penyelenggaraan program jaminan sosial bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah menjadi tugas pokok bagi PT Taspen (Persero). Data Badan Kepegawaian Negara menyebutkan bahwa terdapat lebih dari 4,5 juta ASN hingga tahun 2016. Maka dari itu, Taspen selalu berinovasi demi meningkatkan mutu pelayanan. Namun dalam prosesnya sering dijumpai beberapa masalah dalam pelayanan.

Dari sisi internal, masalah yang timbul di antaranya kualitas dan akurasi data yang tidak terukur akibat tidak ada standar basis data yang diterima Taspen dari Pemda; tidak adanya standardisasi dalam pelayanan di tiap Kantor Cabang Taspen menyebabkan ketidakseragaman dalam memberikan pelayanan; adanya kompleksitas pelayanan bagi pelanggan; dan keterbatasan jangkauan Kantor Cabang Taspen. Sedangkan dari sisi eksternal, minimnya pemahaman pengguna layanan tentang hak dan kewajiban serta kurangnya sinergi dengan pemangku kepentingan lain.

Oleh karena itu, Taspen meluncurkan terobosan "Sahabat Latanro", suatu inovasi untuk mengatasi masalah pelayanan melalui aplikasi SIMGAJI, Layanan Klaim Otomatis (LKO), dan *One Hour Service* (OHS). Inovasi ini diinisiasi oleh jajaran direksi beserta sejumlah divisi. Tahun 2010, Divisi Kepesertaan dan Divisi Teknologi Informasi Kantor Pusat Taspen menginisiasi pembentukan aplikasi penggajian (SIMGAJI) dan mulai diterapkan tahun 2011. Kemudian tahun 2016, manajemen menerbitkan Peraturan Direksi Nomor PD-29/DIR/2016 tanggal 19 Agustus 2016 tentang Pelaksanaan Layanan Klaim Langsung 1 Jam yang menjadi dasar inovasi OHS. Tahun 2015 Divisi Layanan dan Manfaat Taspen memperkenalkan LKO untuk memberikan pelayanan kepada ASN yang akan memasuki masa pensiun secara mudah, cepat, dan akurat.

Inovasi Sahabat Latanro memberikan kemudahan dalam pelayanan yang diberikan kepada para pelanggan. Seperti SIMGAJI yang dapat menghasilkan output terstandarisasi dari Pemda sehingga menjamin akurasi data. Selain itu, LKO memungkinkan peserta tidak perlu mengunjungi kantor Taspen untuk

SAHABAT LATANRO (PROSPEROUS THANKS TO TASPEN PERSERO SERVICES)

40

*Services and Benefits Division
PT Taspen (Persero)*

- *Implementation of social security program for the State Civil Apparatus (ASN) has become the main task for PT Taspen (Persero). State Personnel Agency data states that there are more than 4.5 million ASN until 2016. Therefore, Taspen always innovate to improve their quality of service. But in the process often found some problems in their service.*

From the internal side, the problems that arise include the quality and accuracy of data which is not measurable due to no standard database received by Taspen from the Regional Government; The absence of standardization in service at each Taspen Branch Office causes uniformity in providing services; The complexity of service for the customer; And limited range of Taspen Branch Offices. While from the external side, the lack of understanding of service users about rights and obligations and lack of synergy with other stakeholders.

Therefore, Taspen launches the breakthrough of «Sahabat Latanro», an innovation to solve service problems through SIMGAJI application, Automated Claim Service (LKO), and One Hour Service (OHS). This innovation was initiated by the board of directors and a number of divisions. In 2010, the Division of Taspen Office Participation and Information Technology Division initiated the establishment of a payroll application (SIMGAJI) and began to be implemented in 2011. Then in 2016, management issued the Directors Regulation No. PD-29 / DIR / 2016 dated August 19, 2016 on Implementation of Direct Claims Service 1 Hour which is the basis of OHS innovation. 2015 Services and Benefits Division Taspen introduces LKO to provide ASN services that will retire easily, quickly and accurately.

Latanro Friend>s (Sahabat Latanro) innovation provides convenience in the services provided to its customers. Such as SIMGAJI which produce standardized output from Local Government to guarantee data accuracy. In addition, LKO allows participants not to visit the Taspen office to arrange for retirement. Pension funds and ENT will be automatically transferred to participant>s account. Coupled with the one-hour service through innovation, OHS provides maximum service to

mengurus pensiun. Dana pensiun dan THT akan ditransfer otomatis ke rekening peserta. Ditambah lagi dengan adanya layanan satu jam melalui inovasi OHS memberikan layanan yang maksimal kepada para pelanggan. Dampak dari proses yang cepat dan mudah menyebabkan pelayanan menjadi bebas biaya dan tidak adanya praktek percaloan.

Dalam proses pelaksanaan inovasi, Taspen menjalankan beberapa strategi yakni mendesain aplikasi SIMGAJI sesuai dengan kebutuhan, koordinasi dengan BKN, membina kerja sama dengan kementerian/lembaga dan Pemda, penyederhanaan persyaratan pengajuan klaim, penerapan *Service Level Agreement (SLA)*, mengembangkan sistem monitoring, serta membangun pola evaluasi dan umpan balik yang positif.

Tertelaksananya inovasi ini tidak terlepas dari kolaborasi beberapa pihak, seperti seluruh peserta Taspen, manajemen dan karyawan Taspen, Pemda yang bekerja sama dengan Taspen, dan instansi pusat baik kementerian maupun lembaga.

Kelancaran suatu program dalam suatu instansi tidak terlepas dari dukungan sumber daya yang ada. Dari sisi keuangan, inovasi ini ditopang sepenuhnya dari anggaran belanja Taspen. Selain itu, pihak manajemen menyiapkan dukungan teknis melalui penyiapan *Standard Operating Procedure (SOP)*, perancangan aplikasi SIMGAJI dan sistem informasi LKO/OHS, perancangan aplikasi monitoring klaim, serta pembuatan model evaluasi bulanan atas pencapaian kinerja layanan kantor cabang. Sedangkan untuk lebih menghasilkan layanan dengan kualitas yang seragam di seluruh kantor cabang dilakukan standarisasi layanan. Tim manajemen terus melakukan peningkatan kapasitas pegawai untuk mendukung terlaksananya layanan yang prima kepada pelanggan.

Inovasi yang sudah berjalan akhirnya dapat membuahkan hasil yang manis, level akurasi data terjadi peningkatan, kepercayaan terhadap perusahaan meningkat, dan peserta menerima manfaat Tabungan Hari Tua dan Pensiun tepat waktu sesuai tanggal jatuh tempo. Selain itu, jumlah perjanjian kerja sama dengan Pemda terus meningkat. Setidaknya 467 Pemda telah mengadopsi aplikasi SIMGAJI dalam pengelolaan gaji dan pembayaran premi. Peserta yang akan mengurus pensiunan tidak perlu lagi mengunjungi kantor Taspen untuk mengurus segala persyaratan. Keluhan dari pelanggan berkurang seiring dengan peningkatan kepuasan konsumen. Pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) meningkat di tiap kantor cabang.

Demi menjaga kualitas dari inovasi tersebut, Taspen melakukan pemantauan

its customers. The impact of a fast and easy process leads to cost-free services and non brokering practices.

In the implementation process of innovation, Taspen runs several strategies such as designed SIMGAJI application in accordance with the needs, coordination with BKN, fostering cooperation with ministries / agencies and local government, simplification of claim submission requirements, implementation of Service Level Agreement (SLA), develop monitoring system, Positive evaluation and feedback patterns.

Implementation of this innovation can not be separated from the collaboration of several parties, such as all participants Taspen, management and employees Taspen, local government in cooperation with Taspen, and central agencies both ministries and institutions.

The smoothness of a program within an agency can not be separated from the support of existing resources. From the financial side, this innovation is sustained entirely from the Taspen budget. In addition, the management prepares technical support through the preparation of Standard Operating Procedure (SOP), SIMGAJI application design and LKO / OHS information system, design of claims monitoring application, and monthly model evaluation of branch office service performance achievement. Meanwhile, to produce more services with uniform quality in all branch offices, service standardization is carried out. The management team continues to improve the capacity of employees to support excellent service to customers.

Innovation that has been running finally can produce fruitful results, the level of data accuracy increases, the confidence of the company increases, and the participants receive the benefits of Old Age Savings and Pension on time as due date. In addition, the number of cooperative agreements with the local government continues to increase. At least 467 local governments have adopted SIMGAJI applications in the management of salaries and premium payments. Participants who will take care of pensioners no longer need to visit the Taspen office to take care of all the requirements. Complaints from customers decreased along with increased consumer satisfaction. Achievement of Key Performance Indicator (IKU) targets increases at each branch office.

In order to maintain the quality of these innovations, Taspen monitors and evaluates the performance of all branch offices. The task is accomplished by the Services and Benefits Division. In addition, Taspen also applies the Customer Satisfaction Index (CSI) Survey to measure customer perceptions of the services provided.

dan evaluasi terhadap seluruh kinerja dari kantor cabang. Tugas tersebut diemban oleh Divisi Layanan dan Manfaat. Selain itu, Taspen juga menerapkan *Survei Customer Satisfaction Index (CSI)* untuk mengukur persepsi pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan. Survei ini dilakukan setiap satu tahun sekali. Selain itu, dikembangkan pula aplikasi *helpdesk* untuk memantau kesulitan yang dihadapi Pemda dalam penggunaan SIMGAJI dan aplikasi *dashboard* untuk melakukan monitoring sosialisasi, *workshop, parallel run*, implementasi, dan penandatanganan perjanjian kerja sama. Melalui aplikasi tersebut, Kantor Taspen Pusat dapat memantau penyelesaian klaim tiap kantor cabang.

Dilihat dari berbagai manfaat yang dirasakan, inovasi ini akan terus mengalami perkembangan dan berkelanjutan. Inisiatif LKO maupun OHS dapat direplikasi oleh perusahaan lain yang sejenis selama mereka terus menjaga komitmen dan semangat untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Selanjutnya, Taspen akan melakukan pengembangan aplikasi berbasis web, sentralisasi basis data secara nasional yang berbasis *cloud computing system*. Hal ini diperlukan agar data dapat diakses secara nasional dan pemutakhiran bisa real time.

This survey is conducted every once a year. In addition, a helpdesk application was developed to monitor the difficulties faced by the local government in the use of SIMGAJI and dashboard applications to conduct socialization monitoring, workshops, parallel runs, implementation and signing of cooperation agreements. Through the application, the Central Taspen Office can monitor the settlement of claims for each branch office.

Reviewing from the perceived benefits, these innovations will continue to develop and sustain. The LKO and OHS initiatives can be replicated by other similar companies as long as they continue to maintain their commitment and passion to provide the best service to the community. Furthermore, Taspen will conduct web-based application development, centralized national database based on cloud computing system. This is necessary so that data can be accessed nationally and can be real time updated.

The image features the text 'TOP 40' in a large, stylized, golden font. The letters are three-dimensional and have a metallic sheen, with bright highlights and shadows that give them a sense of depth. The background is a vibrant red and orange gradient, composed of various geometric shapes like triangles and polygons, creating a dynamic and modern feel. The overall composition is centered and balanced.

INOVASI PELAYANAN PUBLIK
TAHUN 2017

PUBLIC SERVICE INNOVATION 2017

TESTIMONI
TIM PANEL INDEPENDEN KOMPETISI INOVASI
PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2017

*TESTIMONIALS
INDEPENDENT PANEL TEAM OF PUBLIC SERVICE
INNOVATION COMPETITION YEAR 2017*



Prof. Dr. JB. Kristiadi,
Ketua Tim Panel Independen 2017

Kemajuan Teknologi Informasi melahirkan berbagai aplikasi yang memudahkan interaksi dan transaksi berbagai aktivitas masyarakat. Birokrasi tidak boleh tertinggal dengan tuntutan zaman, hanya dengan berinovasi birokrasi akan mampu menyesuaikan langkahnya agar sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Top 40 merupakan inovasi bermodalkan kearifan lokal, diharapkan mampu menjadi pijakan untuk melompat lebih jauh dan bahkan mampu mencapai layanan berstandar dunia. Maju, terus Birokrasiku.

Advances in Information Technology spawned a variety of applications that facilitate the interaction and transactions of various community activities. Bureaucracy should not be left behind by the demands of the times, only by innovating the bureaucracy will be able to adjust its steps to fit the wants and needs of society. Top 40 is an innovation with local wisdom, is expected to be a foothold to jump further and even able to achieve world-class services. Go on ahead of my bureaucracy.



Prof. Dr. Eko Prasajo,
Anggota Tim Panel Independen 2017

"Keberadaan negara paling dekat dirasakan melalui kualitas pelayanan publik. Berbagai inovasi pelayanan publik yang diciptakan oleh Menteri, Kepala Lembaga Pemerintahan, Gubernur, Bupati dan Walikota mewujudkan bahwa negara tidak absen. Inovasi membutuhkan komitmen kepemimpinan perubahan yang sangat kuat, dukungan kapabilitas birokrasi, dan legitimasi dari masyarakat. Kompetisi inovasi pelayanan publik menstimulasi peningkatan kualitas pelayanan dan pada akhirnya memperkuat kepercayaan publik kepada pemerintah. Bila tidak menjadi jalan yang besar, maka berbagai inovasi ini telah menjadi jalan setapak yang dapat dilalui orang banyak. Untuk para pemimpin pemerintahan jangan berhenti berinovasi".

"The existence of the state closely felt through the quality of public services. The various innovations of public services created by the Minister, Head of Government Institutions, Governors, Regents and Mayors realize that

the state is not absent. Innovation requires a strong leadership commitment to change, support bureaucratic capabilities, and legitimacy from the public. The competition of public service innovation stimulates the improvement of service quality and ultimately strengthens public confidence in the government. If it does not become a big road, then these innovations have become the paths that can be passed by the people. For government leaders, do not stop innovating.



Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA,
Anggota Tim Panel Independen 2017

Membangun Indonesia dari daerah berarti memperbaiki kualitas pelayanan publik dan menjadikan inovasi pelayanan publik sebagai ikon baru membangun Indonesia. Melalui inovasi tersebut diharapkan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan bisa diwujudkan konkret. Demokrasi dan otonomi daerah yang berlangsung sejak 2001 semestinya menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang menyejahterakan rakyat dan bukan yang korup. Pemerintah daerah (Pemda) dituntut untuk memiliki inisiatif kebijakan operasional yang bersifat pro masyarakat miskin. Sekarang ini pemda tidak bisa lagi tergantung pada pemerintah pusat. Pemda harus mandiri dan bertanggung jawab kepada rakyatnya dengan mengentaskan kemiskinan dan pengangguran di daerahnya. Keberhasilan dalam melakukan inovasi pelayanan publik dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, termasuk masalah kepemimpinan (*leadership*) yang ditunjukkan kepala daerah. Dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah, upaya melakukan inovasi membutuhkan keberanian pemimpin dalam mengambil keputusan untuk menerobos kekakuan-kekakuan birokrasi dan perilaku-perilaku linier yang ada dalam masyarakat. Terobosan kebijakan dan inovasi yang dilakukan kepala daerah dan/atau kepala SKPD acapkali membuahkan hasil positif bagi daerah berupa *best practices*. Terobosan kebijakan atau inovasi daerah diharapkan bisa menciptakan kepastian hukum, keamanan, dan mengeliminasi pungutan liar yang acapkali dikeluhkan publik.

Building Indonesia from the region means improving the quality of public services and making public service innovation a new icon to build Indonesia. Through these innovations prosperity of society are expected, as well as development of democracy, justice and equity can be concretely realized. Democracy and regional autonomy that took place since 2001 should have resulted in good governance, which makes the people prosperous and uncorrupt. Local governments (Pemda) are required to have pro-poor operational policy initiatives. Now the local government can no longer depend on the central

government. The local government must be independent and accountable to its people by alleviating poverty and unemployment in the region. Success in public service innovation is influenced by several important factors, including the leadership issues shown by the regional head. In the context of decentralization and regional autonomy, innovation requires the courage of leaders in making decisions to break through bureaucratic rigidities and existing linear behaviors in society. Policy breakthroughs and innovations by local heads and / or SKPD heads often yield positive results for regions of best practices. Local policy or innovation breakthroughs are expected to create legal certainty, security, and eliminate illegal levies that are often complained of by the public.



Neneng Goenadi, Anggota Tim Panel Independen 2017

Tahun ini adalah tahun ke-4 keterlibatan saya sebagai juri dalam panel independen Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik untuk Kementerian, Lembaga, BUMN dan Pemerintah Daerah. Bagi saya merupakan suatu kepuasan melihat banyak perubahan dan inovasi dari tingkatan-tingkatan layanan di Indonesia. Sebagai negara yang besar, tidak mudah bagi Indonesia untuk dapat melaksanakan inovasi secara serempak. Sehingga upaya yang dilakukan oleh berbagai instansi patut diberi acungan jempol. Saya berharap inovasi tersebut terus dapat berkesinambungan, sehingga layanan publik di Indonesia terus meningkat.

This year is the fourth year of my involvement as a judge in an independent panel of Public Service Innovation Competitions for Ministries, Institutions, SOEs and Local Governments. It is my satisfaction to see many changes and innovations from the service levels in Indonesia. As a large country, it is not easy for Indonesia to implement innovation simultaneously. So the efforts made by various agencies should be given a thumbs up. I hope the innovation continues to be sustainable, so public services in Indonesia continue to increase.



Nurjaman Mochtar, Anggota Tim Panel Independen 2017

Seandainya replikasi hasil perlombaan Sistem Inovasi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bisa lebih cepat di-viral-kan ke berbagai daerah, niscaya peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh Tanah Air akan semakin mendekati harapan masyarakat.

If the replication of the results of the Public Service Innovation System of the Ministry of Administrative and Bureaucracy Reform could be faster in viralization to various regions, the improvement of the quality of public services throughout the country will be closer to the public expectation.



Wawan Sobari, Ph.D, Anggota Tim Panel Independen 2017

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) merupakan instrumen strategis untuk menumbuhkan inovasi sebagai kebutuhan perubahan. Kompetisi ini bukan hanya memberikan tantangan kepada Institusi pemerintah mulai pusat hingga daerah dalam merespon setiap perubahan domestik dan global. Pada saat yang sama, KIPP mengajarkan krusialnya akuntabilitas publik bagi semua pemangku jabatan penyelenggara negara.

The Public Service Innovation Competition (KIPP) is a strategic instrument to foster innovation as a need for change. This competition not only presents challenges to government institutions from central to regional in response to every domestic and global change. At the same time, KIPP teaches crucial public accountability to all state office holders.



Tulus Abadi,
Anggota Tim Panel Independen 2017

Kompetisi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB adalah hal yang sangat penting dan mendesak. Mengingat hingga detik ini potret pelayanan publik Indonesia masih perlu ditingkatkan. Diharapkan dengan kompetisi semacam ini mendorong spirit pengelola pelayanan publik untuk terus mengimprovisasi pelayanannya. Bahkan, dengan pelayanan publik yang bagus, akan mendorong adanya transparansi dan akuntabilitas. Pungli bisa ditekan, juga praktik koruptif dan kolusif. Pelayanan publik yang baik dan transparan juga bisa mendorong peningkatan pendapatan asli suatu daerah.

The public service competition organized by the PANRB Ministry is very important and urgent. Given up to this moment the portrait of Indonesian public services still needs to be improved. It is hoped that this kind of competition will encourage the spirit of public service management to keep improving its public services. In fact, with good public services, will encourage transparency and accountability. Illegal charges can be suppressed, as well as corruptive and collective practices. Good and transparent public services can also encourage an increase of the region original income of a region.



Dr. Refly Harun, S.H, LL.M,
Anggota Tim Panel Independen 2017

Pelayanan publik yang baik di negara ini seharusnya tidak lagi sebatas mimpi. Adanya 40 inovasi pelayanan publik dalam buku ini adalah sebagian dari upaya untuk merealisasikannya. Saya mengucapkan selamat kepada semua pihak yang sudah bersusah payah untuk mewujudkan mimpi kita bersama.

Good public service in this country should no longer be a dream. 40 public service innovations in this book are part of the effort to make it happen. I congratulate all those who have gone to great lengths to realize our dreams.



Suryoprato,
Anggota Tim Panel Independen 2017

Birokrasi sering digambarkan tidak mampu memberikan pelayanan yang baik. Ternyata banyak inovasi yang berorientasi kepada pelayanan publik yang lebih baik dan sekaligus meningkatkan efisiensi. Kompetisi inovasi pelayanan publik mendorong lembaga-lembaga pemerintah untuk selalu membuat terobosan sehingga publik mendapatkan layanan yang terbaik.

Bureaucracy is often described as not being able to provide good service. It turns out that many innovations are oriented to better public services and while increasing efficiency. The public service innovation competition encourages government agencies to always make breakthroughs so that the public gets the best service.



TOP 40

INOVASI PELAYANAN PUBLIK
TAHUN 2017

PUBLIC SERVICE INNOVATION 2017

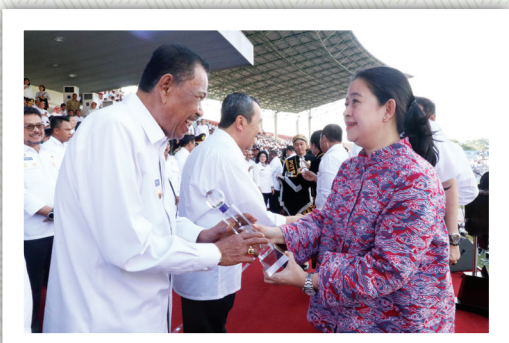
DOKUMENTASI BEBERAPA PENERIMA PENGHARGAAN TOP 40 INOVASI PELAYANAN PUBLIK 2017

Penyerahan Penghargaan kepada beberapa Top 40 Inovasi Pelayanan Publik 2017 oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani didampingi oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur.











TOP 40

INOVASI PELAYANAN PUBLIK
TAHUN 2017

ISBN 978-602-71510-9-3



9 786027 151093